

SUARA anak-anak muda yang ditulis dalam buku ini merupakan refleksi yang menggambarkan kegelisahan, suara hati sekaligus harapan mereka yang sangat kuat untuk merawat keberagaman hidup yang ada, dalam rangka membangun Indonesia dan dunia tanpa ekstrimisme dan kekerasan. Kegelisahan generasi millennial “zaman now” dalam buku ini terhadap pelbagai macam bentuk konflik, kekerasan atas nama agama, suku, dan golongan dewasa ini, karena mereka prihatin dan sadar bahwa fenomena ekstrimisme, terorisme, dan kekerasan tersebut merupakan penyimpangan terhadap *mission sacre* diturunkannya agama-agama, serta keluhuran budi pekerti yang ada dalam budaya setiap suku bangsa di dunia.



ORANG MUDA BICARA Keragaman, Intoleransi & Nir-Kekerasan

Pengantar: ABIDIN WAKANO

ORANG MUDA BICARA

KERAGAMAN, INTOLERANSI & NIR-KEKERASAN



Pengantar:
ABIDIN WAKANO



ORANG MUDA BICARA

KERAGAMAN, INTOLERANSI & NIR-KEKERASAN



Ambon, Februari 2018





ORANG MUDA BICARA **Keragaman, Intoleransi & Nir-Kekerasan**

Diterbitkan atas kerjasama Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC)
IAIN Ambon, dengan PPIM Universitas Islam Negeri (UIN) Syaraif Hidayatullah
Jakarta, UNDP dan CONVEY

Editor:

Rudi Rahabeat
Zairin Salampessy

Penulis:

Abdul Gaffar - Agatha Pricilia Jalnuhuubun - Ahmad Fathorrozi -
Amrizarois Ismail - Anita Wahyu Rakasiwi - Arrayyan Firdaus -
Cynthia Nofentary Purba - Demas Buntuma'dika - Desi Aprianti -
Darul Ma'arif Asry - Devi Afithasari - Dhinari Sari - Eko Prasetyo -
Filyadi Gusti Zamzami - Fitra Utama - Giovano Bhakti Meizhar - Hary -
Idrus Maulana Yusuf - Iin Solihin - Ika Puspitasari - Ikin Rojikin -
Irwan Saputra - Isthiqonita - Khairun Nisa - Kirana Aisyah -
Lutfi Nur Falaq - M. Thaha - Masithah Masha - Mohammad Fariansyah -
Muhammad Mufti Muaddib - M. Sabar Prihatin - Muhammad Saiful Haq -
Muhammad Soleh - Muhammad Reza - Mulfandhy Gailea - Mustofa -
Ni Putu Putri Puspitaningrum - Nur Hikmah - Nurani Fitriyah -
Perdana Nur Ambar Setyawan - Priska Nur Safitri - Silvia Ananda -
Sofah D. Aristiawan - Sonya Yulistan Andomo - Sultriana - Syihabul Furqon -
Tumpal Andani Aritonang - Widhyka Fakhriyakansa - Widia Munira -
Yossika Dwi Permatasari - Yustianto T. - Zariqoh Annayah Silviah -
Zumrotun Nafsiah

Desain Sampul dan Tata Letak:
Zairin Salampessy

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon
Gedung Rektorat IAIN Ambon Lantai III
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher
Kebun Cengkeh - Batumerah Atas
Ambon 97128

Februari 2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	ix
KEPING 1	
DINAMIKA RADIKALISME, INTOLERANSI DAN TERORISME	
1. Dari Pemikiran Dan Perilaku Intoleransi Hingga Aksi Terorisme - <i>Ni Putu Putri Puspitaningrum</i>	3
2. Dinamika Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, Dan Kekerasan Ekstrimis Di Indonesia - <i>M. Thaha</i>	9
3. Dinamika Toleransi Beragama Di Indonesia - <i>Muhammad Reza</i>	15
4. Dinamika Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Dan Kekerasan Ektrimisme di Indonesia - <i>Yustianto T.</i>	25
5. Indonesia Anti Radikalisme - <i>Idrus Muallana Yusuf</i>	33
6. Indonesia Darurat Intoleransi - <i>Khairun Nisa</i>	41
7. Peran Masyarakat Dalam Menyikapi Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, Dan Kekerasan Ekstrimis Di Indonesia - <i>Cynthia Nofentary Purba</i>	49
8. Melacak Dua Wajah Agama Sebagai Upaya Merajut Keberagaman - <i>Abd. Gaffar</i>	55
9. Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, Dan Kekerasan Ekstrimis: Ancaman Nyata Bangsa Indonesia - <i>Ahmad Fathorrozi</i>	61
10. Rethinking Jihad - <i>Asry</i>	67



**KEPING 2****MEDIA SOSIAL DAN INTOLERANSI SARA**

1. Saya Siap Membungkam Teroris
Dengan Media - *Yossika D. Permatasari*..... 73
2. Peran Media Massa Dalam Menangkal
Radikalisme - *Masithah Mahsa*..... 77
3. Media Sosial (MEME) Dan Intoleransi SARA
Di Indonesia - *Agatha Pricilia*..... 83
4. Pengaruh Media Dalam “Potensi Ganda” -
Amrizarois Ismail..... 87
5. Mengenal Teroris Melalui Media Masa Kini -
Devi Afithasari..... 99
6. Media Sosial Sebagai Alat Perlawanan
Terhadap Diskriminasi, Intoleransi,
Dan Kekerasan Ekstrimis - *Eko Prasetyo*..... 105
7. Narasi Alternatif Oleh Organisasi Masyarakat Sipil
Di Media Sosial Dalam Melakukan
Kontra - Radikalisasi - *Kirana Aisyah*..... 111
8. Pelintiran Kebencian, Dan Fenomena Masyarakat
Yang Memakluminya - *Muhammad Mufti M*..... 119
9. Refleksi Terorisme Dan Perlawanan Media Sosial -
Mohammad Fariansyah..... 125
10. Media Sosial Sebagai Alat Perlawanan
Terhadap Diskriminatif Intoleransi
Dan Kekerasan Estrimis - *Muhammad Soleh*..... 131
11. Media Sosial Sebagai Benteng
Penjaga Perdamaian Masyarakat Indonesia -
Silvia Ananda..... 135
12. Media Sosial Sebagai Alat Perlawanan
Terhadap Diskriminasi Intelektual
Dan Kekerasan - *Ekstrimis Sultriana*..... 139





13. *Cyberspace Dan Bubble Effect:*
Sebuah Tantangan Dimensi Maya Atas Tatanan Sosial
Dan Perdamaian Di Tengah Kecamuk Massa -
Syihabul Furqon..... 145

KEPING 3

KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA DAMAI

1. Menangkal Intoleransi, Radikalisme
Dan Ekstremisme Kekerasan Dengan Pendekatan
Budaya Lokal Indonesia - *Nurani Fitriyah*..... 161
2. Cinta Indonesia, Cinta Budayanya - *Mustofa*..... 163
3. Prinsip *Piil Pesengiri*: Kearifan Lokal
Masyarakat Lampung Sebagai *Social Capital*
Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian - *Fitra Utama*.... 177
4. Pelestarian *Tari Lulo* Kesenian
Khas Sulawesi Tenggara Dalam Menyatukan
Keberagaman Di Indonesia - *Irwan Saputra*..... 185
5. Menangkal Intoleransi Melalui Kearifan Lokal
Falsafah Kesusastraan Masyarakat Ternate
Jou Se Ngofangare - *Mulfandhy Gailea*..... 193
6. Kearifan Lokal Di Aceh “P penghormatan Perempuan”
Sebagai Modal Sosial Untuk Mengatasi Diskriminasi -
Widia Munira..... 197
7. Diskriminasi Struktural Dan Sosial:
Masyarakat Adat Sunda Wiwitan
Dan Jemaat Ahmadiyah Kuningan Jawa Barat -
Zariqoh Ainnayah Silviah..... 203
8. Pesantren Sebagai Kearifan Lokal Yang Membentuk
Watak Otentik Islam Toleran - *Zumrotun Nafisah*..... 207
9. Mendongeng: Mengatasi Masalah Kekerasan
Melalui Bercerita - *Arrayyan Firdaus*..... 215



**KEPING 4****MERAYAKAN KEBERAGAMAN**

1. Keberagaman Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia - *Priska Nur Safitri*..... 221
2. Pelangi Indonesia; Wisata Religi Negara Majemuk - *Nur Hikmah*..... 225
3. Dampak Positif Penulisan Identitas Aliran Kepercayaan Di Dalam KTP Bagi Keberagaman Indonesia - *Perdana Nur Ambar Setyawan*..... 229
4. Langkah Merawat Keberagaman Indonesia - *Muhammad Saiful Haq*..... 235
5. Komunitas Literasi Menjaga Masa Depan Keberagaman Di Indonesia - *Filyadi Gusti Zamzami*..... 243
6. *A Spoonful Of Smile And A Glass Of Kindness; A Warm Peace For Everyone* - *Desi Aprianti*..... 249
7. Mengelola Keragaman - *Ikin Rojikin*..... 253
8. Dinamika Gerakan Perdamaian Di Cirebon - *Harry*..... 259
9. Menyikapi Intergrasi Sosial Rakyat Aceh Pasca Konflik - *Dinar Sari*..... 267
10. Hukum Progresif Investasi Dalam Menjaga Pluralisme Di Indonesia - *Anita Wahyu Rakasiwi*..... 271
11. Senam Nusantara dalam Merawat Keberagaman Budaya Indonesia - *Putra Renaldy Sari*..... 277

KEPING 5**MASA DEPAN KEBERAGAMAN**

1. Masa Depan Keberagaman Di Indonesia - *Demas Buntuma'dika*..... 283
2. Bingkai Keberagaman Dalam Demokrasi - *Sonya Yulistan Andomo*..... 285





3. Bergerak Bersama Sebagai Solusi Untuk Masa Depan Keberagaman Di Indonesia Yang Lebih Baik - <i>Widhyka Fakhriyakansa</i>	297
4. Merawat Toleransi Dan Keberagaman Melalui Gerakan Mahasiswa Peduli Anak Usia Dini Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berbudaya - <i>Tumpal Andani Aritonang</i>	303
5. Mengkaji Dan Merevitalisasi Gagasan Pluralisme Gus Dur Sebagai Upaya Membingkai Indonesia Harmonis Beragama <i>Giovano Bhakti Meizhar</i>	307
6. Teologi Inklusif Cak Nur; Menyemai Kerukunan Umat Beragama - <i>lin Sholihin</i>	319
7. Damai Dalam Keberagaman - <i>Ika Puspitasari</i>	323
8. Iman Yang Selalu Tersenyum - <i>Sofah D Aristiawan</i>	331
9. Islam Nusantara Sebagai Rumah Bhinneka Di Indonesia - <i>M. Sabar Prihatin</i>	339
10. Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah Menangkal Ekstrimisme Dan Radikalisme - <i>Lutfi Nur Falaq</i>	345
11. Kebebasan Beragama Masih Dipertanyakan - <i>Isthiqonita</i>	351
TENTANG PENULIS	355







PENGANTAR

ABIDIN WAKANO

Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center IAIN Ambon

Buku ini adalah suara anak-anak muda lintas agama, suku, aliran kepercayaan dan profesi dari pelbagai provinsi di Indonesia yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *Interfaith Youth Camp* (IYC) di Pantai Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada 25 hingga 30 Januari 2018.

50 orang pemuda ini merupakan bagian dari 3000-pemuda dari seluruh Indonesia yang mendaftar secara online untuk mengikuti kegiatan *Interfaith Youth Camp* di Pantai Negeri Liang yang diselenggarakan oleh Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, bekerjasama dengan PPIM Universitas Islam Negeri (UIN) Syaraif Hidayatullah Jakarta, UNDP dan CONVEY. Walaupun 50 orang pemuda ini belum berhasil ikut bersama 120 orang pemuda yang lulus seleksi, tetapi tulisan mereka sangat berharga dan penting untuk dipublikasikan dalam buku Ontologi ini.

Suara anak-anak muda yang ditulis dalam buku ini merupakan refleksi yang menggambarkan kegelisahan,





suara hati sekaligus harapan mereka yang sangat kuat, untuk merawat keberagaman hidup yang ada dalam rangka membangun Indonesia dan dunia tanpa ekstrimisme dan kekerasan. Kegelisahan generasi millennial “zaman now” dalam buku ini terhadap pelbagai macam bentuk konflik, kekerasan atas nama agama, suku, dan golongan dewasa ini, karena mereka prihatin dan sadar bahwa fenomena ekstrimisme, terorisme, dan kekerasan tersebut merupakan penyimpangan terhadap *mission sacre* diturunkannya agama-agama, serta keluhuran budi pekerti yang ada dalam budaya setiap suku bangsa di dunia.

Karena semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Budha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan Ahimsa, tidak boleh menyakiti dan membunuh, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Alamin*). Kemudian pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) setiap masyarakat terdapat nilai-nilai luhur yang sangat menghargai dan menunjung tinggi kehidupan setiap makhluk dan nilai-nilai kemanusiaan.

Olehnya itu, dalam buku ini selain mereka berkisah tentang pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah mereka lihat, dengar, dan alami, tetapi juga *succes story* pengalaman-pengalaman persaudaraan dan persahabatan sejati lintas agama, suku, golongan yang indah dan menyenangkan. Hal yang menarik dalam tulisan-tulisan ini, para generasi muda tersebut tidak hanya menempatkan diri sebagai korban dan larut dalam derita panjang, apalagi menaruh dendam, akibat stigma-kolektif yang pernah dialami, tetapi justru dalam tulisan-tulisan ini mereka menawarkan solusi-solusi yang sangat mencerahkan. Solusi- solusi tersebut bersumber dari kearifan hidup masyarakat kita serta pengalaman pribadi. Sekaligus menegaskan diri untuk terus terlibat aktif sebagai pekerja perdamaian. Hal ini relevan dengan sebuah kata bijak,





bahwa “lebih baik menyalakan pelita kehidupan, daripada selalu mengutuk kegelapan malam”. Serta sebuah ungkapan nilai yang berbunyi “anda tidak berhak merubah orang lain, tetapi anda lebih berhak merubah diri anda, sehingga orang lain bisa berubah karena anda yang berubah”.

Di sinilah kekuatan buku ini, yang lahir dari “kegelisahan” serta “asa” generasi muda yang inklusif, egaliter serta punya visi dan concern yang kuat terhadap isu kemanusiaan untuk membangun masa depan yang dunia lebih damai dan berkeadaban. Dari suara generasi muda ini pula, kita tetap punya asa dan optimisme yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. 🙏







KEPING 1
**DINAMIKA RADIKALISME,
INTOLERANSI DAN TERORISME**





2

Orang Muda Bicara: Keragaman, Intoleransi & Nir-Kekerasan





1

Dari Pemikiran dan Perilaku Intoleransi hingga Aksi Terorisme

Apakah Generasi Muda Indonesia Cukup Tangguh untuk Melawan?

NI PUTU PUTRI PUSPITANINGRUM

Intoleransi dan terorisme menjadi topik yang banyak diberitakan di Indonesia. Bahkan, fenomena ini terjadi di kota-kota besar yang secara pendidikan seharusnya lebih maju dan orang-orangnya berpikiran terbuka. Intoleransi merupakan aksi “menolak” sesuatu yang berbeda, sedangkan terorisme yang berasal dari bahasa latin “*terrere*” merupakan suatu aksi untuk membuat seseorang atau sekelompok orang merasa takut dan situasi menjadi gempar. Intoleransi dan terorisme terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari tindakan penyerangan secara fisik hingga mental.

Aksi terorisme bisa berasal dari sikap intoleransi yang berkembang menjadi radikal lalu diwujudkan dalam kekerasan ekstrimis yang membahayakan. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto bahwa intoleransi adalah cikal bakal terorisme.¹

¹<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/03/13044431/polri.intoleransi.adalah.cikal.bakal.terorisme>



Faktor Risiko

Banyak yang mengaitkan faktor pendidikan dan ekonomi sebagai cikal bakal tindakan intoleransi hingga ekstrimis. Ternyata, hal itu belum terbukti kebenarannya. Para tersangka teroris yang tertangkap dan diperiksa ternyata tidak semuanya memiliki pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah, bahkan ada lulusan S2 serta kekayaan yang tak sedikit.

Haroon Ullah menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat dikaitkan dengan adanya tindakan intoleransi yang berujung pada radikal, terorisme, hingga kekerasan ekstrimis², yakni:

1. Kemiskinan dan Pendidikan Pendah. Faktor ini memang berpengaruh tetapi tidak disebutkan bahwa hal ini adalah penyebab utama.
2. Dorongan untuk Bermakna dan Menurut karena Takut dan Frustrasi. Rasa frustrasi muncul dari kondisi di negara itu sendiri, contohnya korupsi yang menyengsarakan rakyat. Mereka menjadikan alasan itu untuk “mengikuti” suatu kegiatan terorisme. Mereka menganggap menjadi ekstrimis adalah cara paling mudah karena menuruti aturan yang ada tidak mengubah apapun.
3. Dorongan untuk Berubah dan Berkuasa melalui Aksi Kekerasan. Mereka sudah pada tahap ingin membangun pemerintahan baru yang “dianggap” lebih baik. Rasa frustrasi dan ajakan dari luar, ditambah dengan karakteristik otak dan kepribadian individu tertentu bisa memunculkan keinginan untuk “mengubah dan berkuasa”. Cara yang dianggap mudah untuk mengubah dan menguasai sesuatu adalah dengan “aksi kekerasan”.

Tiga hal di atas dapat menjadi faktor risiko munculnya tindak intoleransi hingga kekerasan yang bersifat ekstrim, seperti terorisme. Walaupun kita melihat faktor risiko ini

² Ullah, H. (2016). Why do people become religious extremist. Oak TV. <https://www.youtube.com/watch?v=7AC6RZbCaA>

telah ada di Indonesia, tetapi faktor risiko ini tidak akan bisa berkembang ketika setiap orang memiliki mental yang tangguh untuk melawan.

Hal ini semakin mengkhawatirkan karena dinamika gerakan ekstrimis semakin gencar karena propaganda dapat menyebar luas secara mudah melalui media. Pada masyarakat yang tidak tangguh, memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai dampak dari sebuah tindak intoleransi dan kekerasan ekstrimis, akan mudah untuk menyerap informasi yang salah. Keputusan untuk melakukan tindakan pun akhirnya dibuat tidak dengan pertimbangan yang matang. Akhirnya semakin banyak orang yang terlibat dalam gerakan ini

Karakter

Apabila melihat dari sudut pandang karakter seseorang yang mungkin menjadi radikal atau ekstrimis, psikolog bernama John Horgan, PhD, dosen di Pennsylvania State University's International Center, melakukan penelitian terhadap 60 tersangka terorisme. Ia mengidentifikasi karakter dari tersangka tersebut dan menyimpulkan bahwa mereka memunculkan pemikiran, perasaan, dan tindakan sebagai berikut:

- a. Merasa marah, terasingkan, dan tidak dipandang haknya.
- b. Percaya bahwa sistem politik yang berlaku tidak memiliki kekuatan berarti untuk mengubah keadaan.
- c. Merasa bahwa dirinya merupakan korban dari ketidakadilan sosial yang sedang berjuang.
- d. Merasa lebih perlu beraksi dibandingkan berbicara mengenai masalahnya.
- e. Percaya bahwa terlibat dalam kekerasan merupakan tindakan yang pantas.
- f. Memiliki teman atau keluarga yang mendukung cara berpikirnya.



- g. Percaya dengan bergabung dengan kelompok pergerakan dapat memberi penghargaan bagi dirinya melalui: pengalaman, kekeluargaan, dan identitas.

Apabila kita perhatikan, karakteristik yang disebutkan lebih banyak berasal dari dalam diri, mulai dari pemikiran (kepercayaan) dan perasaan. Kita bisa menyebutkan bahwa karakter tersebut menjadi risiko bagi seseorang untuk terjebak dalam radikalisme. Namun, sampai saat ini, belum ada profil kepribadian tertentu yang dapat menggambarkan mengapa seseorang menjadi radikal dan terlibat dalam terorisme, tetapi ditekankan bahwa gangguan mental bukan merupakan alasan yang mendasari tindak terorisme.³ Sehingga kita tidak boleh dengan mudah menuduh seseorang sebagai orang yang radikal atau ekstrimis. Kita pun harus memastikan bahwa kita memiliki karakter diri yang mendukung untuk mencegah terlibat dalam tindak intoleransi hingga terorisme.

Neuropsikologi dan Perilaku

Perhatian pada aspek *neuropsikologi* terkait fenomena intoleransi hingga terorisme memang masih jarang dilakukan. Padahal hal ini penting, bisa mendukung upaya untuk mencegah dan proses deradikalisasi.

Mereka yang terlibat dalam tindak terorisme biasanya memiliki level agresivitas yang tinggi. Tingkat agresivitas ini terkait dengan level serotonin yang rendah.⁴ Akhirnya, menyebabkan seseorang mudah untuk marah, terprovokasi, hingga melakukan kekerasan.

Selain itu, sikap intoleransi dan terorisme juga terkait dengan proses pembuatan keputusan yang tidak tepat. Masih banyak orang yang dengan mudah dihasut lalu bergabung dengan kelompok radikal, hingga melakukan aksi yang merugikan banyak orang. Hal ini terkait dengan fungsi otak

³ Borum, R. (2010). Understanding terrorist psychology. The psychology of counter-terrorism, 19-33. ⁴ Kolb, B., Whishaw, I. Q., & Teskey, G. C. (2001). An introduction to brain and behavior (Vol. 3). New York: Worth Publishers.





bagian korteks prefrontal yang tidak maksimal. Bagian pada otak ini berperan dalam kemampuan membuat keputusan dan mengontrol diri.⁴ Ketika bagian ini tidak berfungsi dengan baik, maka keputusan untuk berperilaku pun bisa keliru.

Bagaimana menjaga fungsi otak? Fungsi otak ini dipengaruhi oleh banyak aspek, bukan hanya pendidikan. Makanan dan minuman yang sehat sebagai asupan yang masuk ke dalam tubuh juga menjadi hal penting untuk membentuk otak yang berfungsi maksimal. Kemudian, kasih sayang dan hal-hal menyenangkan juga membuat otak lebih optimal. Lalu, olahraga dan kualitas tidurpun juga mempengaruhi fungsi otak.

Dengan menjaga kualitas otak, kita sebenarnya sudah berusaha menghindarkan diri dari kemungkinan melakukan tindakan intoleransi hingga terorisme. Otak yang berfungsi maksimal membantu kita memfilter informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat ketika dihadapkan pada hal-hal yang negatif.

Menyiapkan generasi tangguh dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa ada banyak faktor yang terkait dengan tindakan intoleransi hingga terorisme. Kesiapan kita sebagai generasi muda Indonesia sangat dibutuhkan agar tidak terjerumus di dalamnya.

Gerakan intoleransi hingga terorisme ini bisa berkembang karena minimnya ketangguhan diri generasi kita untuk menerima ajaran dan memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu. Apabila kita tangguh, maka faktor risiko tidak akan berkembang menjadi suatu tindakan kekerasan yang melukai fisik dan mental, begitu juga sebaliknya.

Mari mempersiapkan ketangguhan diri melawan intoleransi hingga terorisme. Dimulai dari persiapan pada diri sendiri. Mulai dari makanan, minuman, olahraga, hingga kebiasaan positif lainnya merupakan awal mula otak bisa berfungsi dengan baik. Ketika otak sudah bisa maksimal, maka kita bisa membuat keputusan yang tepat ketika ingin mengikuti suatu ajaran atau memfilter ujaran. Otak yang sehat



menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan karakter positif dalam diri. Dengan demikian, modal untuk menjadi generasi yang tangguh bisa didapatkan.

Setelah persiapan diri, selanjutnya mempersiapkan lingkungan. Ketika kita saling dukung untuk menyiapkan lingkungan yang damai, faktor risiko pun tidak berkembang hingga merugikan. Contoh, apabila berita dengan ujaran kebencian banyak beredar, maka pesan-pesan positif pun juga harus lebih banyak. Hal ini bisa menyeimbangkan informasi yang diterima masyarakat.

Ada berbagai pesan positif yang bisa disebar, seperti proses mengingat kembali budaya lokal Indonesia yang identik dengan gotong royong dan kekeluargaan tanpa membedakan, perjuangan bangsa melawan penjajah dengan persatuan, lalu nilai-nilai kasih sayang yang nyata kepada sesama manusia.

Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat gerakan intoleransi hingga terorisme ini tidak merajalela hingga menimbulkan lebih banyak lagi kerugian. Mulailah dari diri sendiri hingga menjadi pribadi yang tangguh. Lalu bekerja sama membentuk lingkungan yang damai hingga menjadi bangsa tangguh. 🙏

Daftar Pustaka

- Borum, R. (2010). *Understanding terrorist psychology. The psychology of counterterrorism*, 19-33.
- Kolb, B., Whishaw, I. Q., & Teskey, G. C. (2001). *An introduction to brain and behavior* (Vol. 3). New York: Worth Publishers
- Kuwado, F. B. (2017). *Polri: Intoleransi adalah Cikal Bakal Terorisme*. Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/03/13044431/polri.intoleransi.adalah.cikal.bakal.terorisme>
- Ullah, H. (2016). *Why do people become religious extremist*. Oak TV. <https://www.youtube.com/watch?v=7A-C6RZbCaA>



2

Dinamika Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Kekerasan Ekstrimis di Indonesia

M. THAHA

Radikalisme di Indonesia menjadi sangat nyata, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosio-politik di tengah masyarakat Indonesia yang begitu luas. Munculnya sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab baru di Indonesia yang mengatasnamakan Islam, hadir bermacam-macam setelah gerakan reformasi menumbangkan rezim Orde Baru, dan berdatangnya orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa Ideologi baru ke tanah air.

Kehadiran sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab baru tersebut mengubah konstalasi umat beragama khususnya agama Islam di Indonesia. Adapun ideologi yang mereka bawa lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab Maliki yang diadopsi dan diintrodusir oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab saudi.¹

¹ Jurnal ilmiah, Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia : Antara Historisitas dan Antropositas, (IAIN Radeng Intan Lampung: Volume 9, Nomor 2, Desember 2015), hal. 254-255.



Paham Wahabi merupakan paham yang mengagungkan budaya dan tradisi ala Arab yang konservatif dengan menggunakan agama Islam sebagai gaungnya. Dalam kaitannya dengan radikalisme, paham Wahabi dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit di antara kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah bid'ah, kafir, musuh, dan wajib diperangi.²

Kalidjernih³ mengatakan Radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan yakni yang menantang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan superfisial. Secara etimologis radikalisme berasal dari kata radix (latin) yang berarti akar yang kemudian menjadi inti dari makna radicalism yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya.

Menurut data hasil penelitian indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Birru, L. di Media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.840.⁴ Pertanyaannya kemudian, sampai kapan konflik yang mengatas namakan agama dan Islam akan terus terjadi di Indonesia? Potensi konflik antar elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi pada lima hingga sepuluh tahun mendatang (Kompas, Jumat 10 Februari 2012). Selain karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga terjadi karena demokrasi di negeri ini masih

² Khamami Zada, *Islam Radikalisme*, (Jakarta: Teraju, 2002), hal. 95.

³ Kalidjernih, 2010, *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politik*, (Bandung, Widya Aksara Press), hal. 140. dalam Jurnal Yosaphat Haris Nusarastrinya, *Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*.

⁴ Birru, L. "Indeks Kerentanan Radikalisme" (Online) tersedia: <http://www.voanews.com/indonesian/news/Indeks-Radikalisme-diIndonesia> (28 Desember 2011) dalam Jurnal Yosaphat Haris Nusarastrinya, *Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*.

belum matang.

Azumardi Azra, dalam Artikel Tempo “Radikalisme Islam Indonesia” 15 Desember 2002. Lebih jauh ditegaskan bahwa Radikalisme dan Terorisme kini menjadi musuh “baru” umat manusia. Meskipun akar radikalisme telah muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan mengantarkan fenomena ini sebagai “musuh kontemporer” sekaligus sebagai “musuh abadi”.

Banyak pihak mengurai spekulasi secara tendensius bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme agama, terutama Islam. Tak heran jika kemudian Islam seringkali dijadikan ‘kambing hitam’. Termasuk dan terutama pada kasus bom paling fenomenal: WTC dan kasus termutakhir bom “Boston Marathon”.⁵

Hal tersebut dapat kita cermati bahwa di Indonesia akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu radikalisme di antaranya adalah kelompok yang mengklaim dirinya jaringan Al-Qaeda dan ISIS, dimana keduanya menjadi isu global sampai saat ini.⁶

Semangat radikalisme dan terorisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.

Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar, karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi Syari’at Islam tanpa keharusan mendirikan “Negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia, di samping juga ada yang memperjuangkan

⁵ Dalam Sofian Munawar Asgart, *Melawan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Research Associate, The Interseksi Foundation, Jakarta, hal. 1.

⁶ Christina Parolin dalam Jurnal Ahmad Asrori (2015:254), *Radical Spaces: Venues of Popular Poliflicts in London, 1790-c. 1845* (Australia: ANU E Press, 2010), Cet.ke-1, h. 3.

berdirinya “Sistem Khilafah Islam”. Pola organisasinya juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI.⁷

Walaupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk saat ini telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi Widodo karena dianggap anti-Pancasila (Kompas senin, 10 Juli 2017). Akan tetapi pahamnya masih tetap ada di sebagian masyarakat Indonesia, yang bisa jadi dalam bentuk wajah baru dengan tidak lagi memakai simbol HTI. Akan tetapi spiritnya untuk mendirikan negara Islam masih berlangsung, hanya saja legitimasinya sudah tidak ada (Illegal).

Selain radikalisme agama, aksi teror juga masih berisiko muncul akibat gesekan-gesekan lainnya, seperti anti persatuan, separatisme, dan lain-lain. Oleh karena imunitas harus senantiasa mengingat bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang terdiri dari keberagaman.

Jika masyarakat sudah tidak memiliki sikap tenggang rasa dan pemikiran terbuka, maka akar-akar radikalisme pun akan dapat leluasa masuk mempengaruhinya. Karena itu, pemerintah sangat perlu untuk menjadi lokomotif dalam pembangunan persatuan dan kesejahteraan bangsa guna menghindarkan negeri ini dari ancaman radikalisme yang dapat memanfaatkan celah-celah ketidakadilan.⁸

Sementara peneliti LIPI Anas Saidi mengatakan bahwa, paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda. Ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya. Dia menegaskan jika pemahaman ini dibiarkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena mereka menganggap ideologi Pancasila tidak

⁷ Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 5.

⁸ Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia : Antara Historisitas dan Antropositas*, hal. 260.

lagi penting.⁹

Lebih jauh Anas mengungkapkan dalam penelitian yang dilakukan pada 2011 di lima Universitas di Indonesia UGM, UI, IPB, Unair, dan Undip yang hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan khususnya di kalangan mahasiswa di kampus-kampus umum. Dan radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa itu terjadi pasca reformasi, dengan menyebar melalui Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), termasuk HTI dan Salafi yang merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional.

Proses Islamisasi ini terjadi secara monolitik dan masjid menjadi dikuasai kelompok tertentu yang konsekuensi pengikutnya adalah sikap intoleran, dan jika nanti mereka kemudian menjadi pejabat, misalnya menjadi menteri atau menjadi apa sajalah yang dimana posisi mereka memiliki peranan penting dalam struktur masyarakat, jika tidak punya sikap toleransi dan masih punya benak untuk mengganti Pancasila, ini akan menjadi semacam sebuah ancaman yang mesti harus kita cemaskan.

Anas mengatakan lebih lanjut bahwa proses Islamisasi di kalangan anak muda itu harus diimbangi dengan proses Islamisasi yang terbuka, bervariasi dan penyelesaian perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan tidak dengan kekerasan. Jika itu dilakukan, Anas melihat ada sisi positif proses Islamisasi ini dapat memberikan generasi muda yang lebih baik dan dapat menerima perbedaan.¹⁰

Oleh karena itu, pluralitas (keberagaman) sudah pasti niscaya dalam republik ini, walaupun kita berbeda keyakinan (agama), tetapi kita sama dari segi kemanusiaan (Realisme). Artinya kita sama-sama menghargai keyakinan beragama kita, karena mungkin agama yang kita yakini baik itu dari kalangan Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya, adalah merupakan masing-masing agama yang telah diakui

⁹ Sri Lestari, Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal, BBC Indonesia, 18 Februari 2016, hal. 1.

¹⁰ Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia : Antara Historisitas dan Antropositas, hal. 261.



keberadaannya di masyarakat Indonesia.

Sehingga kita tidak boleh saling menegasi antara manusia satu dengan manusia lainnya atau agama satu dengan agama lainnya, karena kita sama-sama umat beragama dan sama-sama masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosio-politik. Terlebih setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan kedatangan orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa paham-paham atau ideologi-ideologi baru ke tanah air, dan turut mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia.

Permasalahan kemudian, paham baru yang mereka bawa tersebut sifat dan sikapnya lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.

Selanjutnya, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Presiden Jokowi Widodo karena dianggap anti-Pancasila. Akan tetapi pahamnya masih tetap ada di sebagian masyarakat Indonesia, yang bisa jadi dengan wajah baru dalam dengan tidak lagi memakai simbol HTI. Dimana spirit untuk mendirikan negara Islam masih berlangsung, hanya saja legitimasinya sudah tidak ada.

Lebih lanjut bahwa proses Islamisasi di kalangan anak muda itu harus diimbangi dengan proses Islamisasi yang terbuka, karena proses Islamisasi ini dapat memberi dampak generasi muda yang lebih baik dan dapat menerima perbedaan. Tetapi jika sebaliknya, maka pengikutnya di masa yang akan datang akan memiliki sikap intoleran.☹️





3

Dinamika Toleransi Beragama di Indonesia

MUHAMMAD REZA

Secara faktual, Indonesia adalah negeri yang sangat akrab dengan berbagai perbedaan. Dari perbedaan suku, ras, agama, dan warna kulit. Namun hal ini sama sekali tidak menghilangkan jiwa persaudaraan di antara warga negara Indonesia. Bahkan hal yang demikian semakin menuntut masyarakat agar lebih saling mengenal satu sama lain. Itulah Indonesia, yang dari bermacam-macam latar belakang, terpisah melalui pulau-pulau, dengan bahasa yang berbeda-beda, kepercayaan agama yang beragam, namun sama sekali tidak merusak rasa persatuan.

Pasca reformasi, beberapa pengamat politik Barat memprediksi bahwa Indonesia akan terpecah seperti Uni Soviet. Karena dengan beberapa alasan yang cukup logis, apalagi Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang sangat berpotensi pecah. Namun ternyata analisis tersebut tidak terbukti benar, Indonesia tetap menjadi negara yang utuh walaupun tidak bisa dipungkiri sempat terjadi letupan-letupan kecil di berbagai daerah seperti lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, tetapi hal tersebut





tidak mampu menggoyang garuda dari singgasannya.

Namun belakangan, banyak terjadi gejala-gejala kekerasan di negeri ini, terutama konflik agama dan sektetarian. Kasus Ahmadiyah di Bogor dan Syiah di Sampang adalah bukti bahwa semakin merosotnya sikap toleransi beragama terhadap sesama warga negara Indonesia. Syiah dan Ahmadiyah adalah dua kelompok Islam yang berbeda dari kebanyakan umat islam di Indonesia yang mayoritas penganut Islam Ahlusunnah Waljama'ah yang direpresentasikan oleh dua organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah. Belum lagi kasus penghancuran rumah-rumah Ibadah dan simbol keagamaan seperti pemboman gereja di Samarinda (Kalimantan Timur) yang semakin menambah luka kita bersama..

Salah Siapa? Siapa yang disalahkan dalam hal ini, apakah pemerintah yang tidak tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut, apakah hukum kita yang tidak jelas, atukah memang ini kesalahan para tokoh agama yang turut andil dalam memprovokasi? Tentu semua elemen tersebut saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, perlu adanya keterbukaan pemikiran terhadap kondisi politik global saat ini, agar kita semua dapat membuka cakrawala hingga kita mampu mencari akar permasalahan dari persoalan ini.

Yang amat disesalkan ialah sikap beberapa tokoh agamawan yang ikut serta dalam mengembangkan sikap intoleran tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kesempatan seperti pada acara seminar yang bertajuk penyesatan terhadap satu kelompok, atau buku-buku yang isinya hanya menyulut api perpecahan, ceramah keagamaan yang diubah menjadi sarana pengkafiran. Bentuk provokasi seperti ini sangat mengena sekali dihati-hati masyarakat Indonesia yang memang sedang mengalami carut marut dalam semua aspek, terutama persoalan ekonomi. Hal semacam ini semakin berkembang bahkan sudah merambah ke dalam sosial media seperti *Facebook* dan *Youtube*. Bila perkara ini tidak disikapi secara serius, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih mengerikan.



Saya melihat ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat Indonesia saat ini. Yakni, pengaruh organisasi radikal/*taqfiri* yang mulai menguasai wacana di tengah masyarakat. Bila dilihat secara seksama, masuknya ideologi radikalisme dan *taqfirisme* ini bersamaan dengan kondisi politik global khususnya di Timur Tengah yang sedang bergejolak, yang barang tentu mempengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Ciri khas ideologi ini ialah, mudah mengkafirkan kelompok lain hanya karena berbeda pemahaman dengan mereka. Bahkan ideologi tersebut sampai pada titik menghalalkan darah seseorang. Ideologi semacam ini diam-diam tapi pasti sedang digemari oleh kalangan muda yang memang mempunyai pola pikir labil dan haus akan informasi. Hal semacam ini tentu dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang belakangan telah menguasai sosial media secara masif

Dalam sekejap, orang berbondong-bondong terdoktrin oleh pemikiran tersebut walaupun tidak terikat secara organisasi, namun ideologi *taqfiri* ini, bisa disebut berhasil dalam merubah mindset sebagian masyarakat yang memang kurang beruntung secara pendidikan keagamaan. Ini bisa dilihat dalam beberapa waktu belakangan, termasuk perihal Pilkada DKI 2017 yang telah menghabiskan energi kita semua.

Solusi

Rasanya perlu untuk memberikan pendidikan sejak dini terhadap nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan kepada seluruh masyarakat terlebih ke kalangan *grass root*. Mengingat belum banyak dari mereka yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hingga rasanya perlu tenaga yang lebih ekstra untuk memberikan pemahaman di tingkat ini. Selain itu, nilai-nilai toleransi bisa dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan dan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah bahkan di pesantren-pesantren.

Dengan begini, para guru dan para *mubalig* dituntut untuk benar-benar memberikan pencerahan terhadap



para murid dan santri terkait pentingnya arti persatuan dan menghargai perbedaan. Karena nilai-nilai pancasila harus segera diterjemahkan dalam pola-pola teknis seperti ini, jika tidak, pancasila hanya sekedar falsafah yang normatif ditengah masyarakat kita. Oleh karena itu, saya pikir Menteri Pendidikan dan Menteri Agama harus segera memikirkan hal tersebut.

Yang kedua ialah, pemerintah harus berani mengambil sikap tegas terhadap segala tindakan-tindakan teror atau kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh siapapun dan organisasi apapun. Tidak perlu kompromi terhadap organisasi-organisasi yang setiap langkahnya hanya ingin membuat kericuhan. Di samping itu, pemerintah beserta para intelejen negara harus bertindak tegas kepada organisasi yang berhaluan anti Pancasila dan NKRI. Karena negara mempunyai legitimasi dan kekuasaan penuh untuk mengambil sikap dalam menumpas siapapun yang ingin membuat kericuhan atau perbuatan makar di bumi Indonesia.

Sekedar autokritik, kadang pemerintah hanya fokus pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, tapi nampaknya pemerintah masih kurang dalam mengantisipasi. Maka saya rasa, pemantauan terhadap setiap organisasi atau aliansi yang bernuansa sparatis, adalah hal yang wajar. Agar tidak terjadi hal-hal yang serupa dikemudian hari. Karena untuk menjadi radikal, umumnya ada proses dan prospek. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Memutus rantai radikalisme sampai akar-akarnya. Saatnya untuk bertindak tegas ditengah terancamnya keberagaman di bumi ibu pertiwi.

Pendidikan Keagamaan dan Akar Radikalisme

Akhir-akhir ini negeri kita sedang diserang oleh wabah radikalisme atas nama agama yang cukup mengkhawatirkan. Pada awalnya peristiwa tersebut tidak terlalu diperhitungkan oleh sebagian pihak, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Namun ketika skala tersebut semakin besar dan sudah menuai banyak korban, maka kesadaran akan bahaya gejala tersebut



mulai tumbuh. Pemerintah pun segera meresponnya dengan cepat. Salah satunya dengan mengesahkan Perpu yang berisi pembubaran bagi organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya bagi persatuan dan keutuhan NKRI.

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ketika berbicara mengenai radikalisme. Kebanyakan kita menganggap bahwa sikap intoleran merupakan tren cara berfikir dalam melihat kemajemukan, atau *spontanitas thinking*. Oleh karenanya, hal yang demikian tidak perlu digubris terlalu berlebihan. Akibat dari respon pasif tersebut, tentu ini memberi jalan mulus bagi berkembangnya wabah radikalisme di tengah masyarakat yang memang belakangan ini telah mengalami titik jenuh oleh hiruk pikuk hedonisme. Bagi para pedagang konflik, mereka adalah makanan empuk yang siap diolah hanya dengan sedikit polesan.

Padahal, bila diselidiki lebih dalam, sindrom radikalisme ini bukan lahir dari proses kultural yang bersifat determinan. Bisa dikatakan bahwa sindrom tersebut seperti ditanamkan melalui pola struktural secara sistematis. Tak syak lagi bahwa pola tersebut telah memasuki dan menjadi bagian dari materi pendidikan di Indonesia. Ini terbukti di dalam beberapa materi pembelajaran khususnya pada bidang keagamaan walaupun tentu tidak semuanya, namun kebanyakan lebih cenderung bersifat sektetarian dan beraroma fanatisme terhadap satu ideologi/pemikiran tertentu, dengan menanamkan kebencian terhadap agama, *mazhab* dan ras tertentu.

Selain itu, secara umum pendidikan keagamaan lebih bersifat doktrinasi dan dogmatis. Hingga tak ada ruang untuk mempertanyakan ulang mengenai pembahasan yang telah diajarkan. Materinya pun hanya mengarah kepada satu referensi saja. Biasanya, para murid/santri yang mempunyai latar belakang NU, hanya diajarkan secara literlek *fikih Syafi'i*, teologi *Asya'ri*, dan *tasawuf* Al Ghazali. Kalaupun ada pembahasan diluar ini, tak lebih hanya sekedar intermezo untuk menghabiskan waktu jam pelajaran. Hal ini pun juga terjadi di dalam pendidikan kelompok-kelompok Islam lainnya.



Konsekuensi dari metode tersebut, tentu saja akan melahirkan generasi-generasi yang alergi terhadap perbedaan. Karena mereka tak pernah tahu ada realitas di luar apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Kelak ketika mereka keluar dan bersentuhan dengan cakupan masyarakat yang lebih luas, tentu akan merasa aneh dan risih bila ada yang berbeda sepemahaman dengan tradisi keagamaan yang mereka anut, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap apatis terhadap entitas lain di luar kelompok mereka.

Belum lagi metode pengajaran yang dilakukan oleh para guru dengan mengamputasi jiwa kritis si murid. Hingga si murid jatuh pada jurang kejumudan. Si murid tidak akan menerima pendapat-pendapat lain, selain apa yang dikatakan oleh para guru/ustad. Mereka pun akan alergi terhadap segala bentuk pembaharuan dalam hal pemikiran. Dengan demikian keilmuan tidak mungkin dapat berkembang bila kondisi tersebut terus merenus dipertahankan.

Pada skala kecil, hal ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena efek dari hal tersebut tidak selalu menimbulkan gesekan secara fisik, Namun pada skala besar, tentu ini sangat membahayakan bagi persatuan. Seringnya terjadi diskriminasi sosial yang dialami oleh kaum minoritas pada momen-momen tertentu, akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik horizontal di tengah umat yang berbuntut pada kerusuhan masal.

Selama ini gejala intoleransi selalu diidentikan dengan paham-paham tertentu, sebut saja Wahabisme. Aliran ini sering menjadi kambing hitam bagi terjadinya kekerasan atas nama agama. Walaupun pendapat ini tidak bisa kita tolak secara keseluruhan, namun fakta dilapangan tidak selalunya seperti itu. Virus radikalisme tak pernah pandang buluh dalam mencari mangsanya, virus ini bisa saja merasuki pikiran-pikiran para kaum sarungan yang diidentikan dengan NU sebagai organisasi yang selama ini menjadi model kongkret Islam toleran.



Apa yang terjadi di Sampang Madura adalah bukti kejahatan atas nama agama, dan yang melakukannya orang-orang yang mengeklaim dirinya NU. Konon, menurut beberapa kesaksian para peneliti, orang-orang di sana bila ditanya agamanya, mereka menjawab bahwa agamanya adalah NU. Hal ini cukup memprihatinkan. Belum lagi bila kita lihat beberapa kali penyerangan terhadap pesantren Yapi di Jawa Timur yang disinyalir sebagai pesantren Syiah, dan beberapa peristiwa pembubaran acara keagamaan di berbagai tempat lainnya. Namun bukan berarti gejala eksterimisme tidak menjangar kepada kelompok-kelompok Islam lainnya. Penulis semata-mata hanya lebih menyayangkan bila di dalam tubuh NU ada pribadi-pribadi *takfiri*, karena ini berlawanan dengan semangat NU yang notabennya sebagai pengusung Islam Moderat.

Apalagi bila kita melihat video-video di *youtube* yang belakangan ini sering menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dengan cara instan. Mereka akan mudah termakan oleh oknum-oknum ustad yang kerjanya hanya mengkafirkan dan mensesatkan kelompok lain. Bahkan dalam beberapa momen tertentu, secara serampangan mereka memberi fatwa dan menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak etis terhadap kelompok tertentu.

Karena masyarakat awam ini sebelumnya kosong dari pengetahuan agama dan tidak biasa berfikir filosofis, maka mereka akan mudah terprovokasi dengan himbauan tersebut. Mereka tidak mempunyai perspektif lain dalam memahami perbedaan dan hanya melihat suatu fenomena dalam kerangka *black and white*. Sehingga yang ada dibenaknya adalah benar atau sesat. Cara pandang eksakta yang dibawa dalam ranah agama inilah, yang kemudian menimbulkan sikap ekstremisme.

Yang lebih mengharukan, ustad-ustad karbitan ini juga merasa ahli dalam berbagai bidang keilmuan terutama perihal sains dan politik. Sehingga mereka berani menerjang ilmu-ilmu



tersebut dengan bahasa konspiratif yang amat menggelikan. Hanya mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, lantas mengambil kesimpulan secara serampangan. Masyarakat pun tergiring untuk mempercayai celotehan-celotehan tersebut. Akibatnya, semua peristiwa selalu dikaitkan-kaitkan dengan agama. Inilah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa kebencian dan kecurigaan diantara umat.

Oleh karena itu, perlu rasanya untuk merekonstruksi pendidikan agama Islam di Indonesia agar tidak selalu bernada sektarianisme. Dan juga tidak hanya memfokuskan diri pada perihal *fikih* yang barang tentu meniscayakan kekakuan. *Fikih* itu hanya berbicara pada tataran haram dan halal, hitam dan putih. Hal ini bukan berarti kita mengatakan fikih tidak penting, Namun akan lebih baik, bila dilengkapi dengan pembahasan sejarah Islam dan teologi dasar. Dengan begitu, murid akan memahami cakrawala Islam yang lebih luas dan komprehensif sekaligus memberi wawasan mengenai nilai-nilai kebijakan di tengah perbedaan.

Dari sini sepertinya harus ada langkah-langkah strategis dan kongkret yang mesti dilakukan oleh pihak berwenang. Mungkin yang perlu dilakukan ialah memasukan kurikulum mengenai nilai-nilai toleransi sebagai materi wajib bagi semua instansi pendidikan dengan mengenalkan kemajemukan agama-agama yang ada di Indonesia, di hadapan para murid. Dalam ruang lingkup Islam, kita bisa menjelaskan bahwa agama ini memiliki ragam warna pemikiran dan mazhab-mazhab. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dan calon guru agama, terbiasa dalam menghadapi perbedaan.

Selain itu, pemerintah harus mengadakan bimbingan bagi para calon guru/ustad sebelum mereka terjun ke masyarakat. Karena guru-guru inilah yang akan berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat ke depan. Mereka adalah pencetak generasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pembekalan intelektualitas yang memadai dan membersihkannya dari pola pikir ekstremisme, merupakan





keajiban dan tanggung jawab pemerintah. Bahkan pemerintah harus bertindak tegas dengan memberi sanksi kepada oknum-oknum guru, ustad dan kyai yang menebarkan kebencian atas nama apapun.

Menurut hemat penulis, timbulnya sikap saling mengkafirkan di antara masing-masing kelompok, dikarenakan adanya kesalahpahaman dan kekurangan informasi diantara satu dengan yang lain. Masing-masing tak memberi hak jawab dan enggan untuk mendengar klarifikasi mengenai hal-hal yang dituduhkan. Akibatnya yang terjadi, masing-masing saling menghukumi sesat dan merasa paling benar hingga seakan mempunyai tanggung jawab untuk menyadarkan atau bahkan melenyapkan kelompok yang dianggap sesat dengan dalih membrantas kemungkaran.☹️







4

Dinamika Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Dan Kekerasan Ekstrimisme Di Indonesia

YUSTIANTO T.

Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar dengan tingkat keberagaman masyarakatnya baik suku, agama, ras, etnis, budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara besar dan beraneka ragam intensitas munculnya konflik-konflik atau perpecahan dalam masyarakat sangat mudah terjadi.

Konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan, dan akan terjadi ketika tidak adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi sampai ditemukan hal yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan, 2010: 2).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam misalnya dari segi agama tentu sangat rentan terhadap timbulnya perpecahan atau konflik sosial. Dengan kata lain, agama dalam kehidupan masyarakat majemuk dapat berperan sebagai faktor pemersatu (intergratif), dapat pula berperan sebagai faktor pemecah (disintregratif). Fenomena semacam ini banyak ditentukan sedikit-tidaknya oleh:





- 1) teologi agama dan doktrin ajarannya,
- 2) sikap dan prilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut,
- 3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya, serta
- 4) peranan dan pengaruh pemuka agama, dalam mengarahkan pengikutnya (Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 2002: 177).

Akhir-akhir ini Indonesia disuguhkan dengan berbagai peristiwa berkaitan dengan perpecahan antar bangsa, baik karna latar belakang agama, suku, budaya etnis dan pertentangan antar golongan. Aksi tersebut berujung kepada tindakan intoleransi dan radikalisme yang mengarah pada tindakan ekstrimisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atas fenomena sosial yang terjadi sebagai tindakan perlawanan karna berbeda dari yang diyakininya. Kasus penolakan pendirian rumah ibadah, pelarangan kegiatan beribadah, pengrusakan rumah ibadah, penolakan keberadaan etnis tertentu sampai kepada terjadinya konflik horizontal antar warga masyarakat adalah suatu keadaan bangsa yang harus disikapi secara bersama.

Persoalan-persoalan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme menjadi hal penting untuk dibicarakan. Upaya untuk merajut kembali toleransi dan meminimalisir radikalisme dan ekstrimisme menjadi tugas bersama yang harus diselesaikan. Eksistensi Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai idiologi negara yang sudah final harus benar-benar mampu diwujudkan. Hal ini berkenaan dengan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Sekalipun dalam beberapa dekade terakhir diguncang oleh isu-isu perpecahan untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Semua komponen bangsa hari ini diperhadapkan terhadap kenyataan apakah mampu untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara plural yang aman ditinggali oleh



semua golongan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perbedaan satu sama dengan yang lain.

Dinamika Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Dan Kekerasan Ektrimisme Di Indonesia

Intoleransi

Indonesia adalah negara yang sangat bhinneka. Kebhinnekaan Indonesia itu terdapat dalam hampir seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam hal agama. Agama menjadi salah satu hal yang sensitif bila dikaitkan dengan keharmonisan dan toleransi. Tentu saja, dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia ini seringkali terjadi gesekan-gesekan. Akar dari gesekan-gesekan tersebut adalah perbedaan-perbedaan paham dalam melihat sesuatu hal. Toleransi dan intoleransi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hal itu. Mengenai ke-bhineka-tunggal-ika-an yang didengungkan oleh negara kita, banyak kasus pelanggaran HAM terkait intoleransi antar umat beragama yang muncul di Indonesia menjadi salah satu bukti belum ditegakkannya rasa toleransi secara keseluruhan. Baru-baru ini, gejala intoleransi di Indonesia memanas seiring dilaksanakannya aksi yang mengatasnamakan pembelaan agama. Mulai dari aksi damai 411 hingga aksi 212 pada penghujung tahun 2016 dan aksi 212 jilid II di awal tahun 2017.

Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.



Bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya agar diterima oleh orang lain sekalipun dengan cara paksaan.

Ekstrimisme

Ekstrimisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Paham ekstrimisme sering menggunakan cara atau gerakan yang bersifat keras dan fanatik dalam mencapai tujuan. Ekstrimisme mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain, perasaan saling mencurigai sehingga mengakibatkan perpecahan. Ekstrimisme adalah bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Ekstrimisme pula dapat berarti cara untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Jika mencermati gerakan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir justru kelihatan jelas sangat dipengaruhi oleh isu-isu global, nasional dan regional. Persoalan timur tengah misalnya merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak mengundang simpati rakyat Indonesia. Bahkan sengketa wilayah Palestina dan Israel dimana negara Palestina mendapat tekanan dan diskriminasi yang sangat besar dari Israel membuat tidak sedikit masyarakat Indonesia melakukan aksi solidaritas peduli Palestina.

Kasus-kasus dalam negeri sendiri seperti kasus Ahok mantan gubernur DKI Jakarta yang dianggap menistakan agama Islam juga memantik reaksi publik. Sehingga berbagai kalangan dari berbagai daerah di Indonesia bereaksi dengan keyakinan



dan kebenaran masing-masing. Banyak yang menolak tapi tidak sedikit pula yang mendukung, yang kemudian biasanya direpresentasikan dalam tindakan-tindakan praktis di masing-masing daerahnya. Peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah yang terjadi di Bandung, pelemparan rumah-rumah ibadah di Makassar, kasus Tolikara Papua, dan masih banyak lagi merupakan tindakan intoleransi dan radikalisme yang berujung kepada hal-hal yang bersifat ekstrimisme.

Walaupun pada dasarnya munculnya gerakan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme diberbagai daerah di Indonesia sebetulnya terjadi secara sporadis. Dimana tidak semua daerah mengalami hal yang sama bahkan intensitasnya relative tidak sama. Artinya bahwa munculnya gerakan tersebut sebagai konsekuensi logis yang terjadi berkaitan dengan cara pandang dan sikap reaktif yang dialami terhadap kondisi sosial dimana ia berada. Artinya peluang terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme di daerah yang berbeda dengan isu yang berbeda pula diakibatkan oleh kondisi sosial dan geo politik daerah masing-masing sangat mungkin terjadi. Karna itu diperlukan suatu strategi jitu yang komprehensif dalam rangka mengatasi persoalan ini sampai kepada akar masalahnya.

Ada beberapa hal yang menurut saya penting dilakukan dalam rangka meminimalisir bahkan pula meretas tindakan-tindakan intoleransi di Indonesia, yaitu :

1. Peran Negara

Peran negara yang dimaksud adalah peran pemerintah dalam upaya memproteksi bahkan juga dapat melakukan tindakan-tindakan refresif kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap dapat atau telah mengancam keutuhan dan persatuan bangsa dan Negara. Pemerintah orde baru sedianya menjadi referensi dimana saat itu dibawa kendali pemerintah organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tidak tanggung-tanggung dibubarkan oleh pemerintah.



2. Peran Pemuka Agama

Pemuka agama merupakan simpul-simpul utama adanya pengendalian untuk menahan kelompok-kelompok tertentu dalam bertindak. Himpunan dan suara-suara agama melalui para tokoh-tokohnya diharapkan lebih menekankan upaya-upaya untuk merajut kebersamaan dan persatuan. Kampanye-kampanye yang disampaikan diharapkan pula bernuansa penyjukan umat dan pentingnya hidup berdampingan satu sama dengan yang lain.

3. Revitalisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

FKUB adalah lembaga yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level akar masyarakat untuk mengenali, mengadvokasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam konteks beragama. Selama ini masyarakat tidak terlalu merasakan pentingnya kehadiran lembaga ini. Hal ini membuktikan bahwa peran yang sering dimainkan oleh lembaga ini sangat minim bahkan menjadi tumpul dalam menyelesaikan masalah. Jika dicermati bahwa minimnya peran lembaga ini sebagai lembaga yang mampu menjadi solutif di tengah-tengah persoalan yang ada tidak terlepas dari langka-langka yang selama ini dilakukan lembaga ini. Faktanya di lapangan bahwa lembaga ini berperan ketika ada masalah yang terjadi. Usaha-usaha preventif yang dilakukan sangat minim sekali sehingga membuat lembaga ini seolah tidak berdaya.

4. Revitalisasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan merupakan produk kebijakan pemerintah yang secara sah dan mempunyai legitimasi untuk digunakan oleh pemegang mandat negara dalam rangka bertindak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Karna itu suatu produk peraturan yang dibuat harus benar-benar kontekstual dan sesuai dengan kearifan masyarakat dimana peraturan itu dibuat. Semenjak reformasi produk hukum yang ada seolah-olah dikalakan dengan kekuatan kelompok-kelompok tertentu.





Sehingga sangat terlihat kehati-hatian pemerintah yang terlalu berlebihan dalam memberikan vonis kepada suatu organisasi yang dianggap bertentangan dengan idiologi Pancasila.

Kesimpulan

Dinamika gerakan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh isu-isu global, nasional dan regional. Terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda seolah-olah menjadi refresentasi dari kelompok tersebut. Hal ini pula yang berdampak kepada keolompok-kelompok masyarakat yang terobsesi dengan adanya suatu paham yang diyakininya yang pada faktanya dilapangan tidak terjadi persis dengan keyakinannya. Diperlukan langka-langka konkrit dalam rangka meminimalisir bahkan memberantas gerakan-gerakan tersebut. Karena itu dibutuhkan peran semua stakeholder seperti pemerintah dari tingkat atas sampai ke pelosok, pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara untuk berperan aktif secara bersama-sama merajut kebersamaan bangsa dan negara sebagai cita-cita luhur yang diagejewantakan dalam Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Komitmen dan konsistensi bersama bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga sebagai rumah dimana perbedaan dapat tumbuh subur tanpa harus mengkerdikan identitas yang lain benar-benar dapat diwujudkan.

Saran

Dalam rangka mengupayakan agar tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dapat dicegah adalah dengan membangun keseragaman pikiran dan konsensus bahwa Pancasila adalah rumah bersama dimana perbedaan dapat tumbuh dan berkembang yang perkembangannya tidak akan mengganggu eksistensi identitas lain. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk peran serta pemerintah secara aktif dan tegas dalam memberantas kelompok-kelompok yang dapat mengancam keberadaan





negara. Selain itu pendidikan formal dan non formal yang bermuatan pendidikan keagamaan dan ahlak harus rutin dan secara berkelanjutan digalakkan di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada generasi-generasi muda untuk dapat memahami konteks negaranya secara komprehensif. Di dalam masyarakat pula harus digalakkan forum-forum yang dapat menjadi wadah komunikasi dan berinteraksi antar semua golongan sehingga dapat meminimalisir kecurigaan-kecurigaan yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang beranekaragam. 🙏

Daftar Pustaka

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

Internet

<https://www.voaindonesia.com/a/dinamika-global-picu-radikalisme-dan-intoleransi-/3851883.html>. Diakses 2 Januari 2018 pukul 14:24 WITA

<http://ksm.ui.ac.id/mengusut-kasus-intoleransi-di-indonesia-siapa-yang-sebenarnya-memecah-belah-nkri/>. Diakses 2 Januari 2018 pukul 14:45 WITA





5

Indonesia Anti Radikalisme

IDRUS MUALANA YUSUF

Bangsa Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi incaran dan sasaran gerakan politik yang mengatasnamakan Islam, termasuk kelompok ISIS. Kompleksitas radikalisme di Indonesia yang tidak mudah diselesaikan karena akan selalu dikaitkan dengan pergolakan dunia lain terutama Timur Tengah, sehingga pilihan untuk penguatan basis kebangsaan dan ke-Indonesian dengan memberikan pemahaman dan penguatan nasionalisme merupakan solusi jangka panjang yang harus ditempuh oleh pemerintah, disamping solusi jangka pendek yaitu dari sisi penegakan hukum dan ketegasan sikap dari keamanan yang berwenang. Keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sangat mengkhawatirkan di kalangan dunia internasional, karena dianggap mengganggu perdamaian dunia, oleh karena itu gerakan anti ISIS banyak bermunculan di berbagai negara, tidak ketinggalan di Indonesia, gerakan penolakan ISIS pun marak bermunculan di berbagai kegiatan sebagai upaya menangkal penyebaran paham tersebut, baik di kalangan ormas maupun perguruan tinggi.





Pemerintah Menolak Tegak

Belakangan ini telah dihebohkan adanya ISIS yang berusaha mencari dukungan dan pengaruh di Indonesia. Namun, secara tegas pemerintah RI dan Badan Nasional Penanggulangan Tindakan Terrorisme (BNPT) menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Kebhinekaan yang menaungi NKRI. Sebab apa yang dilakukan ISIS masuk dalam kategori tindakan terorisme, karena dilakukan dengan cara kekerasan dan menebar teror. Seperti penyeru jihad ala ISIS di Indonesia tersebut adalah kelompok teroris Santoso asal Poso yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Ormas Islam, tokoh politisi, intelektual dan masyarakat menolak terhadap eksistensi ISIS di Indonesia. Berbagai pernyataan menolak ISIS di Indonesia pun bermunculan, tetapi apakah cukup dengan memberikan statemen?

Menangkal/Upaya Pencegahan

Saat ini yang lebih penting adalah bagaimana upaya nyata untuk menangkai gerakan radikal seperti ISIS itu dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat. Karena selama ini, pelibatan seluruh elemen masyarakat selama ini belum pernah dilakukan, justru dalam membasmi dan menangkai gerakan radikal terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu duduk bareng merumuskan hal tersebut, setidaknya dengan melibatkan masyarakat dan tokoh akan ditemukan untuk membentengi masyarakat, terutama anak-anak agar tidak terpengaruh visi kelompok ISIS. Tanpa hal tersebut akan sulit menemukan upaya yang komprehensif dalam menangkai radikalisme. Pencegahan paham radikalisme dan menangkai bahaya ideologi ISIS tersebut hendaknya tidak diberikan kepada para elit semata. Tetapi bagaimana lapisan bawah juga harus gencar dilakukan, sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, paham radikal yang menjadi



kekhawatiran pemerintah bisa ditangkal. Kalau pun ada yang mencoba menyusupkan paham-paham tersebut, tentu akan ditolak karena sudah adanya pemahaman masyarakat.

Pendidikan Bagi Guru Agama

Pentingnya pendidikan Islam bagi para calon guru agama Islam, karena pendidikan Islam yang berada di punggung guru bagai pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menangkal radikalisme, di sisi yang lain justru bisa melahirkan radikalisme agama. Jangan sampai pendidikan agama yang salah bisa menjadikan seseorang menjadi radikal. Karena masih banyak sekolah, siswa bukannya diperkenalkan dengan ajaran yang penuh cinta, namun justru dikenalkan dengan ajaran yang keras, agresor, dan pembalas dendam. Di sinilah peran guru sebagai pendidik menduduki posisi kunci. Karena di tangan merekalah, anak didik bisa dibentuk cara pandang pada agama dengan kacamata cinta. Sementara itu, untuk mencegah lahirnya radikalisme, perlunya merombak total cara pandang terhadap agama Islam serta mengkritisi kurikulum pendidikan agama yang menurutnya lebih berorientasi pada hukum (*nomos oriented religion*) yang kaku dan eksklusif, bukannya pada cinta (*eros oriented religion*) yang moderat dan inklusif. Padahal Islam adalah ajaran yang sangat berorientasi pada ajaran cinta (*eros*). Pelajaran agama dan Pancasila harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kurikulum pendidik. Hal tersebut perlu dilakukan agar revolusi dan mental terintegrasi agar tidak salah paham dalam praktiknya.

Radikalisasi Pancasila

Pemerintah harus melakukan radikalisasi Pancasila dan revolusi mental untuk menangkis masuk dan berkembangnya radikalisme di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan ISIS, yang belakangan diketahui terindikasi dengan jaringan terorisme. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila di era sekarang hanya sebatas hafalan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, implementasi tidak



sampai tujuan, harus melakukan radikalisasi Pancasila dan revolusi mental untuk menangkis radikalisme. Akibat nilai-nilai Pancasila yang tidak membumi, gerakan radikalisme juga subur seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran menjadi pintu masuk gerakan ISIS ke Indonesia. Karena saat ini, ada indikasi aktivis ISIS juga terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia. Kalau sampai paham ISIS dan terorisme saling berkaitan, maka ibarat api dan bensin, akan menyebar ke mana-mana.

Tidak hanya itu, gerakan ISIS juga berniat meruntuhkan NKRI. Untuk itulah, dibutuhkan peran Pancasila dan revolusi mental, tokoh agama, guru/pendidik, elit politik, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus sepakat jika pemberitaan dan informasi anti-ISIS harus terus digelorkan untuk mematahkan upaya ISIS mengajak pemuda Indonesia menjadi bagian darinya. Semoga cara tersebut dinilai efektif untuk menutup celah-celah masuknya radikalisme yaitu dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dan menjawab problematika sosial. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila akan sangat efektif dalam menangkis gerakan ISIS dan nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke kurikulum sekolah. Semoga cara-cara tersebut akan efektif sebagai metode jangka panjang untuk menangkis radikalisme. Sementara untuk jangka pendek, dapat menggunakan pendekatan hukum.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan sebuah laporan yang cukup mencengangkan. Dalam laporan itu disebutkan telah terjadi peningkatan paham radikalisme di lima kampus besar di Indonesia, yakni UGM, UI, IPB, Undip, dan UNAIR. Studi yang lebih baru pada tahun 2013 yang dilakukan Maarif Institute, yang rupanya mengonfirmasi hasil penelitian LIPI, menunjukkan bahwa ekspansi gerakan Negara Islam Indonesia (NII) –suatu gerakan radikal atas nama Islam yang menolak NKRI– terjadi akibat meluasnya paham radikalisme di kampus.



Hasil penyelidikan terhadap aksi teror di Jakarta pada awal 2016 lalu semakin menegaskan betapa kampus menjadi “ladang subur” bagi merebaknya pemahaman radikal yang kemudian menghasilkan bibit teroris. Otak aksi tersebut, Bahrudin Naim, adalah seorang pemuda yang mulai melibatkan diri dalam gerakan radikal sejak ia kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Pemahaman radikal yang telah tertanam kuat dalam dirinya membuatnya melakukan tindakan lebih berani dengan bergabung pada organisasi terorisme internasional. Lagi-lagi lingkungan kampus terindikasi menjadi tempat strategis bagi kelompok-kelompok radikal untuk mengekspansi ide dan memobilisasi calon teroris baru.

Berawal dari Radikalisme

Pada dasarnya sebuah tindakan yang secara nyata dilakukan oleh manusia adalah hasil refleksinya atas ideologi yang terdapat dalam dirinya. Ideologi, dengan demikian memainkan peranan penting sebagai akar sekaligus pengendali tindakan manusia, terlepas tindakan itu bernilai positif atau tidak. Proposisi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa tindakan atau aksi teror dapat terjadi. Atau, dalam skala yang lebih mikro, mengapa seseorang atau golongan tertentu melakukan aksi teror yang notabene berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan?

Dalam sebuah paparannya, Fanani (2013) menyatakan radikalisme adalah satu tahapan sebelum terorisme. Sebagaimana Rizal Sukma (2004) juga menyebut *radicalism is only one step short terrorism*. Sekalipun keduanya tampak sama, namun keduanya memiliki definisi dan kedudukan berbeda.

Maarif (2002) menjelaskan bahwa radikalisme lebih menunjukkan pada cara pengungkapan keberagaman seseorang atau kelompok yang didominasi oleh cara pandang sempit serta menempatkan dirinya dalam posisi lebih benar dari kelompok lain. Sedangkan terorisme adalah tindakan kriminal yang didasarkan atas pemahaman radikal.



Pemahaman radikal tidak selalu menghasilkan aksi terorisme, tetapi aksi terorisme selalu berakar dari pemahaman atau ideologi radikal.

Untuk menghancurkan benih-benih aksi terorisme, maka yang harus dilakukan mula-mula adalah membendung paham radikalisme. Terorisme akan tetap tumbuh subur manakala radikalisme tidak dibendung dan terus melebarkan sayap ke banyak orang untuk memobilisasi calon-calon teroris baru. Ketika paham radikalisme menyusut, maka besar kemungkinan aksiaksi teror tidak akan ada lagi, karena akar pemahamannya telah menjauh – jika tidak disebut sirna. Dari sinilah tugas pemberantasan terorisme itu harus dimulai.

Mencegah Kampus dari Radikalisme

Kampus menjadi lingkungan yang menjanjikan bagi pengusung paham radikal. Mereka membidik para mahasiswa yang secara psikologis masih dalam proses pencarian jati diri. Dalam banyak kasus, pegiat paham radikal membidik mahasiswa yang “polos”, artinya yang tidak memiliki latar belakang keagamaan kuat. Kepolosan mahasiswa ini dimanfaatkan oleh pengusung paham radikal dengan memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, dan jauh dari kontekstualisasi. Pada proses inilah radikalisme ditanamkan dan disebarluaskan melalui sistem kaderisasi yang ketat dan cenderung tertutup.

Dari gambaran proses kaderisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan yang membidik mahasiswa “polos” sebagai generasi penerusnya dan dilakukan tertutup, maka kita dapat mengambil kesimpulan.

Pertama, mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat justru merekalah yang memiliki semangat belajar keagamaan yang cukup tinggi. Ironisnya, semangat tersebut justru ditangkap oleh kelompok radikal, sehingga mahasiswa mudah terdoktrinasi dan terjebak dalam ajaran radikal. Kedua, pola tertutup dalam kaderisasi paham





radikal menjadi titik penting proses doktrinasi paham radikal itu sendiri, dimana semakin eksklusif suatu perkaderan maka radikalisasi semakin tidak terbendung.

Karenanya, upaya yang efektif untuk mencegah kampus dari radikalisasi adalah dengan melakukan strategi yang berlawanan dari dua kesimpulan penting di atas. Pertama, kampus harus memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada mahasiswa, terutama untuk menampung mereka yang sesungguhnya memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, sekalipun tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kental. Sehingga mereka tidak belajar agama kepada kelompok radikal dan eksklusif yang berbahaya.

Kedua, kampus secara berkala harus mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme. Selain mampu membendung radikalisasi dan mencegah bibit teroris, kedua upaya itu bisa menjadi strategi jitu untuk membangun moralitas mahasiswa yang seimbang dengan keunggulannya secara akademik.☺







6

Indonesia Darurat Intoleransi

Antara Kepentingan Golongan Dan Keutuhan Bhinneka Tunggal Ika

KHAIRUN NISA

Indonesia merupakan bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, prespektif, orientasi hidup, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda (Sumbulah dan Nurjanah, 2013). Dilihat dari berbagai aspek tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia (Nur Achmad, 2001). Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” lahir sebagai suatu tekad untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam suatu masyarakat yang majemuk (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2005).

Semboyan ini lahir sebagai refleksi atas kemajemukan bangsa, sekaligus sebagai jawaban agar kemajemukan tersebut tidak memicu disintegrasi, tapi justru menjadi tiang-tiang penyangga untuk hadirnya sebuah bangsa yang kukuh. Keberagaman dipahami sebagai aset berharga dalam nafas Bhinneka Tunggal Ika (Weinata Sairin, 2006). Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai





kemajemukan di tengah masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Keberagaman yang menjadi watak Indonesia lantas tidak lepas dari adanya pertikaian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak aksi intoleran dan diskriminasi yang terjadi disebabkan adanya perbedaan pemahaman -baik ideologi ataupun gaya hidup-, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tinta sejarah mencatat betapa sadisnya kerusuhan bernuansa etnis yang terjadi di Sampit antara etnis Madura dan Dayak. Di samping itu, salah satu konflik yang tidak kalah menegangkan adalah peristiwa karnaval berdarah di Jawa Timur antara kelompok Sunni dan Syi'ah. Sebelum meletusnya peristiwa tersebut, masih segar ingatan publik atas kasus serupa yang terjadi di desa Karanggayam dan desa Bluuran Kabupaten Sampang. Konflik yang berujung pada aksi kekerasan ini telah menyebabkan diungsikannya ratusan warga yang diduga penganut Syi'ah ke Sidoarjo dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat (Firdaus M. Yunus, 2016).

Sepak terjang kasus intoleransi terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya terkait isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Komnas HAM melaporkan bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 97 kasus intoleransi beragama. Angka ini meningkat dibanding tahun 2014 -76 kasus dan 2015 -87 kasus-. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia boleh jujur, tentu ini bukan angka yang sedikit. Kasus tersebut terjadi dalam bentuk pelanggaran hingga perusakan rumah ibadah.

Ketua Komnas HAM, Imadudin Rahmat menyatakan bahwa jumlah temuan masjid dan mushala yang menjadi korban pelanggaran KBB sebanyak 24 pada tahun 2016. Permasalahan ini dikarenakan belum terselesaikannya permasalahan pendirian beberapa masjid dan mushala di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Selain itu, terdapat juga pelanggaran pembangunan masjid milik warga Muhammadiyah di Aceh dan beberapa pelanggaran masjid Ahmadiyah di Jawa Barat. Kasus KBB tersebut tidak terbatas pada masjid dan



mushala, tempat ibadah umat Kristen juga menjadi sorotan. Tercatat 17 pengaduan terkait pembatasan pendirian gereja yang mayoritas terjadi di Aceh, Jawa Barat dan Jakarta.

Kalau ditelisik lebih jauh, titik polemik disebabkan oleh persoalan mayoritas dan minoritas. Penolakan pembangunan gereja di Jawa misalnya, terjadi karena mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam. Begitu pula yang terjadi di Manado, terdapat penolakan pembangunan masjid di lingkungan yang mayoritas Kristen. Lebih jauh, di tahun 2017 masyarakat Indonesia dihebohkan oleh polemik patung raksasa Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur. Pro-kontra turut mewarnai polemik tersebut, ada kelompok yang dengan getolnya mendorong agar patung dimusnahkan. Namun, ada juga kelompok yang menyuarakan aksi toleran agar membiarkan patung tersebut tetap berdiri.

Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas kian terasa dengan adanya dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait ucapan yang dilontarkannya saat acara peresmian panen pertama budidaya kerapu di Kantor Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka pada tanggal 27 September 2016 silam. Kasus ini tidak reda sepanjang tahun 2017. Sejak saat itu, beragam tulisan hadir sebagai respon terhadap penafsiran Q.S. al-Maidah ayat 51 tersebut –di samping adanya aksi demo yang menuntut agar Ahok dipenjarakan atas dasar penistaan agama.

Media massa pun tidak ketinggalan, banyak orang yang kemudian memaknai al-Maidah 51 sebagai ayat yang mengajarkan tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim. Bahkan, belakangan viral berita tentang sebuah masjid di daerah Jakarta Selatan yang memasang spanduk yang bertuliskan “MASJID INI TIDAK MENSHOLATKAN PENDUKUNG & PEMBELA PENISTA AGAMA”, yang dimaksud di spanduk tersebut adalah para pendukung Ahok atau yang dikenal “Ahoker” di media sosial. Panjangnya perdebatan terkait kasus Ahok dan al-Maidah 51 tersebut membuat



Sahiron Syamsuddin, ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir seIndonesia (AIAT) turut angkat bicara sebagai saksi ahli di persidangan ke-16 Ahok.

Berbekal keilmuan yang mumpuni, Sahiron menjelaskan bahwa Q.S. alMaidah ayat 51 tidak ada hubungannya sama sekali dengan diskursus kepemimpinan non-Muslim. Namun, tentu pendapatnya ini tidak diamini oleh semua kelompok. Bahkan, sebelum kasus penolakan terhadap kepemimpinan Ahok, penolakan yang sama juga ditujukan kepada Lurah Lenteng Agung Jakarta Selatan, Susan Jasmine Zulkifli yang beragama Kristen. Kasus-kasus intoleran di atas banyak yang bermuara pada satu titik, yaitu kepentingan kelompok tertentu.

Polemik antara kaum mayoritas dan minoritas misalnya, biasanya berasal dari kaum mayoritas yang merasa lebih memiliki otoritas untuk mengatur daerahnya daripada kaum minoritas. Contoh konkritnya adalah kasus etnis Tionghoa dengan masyarakat Pandhalungan, Sitobondo. Peristiwa konflik yang pernah terjadi pada tahun 1996 banyak yang menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut adalah karena perbedaan agama yang kemudian terjadi kesalahpahaman antar keduanya.

Di samping itu terdapat indikasi adanya kecemburuan masyarakat lokal terhadap etnis Tionghoa yang bisa dikatakan ekonomi mereka di atas masyarakat lokal. Kita bisa melihat dari kasus ini bahwa kelompok yang merasa berkepentingan dapat memicu munculnya aksi intoleran. Masyarakat terkadang lupa bahwa keragaman yang ada di Indonesia tidak selalu murni dari bangsa itu sendiri, namun ada proses yang membuatnya lebih majemuk. Salah satunya adalah kedatangan imigran asing ke nusantara dan kemudian menetap.

Bahkan, kasus-kasus yang membawa ideologi agama sering digunakan untuk kepentingan politik seperti kasus Ahok di atas. Bagaimanapun saksi ahli memaparkan penafsiran Q.S. al-Maidah yang disinyalir tidak berhubungan dengan kepemimpinan non-Muslim, tidak semua masyarakat



menerima fakta ilmiah tersebut. Terlebih dengan bombardir yang diserukan oleh berbagai ormas yang menolak non-Muslim –terlebih orang yang dianggap antek-antek Cinasebagai pemimpin di negeri tercinta ini. Berbagai ujaran kebencian pun turut mewarnai penolakan pemimpin non-Muslim ini. Umat Muslim yang mengamini kepemimpinan Ahok lantas dianggap munafik, berkhianat bahkan label kafir dengan mudah dituduhkan kepada mereka.

Tidak sampai di sini, di tengah kericuhan persoalan ini muncul Anisier – istilah untuk pendukung Anies Baswedan yang turut memanaskan suasana. Mereka berasumsi bahwa Anies lebih pantas menduduki jabatan daripada Ahok. Berawal dari pandangan ideologi oleh orang-orang yang berkepentingan, hasil dari kasus ini adalah munculnya “Ahoker” dan “Anisier” yang saling memaki dan menghina satu sama lain.

Pernyataan penulis ini bisa dibuktikan dengan memperhatikan berbagai postingan yang ada di media sosial terkait Ahok ataupun Anies. Berkaca dari berbagai persoalan ini, masyarakat Indonesia seakan terpecah ke dalam beberapa kelompok. Jika masyarakat terus bersikap seperti ini, nampaknya keragaman yang menjadi identitas bangsa hanya sekedar nama saja. Keragaman dalam realitanya, namun perpecahan dalam masyarakatnya. Kenyataan bangsa yang majemuk dan adanya semboyan bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai salah satu pilar kebangsaan seharusnya mengikat masyarakat Indonesia dalam persatuan.

Perbedaan yang terjadi pasti tidak bisa dielakkan keberadaannya, namun harus ada kesadaran individual bahwa perbedaan yang muncul bukan untuk dipermasalahan apalagi diperselisihkan. Keragaman yang muncul merupakan salah satu simbol kekayaan bangsa yang semestinya dijadikan aset untuk mengembangkan potensi Indonesia ke arah yang lebih maju. Masyarakat harus ingat bahwa Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Bukan tanpa alasan para pendiri republik ini memilih bentuk kesatuan yang berdiri di atas keberagaman. *Founding fathers* menyadari konsekuensi logis dari adanya pluralitas di bumi pertiwi ini. Pluralitas ini bisa menyelamatkan Indonesia dari serangan rival-rivalnya, sehingga membawa Indonesia ke puncak kejayaan.

Sebaliknya, pluralitas bisa membawa kehancuran bangsa ketika masyarakat tidak menyadari arti pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan yang melanda. Generasi penerus bangsa harus menyadari hal ini. Sehingga apa yang mereka lakukan akan mampu menjaga kebhinnekaan yang ada demi terciptanya Indonesia yang sejahtera. Jika tidak demikian, kepentingan-kepentingan golongan akan terus memuncak yang berakibat pada munculnya berbagai kasus diskriminasi dan intoleran.

Kalau hal ini sudah terjadi, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika akan terancam. Pertanyaan mendasar yang harusnya disadari oleh masyarakat adalah “Masihkah memelihara keegoisan atau kepentingan segelintir orang dan mengancam keutuhan semboyan bangsa?”. Mari berpikir bersama untuk keutuhan bangsa dan negara ini. 🙏

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur (ed.). 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Gea, Antonius Atosokhi dkk. 2005. *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lestari, Gina. “*Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*” dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Th. 28. No. 1. Februari 2015.
- Rahman, Nuril Endi. “*Konflik dan Kecemburuan Sosial antara*

Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan di Daerah Besuki-Situbondo". Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization".

Sairin, Weinata. 2006. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: Gunung Mulia. Sumbulah, Umi dan Nurjanah. 2013.

Pluralisme Agama: *Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya". *Substantia*. Vol. 16. No. 2. Oktober 2014.

Website:

"Masjid Korban Terbanyak Pelanggaran Intoleransi Beragama di Indonesia" dalam <http://nasional.republika.co.id>, diakses tanggal 1 Januari 2018 pukul 11.00 WIB.

"Persaudaraan Lintas Agama Kritik Intoleransi Soal Patung di Tuban" dalam <https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 1 Januari 2018 pukul 11.45 WIB.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam www.komnasham.go.id





7

Peran Masyarakat Menyikapi Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Kekerasan Ekstrimis di Indonesia

CYNTHIA NOFENTARY PURBA

Gerakan Intoleransi, Radikalisme Terorisme dan Kekerasan Ekstrimis, adalah gerakan-gerakan yang dapat memecah belah kesatuan di Negara kita. Sangatlah besar harapan masyarakat dalam mewujudkan toleransi, baik toleransi beragama, keberagaman, saling menghormati dan menghargai. Namun, pada faktanya, tidak sedikit masyarakat juga yang malah mengupayakan sebaliknya. Intoleransi adalah sikap yang mencerminkan saling membenci, tidak menghargai, tidak menghormati, dan mementingkan kepentingan golongan. Ikut menghargai perbedaan serta berpartisipasi menjadi bagian dari sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, semestinya menjadi suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Netralisasi ideologi pada hakikatnya tetap dibutuhkan sebagai upaya memperkuat benteng pertahanan ideologis dari warga negara, terutama sebagai penetrasi dan pengaruh ideologi radikal yang dibawa dan dipropagandakan oleh kelompok radikal.

Aksi Gerakan seperti Intoleransi, Radikalisme, Terorisme,





dan Kekerasan Ekstrimis bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat. Dari mulai melihat terorisme sampai dengan isis, yang membuat masyarakat khawatir dan siaga. Di dunia ini terorisme bukan lah hal baru, namun selalu menjadi aktual. Dimulai dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York 11 September 2001 lalu hingga ledakan bom bunuh diri di jalan Tamrin, Jakarta Indonesia kemarin. Serentetan ini menjadikan tindak aksi terorisme sebagai *extraordinary crime* yang begitu meresahkan. Banyak pihak berspekulasi dan menimbulkan kecurigaan antar masing – masing dan berpotensi memecah belah sebuah negara dan mengancam kesejahteraan serta keamanan yang memaksa pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasinya.

Bukan sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangnya. Dari genjatan senjata secara langsung hingga penerapan – penerapan program anti radikal diseluruh tatanan masyarakat. Pengetatan penjagaan asing pun sedikit demi sedikit menuju level yang lebih tinggi. Namun itu semua tidak menghilangkan sampai keakarnya. Seperti halnya udara, gerakan-gerakan seperti itu tetap menyusup melalui celah – celah yang berusaha di tambal. Mengkambing hitamkan salah satu pihak sehingga keresahan warga tetap tak terelakkan.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam suatu aliran politik. Indonesia di bawah ancaman ideologi gerakan-gerakan radikalisme sangatlah mengkhawatirkan. Gerakan radikal transnasional, termasuk perkembangan ISIS sejak 2013 adalah salah satu ancaman bagi keamanan nasional yang perlu diantisipasi, dihadapi, dan ditanggulangi secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan di Indonesia. Bahaya ancaman yang disebabkan oleh berkembangnya ideologi dan gerakan-gerakan radikal transnasional tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah-wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara dan Australia karena kemampuan gerakan tersebut melibatkan warga negara dari



lintas-negara dan lintas benua.

Sampai saat ini, dinamika kehidupan bermasyarakat Indonesia masih belum menunjukkan suatu kondisi yang stabil pasca era reformasi. Salah satu penyebabnya bersumber dari faktor internal dan eksternal bangsa Indonesia itu sendiri yang menyebabkan mengapa tahapan transisi itu begitu lama.

Faktor internal seperti kondisi heterogenitas etnis, agama, kultur, dan kesenjangan ekonomi serta sosial semakin memperbesar potensi masuknya ideologi-ideologi radikal. Ancaman yang tidak terlihat ini merupakan bahaya besar bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, belum lagi tumbuhnya ideologi-ideologi baru yang lebih mudah dibandingkan era Orba. Saat ini, kebebasan masyarakat dalam mengemukakan suaranya sudah harus dinomorsatukan tanpa melihat potensi ancaman yang mengintai. Kebebasan berpolitik dan berdemokrasi tampaknya harus dibayar mahal Indonesia setelah melihat rentetan kasus terorisme yang terjadi.

Meningkatnya jumlah kasus terorisme sejak awal era reformasi memperlihatkan kurang tanggapnya aparat keamanan terhadap ancaman-ancaman yang tidak terlihat. Kondisi internal seperti ini memperlihatkan bahwa ancaman tidak datang dari luar saja dalam bentuk agresi militer dari negara lain, namun ancaman datang dari dalam negeri berupa pergerakan radikal yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri.

Transisi dari era Orba ke reformasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perubahan kondisi internal bangsa Indonesia. Warga yang dahulunya sangat mengedepankan makna kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa, saat ini justru menjunjung tinggi arti demokrasi dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Pancasila dianggap memiliki pengaruh Orba sehingga ditinggalkan warga Indonesia yang sekarang lebih berpegang pada maksud dan tujuan hidup berdemokrasi. Kehidupan berdemokrasi Indonesia saat ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi ideologi lama maupun baru yang muncul dari luar dan dalam negeri. Oleh karena itu tidak heran



apabila pemikiran radikal bermunculan dan berkembang di berbagai wilayah NKRI.

Dari sisi eksternal, faktor penyebab utamanya adalah keamanan nasional yang masih menghadapi ancaman karena muncul kembali dan maraknya aksi kelompok-kelompok anti NKRI. Keterbukaan kehidupan berpolitik dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam membawa ideologi barunya yang justru membahayakan integrasi bangsa.

Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar, namun tak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara para pelaku domestik (*indigenous*) dengan mereka yang memiliki jejaring transnasional (*trans-national networks*).

Sebagai negara yang menjadi target aksi terorisme internasional dan gerakan *Khilafah Islamiah*, Indonesia telah dan sedang menyelenggarakan berbagai strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Pendekatan kekuatan lunak melalui program deradikalisasi penting untuk dilakukan. Strategi ini ditunjukkan untuk menetralkan pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan Islam, yang menjadi landasan aksi terorisme. Melalui pendekatan netralisasi ideologi radikal, upaya penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya yang terdalam yaitu ideologi. Penanggulangan terorisme merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa dan negara Indonesia karena terorisme masih merupakan ancaman yang nyata dan sangat berbahaya bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI.

Terorisme adalah sebagai aksi-aksi perusakan publik, yang dilakukan tanpa suatu alasan militer yang jelas, serta





penebaran rasa ketakutan secara luas di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jika di pahami secara jernih kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis dan masih banyak yang lain.

Namun demikian, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa aksi-aksi yang melatar belakangi aksi terorisme di Indonesia seringkali dipertautkan dengan agama atau pendirian sebuah negara baru dengan paham yang baru. Rasa tidak puas dan pemahaman agama yang salah membuat sebagian orang bertindak radikal dan mereka menganggap itu tidaklah salah. Dalam sejumlah kasus, agama yang diyakini sebagai petunjuk dan penuntun digunakan untuk mencari – cari alasan untuk nantinya digunakan menjadi tindak radikal yang amat sanagt melenceng dari apa yang diajarkan agamanya. Contoh agama tidak memperbolehkan menyakiti tetapi tindak teroris yang radikal justru menimbulkan kesakitan.

Pelaksanaan penanggulangan terorisme yang sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku masih mengalami berbagai kendala. Namun demikian, tuntutan publik terhadap merekapun cenderung semakin besar karena semakin meningkatnya rasa tidak aman. Sementara itu, kondisi politik yang ada tidak memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan atau kebijakan yang dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan perlindungan HAM.

Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan aksi-aksi teror sehingga sudah selayaknya menjadi bagian utama dalam upaya penanggulangan terorisme. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi negara dan harus memprioritaskan keamanan rakyat. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme harus berorientasi kepada kepentingan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebab, jika rakyat merasakan adanya perlindungan dari Pemerintah terhadap ancaman terorisme, Pemerintah akan semakin memilki legitimasi dan dukungan.

Paham Radikalisme, terorisme dan kekerasan ekstrim





merupakan salah satu ancaman nyata terhadap kehidupan dunia global. Tindakan ekstrim biasanya dilandasi oleh sikap radikal yang disebabkan oleh kefanatikan menganut suatu paham. Orang atau golongan ini biasanya mengakui bahwa paham atau aliran yang dianutnya ini, adalah terbenar, sehingga tidak mau menerima pendapat atau pemikiran orang atau pihak lain. Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahwa paham atau aliran lain yang tidak sesuai dengan pemahannya adalah salah, dan karena itu harus dihilangkan.

Dalam hal ini, pelibatan yang nyata terhadap partisipasi rakyat melalui organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan gerakan-gerakan tersebut adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, pelibatan tersebut masih terbatas karena belum adanya aturan yang baku yang menjadi payung hukum bagi program deradikalisasi. Masyarakat memang telah dilibatkan dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, tapi pelibatan yang lebih dari itu masih belum tampak nyata.

Strategi merupakan cara untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yang di dalamnya mencakup sasaran (*ends*), sarana (*ends*, dan metode (*methods*). Selanjutnya, kebijakan yang telah ditetapkan dan strategi yang dibuat akan dijabarkan secara rinci di dalam berbagai upaya yang berupa program atau kegiatan. Pada sasaran (*ends*), proses jalan panjang dalam melawan pemikiran-pemikiran radikal yang ruang gerakannya semakin bebas di era reformasi ini. Pada sarana (*means*), adalah bagaimana sarana ini tentunya wajib didukung juga oleh organisasi masyarakat, berbagai tokoh agama, adat, dan budaya, serta kaum cendekian lainnya, sebagai perwakilan kehidupan berdemokrasi yang utuh di Indonesia. Dan pada metode (*methods*), Proses awal yang terkait dengan kegiatan identifikasi sampai merehabilitasi, mereduksi, serta sampai dengan tahap menyalakan program deradikalisasi harus benar-benar terlaksana.☺





8

Melacak Dua Wajah Agama Sebagai Upaya Merajut Keberagaman

ABD. GAFFAR

Munculnya gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme dan kekerasan ekstrimisme di Indonesia adalah implikasi dari kegagalan menginterpretasi dan merevolusi teologi Islam klasik. Kedengarannya memang sangat ngeri, sebuah gerakan yang nampak kepermukaan atas nama agama mereka seenaknya melakukan tindakan yang sangat jauh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Aggapan terhadap kegagalan umat Islam dalam merevolusi perspektif mereka terhadap teologi Islam Klasik, sehingga memicu muncul gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme dan kekerasan ekstrimisme di Indonesia bukan untuk menyudutkan Islam sebagai agama. Namun, Islam di sini lebih ditekankan kepada penganutnya.

Sebagaimana yang kita saksikan baik di media sosial, media cetak maupun media elektronik, bahwa pelaku intoleransi, radikalisme, terorisme dan kekerasan ekstrimisme kebanyakan adalah penganut agama Islam. Fakta ini sudah menjadi rahasia umum masyarakat Indonesia. Sebagaimana kata Haidar Baghir “berbeda antara Islam Tuhan dan Islam Kita”. Pandangan ini



cukup sederhana, paling tidak mendeskripsikan kepada kita bahwa Islam yang kita pahami semaksimal mungkin mendekati Islam yang Tuhan maksud. Pandangan ini juga mengafirmasi bahwa tindak intoleransi, radikalisme, terorisme dan kekerasan ekstrimisme adalah implikasi dari cara pandang kita.

Kita tahu bahwa populasi penganut Islam di Indonesia jauh dominan dibanding dengan penganut agama dan penganut kepercayaan yang lain. Tentu fakta tersebut juga dapat sebagai acuan bahwa dimana-mana mayoritas selalu determinan terhadap minoritas. Apalagi melihat *setting* sosial kita yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Jika berkaca pada *setting* sosial India pra politik fragmentasi yang membagi India menjadi komunitas Muslim dan komunitas Hindu, maka *setting* sosial kita kurang lebih sama, perbedaannya hanya pada komunitas Muslim Indonesia lebih dominan.

Setting sosial seperti ini dapat memunculkan sikap saling curiga dan kesalah-pahaman antara beberapa penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebagian penganut yang minoritas dapat beranggapan bahwa dengan dominasi umat Islam, dapat mengeksploitasi dan merendahkan mereka. Sebaliknya, penganut agama Islam beranggapan bahwa pihak-pihak dari penganut agama lain tengah mencari momentum dan cara untuk kembali meneguhkan eksistensi mereka di Negeri ini. Peristiwa ini bisa kita amati pada akhir tahun 2016 sampai pengadilan memutuskan bersalah pada kasus penistaan agama Islam oleh gubernur Jakarta yang kita kenal dengan nama Ahok. Peristiwa ini memicu demonstrasi dan aksi yang berjilid-jilid sehingga melahirkan alumni Monas 212. Ini adalah bukti kegagalan umat Islam merevolusi teologi Islam klasik dan bukti bahwa agama dapat dijadikan alat demi kepentingan politik.

Sebagian penganut agama Islam di Indonesia menganggap teologi hanya diaplikasikan pada ranah metafisik. Sehingga sama sekali tidak menyentuh sisi substansi keadilan, kedamaian, kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Bahkan parahnya lagi justru menjadikan teologi sebagai jalan bagi halalnya

radikalisme dan penindasan atas nama agama. Karena Teologi hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, Sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eskatologis. Teologi semacam ini ketika tidak direvolusi menjadi teologi yang praksis maka akan melahirkan pesimisme, frustrasi dan lemah keyakinan sehingga apa saja yang mengganggu keyakinannya, maka jalan pintas jihad ekstrimis sebagai solusinya.

Maka dari itu, teologi Islam klasik yang dipahami selama ini harus ditransformasikan menjadi teologi yang membebaskan. Teologi yang mampu mengelaborasi wilayah keyakinan dan praksis, iman dan amal dan refleksi dan aksi. Dengan cara seperti ini, sedikit demi sedikit kita akan mewujudkan Persaudaraan yang universal (*universal brotherhood*), Kesetaraan (*equality*) Keadilan sosial (*social justice*).

Berdasarkan penjelasan ini kita dapat melihat dua wajah agama yang diinterpretasikan ke dalam dua pemahaman teologis, yaitu teologi Islam klasik dan teologi pembebasan. Teologi Islam klasik melahirkan cara beragama yang stagnan, mandek, pesimis, hanya tempat mengeluh seperti kaum yang tertindas, candu sebagaimana kata Marx, sedangkan teologi pembebasan mampu menjadi senjata yang paling ampuh untuk merevolusi dan melawan kedzaliman. Merevolusi perspektif teologi memberi ruang keyakinan yang lebih maju dan inklusif mengenai pluralitas dan diversitas agama sebagai keniscayaan.

Pada dasarnya teologi seperti ini sudah diperkenalkan oleh nabi Muhammad Saw. dengan semangat profetik dan liberatifnya. Berbeda dengan Khilafah Islamiyah yang digaungkan dengan HTI dan gerakan Islam radikal lainnya, Nabi tak berkeinginan membentuk masyarakat dengan penduduk homogen umat Islam saja, tetapi cita-cita beliau yang sebenarnya adalah menghancurkan kezaliman, kesenjangan dan diskriminasi yang ada pada zaman itu. Pada saat itu Nabi meletakkan asas perdamaian suku-suku yang sejak lama



bersebrangan untuk hidup berdampingan dan dalam sistem politik, Nabi meletakkan proses-proses demokrasi dengan mengedepankan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Melihat realitas sosial kita saat ini memang layak bagi umat Islam untuk kembali melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang pro dengan paham radikalisme dan tindakan kekerasan atas nama agama yang telah diselewengkan oleh segelintir orang demi melanggengkan tindakan radikalisme dan semacamnya. Merelevansikan ayat-ayat yang terkesan menindas dan merusak keragaman dengan konteks masyarakat kita. Menjadikan Al-Qur'an lebih fleksibel sebagai landasan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Pembacaan ulang ini harus didasari pada nilai universal yakni keadilan (*"adl*), kebenaran (*ihسان*), nalar (*"aql*), dan kearifan (hikmah).

Dengan konstruksi pemahaman seperti ini, dapat kita aplikasikan pada aspek keberagaman kita. Misalnya tauhid yang kita pahami selama ini hanya sebatas pengesaan terhadap Allah, maka dengan konstruksi teologi pembebasan juga mengimplikasikan tauhid sebagai kesatuan manusia (unity of mankind). Tauhid sebagai kesatuan manusia mampu melintasi batas-batas keyakinan, etnis, suku, bangsa dan warna kulit. Tauhid sebagai kesatuan manusia adalah tauhid yang aktif, tidak akan membenarkan radikalisasi, diskriminasi, baik dalam bentuk ras, agama, kasta ataupun kelas sosial. Sebab pembagian kelas, secara tidak langsung akan menegaskan dominasi mayoritas terhadap yang minoritas.

Begitupun dengan kata Iman harus ditafsirkan dengan konstruksi teologi pembebasan. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Allah tapi juga harus dapat dipercaya sebagai subjek yang dapat menciptakan perdamaian dan ketertiban. Karena Islam sama sekali menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam dan konsepnya jelas "bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Konsep ini menegaskan bahwa kita mengakui keberadaan agama dan keyakinan lain dan meyakini bahwa keberagaman adalah suatu sunnatullah





yang telah terjadi dan niscaya dalam masyarakat kita.

Dalam perspektif filsafat wujud dikatakan bahwa, kita adalah sederajat, seirama, setingkat dan satu dalam eksistensi (wujud), namun kita berbeda dalam esensi (*mahiyah*) dan individu. Mungkin saja sebagian kita menolak pluralisme namun kita tak akan menolak pluralitas kita.

Dengan teologi pembebasan sebagai konstruksi cara pandang dalam melihat realitas kita, kiranya mampu menyatukan dan merajuk perbedaan-perbedaan dan keragaman kita. Bagaikan jarum dan benang dalam konteks menjahit, keduanya memiliki peran yang seimbang dan tidak memiliki kelebihan satupun di antara keduanya dalam merajut kain. Begitupula cita-cita kita sebagai bagian dari keberagaman di Indonesia. Saling memahami satu sama lain dan saling melengkapi.☺







Gerakan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Kekerasan Ekstrimis Ancaman Nyata Bangsa Indonesia

AHMAD FATHORROZI

Secara historis masuknya agama-agama ke Indonesia sangat damai, toleransi, rukun, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Meski mereka berbeda keyakinan, tetapi kerukunan warga Negara Indonesia sangat tepelihara, dapat di lihat pada awal abad ke-20 sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia memiliki keharmonisan antar sesama warga, karena mereka memiliki satu tujuan yakni kemerdekaan Indonesia. Namun sangat disayangkan dengan seiring berkembangnya zaman dan tuntutan sosial di tengah masyarakat Indonesia, maka bermunculanlah aliran-aliran, sekte-sekte yang mengatas namakan Islam berkembang pesat dengan latar belakang kebudayaan yang eksis di kalangan penganutnya.

Jika dilacak sejarah awal munculnya gerakan-gerakan yang mengatas namakan Islam di lihat pada awal masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan yang di maksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950-an (Affandy: 2016). Adapun tujuan gerakan-gerakan tersebut





pada mulanya ingin membangun sebuah Negara yang berbasis Islam, sehingga pada masa itu banyak golongan seperti Nasionalisme, dan Sosialisme yang merasa terancam dengan gerakan-gerakan intoleransi yang dilakukan oleh golongan DI/TII. Hingga akhirnya Presiden Indonesia pertama yakni Ir. Soekarno membuat konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis), melalui pemikirannya itu Soekarno menjelaskan bahwa ketiga golongan besar tersebut memiliki tujuan yang sama yakni melawan penindasan, meski berbeda ideologi tetapi kerukunan dan gotong royonglah yang dapat menciptakan tatanan masyarakat yang damai.

Sikap intoleransi adalah sikap yang tidak mau menerima sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dan selalu membenarkan golongannya sendiri. Melalui sikap itulah gerakan radikalisme, terorisme, bahkan perbuatan ekstrimisme muncul di masyarakat. Meskipun hal itu tidak lepas dari beberapa faktor seperti ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, hasil riset Djelantik (2006) di Jawa Barat menyebutkan bahwa salah satu faktor pendukung radikalisme dan terorisme adalah karena ketidakpuasan publik (*dissatisfaction*) terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil. Dalam kaitan ini, mereka yang mempunyai kecukupan materi akan menerima sebuah sistem dimana mereka tinggal dan beraktifitas secara damai, sebaliknya mereka yang secara sosio-ekonomi mengalami kesengsaraan dan kekurangan mempunyai kecenderungan untuk berbuat radikal dan besar kemungkinan menggunakan cara kekerasan (ekstrimisme) termasuk gerakan terorisme. Di sisi lain, munculnya radikalisme di Indonesia menjadi nyata.

Seiring perubahan tatanan sosial dan politik, terlebih setelah hadirnya orang-orang Arab muda yang membawa ideologi baru ke tanah air, turut mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi yang mereka bawa lebih keras dan tidak mengenal toleransi. Dalam konteks politik, radikalisme dan terorisme bisa disebabkan oleh perlakuan diskriminatif penguasa terhadap kelompok tertentu. Diskriminatif tersebut bisa berupa tidak diakomodasinya aspirasi atau keinginan



kelompok tersebut sehingga mengakibatkan tindakan frontal dan anarkis. Disamping historitas radikalisme di Indonesia, dalam komunitas muslim aksi terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan istilah Islam fundamentalis. Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Barat di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya di dunia global. Ideologi gerakan Islam fundamentalis adalah pengakuan bahwa Islam yang autentik hanya pernah muncul pada periode Nabi Muhammad di Madinah dan pada masa khalifah pertama dari Khulafa' al-Rasyidin (622-661). Mereka menuntut umat Islam untuk memunculkan kembali prinsip-prinsip itu dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dari kedua kelompok diatas adalah untuk mewujudkan konsep ummah di bawah seorang khalifah, dan penerapan syari'at Islam yang semua itu harus diwujudkan dalam bentuk khilafah.

Gerakan kaum intoleran sudah menguasai pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Kelompok intoleran menyebarkan kebencian dengan berkedok agama secara intensif dan berlanjut, saat ini gerakan intoleran sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak rasa benci itu membuat mereka tidak setuju anggota kelompok itu (non muslim) menjadi pejabat di Indonesia, bahkan ada yang tidak setuju kelompok-kelompok tersebut menjadi tetangga mereka. Semakin tinggi menerapkan syariah, semakin tinggi keinginan untuk melakukan gerakan radikal. Menurut Murodi wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, bahwa tujuannya adalah untuk menggulingkan kekuasaan politik, makanya gerakan radikal itu muncul di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia. Mereka ingin mengganti ideologi Negara dengan ideologi Islam. Untuk tetap menjaga keutuhan NKRI maka menurut penulis, seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk memahami dan menerapkan falsafah Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, dan damai. Mestinya yang harus diajarkan ke masyarakat adalah bahwa negara ini didirikan oleh para

pahlawan yang berbeda agama, suku, dan latar belakangnya, sehingga menrumuskan Ideologi Pancasila semata-mata untuk menjadi wadah bagi warga Indonesia agar tetap rukun, damai dan tolong menolong meski berbeda suku, budaya, dan agama.

Selanjutnya, cara yang tepat untuk menangani gerakan intoleran, radikalisme, terorisme, dan kekerasan ekstrimis di Indonesia dapat dilakukan melalui:

1. Peran Pemerintah Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah nampak jelas karena kita punya UU anti terorisme. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011), Pemerintah melakukan program deradikalisasi. Deradikalisasi adalah kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Hal-hal yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi:
 - (a) Melakukan *counter terrorism*,
 - (b) Mencegah proses radikalisme,
 - (c) Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama,
 - (d) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi,
 - (e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham *terror* (terorisme), dan
 - (f) Memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Berdasarkan definisi di atas dan juga cakupan kerjanya maka deradikalisasi diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis.
2. Institusi keagamaan dan pendidikan mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstrimisme keagamaan, Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan



melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatan lil alamin* dan toleran. Meskipun lembaga seperti pesantren itu adalah lembaga pengajaran agama, namun sepanjang sejarah kita, pesantren-pesantren di Indonesia pada ghalibnya adalah lembaga yang sangat toleran dan terbuka.

3. Meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya paham radikalisme dan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat dan bernegara yang penuh keberagaman, sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama. 🤝







10

Rethinking Jihad

ASRY

“Syariat jihad dalam artian perang merupakan perintah Allah, seseorang yang berjihad akan mati syahid”

Demikian kata para perekrut terorisme sebagaimana yang diakui oleh Ali Imron, terpidana kasus Bom Bali. Ayat-ayat yang mereka belokkan penafsirannya sebagai alat dalam memuluskan doktrin radikal mereka adalah ayat-ayat yang secara tekstual memang dapat dipahami sebagai dalil kuat untuk melakukan gerakan radikal. Penggalan ayat Al-Qur'an surah Muhammad/47 ayat 4 adalah salah satu contohnya. Penggalan ayat yang biasa ditampilkan adalah “Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka...”. Dari penggalan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah swt. memerintahkan manusia untuk memancung batang leher orang-orang kafir di manapun mereka dan kapan saja orang-orang muslim mendapatkan mereka. Ngeri bukan?

Padahal, ayat tersebut secara utuh berbunyi “Maka apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka, sampai batas apabila kamu telah melumpuhkan gerak mereka maka kuatkanlah ikatan (tawanlah) mereka, lalu (kamu boleh) membebaskan





mereka sesudah(nya) atau (boleh juga melepaskannya) dengan menerima tebusan sampai perang meletakkan beban-bebannya. Demikian-lah, seandainya Allah menghendaki niscaya Dia akan membinasakan mereka tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”.

Menampilkan secara utuh –dari awal hingga akhir- ayat ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa konteks ayat ini adalah kondisi peperangan, perhatikan kalimat “... sampai perang meletakkan beban-bebannya”. Berarti, perintah memancung orang-orang kafir pada kalimat sebelumnya adalah konteks perang. Jika dalam konteks perang, maka perintah ayat ini tidak bermasalah sama sekali.

Dari tradisi dulu hingga kini, kalau di medan perang, menghabsi musuh yang ada di hadapan adalah misi utamanya. Belum lagi jika dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai 3 berbunyi, “Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah membatalkan amal-amal mereka, sedang orang-orang yang beriman dan mengerjakan (amal-amal) yang saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad—dan itulah yang haq dari Tuhan mereka—Allah menghapus dosa-dosa mereka serta memperbaiki pikiran mereka. Itu adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perumpamaan-perumpamaan bagi mereka.”

Jika ayat 4 tadi dihubungkan dengan ayat 1 hingga 3 ini, maka kesan yang muncul bahwa Islam memerintahkan secara mutlak untuk memusuhi semua orang kafir adalah tidak benar. Perhatikan bahwa ayat 1 sampai 3 ini berbicara hanya tentang orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan Allah, tidak termasuk mereka yang hidup dalam damai dan harmonis dengan umat Islam.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa yang dimaksud



ayat ini bukan semua orang kafir, tetapi orang-orang tertentu yang mencabut salah satu hak asasi manusia, yakni kebebasan beragama. Kalau demikian, maka yang lebih berhak dipancung di negeri ini adalah justru mereka oknum kaum penganut agama mayoritas yang selalu menghalang-halangi hak beragama penganut agama minoritas.

Bukankah sudah sering diberitakan bagaimana umat agama minoritas negeri ini dihalang-halangi untuk melakukan ibadah mereka? Yang sebagian besar kita hanya diam, dan terkesan atau memang sedang memeri pesan menyetujui tindakan menghalangi kebebasan beragama itu?

Inikah jihad? Tidak! Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Arti jihad ialah segala upaya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan Islam. Upaya-upaya itu bisa dalam bentuk fisik (jihad), pemikiran (ijtihad), dan semangat batin (mujahadah). Jika ada yang mengatasnamakan suatu gerakan jihad tetapi tidak melibatkan dimensi ijtihad dan mujahadah, maka sesungguhnya belum bisa disebut jihad.

Dengan demikian, jihad tidak harus berwajah maskulin, kasar, keras memegang senjata. Seorang tukang sapu jalanan memegang sapu, seorang penulis memegang pena, seorang petani memegang cangkul dan seorang nelayan memegang jala. sesungguhnya mereka juga berjihad dan alat-alat yang ada ditangannya adalah peralatan jihad. Itulah jihad feminin. Bukankah di antara 99 sifat-sifat Allah Swt yang tergabung di dalam al-Asma' al-Husna', nama-Nya yang paling sering terulang di dalam Al-Qur'an ialah al-Rahim (Maha Penyayang) terulang sebanyak 114 kali dan al-Rahman (Maha Pengasih) terulang sebanyak 57 kali. Bandingkan dengan nama Allah Swt yang menggambarkan diri-Nya sebagai Maha Angkuh (al-Mutakabbir) dan Maha Pendendam (alMuntaqim), yang kedua nama itu hanya masing-masing terulang sekali.

Sifat feminin Tuhan lebih menonjol dari sifat maskulin-Nya. Lihatlah sifat Nabi Muhammad saw. ketika beliau menaklukkan Mekkah, yang beliau serukan bukanlah balas dendam kepada orang-orang yang telah memboikot dan menyiksa kaumnya



di masa silam. Beliau justru berkata: “Hari ini adalah hari perdamaian” (al-yaum yaum almarhamah). Sifat feminin Nabi lebih menonjol dari sifat maskulinnya. Itulah jihad beliau

Lihat pula sikap sahabat Umar bin Khattab ra ketika membebaskan kota Yerusalem tanpa memaksakan pihak lain masuk ke dalam Islam. Begitupula tidak menghancurkan patung-patung bukti peradaban Mesir yang masih bisa kita lihat hingga kini. Sifat feminin sahabat Nabi (walau seperti sosok Umar bin Khattab ra. yang terkenal keras) lebih menonjol dari sifat maskulinnya. Itulah jihad sahabat Nabi Bagaimanakah dengan umat Nabi saw. hari ini? Apakah kita telah meneladani Allah swt., Rasulullah saw. dan sahabatnya dengan menonjolkan jihad feminin dibandingkan dengan jihad maskulin? *Wallahu A'lam Bishshawaab.* 🌸





KEPING 2

**MEDIA SOSIAL
DAN INTOLERANSI SARA**







1

Saya Siap Membungkam Teroris Dengan Media!

YOSSIKA D. PERMATASARI

Di Indonesia, gelombang reformasi telah melahirkan dinamika baru dalam gerakan keberagaman. Gerakan baru keberagaman tak lagi didominasi produk lokal, tetapi juga muncul wajah-wajah internasional. Dinamika di tingkat nasional, regional dan global dinilai ikut memicu tindak kekerasan ekstrim yang terjadi di Indonesia. Radikalisme yang saat ini menjadi polemik dinilai sebagai ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, Indonesia sering kali dituduh dalam berbagai aksi terorisme nasional bahkan internasional. Tuduhan-tuduhan tersebut dikaitkan dengan “Fundamentalisme Islam”. Situasi keagamaan di Indonesia belakangan ini sudah semakin mirip dengan di Timur Tengah yang mempertontonkan aksi intoleransi, radikalisme, kekerasan, dan terorisme.

Perang melawan radikalisme dan terorisme memang tidak pernah ada habisnya. Satu persatu pelaku ditangkap, tapi satu persatu pula muncul sebagai generasi barunya. Meski para pelaku sudah dipenjara, tapi ideologi radikalisme tidak bisa dipenjara, karena itu ideologinya terus menyebar





kedalam pemikiran generasi muda. Kemajuan teknologi telah dimanfaatkan kelompok radikal, untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang salah.

Munculnya website yang kerap menebar kebencian "*hate speech*" adalah fakta konkret bahwa internet menjadi sebuah lahan bagi kelompok radikal untuk melakukan aksinya. Dari kampanye-kampanye yang disebarkan kemudian muncullah generasi muda yang cenderung eksklusif merasa seolah mendapatkan suatu kebenaran dalam mengamalkan ideologinya untuk membenci, memusuhi, bahkan meruntuhkan negaranya sendiri, serta menganggap yang bertentangan adalah kafir.

Aksi terorisme kini telah merambah ke Tanah Air. Para teroris umumnya pernah belajar di Timur Tengah mulai dari menembak, merakit bom, dan lain-lain. Dari peristiwa demi peristiwa terorisme juga dapat terlihat, para pelaku umumnya masih berusia muda atau bahkan dari kalangan remaja. Mulai dari bom Bali, bom Buku, bom Kampung Melayu, bom Kedubes, hingga bom Panci Bandung, dan yang terbaru adalah bom di Polsek Bontoala Makassar pada dini hari awal tahun baru 2018. Karena itu, radikalisme kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di Indonesia. Pemerintah, Lembaga, dan pihak-pihak terkait, kini semakin gencar mencegah radikalisme atau deradikalisasi, khususnya di kalangan remaja. Usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri.

Saat ini media sosial telah dijadikan sebagai alat propaganda yang efektif, dan secara tidak langsung digunakan untuk melakukan perekrutan seseorang bergabung ke dalam kelompok radikalisme. Sementara ruang publik media sosial, nyatanya terus mendapatkan perhatian tersendiri bagi generasi muda. Salah satu yang menjadi perhatian bersama adalah maraknya ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian inilah yang kadang ditelan mentah-mentah oleh sebagian pihak. Untuk itu diperlukan sebuah upaya dan komitmen bersama, untuk melawan radikalisme baik itu di media sosial





maupun di lingkungan sekitar. Persoalan-persoalan tersebut sudah saatnya menjadi agenda generasi muda Indonesia hari ini. Kita harus segera menyingsingkan lengan baju dan mencurahkan segala kekuatan untuk berkontribusi secara nyata dalam mengurai persoalan radikalisme.

Di era modern ini, diperlukan strategi yang efektif untuk melawan radikalisme dan terorisme. Jadilah generasi muda yang menjadi agen perubahan dan penyeru kebenaran untuk bergerak. Mengaktualisasikan dengan pemahaman agama yang benar, yang berdiri pada posisi menolak radikalisme. Jika pada diri pemuda sudah paham untuk membedakan arti kebenaran dan kesalahan, saatnya menjadi agen perubahan. Proses menjadi agen perubahan tidaklah mudah, diawali dari keluarga dan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jika pemuda bisa melakukan hal tersebut, secara langsung telah meminimalisir calon pelaku radikalisme.

Dan untuk melengkapi semua itu, pemuda juga harus menjadi penyeru kebenaran, jangan menjadi penyeru kebencian. Menyeru kebenaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Menyebarkan konten perdamaian salah satunya. Generasi muda diharapkan menjadi generasi yang aktif, dan harus memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Jangan mau menjadi generasi pasif, yang bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian di negeri ini. Tentu sebagai generasi muda kita perlu untuk menangkal radikalisme dan terorisme.

Diam bukan berarti emas dalam menanggapi perkara ini. Ikhtiar merupakan langkah yang juga bisa dilakukan generasi muda untuk menyebarkan kebenaran, yakni; memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat khususnya pemuda tentang perdamaian. Semua agama mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama umat manusia. Menjaga toleransi sangat penting untuk di lestarikan. Dengan adanya toleransi maka kehidupan akan terasa damai dan harmonis tanpa adanya permusuhan. Selain itu menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif, merupakan salah





satu cara menjauhkan diri dari praktek intoleran. Misalnya dengan memanfaatkan musik, gambar, film, bahkan buku yang menyuarakan indahnya kedamaian, anti radikalisme dan terorisme, berbeda-beda tetapi tetap satu itu Indonesia. Dan generasi muda merupakan tonggak pemersatu keberagaman negeri ini. Indonesia Damai.

Salam Pemuda! 🙌





2

Peran Media Massa Dalam Menangkal Radikalisme

MASITHAH MAHSA

Informasi dapat kita terima dari mana saja salah satunya media massa. Kekuatan semantik yang ditimbulkan oleh media massa memberikan kontribusi terhadap kesadaran dan pencitraan publik. Ada begitu banyak transaksi simbolik yang dihasilkan media sebagai bentuk komunikasi massa. Corner dalam Davis (2010: 291) menyebutkan bahwa praktik pemahaman pada media bisa dilihat dari penekanan terhadap tekstualitas melalui audiens ‘membaca’ produksi media.

Dalam studi analisis wacana kritis dengan menggunakan pendekatan Vandijck, ada tiga dimensi dasar untuk menganalisis wacana dari suatu media yakni dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dimensi teks terkait dengan tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retorik. Sementara, kognisi sosial merupakan bagaimana cara mempelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu atau kesadaran mental dari penulis dalam bentuk teks. Hal ini difokuskan pada efek kognitif atau efek media massa terhadap pengetahuan. Sebuah media tidak hanya dapat mengubah sikap, tetapi juga mengubah pengetahuan seseorang akan





suatu hal. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa. Dimensi terakhir yaitu konteks sosial. Konteks sosial membahas tentang bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Analisis masyarakat ini umumnya dipengaruhi oleh dua hal, yakni praktik kekuasaan dan akses yang memengaruhi wacana.

Dewasa ini media massa tidak lepas dari kondisi organisasional yang diatur oleh kebijakan media yang menyangkut dengan bahasa dan penggunaan citraan. Contoh paling jelas adalah banyaknya wacana media yang melibatkan ideologi dari media tersebut, misalnya media tersebut dimiliki oleh pengusaha yang juga merupakan politikus. Kita bisa melihat bagaimana produksi berita yang dihasilkan pada musim Pemilu, tentu jelas terlihat dimana keberpihakan media tersebut dari diksi yang digunakan. Di sisi lain, proses pemahaman, penerimaan atau 'pendekodean' oleh para audiens juga sangat berpengaruh. Banyak akhir-akhir ini media massa yang menyelidiki bagaimana level audiens berdasarkan produksi makna melalui pembacaan, sehingga pemberitaan yang dihasilkan lebih kepada 'pembacaan yang lebih disukai'. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa media berperan penting dalam membentuk opini publik.

Masih segar di ingatan kita bagaimana peran media terkait beberapa kasus radikalisme di Indonesia seperti bom Bali I dan II, bom Sarinah dan bom 'bunuh diri' Kampung Melayu. Media mem-*blow up* kasus tersebut sehingga menimbulkan beragam spekulasi dari masyarakat. Misalnya bagaimana peran pemerintah dalam menangkal radikalisme di Indonesia? Mengapa hal tersebut terjadi berulang-ulang? Banyak masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum memberikan usaha maksimal dalam menuntaskan radikalisme di Indonesia. Belum lagi kasus pembubaran HTI yang dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal





ini tentu menjadi 'Peer' bagi audiens untuk lebih mem-filter berita yang ada di media massa.

Bentuk radikalisme atas nama agama seperti terorisme adalah hal paling sering muncul di Indonesia. Agama yang paling sering terseret dalam kasus tersebut adalah Islam. Padahal tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang damai dan sangat toleran. Munculnya isu radikalisme dianggap sebagai bentuk perlawanan global terhadap ketidakadilan yang terjadi di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Asrori (2015: 254-255) munculnya radikalisme atas nama islam di Indonesia berawal dari hadirnya orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru dan turut serta mengubah konstelasi umat Islam. Ideologi mereka lebih keras dan tidak mengenal toleransi sebab banyak dipengaruhi *mahzab* Maliki yang diadopsi oleh Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.

Radikalisme tidak lepas dari persoalan politik. Masalah radikalisme di Indonesia makin besar karena meningkatnya pendukung dari gerakan tersebut. Radikalisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu paham yang diciptakan oleh kelompok tertentu yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Namun, dapat diartikan pula sebagai bentuk fanatisme terhadap suatu agama.

Di Indonesia pola gerakan radikalisme beragam, mulai dari sekedar ideologi mendirikan 'kekhalfahan Islam', bahkan sampai gerakan militer. Radikalisme cukup berpengaruh dalam pola politik di Indonesia karena berisiko munculnya dampak lain seperti separatisme bahkan anti pancasila karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut diantaranya harus ada kebijakan/peraturan yang jelas terkait masalah radikalisme agama. Pemerintah dituntut untuk mengusut secara tuntas apa yang menjadi akar timbulnya radikalisme di Indonesia serta tokoh-tokoh yang berperan dalam gerakan tersebut. Selanjutnya, institusi keagamaan dan pendidikan seperti





pesantren dan sekolah-sekolah, karena materi pembelajaran serta pengembangan pemikiran individu terbentuk dalam institusi tersebut. Hendaknya sekolah menanamkan sifat moderat kepada peserta didik dengan menyelipkan materi-materi anti radikalisme. Berikutnya keluarga, keluarga berperan sebagai sekolah pertama bagi anak-anak sehingga apa yang diterima anak-anak dalam keluarga tersebut dikembangkan di intitusi pendidikan.

Terakhir adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil di sini diartikan sebagai orang-orang di luar gerakan tersebut. Masyarakat sipil merupakan konsumen dari pemberitaan terkait kasus-kasus radikalisme. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berpikiran terbuka sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu radikalisme tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat hal yang berperan dalam menangkal radikalisme yaitu pemerintah, intitusi pendidikan, keluarga dan masyarakat sipil. Namun, ada hal lainnya yang tidak kalah penting yaitu media massa. Media massa merupakan jembatan penghubung antara informasi dan masyarakat.

Seperti yang telah dibahas di atas, media massa berperan sangat penting dalam upaya pencegahan radikalisme. Jika suatu media massa tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik tentu akan menghasilkan pemberitaan yang netral, bersifat terbuka dan tidak memihak. Karena sekecil apapun pemberitaannya akan berdampak pada masyarakat. Ada baiknya, redaksi yang digunakan dalam pemberitaan dipilih agar tidak memicu masalah baru yang lebih kompleks.

Dewasa ini, penggunaan media massa terus mengalami peningkatan. Media online misalnya, selain mudah diakses, juga menghemat waktu pengguna dalam membaca berita. Namun, media massa juga memberikan dampak buruk ketika disalahgunakan oleh oknum tertentu salah satunya kelompok radikalisme. Media online dijadikan sebagai media jihad oleh kaum tersebut. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa pembelajaran agama disampaikan melalui tontonan tanpa





ada guru yang membimbing. Hal tersebut bisa menimbulkan penyimpangan pemahaman terhadap agama. Dalil-dalil yang disampaikan bisa menjadi bias jika tidak didampingi guru. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa media massa ibarat dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Bisa menimbulkan dampak positif jika pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Namun, bisa berdampak sangat fatal jika makna pesan tersebut tidak dipahami dengan baik. ☺

Daftar Pustaka

- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia antara Historisitas dan Antropisitas. *Jurnal Kalam* Vol 9 No 2 Desember 2015
- Davis, H., dan Paul W. (2010). *Bahasa, Citra dan Media*. Yogyakarta: Jalasutra







3

Media Sosial (MEME) dan Intoleransi SARA di Indonesia

AGATHA PRICILIA

Teknologi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Di era modernisasi, perkembangan teknologi secara drastis meningkat dan terus berevolusi hingga sekarang. Bisa dikatakan teknologi dapat menguasai dunia. Indonesia merupakan negara yang hidup dalam lingkungan global, dan mengikuti maju mundurnya penguasaan teknologi. Lain diantaranya adalah internet dan media sosial. Internet sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta media sosial yang merupakan sebuah media online atau biasa dikenal dengan dunia maya dan berisi orang-orang yang berasal dari dunia nyata untuk saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi. Saat teknologi internet dan *mobile phone* semakin maju, maka media sosial pun ikut berkembang. Ketika kita mengakses facebook, instagram, twitter, bahkan whatsapp begitu mudah dilakukan hanya dengan menggunakan mobile phone.

Tetra Pax Index 2017 (*The connected customer*) mencatatkan pengguna internet di Indonesia sekitar 132 juta pengguna. Sementara hampir setengahnya adalah pengguna media sosial. Lebih dari 106 juta orang Indonesia menggunakan





media sosial setiap bulan dan sekitar 85% diantaranya mengakses media sosial melalui perangkat seluler. Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam cekaman media sosial. Di tengah berjalanya arus informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, terdapat satu istilah yang semakin dikenal masyarakat di tanah air adalah Meme.

Pada umumnya sebagian masyarakat pengguna media sosial atau yang biasa disebut medsos belum begitu mengenal sejarah dan arti dari meme. Meme adalah bentuk komunikasi era digital yang pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins yang adalah seorang penulis asal Britania melalui bukunya *The Selfish Gene*. Dawkins memakai istilah ini untuk mendefinisikan lahirnya budaya dengan anggapan terjadinya merupakan bentukan dari banyak replikator. Meme di Indonesia masuk dan berkembang sekitar tahun 2013 melalui fanspage *facebook* seperti meme komik Indonesia, yang awalnya hanya menampilkan meme rage komik dan meme murni. Meme rage komik adalah meme yang berbentuk comic dan meme murni merupakan meme gambar yang tidak ada percakapannya (bukan komik).

Meme berisi gambar-gambar yang konyol,aneh,lucu dan menyindir sesuatu hal yang beredar luas di internet. Bentuk dari meme ada yang bersifat membangun, mengkritik fenomena-fenomena sosial yang terjadi seperti halnya isu mengenai SARA. Sebagai _egara majemuk, Indonesia memiliki beragam suku,ras,agama,dan golongan yang berbeda-beda dan mempunyai pandangannya masing-masing. Perbedaan inilah yang memicu terjadinya konflik.

Dewasa kini, ideologi tak lagi dipahami sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita atau nilai suatu bangsa sehingga menimbulkan adanya Intoleransi dari toleransi yang ada. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukaan maupun golongan. Intoleransi muncul ke permukaan ketika toleransi di Indonesia berkurang. Media sosial memainkan perannya untuk memberitakan hal-





hal mengenai toleransi dan perlawanan terhadap intoleransi.

Hal yang paling terlihat ketika saat Pilkada di Indonesia, untuk melumpuhkan lawan politik mereka yakni dengan menggunakan isu SARA. Semisal saat mantan gubernur DKI Jakarta Ahok Basuki ialah keturunan China, dan beragama Kristen Protestan yang ingin menjabat untuk kedua kalinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok dituduh telah melakukan penistaan agama. Kasus beberapa tahun lalu ini sangat heboh sampai media-media asing pun turut meliput.

Bukan saja diadakanya sosialisasi untuk mencegah intoleran tetapi, peranan aktif dari setiap unsur melalui media sosial maupun media cetak. Meme menjadi salah satu cara untuk mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai perlawanan terhadap Intoleransi.

Pengalaman Pribadi

Berbicara mengenai isu maupun konflik mengenai SARA sudah tidak asing lagi di telinga kita, saya punya pengalaman tentang SARA yaitu kerusuhan di Ambon tahun 1999. Singkat cerita, saat itu saya masih berumur tiga tahun. Saat mengharukan ketika kami harus berlari pontang-panting untuk mencari perlindungan dan terhidar dari dahsyatnya genjatan peluru dan bom. Waktu itu saya belum sekolah, tetapi keempat saudara saya sudah bersekolah, akibat perseteruan sengit yang terjadi kala itu, sekolah pun tidak ada alias ditutup. Kakak saya mengatakan untuk membaca buku sajakpun tidak bisa karena semuanya telah hangus terbakar.

Dari tempat pengungsian yang berlokasi di daerah Tantui, kami hanya bisa melihat dari jauh rumah tempat saya dibesarkan bersama kelima saudara saya, tempat berbagi suka maupun duka telah habis dilahap si jago merah. 18 tahun pun berlalu kisah yang mengharukan telah kami lewati segala upaya dari pemerintah, masyarakat maupun tokoh-tokoh agama telah dilakukan. Monumen Gong Perdamaian yang berdiri tepat di jantung Kota Ambon merupakan tanda perlawanan terhadap Intoleran SARA. Sampai saat ini Ambon semakin





damai dan semakin toleransi terhadap sesama. Semoga hal-hal seperti ini serta upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat bisa berkembang sampai kepada lingkungan luas agar kita tidak terpicu oleh Intoleransi, diskriminasi, kekerasan dan radikalisme.

Demokrasi di Indonesia akan melemah jika intoleran SARA dibiarkan begitu saja. Karena jika sistem pemerintahan gagal untuk apa adanya ideologi karena tidak ada dasar negara dan arah tujuan bangsa menjadi tidak jelas, untuk itu selaku generasi muda hendaklah kita menjadi terang dalam kegelapan, kita berperan aktif bersama-sama membangun negara yang berdemokrasi dan mewujudkan bahwa berbeda-beda tetapi satu.

Sebagai generasi muda yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa, *“we change our nations, our state and our country to be better”*. Kita menjadi generasi milenial yang mengamati, memvalidasi dan menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia. Seperti kata presiden kita yang pertama Soekarno mengatakan: “berikan aku 10 anak muda niscaya akan kuguncang dunia”. 🙏🐦





4

Pengaruh Media dalam Potensi Ganda

AMRIZAROIS ISMAIL

Proses pembentukan peradaban dunia tidak lepas dengan apa yang disebut perang. Bahkan sejarah peradaban arab, telah tercatat bahwa perang sudah dimulai di saat populasi manusia di dunia ini baru berjumlah 6 orang. Perang tersebut dilakukan antara Qabil dan Habil yang merupakan kedua putra dari Nabi Adam. Qabil tidak menerima keputusan bahwa ia harus menikahi adik dari Habil yaitu Labuda yang parasnya tidak lebih cantik dari adiknya sendiri bernama Iqlima. Qabil pun membunuh Habil lantaran rasa tidak puasny akan keputusan pernikahan yang berlaku. Maka jatuhlah Habil sebagai korban pertama dari sebuah peristiwa yang mungkin adalah peperangan pertama dalam sejarah manusia di saat jumlah manusia sendiri masih 6 orang. Semenjak itu perang demi perang selalu terjadi dalam peradaban manusia, baik itu perang dalam peradaban arab, peradaban Eropa, Peradaban bangsa Asia, dan peradaban Global dalam era pertengahan hingga modern.

Dalam salah satu paragraf di bukunya, Tamim Anshary meringkaskan akan kebangkitan dan kejatuhan sebuah





peradaban dan perang menjadi kunci penting di dalamnya. Skemanya adalah sekelompok suku mendiami daratan yang ideal untuk dihuni, membangun peradaban, ada suku lain yang iri akan peradaban tersebut, terjadi perang perebutan, suku yang telah lama mendiami kalah, suku yang menang membangun peradaban, dan skema tersebut kembali ke awal lagi dimana terdapat suku lain yang iri, kemudian perang perebutan kekuasaan, dan seterusnya (Tamim Ansary: 2010). Peperangan demi peperangan yang terjadi pada Masa Global Era pertengahan juga memiliki pola yang hampir sama dengan hal di atas, dimulai dari perang antar suku dalam satu peradaban, kemudian berkembang menjadi perang antar peradaban dan perang antar bangsa di dunia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sejarah peperangan memiliki pola *snowball* (bola Salju) dimana peperangan umumnya dimulai dalam skala kecil dan lokal kemudian berkembang secara seri dan paralel menjadi skala besar dan global, sejarah tentu mencatat peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menjadi klimaks dari perang global dimana sejarah bermulanya dimulai dari perang skala kecil kemudian menjelma menjadi skala besar dan global.

Berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak serta merta mengakhiri peristiwa peperangan. Dalam era modern dimana tingkat kehidupan, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan seharusnya sudah jauh lebih baik dari masa lalu nyatanya tidak terlepas dari peperangan. Bahkan dalam 10 tahun terakhir terdapat lebih dari 10 peperangan baik yang sudah selesai maupun masih berlangsung. Diantaranya perang saudara di Somalia, perang Darfur, perang Irak, perang Afghanistan, perang Libanon, perang Syria dan yang paling terbaru adalah perang Palestina-Israel yang kembali berkecamuk setelah munculnya pernyataan dukungan pemerintah Amerika Serikat terkait pemindahan ibukota Israel ke Kota Yerusalem. Peperangan yang telah maupun masih terjadi ini terbagi atas beberapa jenis peperangan. Perang saudara, perang ideologis, dan perang perebutan kekuasaan.





Di Indonesia sendiri perang juga beberapa kali terjadi pasca kemerdekaan di tahun 1945, diantaranya perang GAM, Poso, Ambon, hingga Perang di Papua atas Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sekalipun peperangan di Indonesia tidak terjadi dalam skala besar dan hingga mengganggu keamanan internal bangsa, namun korban yang berjatuhan tetap tercatat dalam sejarah kelim peperangan saudara di Indonesia.

Perang Upaya Hegemoni

Sejarah bangsa Indonesia seolah dapat dikatakan sebagai alur mundur dalam sebuah cerita. Yang mana pada awalnya pola peperangan dan konflik di Indonesia adalah perang melawan bangsa lain seperti kolonial Belanda dan Jepang, beralih menjadi pola perpecahan konflik antar suku dan daerah. Artinya meskipun kemerdekaan yang dianggap sebagai klimaks fenomena perang telah tercapai, ternyata tidak lantas mengakhiri rangkaian konflik dan peperangan. Fenomena perang yang nampaknya merupakan warisan hingga akhir abad ke-20 hingga abad ke-21 ini pun masih tetap ada. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari kepentingan negara bangsa untuk mencapai national interestnya.

Definisi Perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain sebagainya, sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan. Definisi perang di sini merupakan suatu bentuk pertempuran terbuka, dimana terdapat kontak senjata antara pasukan yang saling berperang. Sedangkan menurut Hedley Bull, Perang merupakan kekerasan yang terorganisir yang dilakukan oleh unit politik yang satu dengan unit politik yang lainnya. Tujuan dari unit politik tidak lain adalah untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti atau mengakui tujuan dari unit politik tersebut, yang mana pola semacam ini disebut Hegemoni.

Menurut Antonio Gramsci, dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas





nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Perang adalah salah satu wujud upaya pemaksaan untuk kepentingan hegemoni tersebut.

Konferensi Perang Konfensional menjadi perang Hibrida

Selanjutnya Gramsci juga menyampaikan ada 3 komponen yang digunakan sebagai alat untuk mencapai hegemoni, diantaranya adalah kekuasaan, kapital/modal dan media masa. Di era modern ini upaya hegemoni telah mengalami perubahan mode. Perang fisik yang awalnya menjadi implementasi utama perlahan telah bergeser, berkonversi menjadi bentuk perang baru yang lebih halus, yang disebut perang hibrida.

Konsep perang hibrida inilah yang masih diyakini kehebatannya oleh banyak kalangan terutama oleh para pendahulu kita. Istilah ini sebenarnya apabila dirunut berawal dari metafora untuk menggambarkan tuntutan medan perang modern oleh Jenderal (Mar) Charles C. Krulak tentang tantangan yang dihadapi oleh marinir Amerika Serikat (AS) ketika bertugas di “negara gagal” seperti Somalia dan bekas Yugoslavia. Krulak menyadari bahwa medan perang masa depan adalah: terjadi di perkotaan, sifatnya asimetris, situasinya sulit membedakan antara pejuang dan non kombatan, dan persenjataan canggih sudah tersedia dengan mudah untuk semua pihak. Kesimpulannya perang hibrida adalah perang gaya baru yang mana dilakukan dengan melakukan propaganda secara halus untuk menghasilkan kehancuran internal dalam pihak lawan.

Perang jenis ini dianggap lebih efektif dibandingkan perang konvensional yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknologi senjata. Perang di era modern ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan berfokus pada kekuatan





teknologi senjata saja, namun juga dengan memerhatikan aspek sosial budaya dan aspek lain dalam masyarakat (Mattis, Letjen.2005). Aspek sosial budaya dan aspek lain dalam masyarakat mulai mendapatkan perhatian di kalangan militer Amerika, oleh karenanya untuk menghadapi perang hibrida ini mereka mengembangkan konsep yang disebut sebagai *Human Terrain Systems* (HTS). Konsep HTS ini pertama kali dikembangkan oleh anthropolog Montgomery McFate pada tahun 2005, sebagai respons terhadap kesenjangan antara komandan dan staf tentang pemahaman terhadap penduduk dan budaya setempat, terutama ketika melakukan invasi ke Irak dan Afghanistan.

Potensi Ganda Media dalam Perang Hibrida

Bagi generasi yang telah dewasa di era pra digitalisasi mungkin dapat membandingkan betapa dahsyatnya perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan era digital saat ini. Perubahan tersebut dapat dilihat dari salah satu indikatornya berupa perubahan sikap masyarakat Indonesia yang semakin berani menyuarakan perasaan dan pemikirannya baik lewat tulisan, gambar dan media audio visual. Bagi sebagian orang, muncul penilaian bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bernilai positif sebagai tanda terbukanya ruang demokratisasi dalam berpendapat namun sayangnya, sisi negatif dari era kebebasan itu juga telah mengancam kondisi jatidiri bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang sangat lembut, ramah, religius dan kompromis. Hal tersebut sesuai konsep perang hibrida yang telah disampaikan diatas, yang mana unsur sosial budaya juga dijadikan objek dalam suksesi pengaruh yang memiliki daya rusak yang besar.

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia menjadi sangat mudah marah, ofensif dan bahkan tidak segan-segan menjatuhkan wibawa negara melalui sarkasme dalam berbagai bentuk. Dapat kita temui di alat pencarian google, gambar-gambar yang menjadikan tokoh-tokoh bahkan sekelas Presiden dibuat sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan





negatif dan menyudutkan. Herannya, masyarakat Indonesia sepertinya telah terbiasa menganggap hal tersebut sebagai lelucon belaka. Selain itu, masyarakat juga sudah tidak malu dan takut lagi untuk menyebarkan konten-konten yang ekstrim baik yang mengandung unsur pornografi, ajaran radikal bahkan ruparupa tindak kekerasan yang dulu menjadi konten yang harus di sensor sebelum dipublikasikan.

Batas-batas itu telah luruh dan semakin tak terkendali. Media telah menjadi ancaman serius dibalik manfaatnya yang besar bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta lebih luas lagi bagi kehidupan manusia pada umumnya. Tidak dapat dihindari bahwa globalisasi menjadi sebuah instrumen hubungan internasional namun jika bangsa kita tidak waspada dan memiliki filter yang kuat maka sangat dimungkinkan Indonesia akan kalah dalam peperangan yang di era dewasa ini dikenal sebagai perang hibrida.

Pertumbuhan jejaring komunikasi massa menawarkan alat propaganda dan rekrutmen yang kuat. Organisasi Garis Keras seperti ISIS, misalnya, sangat piawai menggunakan berbagai media sosial untuk mempromosikan ideologi dan agendanya. Berbagai bentuk propaganda yang menunjukkan "kehebatan" ISIS disebar melalui *Youtube*. Sementara pesan-pesan propaganda kelompok bisa dibaca meluas melalui *Twitter* dan *Facebook*. Di Indonesia sendiri yang pengguna internetnya menjadi salahsatu terbesar di dunia, jaring media sosial merupakan fasilitator yang *accessible* dan memiliki pengaruh masif. Selain didukung oleh faktor kecepatan juga karena sajian informasinya bisa sangat *up to date* hitungan detik saja. Tidak hanya digunakan sebagai alat propaganda, media juga sangat berperan membelokan ideologi dan jatidiri bangsa sebagaimana yang telah diulas di awal.

Memahami Media Sosial Sebagai Mitigasi Perang Hibrida

Namun, Serangkaian uraian di atas nampaknya belum bisa dijadikan kesimpulan bahwa media Sosial hanya memiliki





potensi negatif yaitu dapat diumpamakan dengan senjata pemusnah massal yang berdampak masif dan permanen saja. Pandangan tersebut tentunya muncul apabila media sosial dipahami tidak secara komprehensif, apalagi memahami media hanya dengan menyandingkan potensi media dengan fenomena yang tengah terjadi belakangan ini, hal tersebut akan memunculkan cara pandang skeptis terhadap media, dimana media hanya dianggap hanya berpotensi merusak moral dan perilaku bangsa dalam hitungan dasawarsa saja, padahal masyarakat Indonesia sebelum era keterbukaan media adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tepa salira, silih asah, asih asuh yang diwariskan secara turun temurun.

Dilihat dari hal tersebut tentunya perlu adanya pemahaman terkait apa, fungsi dan peran media secara komprehensif, agar muncul pemahaman juga bagaimana mitigasi terkait potensi negatif yang dapat ditimbulkan media sosial.

Media Sosial sendiri memiliki definisi media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *usergenerated content*” (Dikutip dari ptkomunikasi.wordpress.com).

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.





Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Peran dan Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain :

- **Accessibility.** Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan *marketing* yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.
- **Membangun Hubungan.** Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah *feedback* langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.
- **Jangkauan Global.** Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal





dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

- **Terukur.** Dengan sistem *tracking* yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

Fungsi Media Sosial

Ketika kita mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasi, yaitu :

- **Fungsi Administrasi.** Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif dimana posisi pasar anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi konten dalam masyarakat yang relevan. Riset pasar untuk menemukan di mana pasar anda.
- **Fungsi Literasi.** Media sosial adalah buku virtual dan terintegrasi dengan akses ilmu pengetahuan diseluruh penjuru dunia. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi literatur atau rujukan utama dalam pendidikan, *planing* dan wacana umum lainnya.
- **Fungsi Validasi.** Informasi yang valid dalam media sosial dewasa ini sangat diperlukan sebagai bahan verifikasi terhadap segala rumor, mitos dan isu yang berkembang terhadap fenomena sosial di masyarakat.

Dengan memahami Media sosial secara komprehensif dan utuh terkait apa itu media sosial, peran dan fungsinya





tentunya memunculkan pemahaman bahwa media sosial adalah objek (alat, benda dan bahan) potensial. Sebagai sebuah objek, media tentunya memiliki potensi yang fleksibel dan tergantung bagaimana Subjek mempengaruhinya.

Hal menarik adalah bagaimana perkembangan media dan apa yang menjadi masalah utama sehingga fungsi dan peran media menjadi sentripetal atau bertolak belakang dengan potensi positif yang dimiliki.

Mengidentifikasi Akar Permasalahan dan mitigasi

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.

Apabila ditarik kesimpulan benang merahnya terletak bagai mana kita selaku Subjek meletakkan *accessibility* pada pembuatan konten tersebut. Melihat dari fenomena penyalahgunaan peran medsos yang terjadi di Indonesia





belakangan ini, baik dalam dunia politik, sosial agama yang mana media sosial justru lebih difungsikan sebagai Objek Propaganda melalui ujaran kebencian (*hate Speech*), informasi fiktif (*Hoax information*) dan konten negatif lainnya, seolah dapat mencerminkan bagaimana tipologi dan mentalitas *Netizen* (pengguna Media Soaial) yang ada di Indonesia. Hal itu juga menjadi latar belakang adanya Revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sejak awal sebagai upaya pemerintah selaku Provider dalam mengatur dan mengawasi kegiatan dimedia sosial dengan tujuan mengantisipasi dan menekan tingginya angka penyalahgunaan media sosial, kini diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 yang salah satu hasil revisi adalah menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Meskipun tak jauh beda dengan UU sebelumnya, namun setidaknya hal itu menunjukkan adanya iktikad baik dari pemerintah, bahwasanya pemerintah hadir dan mengambil peran sebagai provider utama dalam kehidupan bermedia sosial di Indonesia.

Namun adanya UU ITE sebagai bentuk kontroling dari pemerintah nampaknya akan kurang efektif apabila tidak ada partisipasi aktif dari *Netizen* selaku pengguna media sosial, pasalnya mengingat banyaknya pengguna media sosial, konten dan situs web yang terus bertumbuh dan berbanding terbalik dengan jumlah aparaturnya penegak hukum.

Jadi persoalan *quofadis* (arah dan tujuan) media sosial sangat ditentukan bagaimana perubahan dewasa tipologi dan mentalitas *Netizen* kita. Terkait hal tersebut, sekiranya perlu adanya gerakan masal, masif dan terstruktur kearah Revolusi mental para netizen agar sadar dan faham terkait potensi besar media sosial dalam “Potensi Ganda” yaitu media sebagai alat Propaganda dan Preaktor Perang, sekaligus kemampuan media sebagai alat mitigasi dan antisipasi bencana perang Hibrida. 🤝





Daftar Pustaka

Ansary, Tamim, *Dari Puncak Bagdad; Sejarah Dunia Versi Islam*, (Jakarta: Zaman, 2010). Mattis, James N, Dkk; *Future Warfare: The Rise of Hybrid War*, (USA: Proceedings Magazine, Issue Vol. 132/11/1,233, 2005).

<https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peranserta-fungsinya/>. Diakses pada 28 Desember 2017





5

Mengenal Teroris Melalui Media Masa Kini

DEVI AFITHASARI

Persoalan terorisme terus mendapat perhatian dari berbagai pihak dengan ruang lingkup nasional maupun internasional. Berbagai aksi pengebomam berkedok jihad terus bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat disaksikan dengan berbagai bukti kerusakan yang telah terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Kondisi demikian semakin genting dengan semakin maraknya propaganda dari kelompok radikal untuk merekrut anggotanya. Terorisme dan kontraterorisme telah menjadi prioritas tinggi di Indonesia, dan terorisme merupakan ancaman yang berbasis eksternal terbesar untuk Indonesia (Lilley, Wiencek, dan Carpenter, 2005: 133).

Definisi terorisme sendiri pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977, terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*, dimana kejahatan ini meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror (Wahid, Sumardi, Sidik, 2004: 23-24). Terorisme demikian juga dapat





didefinisikan sebagai kekerasan, atau ancaman kekerasan, yang digunakan dan dikejar dalam pencapaian atas sebuah sasaran politik (Howard, Sawyer, dan Bajema, 2009: 4-5). Hal ini sungguh jelas menandakan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme di dunia untuk menciptakan kondisi negara yang damai, aman, dan tenteram. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan, sehingga terorisme bukan lagi dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*) (Mulyana, 2002:22).

Pelibatan anak dalam aksi teror, bukan lagi hal baru. Steven R Ratner dan Jason S Abrams dalam *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*, Second Edition (2001) menulis, salah satu modus operandi pada Pol Pot semasa *killing field* di Kamboja telah melibatkan anak dalam aksi teror.

Dalam konteks transnasional, kelompok teroris dan foreign terrorist fighters juga meningkat karena ketergantungan mereka pada internet dan teknologi komunikasi baru lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan operasinya (Smith, 2007: 62). Di sisi lain, ketika suatu komunitas diserang, orang-orang akan mengungsi kepada agama, dan ketika agama diserang, orang-orang secara pribadi akan merasa diserang dan mulai merasakan kemarahan.

Ketika agama dikatakan sebagai sumber masalah, teroris akan merasa diberikan kebebasan dan kekuasaan lebih atas tindakan yang dilakukannya (Feldstein, 2009: 6). Faktor-faktor dari agama, ideologi, organisasi teroris di lingkungannya, media, maupun negara-negara lain pun dapat berperan menjadi pemicu tindakan terorisme (Ramakrishna dan Tan, 2003: 2). Peneliti Pusat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar menjelaskan penyebaran gerakan radikal sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan pemberitaan media yang memiliki peran cukup berpengaruh dalam merubah kondisi sosial masyarakat. Kehadiran media





massa di era globalisasi saat ini semakin membuat gencar provokasi aksi teror kepada publik.

Jika dikaitkan dengan eksistensi media massa di ranah kontemporer ini khususnya terkait propaganda antiterorisme global. Salah satu sarana untuk perang mental (terorisme) itu adalah media. Bagi teroris tampaknya media massa amat penting tidak hanya karena sifat peliputannya yang sensasional tetapi juga lantaran dianggap menafsirkan sebaik-baiknya "videologi" dan "pertunjukan" yang mereka lakukan. Karena itu tidak jarang media menjadi panggung pertunjukan teroris".

Media massa dianggap paling cerdas memilih sisi-sisi mana dari aksi teroris yang perlu dan tidak perlu dilaporkan. Sementara teroris yang "kreatif" juga terus menjebak media untuk menjual sensasi-sensasi di balik teror mereka. Berkat kemajuan teknologi dan informasi saat ini, kelompok teroris dan para pendukungnya menyebarkan aksi-aksi mereka lewat media sosial seperti *Youtube*, *Instagram*, *twitter* dan sebagainya.

Teroris menyampaikan pesan politik dan membuat ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka bahkan piawai mencari simpati, menggalang dana, dan merekrut anggota-anggota baru lewat propaganda di berbagai media. Bahkan dalam salah satu akun terdapat pujian pelaku teroris yang tewas dalam aksinya. Dikatakan, misalnya, bahwa pelaku terorisme itu mati dengan "tersenyum," atau mayat teroris itu berbau wangi, sesudah sekian hari darahnya masih segar mengalir, dan lain-lain.

Dalam wacana keagamaan tertentu, semua itu dianggap tanda-tanda bahwa orang bersangkutan "mati syahid." Inilah sebetulnya glorifikasi (*glorify*) atau pengagung-agungan terhadap pelaku terorisme. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan bahwa "Media sosial membuka ruang tertutup menjadi terbuka. Tak heran jika beberapa remaja 18-25 tahun bergabung dengan ISIS karena pengaruh propaganda media sosial". Agus juga menyatakan bahwa WNI yang berangkat





ke Suriah, disinyalir bergabung dalam jaringan kelompok oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), diduga korban penyebaran paham radikalisme melalui jaringan internet. Sidney Jones, peneliti terorisme dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), menyatakan, media sosial adalah alat propaganda favorit bagi para pendukung ISIS di Indonesia. Mereka kerap menggunakan *Facebook Fan Pages* sebagai alat propaganda. Beberapa di antaranya sempat ditutup *Facebook*, namun mereka membuatnya lagi dengan nama yang berbeda. Meski demikian, Jones mencatat, sejak pertengahan 2015 penggunaan *Facebook* oleh para pendukung ISIS di Indonesia cenderung menurun (BBC,2015)

Namun penurunan itu diimbangi dengan merebaknya penggunaan aplikasi cakap-cakap melalui telepon seluler, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Zello*. Ketiga aplikasi ini menjadi favorit di kalangan kelompok ekstrem di Indonesia. Bahkan, sebagian narapidana terorisme yang masih berada di penjara bisa berkomunikasi lewat aplikasi tersebut dengan Timur Tengah, dan juga dengan sesama pendukung ISIS di Indonesia. Dalam berita yang dilansir oleh BBC Indonesia, ISIS mulai menggunakan media sosial untuk menarik perhatian anak-anak muda. Pertamakali muncul membuat video yang dikemas dengan gaya film laga Hollywood.

Di Indonesia, Santoso yang disebut memimpin jaringan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur menyampaikan dukungan terhadap pimpinan ISIS Abu Bakar Al Bahgdadi melalui media sosial *YouTube*. Aksinya kemudian diikuti oleh sejumlah orang Indonesia yang mengaku berada di wilayah kekuasaan ISIS, Irak serta Suriah, dan mengajak masyarakat untuk ikut 'berjihad' bersama ISIS di negara tersebut. Peneliti masalah terorisme dari direktur Institute for Policy Analysis of Conflict IPAC Sydney Jones dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada Oktober lalu, mengatakan kelompok Santoso lebih menggunakan media sosial sebagai alat propaganda. Video propaganda ISIS berisi pelatihan senjata yang melibatkan anak-anak berbahasa Melayu dan Indonesia yang beredar





pada Minggu (15/3/2015) hingga Selasa (17/3/2015) lalu di dunia maya. Video tersebut tidak diblokir secara otomatis seperti yang terjadi pada materi pornografi.

Meski kemudian video itu diblokir pihak *YouTube*, Pemerintah mengatakan baru dapat melakukan pencegahan ataupun pemblokiran terhadap situs jika ada pengaduan dari masyarakat. Hal ini yang kemudian menimbulkan lemahnya pengawasan dan media cenderung menjadi ruang pada kekerasan dalam narasi pemberitaan mengenai radikalisme dan terorisme. Prof Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (2012)* menyatakan bahwa :

“Ancaman terbesar bukan dari radikalisme dan terorisme Islam (jumlah pengikut radikalisme Islam di Indonesia sangat kecil dibandingkan mayoritas umat Islam Indonesia yang cinta damai), melainkan datang dari teknologi infomasi global dan media massa, yang makin lama makin tidak terkontrol oleh pemerintah, sementara komunitas IT dan media massa sendiri tidak mengembangkan sistem kontrol diri yang kuat.”

Sehingga media saat ini menjadi pisau bermata dua yang dapat digunakan untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan. Media diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, mencegah radikalisasi, dan meredam kekerasan. Namun dalam kelompok teroris memanfaatkan media untuk mempropagandakan misi dan tujuannya. ☹️

Daftar Pustaka

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150301_radikalisme_anakmuda_sosmed

Lilley, J.R., Wiencek, D.G., & Carpenter, W.M. (2005). *Asian Security Handbook: Terrorism and the New Security Environment Third Edition*. New York: Taylor and Francis.





- Wahid, A., Sunardi, & Sidik, M. I. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hoffman, B. (2009). Defining terrorism. Dalam R.D. Howard, R.L. Sawyer, & N.E. Bajema (Eds.), *Terrorism and counterterrorism: Understanding the new security environment 3rd edition* (hlm. 4-5). New York: McGraw Hill.
- Feldstein, S.P. (2009). *Terrorist ideology and the implications of radicalization*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Ramakrishna, K., & Tan, S.S. (2003). *After Bali: The threat of terrorism in Southeast Asia*. Singapore: Nanyang Technological University
- Ratner, Steven R. (2001). *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*, Second Edition. USA: Oxford University Press
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/mengapa-video-propaganda-isis-di-youtube-tidak-diblokir-secara-otomatis>





6

Media Sosial sebagai Alat Perlawanan terhadap Diskriminasi, Intoleransi, dan Kekerasan Ekstrimis

EKO PRASETYO

LATAR BELAKANG

Dewasa ini kasus diskriminasi, intoleransi dan kekerasan ekstrimis marak terjadi di Indonesia. Menjelang PEMILUKADA serentak di Indonesia, presiden Jokowi menghimbau kepada para peserta pemilihan dan tim sukses untuk tidak menggunakan isu-isu SARA dalam memenangkan pemilihan. Dikutip dari viva.co.id presiden Jokowi menyampaikan *"Saya titip, negara ini negara besar, jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, apalagi nanti menginjak pemilihan presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi. Apalagi sampai memutus tali silaturahmi,"*.

Isu perpecahan santer terdengar dengan gerakan pengumpulan masa seperti gerakan 212, gerakan seribu lilin dan gerakan lainnya yang berlandaskan pada keyakinan kebudayaan.

Muncul suatu pertanyaan mendasar. Negeri ini didirikan bukan demi agama. Sumpah pemuda menjelaskan keinginan





pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, pemuda Indonesia tidak ingin beragama satu dan berbusana satu. “Saya pernah diingatkan Presiden Afganistan, hati-hati negaramu negara besar. 40 tahun lalu, Afganistan ada pertikaian di antara dua suku, bahkan sampai sekarang tidak selesai. Ia mengingatkan, apalagi Indonesia yang punya 714 suku. Kalau ada gesekan, segera selesaikan, sangat riskan sekali,” tutur presiden di kutip dari detik.com. Indonesia telah diselimuti ketakutan atas direbutnya kekuasaan politik. Bahkan dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung menyatakan Kita seperti hidup dalam dua Republik: *Republic of Fear* dan *Republic of Hope*. Akal sehat masyarakat tentu menghendaki perwujudan *Republic of Hope* namun, penguasa politik lebih memilih memelihara *Republic of Fear*.

Dinlansir dari bbc.com “Satu toko kue di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan di media sosial karena menolak menulis ucapan selamat natal permintaan pelanggannya pada kue pesannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang toko tersebut bertindak diskriminatif terhadap konsumennya”. Hal semacam ini menjadi semakin keruh ketika maraknya situs-situs berita abal-abal dengan menyebarkan berita *hoax* serta tidak mengindahkan etika jurnalistik menambah kesemrawutan informasi di Indonesia serta akun-akun fiktif yang semakin menyesatkan informasi.

Situs dan akun tersebut di bentuk oleh para *cyber army* yang bertujuan membela ideologi yang sama dan menyerang ideologi yang berbeda, riset yang dilakukan oleh Maarif Institut mendapatkan 57% responden percaya bahwa remaja yang sering terpapar konten konten cenderung mengembangkan sikap tidak toleran terhadap orang-orang dari latar belakang lainnya serta pidato yang membenci memiliki dampak besar pada kaum muda dalam membuat mereka bertindak dengan cara yang tidak toleran, sementara konten negatif di internet sangat mendorong insiden intoleransi dan diskriminasi,”

Penggunaan kalimat *hate speech* memancing reaksi beragam dari *netizen* dalam menyikapi sebuah isu. Hal ini tentu





memperkeruh isu diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis di Indonesia. Perkembangan teknologi disinyalir menjadi ruang untuk mempercepat gerakan diskriminasi, intoleransi, dan kekeasan ekstrimis melalui sosial media *Facebook, Twitter, Instagram*, dll karena telah terjadinya penggiringan opini (*cyber troops*) yang dapat berdampak perpecahan bangsa karena adanya perbedaan pandangan. Namun riset yang dilakukan oleh CSIS (*centre for strategic and international studies*) pada bulan agustus 2017 menyampaikan bahwa 54.3% generasi milenial membaca media online, dan 11.9% non milenial membaca media online. Tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan ekstrimis berawal dari pemahaman mengenai keyakinan tertentu adalah yang paling benar atau universalitas ideologi sehingga keyakinan atau ideologi orang lain yang berbeda itu salah.

Pembahasan

Detik.com Tenra pak index 2017 menyatakan 40% pengguna internet di Indonesia pengguna media sosial dari total pengguna internet sebesar 132 juta. Ini merupakan ladang bagi orang-orang yang menginginkan konflik vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuannya di Indonesia dengan memanfaatkan isu SARA sebagai senjata pemecah bela bangsa yang di sebar melalui sosial media. Munculnya aktivitas diskriminasi dalam kehidupan sosial masyarakat bertujuan untuk merubah kognitif maupun perilaku yang bersebrangan dengan nilai-nilai dianut oleh mayoritas, bentuk dari diskriminasi dapat berupa pembatasan aktivitas dan ruang gerak minoritas. Namun dalam kasus umum saat ini bentuk diskriminasi dalam sosial media adalah pandangan negatif atau prasangka terhadap minoritas sehingga dapat menurunkan harga diri seseorang. Penyebab munculnya prasangka adalah ketidakakutatan dalam mengelola informasi *heuristics* (jalan pintas dalam penalaran mental) sehingga terjadi pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, ras, suku, agama, golongan, dan





lain sebagainya. Sehingga menimbulkan aktivitas intoleransi, bahkan psikolog dari Harvard university Gordon Willard Allport dalam buku *the nature of prejudice* “di pojok dunia ini tak ada yang bebas dari cemoohan”.

Fromm dalam buku akar kekerasan menyampaikan bahwa konflik paling destruktif adalah konflik saudara yang tidak hanya menghancurkan fisik melainkan sosial, ekonomi, politik kedua belah pihak yang bertikai. Tentu kita semua tidak mau terjadi hal semacam ini di negeri kita tercinta Indonesia. Insting seksual dan insting mempertahankan diri, yang lantas ini diperbarui kembali dengan esens konsepnya yang menyatakan tentang insting eros (kehidupan) dan insting kematian. Dari pandangan psikologimunculnya sikap diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan di sebabkan adanya insting kematian pada manusia yang dapat memicu aktivitas kecenderungan merusak pihak lain. Hal ini merupakan pengembangan dari asumsi dasar bahwa manusia berada dalam pengaruh dorongan untuk merusak, sehingga kecenderungan agresi baik secara verbal melalui media sosial dengan ujaran kebencian dan agresi non verbal berupa kekerasan fisik, kecenderungan tersebut memang sudah dimiliki oleh manusia dalam dirinya. Sehingga stimulus melalui media sosial dapat memicu agresi manusia.

Terjadinya kasus diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis juga tidak dapat lepas dari terjangkitnya virus meme kognitif atau virus pikiran (*the virus of mind*; Richard brodie) oleh oknum-oknum pelaku diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis. Virus ini menyebar melalui tayangan televisi, koran, sosial media, bahkan dari hal yang sangat sederhana seperti berkomunikasi. Kebebasan berbicara mempercepat penularan virus pikiran, mereka biasanya muncul secara spontan atau bahkan diciptakan. Virus pikiran ini mengambil alih bagian otak hingga terlibat kegiatan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis. Jenis *meme allergen* memberi sinyal sehingga memicu reaksi, pada umumnya meme *allergens* termasuk *homofobia*, paranoid, anti-komunis, dan porno fobia. Bentuk umum reaksi meme





allergens adalah reflek, vandalisme, pelecehan verbal, pelecehan non verbal, dan kekerasan fisik. Bentuk semacam itu hampir setiap hari terjadi di Indonesia.

Solusi

Kemajemukan kita tafsirkan dengan mengucapkan *assalamu'alaikum*, salam sejahtera seolah-olah dengan cara basa-basi itu telah mempraktekkan pluralism, Asal usul pluralism di Indonesia ketika sumpah pemuda di ucapkan 17 tahun sebelum teks proklamasi di tulis, Undang undang dasar menyatakan bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat, tuhan tidak berdaulat di NKRI tuhan berdaulat di hati orang yang percaya adanya Tuhan. Untuk mencegah konflik yang dapat terjadi di Indonesia baik konflik di Indonesia (rakyat dan rakyat) atau konflik horizontal (rakyat dengan pemerintah) diharapkan penggunaan sosial media secara bijak harus segera digalakkan. Filosofe Charles Handy berpendapat, bahwa cara berpikir *mindset* kita berbentuk ruangan di rumah. Ada ruang tamu milik kita bersama, saya dan orang lain melihat hal yang sama, yang kedua, ruang privat, hanya saya saja yang mengetahuinya dan saya sangat memahaminya.

Lalu ada ruang misterius yang, baik anda maupun saya sama-sama tidak tahu. Kita dapat memanfaatkan ketidak tahuan individu untuk merubuh perilakunya. Tentu kita tidak perlu menjadi mereka untuk menyebarkan berita *hoax* di media sosial untuk mendapat perhatian *netizen*. Melalui media sosial kita dapat memberikan lagi pemahaman butir pancasila sehingga dapat di pahami oleh *netizen*. Tentu perlu di bentuk *cyber army* untuk menggalakan gerakan ini sehingga tujuan melawan gerakan diskriminasi, intoleransi, dan kekeasan ekstrimis dapat berhasil melalui pemahaman butir-butir pancasila. Laporan survei CSIS Agustus 2017 mengenai pancasila, 90.5% generasi milenial dengan rentan usia 17-29 tahun dan 85.4% non milenial usia diatas 30 tahun menolak jika ada gagasan pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi





lain. Dari data tersebut peluang Pancasila sebagai materi yang diviralkan melalui media sosial untuk melawan gerakan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis sangat besar. Dan penggunaan materi sumpah pemuda dapat di gunakan pula untuk melawan, karena tidak ada sumpah ke empat yang menyatakan “kami putra dan putri Indonesia beragama satu”.

Penggunaan virus meme kognitif di sosial media sangat dapat digunakan untuk melawan gerakan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis. Ketika virus dilawan dengan virus, hal ini ibarat kemoterapi bagi kanker di tubuh Nusantara. Teknis dalam penggunaan sosial media dalam melawan gerakan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis sama dengan *cyber troops* melakukan penguatan terhadap individu dengan penggiringan opini terhadap orang yang menolak adanya diskriminasi, intoleransi dan kekerasan ekstrimis dan pelaku diskriminasi, intoleransi dan kekerasan ekstrimis dengan menggunakan pancasila serta butir-butirnya dan penjelasan mengenai sumpah pemuda sebagai senjata.

Penyebaran materi dapat berupa kutipan dari sila, butir pancasila, dan penjelasan mengenai sumpah pemuda. Serta challenge pancasila dan sumpah pemuda, semacam gerakan “sudahkah anda menerapkan Pancasila dan sumpah pemuda pada hari ini, yang dapat diviralkan sehingga menjadi gerakan untuk menyebarkan pemahaman kebhinekaan atau pluralism. Pembuatan forum-forum diskusi online, atau *official account* mengenai perlawanan di berbagai jenis sosial media untuk memeberikan ayat-ayat dan fakta dengan pengguna bahasa atau pilihan kata yang menimbulkan efek sosio emosi, serta penggunaan media audio visual berupa video pendek dari potongan-potongan film atau video yang berkaitan dengan pluralism, pancasila, dan sumpah pemuda, tentunya ini menjadi perpaduan yang indah dalam perlawanan terhadap diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis di Indonesia. Tentunya kita juga harus siap menerima serangan balik dari pihak lawan. 🙏





7

Narasi Alternatif Organisasi Masyarakat Sipil di Media Sosial sebagai Kontra-Radikalisasi

KIRANA AISYAH

Menurut Jenkins (2009), radikalisasi adalah sebuah proses dalam mengadopsi sistem keyakinan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga memaksakan keyakinan tersebut kepada masyarakat. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan serta menghukum pihak lain yang pemikirannya tidak sejalan. Sementara itu, menurut Jensen (2006), radikalisasi adalah proses di mana seseorang secara perlahan mengadopsi pandangan dan gagasan yang mengarah pada legitimasi kekerasan. Baehr (2013) mendefinisikan radikalisasi dengan lebih komprehensif dan detail yaitu proses individu di mana mereka dipengaruhi aktor eksternal dan disebabkan oleh internalisasi dan pengadopsian gagasan dan pandangan yang ekstrem. Dengan gagasan tersebut, seseorang yang telah mengadopsi paham radikal akan mengusahakan perubahan sosial yang radikal dengan melakukan aksi teror untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, berkembangnya fenomena radikalisasi dapat dilihat melalui penelitian yang diadakan Wahid Foundation yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia mengenai potensi intoleransi dan radikalisme di





Indonesia. sosial-keagamaan di kalangan muslim Indonesia. Hasil dari survei tersebut di antaranya adalah mengukur potensi radikalisme sosial-keagamaan di kalangan muslim Indonesia, yaitu kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Hal ini antara lain diukur dari keterlibatan dalam perencanaan atau ikut melakukan sweeping hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat islam, melakukan demonstrasi menentang kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian islam; dan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain.

Survei menunjukkan 7,7% responden menyatakan mereka bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan 0,4% dari total responden mengaku pernah melakukan tindakan radikal. Bila angka potensi ini diproyeksikan pada sekitar 180 juta jiwa populasi muslim Indonesia, maka terdapat sekitar 13 juta orang yang bersedia melakukan tindakan radikal dan sekitar 700 ribu orang yang pernah terlibat dalam tindakan radikal.

Walaupun demikian, Sarwono (2012) menyatakan bahwa ancaman terbesar bukan dari radikalisme dan terorisme Islam, karena jumlah jumlah pengikut radikalisme Islam di Indonesia masih terbilang sedikit dibandingkan mayoritas umat Islam Indonesia yang cinta damai. Melainkan datang dari teknologi infomasi global dan media massa, yang makin lama makin tidak terkontrol oleh pemerintah, sementara komunitas dan media massa sendiri tidak mengembangkan sistem kontrol diri yang kuat.

Hal ini dapat dilihat dari penelitian NU Online atas 20 portal media islam yang memiliki trafik tertinggi. Terdapat empat kategori yaitu pertama, portal yang berbahaya dan sering mengampayekan kekerasan serta menolak pancasila, kedua portal yang tidak setuju dengan terorisme namun sering menyerang kelompok-kelompok di luar islam, ketiga portal yang tidak membahayakan dan hanya bersifat konservatif, keempat adalah portal yang mempromosikan perdamaian dan





Islam kebangsaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok radikal masih mendominasi portal-portal keislaman di Indonesia. Portal yang berada di peringkat pertama adalah portal dengan kategori kedua sedangkan portal dengan kategori keempat hanya dapat mencapai peringkat kelima. (Savic Ali, 2017).

Dalam proses radikalisasi, media baru dapat berperan sebagai *'echo chamber'*, seperti yang dijelaskan oleh Bjelopera (2011) bahwa internet memiliki peran dalam menormalisasi perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Internet juga membuat seseorang lebih mudah dalam mengakses muatan-muatan radikal yang sesuai dan dapat mengonfirmasi gagasan yang sudah dimiliki (Briggs and Strugnell, 2011; Shetret, 2011). Oleh karena itu, situs-situs islam yang didominasi oleh narasi radikal adalah suatu masalah yang cukup serius, apalagi ketika narasi radikal dari situs tersebut tidak diimbangi dengan situs-situs islam moderat yang menyebarkan nilai-nilai dan semangat yang bertolak belakang dengan narasi radikal.

Dalam kaitannya dengan radikalisasi di media baru dan media sosial, sejauh ini peran pemerintah dalam menangani kasus radikalisasi di media masih cenderung reaktif dan kurang melakukan aksi preventif. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memblokir situs-situs atau aplikasi yang dianggap mempromosikan radikalisme. Pada 14 Juli 2017 lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, resmi telah memblokir situs telegram. Hal tersebut didasari atas bukti yang kuat bahwa terdapat lebih dari 500 halaman ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian, dan sebagainya.¹

Tentu tindakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat dalam memberantas radikalisasi di ranah digital. Namun, efek dari pemblokiran situs radikal hanya bersifat

¹ Dirujuk dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170715122036-185-228099/konten-radikal-alasan-menkominfo-blokir-situs-telegram/>





sementara dan bukan solusi jangka panjang yang tepat. Walaupun beberapa kanal telah diblokir, terdapat cara-cara alternatif lain dalam menyebarkan paham radikal. Oleh karena itu, peran dari organisasi masyarakat sipil untuk melakukan kontra radikalisasi yang menitikberatkan pada penciptaan narasi alternatif yang mempromosikan nilai-nilai dan semangat yang berlawanan dengan radikalisme menjadi cukup penting.

Belum banyak penelitian dan literatur review yang membahas mengenai kontra radikalisasi, lebih banyak penelitian yang membahas mengenai deradikalisasi. Menurut UN Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), deradikalisasi adalah program yang ditujukan untuk individu yang sudah terpapar paham radikal agar orang tersebut dapat kembali hidup berdampingan di masyarakat atau setidaknya mencegah mereka dari bertindak kekerasan kembali.

Sementara itu, kontra-radikalisasi adalah kebijakan atau program yang bertujuan untuk menjawab kondisi dan penyebab yang membuat seseorang mengambil jalan terorisme. Konsep ini digunakan untuk mengacu secara luas mengenai program sosial, politik, legal, pendidikan, dan ekonomi yang memang sengaja dirancang untuk mencegah individu terutama yang rentan terpengaruh oleh paham radikal untuk melewati batas dan menjadi seorang yang radikal dan teroris. Oleh karena itu, fokus utama dari usaha kontra radikalisasi bukan ditujukan untuk teroris namun menguatkan dan memberdayakan masyarakat dan komunitas agar tidak terpengaruhi paham radikal. (Alex Shmid, 2013).

Pada tingkat yang lebih umum, sebuah laporan dari American Bipartisan Policy Center (2011) memaparkan bahwa tujuan dari kontra radikalisasi adalah menyoroti tiga hal utama yang ada dalam dinamika radikalisasi, yaitu *grievances*, *ideology* dan *mobilization*:

- *Counter-grievance*: Jika radikal ekstremis mengeksploitasi rasa tidak puas dan keluhan terhadap keadaan sosial dan politik saat ini, maka salah satu inti dari kontra radikalisasi adalah untuk mengatasi dan memberikan solusi atas rasa





tidak puas dan keluhan tersebut.

- *Counter - ideology*: Jika radikal ekstremis berusaha mempromosikan narasi ekstremis dan membuat ideologi mereka bergema, tujuan kontra radikalisasi adalah untuk mengekspos dan melawan gagasan semacam itu, serta mendidik masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melawan narasi ekstrimis, dan juga memberdayakan para tokoh masyarakat atau orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat tersebut untuk berbicara menentang ekstremis dan gagasan mereka yang keras.
- *Counter-mobilization*: Jika radikal ekstremis mencoba membangun jaringan dan merekrut pengikut, tujuan kontra radikalisasi adalah untuk membantu masyarakat membangun jaringan, pengetahuan, dan 'alat' yang bisa digunakan untuk menantang dan menolak usaha semacam itu.

Menurut Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt (2007), terdapat empat tahapan dalam radikalisasi, yaitu pra-radikalisasi, identifikasi, indoktrinasi jihadisasi. Pra-radikalisasi merepresentasikan kehidupan individu, mulai dari pendidikan, gaya hidup, agama, status sosial sebelum orang tersebut memasuki gerakan radikal. Dalam tahap identifikasi, individu mulai mengeksplor interpretasi yang spesifik dari kelompok islam radikal. Sehingga identitas awal mereka perlahan didefinisikan ulang oleh ideologi radikal tersebut.

Sedangkan indoktrinasi adalah tahapan di mana individu secara intensi menguatkan keyakinan mereka pada paham radikan tersebut serta mengadopsi paham tersebut tanpa mempertanyakan. Aspek utama dalam tahap ini adalah kesediaan dalam menerima paham radikal yang menjustifikasi, melegitimasi, dan mendukung kekerasan terhadap siapapun yang dianggap bertentangan atau tidak sejalan Dalam tahapan terakhir yaitu jihadisasi, individu mulai berpartisipasi dalam aktivitas radikal.



Mengacu pada tahapan di atas, maka upaya melakukan kontra-radikalisasi dengan menyebarkan narasi alternatif di media sosial ditujukan kepada masyarakat secara umum yang masih dalam tahapan pra-radikalisasi dan orang-orang yang rentan terhadap narasi radikal pada tahapan identifikasi. Narasi alternatif di media sosial yang dimaksud adalah penekanan terhadap nilai-nilai sosial yang positif untuk menggantikan narasi radikal (Briggs, Rachel dan Feve, Sebastien, 2013). Hal ini diperlukan untuk mengimbangi narasi radikal agar tidak diterima mentah-mentah oleh masyarakat. Sehingga tidak hanya sekadar melarang dan memblokir narasi radikal tersebut, melainkan menciptakan narasi alternatif yang pada dasarnya bertentangan dengan narasi radikal yang melegitimasi kekerasan.

Tabel 1: Counter-Messaging Spectrum

Apa	Mengapa	Bagaimana	Siapa
Strategi Komunikasi Pemerintah	Melawan narasi radikal dengan meningkatkan kesadaran publik mengenai program-program pemerintah terkait dengan pencegahan radikalisme.	Mengoreksi informasi yang salah serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder.	Pemerintah

Narasi Alternatif	Melawan narasi radikal dengan berfokus dalam menyampaikan narasi alternatif yang ditawarkan daripada mengkritik narasi radikal tersebut.	Menyampaikan narasi positif mengenai nilai-nilai sosial seperti toleransi, keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi	Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah
Kontra-Narasi	Mendekonstruksi, mengkritik, dan mendiskreditkan secara langsung narasi radikal	Menantang narasi radikal melalui ideologi, teologi, fakta, logika, humor serta mengekspos kebohongan dan propaganda dari narasi radikal tersebut.	Organisasi Masyarakat Sipil

Tabel di atas menunjukkan perbedaan jenis-jenis narasi dalam melawan radikalisme serta tujuan dan fokus dari masing-masing narasi. (Briggs, Rachel dan Feve, Sebastien, 2013). Menurut Sadik Harchaoui (2010), organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai penyampai narasi alternatif dalam melawan narasi radikal memiliki dua kekuatan utama. Pertama, organisasi masyarakat sipil dapat membawa tingkat kredibilitas terhadap upaya diplomasi publik yang tidak akan dicapai pemerintah. Hal ini dikarenakan organisasi masyarakat sipil tidak terlalu rentan terhadap manipulasi politik daripada organisasi pemerintah. Selain itu, karakter mereka yang tidak terlalu hierarkis dan independen, mereka lebih mudah



dipercaya sebagai mitra dialog.

Kedua, mereka dipersiapkan dengan baik untuk terlibat dalam dialog dengan khalayak luas termasuk khalayak asing karena memiliki keahlian dan kepentingan yang sama. Hal ini memungkinkan mereka mengatasi rintangan budaya dan menembus berbagai lapisan masyarakat secara luas (Sadik Harchaoui, 2010). Tujuan akhir dari setiap organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam konteks radikalisme dan ekstremisme kekerasan adalah dengan mengalihkan mereka yang terlibat, atau berisiko, jauh dari sikap maladaptif dan menuju integrasi sosial yang positif (Qureshi dan Marsden, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperlukannya lebih banyak narasi alternatif yang diciptakan oleh organisasi masyarakat sipil di media sosial sebagai bentuk kontra-radikalisasi. Dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan mengenai berkembangnya radikalisme di Indonesia serta dalam ranah digital media Islam didominasi oleh situs-situs radikal. Oleh karena itu, dibutuhkan narasi alternatif yang diciptakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di media sosial sebagai salah satu upaya kontra-radikalisasi dalam menjangkau masyarakat secara umum dan orang-orang yang rentan terhadap narasi radikal. 🙏





8

Pelintiran Kebencian, dan Fenomena Masyarakat yang Memakluminya

MUHAMMAD MUFTI M

Ramainya jagad media merupakan kesempatan yang subur untuk di manfaatkan oleh banyak kepentingan kelompok dan golongan. Hal ini tidak lepas dari modernitas yang terus berkembang, dan menuntut seluruh manusia terseret di dalamnya. Selain hal itu, konsekuensi sistem demokrasi yang di anut di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi pelengkap kebebasan dalam kehidupan, bernegara dan berdemokrasi.

Kehidupan yang semakin sehat, sebagai indikator demokratis dengan keterbukaan akses media. Masyarakat ditengah kondisi teknologi yang semakin maju akan turut ambil bagian, bahkan teknologi modern mengambil masyarakat sebagai peran utama mereka dalam menjadikan sumber keuntungan bagi media yang mereka jalankan.

Perkembangan modernitas di Indonesia sedikit banyak terbebani faktor-faktor keagamaan, hal ini tidak lepas dari Indonesia yang tidak menganut sistem negara sekuler, artinya nilai-nilai keagamaan akan selalu hadir dalam setiap wujud kehidupan masyarakat.

Modernitas yang lahir dari dunia secara umum secara





independen muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan, namun sedikit kesulitan dalam menyesuaikan apa itu perkembangan nilai-nilai agama yang ada. Artinya, semestinya modernitas yang ada harus mampu memberikan pandangan dan menjelaskan banyak hal baru untuk kesesuaiannya dalam pola nilai keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Modernitas bisa menentang atau mendefinisikan ulang beberapa aspek praptik-praktik keagamaan, juga mereka yang memiliki wewenang di dalam komunitas keagamaan dan sebaliknya. Sekalipun demikian modernitas dan agama tidak saling meniadakan satu sama lain sebagaimana anggapan banyak orang selama ini. (Ariel Heryanto 2015:48).

Menurut Asef Bayat, Modernisasi dan keagamaan pada akhirnya terus berkaitan, dengan berbagai perbedaan di setiap waktunya. Saat abad ke 19 para ilmuwan sosial hanya membedakan antara yang religius dan non-religius, namun setelah modernisasi masuk sekian lama, mereka berubah menjadi membedakan antara yang religius dan yang lebih religius.

Hegemoni, Agama, dan Keuntungan

Ternyata agama dan kapitalisme bukan hanya dapat hidup berdampingan dan memiliki keterkaitan, keduanya bahkan dalam beberapa kasus bisa bersekutu hingga mampu mendukung kegiatan-kegiatan kolektif yang berjangka panjang (Rudnykyj 2009), (Ariel Heryanto 2015:48).

Rekayasa media untuk sebuah keuntungan merupakan hal yang wajar, karena media lahir ditengah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sengaja dilahirkan untuk kepentingan ekonomi atau keuntungan. Namun, ilmu pengetahuan yang melahirkan media akan tidak dibenarkan ketika dalam melakukan roda perekonomiannya memanfaatkan agama sebagai ladang mereka untuk mendapatkan keuntungan, suatu hal yang di luar etis agama, membenturkan kesucian agama dengan perkara duniawi.

Kini banyak dijumpai media yang menjadi senjata utama oleh kelompok-kelompok untuk menebarkan kepentingan





buruk, menjatuhkan seseorang maupun kelompok. Semestinya mereka harus mampu melihat bahwa pengguna media merupakan masyarakat luas se-antero belahan bumi dengan banyak keberagaman dan perbedaan. Sehingga sudah seharusnya para pengguna media ini mampu menilai hal yang pantas untuk di sampaikan melalui media.

Membawa persoalan agama dalam media boleh-boleh saja, asalkan tetap proporsional dan tidak merugikan orang lain, bahkan menjatuhkan. Namun sebaliknya, ketika membawa persoalan agama dalam media dengan hal yang negatif akan menimbulkan persoalan yang dapat berbuntut panjang, selain merugikan bagi diri sendiri, akan membawa citra buruk untuk agama yang bersangkutan. Hal ini yang sering dibawakan oleh kelompok-kelompok yang sering melakukan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimis dengan memanfaatkan media sosial yang ada.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna media yang tinggi, hal ini tidak lepas dari media memang turut dalam mengentaskan masyarakat Indonesia dari buta huruf, namun angka melek huruf yang sudah cukup baik ini belum mengarah untuk hal yang positif, seperti membaca buku untuk mengembangkan wawasan, namun lebih tertarik kepada media yang memberikan informasi, dan minim koreksi di antara yang benar dan salah.

Indonesia secara resmi memiliki tingkat melek huruf yang tinggi (di atas 90 persen). Namun di luar data statistik itu angka resmi mengacu pada kemampuan untuk mengenali ketimbang kecenderungan sebagian besar penduduk untuk menggunakan secara maksimal huruf-huruf dan angka-angka. Dalam bab ini penggambaran Indonesia sebagai masyarakat berkiblat komunikasi lisan menyiratkan rendahnya melek huruf fungsional, yang berbeda dengan melek huruf nominal yang di ukur statistik, prioritas tinggi terhadap mode komunikasi yang cair sesaat dan kolektif (ciri menandai komunikasi lisan) ketimbang tindakan diam dan ststia individu dalam menulis dan membaca rangkaian teks yang seragam, (Cherian George





2017: 218).

Fenomena kebencian yang banyak dilakukan oleh kelompok ekstrimis radikal terlihat begitu subur, semua mendominasi karena sedikitnya counter balik berupa respon masyarakat yang muncul di media, sehingga keadaan tidak berimbang. Masifnya penyebaran kebencian ini hingga seakan menjadi suatu hal yang benar bagi masyarakat yang acuh terhadap kritis media sosial maupun masa.

Semestinya, masyarakat sebagai insan media mampu memberikan counter terhadap segala kebencian melalui media, namun masyarakat kita cenderung diam, hanya menjadi pembaca dan pengamat saja, tanpa juga memberikan ide dan gagasan mereka melalui media untuk melawan dengan meluruskan hal-hal keliru yang sudah banyak bertebaran.

Bagaimana masyarakat merespon pelintiran kebencian tidak hanya bergantung kepada hukum namun juga norma sosial, khususnya apakah orang menganggap kebencian fanatisme dapat di maklumi atau mesti di lawan, (Cherian George 2017:212).

Segala bentuk intoleransi dari kalangan ektrim radikal memang selalu dirancang melalui media, untuk di menjadi bahan konsumsi publik. Semua dapat lahir dan berjalan tidak terlepas karena kerja setiap fungsi unsur media.

Peran media selain seluruh masyarakat terlibat jurnalis mempunyai posisi strategis untuk mengembalikan media sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa. Namun, banyak ditemui peran jurnalis media cenderung bekerja dalam kepentingan, sehingga profesi yang seharusnya mampu untuk berbuat banyak dalam menghadapi penyalahgunaan media sering terhadang faktor kepentingan.

Jurnalis (media) juga memiliki peran pengungkapan atau pengawas. Mereka dapat mengungkap apa yang mesti diketahui publik tapi di tutup-tutupi kalangan elit yang berkepentingan. Jurnalisme pengawas (*watchdog journalism*) berperan mengungkap penipuan ganda pelintiran kebencian, yaitu: kebohongan propagandanya serta motif dan





kepentingan tersembunyi di belakangnya, (Cherian George 2017:213).

Berbagai media yang ada, dalam menghadapi segala bentuk pelintiran kebencian berbeda-beda dalam bersikap, namun kita perlu mengingat teori deklarasi pers, bahwa tidak ada jenis media yang dapat melayani semua kebutuhan komunikasi yang sangat majemuk dalam demokrasi.

Terakhir, C Edwin Bakrem berpendapat bahwa sistem media harus dinilai berdasarkan keberagaman sekaligus kualitas bagian-bagiannya. Dengan harapan media mampu hadir di tengah warna keberagaman yang ada, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang telah banyak diserap dalam berbagai aspek kehidupan seperti di Indonesia. 🙏







9

Refleksi Terorisme dan Perlawanan Media Sosial

MOHAMMAD FARIANSYAH

Suara ledakan bom terdengar kencang di sekitar kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat kala itu. Tidak hanya sekali ledakan melainkan dua kali dengan selang waktu 11 detik. Ledakan pertama terjadi di dalam gerai Starbucks dan disusul ledakan kedua yang terjadi di Pos polisi di depan Gedung Sarinah. Suasana pagi tertanggal 14 Januari 2016 tersebut sontak mencekam.

Polisi tidak tinggal diam menghadapi aksi tersebut. Polisi menutup Jalan MH Thamrin dari kedua arah dan mengamankan warga sipil yang berada di lokasi. Aksi teror belum usai, dua teroris bersenjata muncul dan melakukan tembakan ke arah polisi. Baku tembak selama 11 menit tidak terhindarkan dengan diikuti beberapa ledakan susulan. Aksi teror ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, dan 19 orang luka-luka.

Aksi teror Sarinah merupakan suatu pesan bahwa teroris adalah ancaman keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suasana mencekam tidak hanya dirasakan oleh warga sipil yang berada di tempat kejadian namun juga masyarakat





yang mengikuti perkembangan peristiwa lewat media. Berita simpang siur terkait aksi susulan pun terus bermunculan baik di media arus utama maupun media sosial. Situasi keamanan Indonesia sontak menjadi perhatian dunia.

Aksi teror Sarinah hampir dua tahun berlalu, namun para teroris terus bergeliat menyebarkan ketakutan di masyarakat. Semenjak aksi tersebut pihak kepolisian mencatat terdapat 170 tindakan terorisme pada 2016. Tahun berikutnya juga diwarnai sederetan aksi teror, salah satu yang menyita perhatian adalah aksi teror Kampung Melayu. Aksi dengan menggunakan bom panci tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 10 orang menderita luka-luka.

Jauh sebelum aksi aksi teror Sarinah, NKRI sejatinya telah banyak dihantam aksi terorisme. Mulai dari bom Bali 2002, penyerangan hotel JW Marriot Jakarta 2003, Kedutaan Besar Australia di Jakarta 2004, bom Bali 2005, dan banyak aksi teror lainnya. Aksi-aksi tersebut didalangi oleh kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini merupakan kelompok islam konservatif yang coba mendirikan negara islam atau daulah islamiyah. Beberapa nama teroris terkenal dari kelompok ini adalah Imam Samudra, Mukhlas, Ali Imron, Amrozi, yang terbukti melakukan aksi teror.

Bujuk Rayu Teroris

Aksi terorisme tidak hanya menghantam Indonesia, namun juga berbagai negara lain di dunia. Semangat mendirikan daulah islamiyah seperti yang dirintis oleh Jamaah Islamiyah juga terjadi dalam skala internasional dalam diri kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria). Kelompok ini berangan menegakan sistem pemerintahan khilafah di dunia. Sangat disayangkan kelompok ini dikenal menggunakan kekerasan dan bahkan tidak segan membunuh warga sipil dalam aksinya.

ISIS memiliki pengaruh kuat di wilayah Iraq dan Syiria. Ia menjadi musuh bagi pemerintahan resmi yang berkuasa. ISIS juga memiliki banyak anggota atau simpatisan yang tersebar di seluruh dunia. Kelompok ini dengan mudah memperdaya warga





sipil dari berbagai negara untuk berbaiat atau mengucapkan janji setia kepada negara tersebut. Cara yang digunakan ISIS untuk menjaring anggota adalah dengan menawarkan kehidupan yang ideal dengan berbagai fasilitas mulai kesehatan hingga rumah tinggal secara gratis. Bujuk rayu tersebut mereka sebar melalui internet.

Dalam laporan mendalam yang dirilis Jaring.id berjudul Jejak Langkah Pendukung Daulah dikisahkan nasib Buruh Migran Indonesia (BMI) yang kerap tergiur ajakan ISIS. Jaring.id memuat laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) terkait indikasi keterlibatan BMI dalam serangkaian kegiatan pro-ISIS.

Fakta lain yang dimunculkan dari laporan mendalam tersebut adalah awal hubungan BMI dengan jaringan ISIS adalah lewat media sosial *Facebook* dan *WhatsApp*. Kedua jenis perangkat lunak komunikasi tersebut digunakan untuk berkomunikasi, merayu, dan mendoktrin anggota ISIS agar tetap setia.

Dalam laporan tersebut juga dikisahkan perjalanan beberapa BMI menuju wilayah kekuasaan ISIS. Namun kebanyakan dari mereka menemui kegagalan ketatnya penjagaan wilayah perbatasan dan kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia. Kegagalan menembus wilayah ISIS tidak menyurutkan tekad anggota ISIS, muncul instruksi untuk tetap berjihad di manapun. Instruksi inilah yang menjadikan teror ISIS terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Potensi Rawan Media Sosial

Perkembangan teknologi telekomunikasi memudahkan manusia dalam berinteraksi satu dengan lainnya. Sekat ruang dan waktu yang dulu membatasi manusia untuk berkomunikasi kini telah terhapuskan. Sederhananya kini kita dapat berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun meski terpisah jarak jutaan kilometer.

Selain menghilangkan sekat ruang dan waktu, perkembangan teknologi juga berhasil menciptakan ruang publik di dunia maya. Teknologi media sosial menawarkan





ruang publik yang bisa dieksploitasi oleh pengguna untuk berbagai kepentingan seperti berkomunikasi dengan teman, jual-beli barang, bahkan mencari informasi tentang pekerjaan. Kebebasan interaksi di ruang publik tersebut pada akhirnya berelasi dengan proses demokratisasi mengingat pengguna bebas menyampaikan apapun, baik mengkritik ataupun dikritik.

Beragam bentuk teknologi hadir untuk menciptakan ruang-ruang publik di dunia maya. Media sosial macam Facebook, Instagram, dan Twitter memiliki jumlah pengguna yang terbilang besar di Indonesia. Dilansir dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APII) pada 2016, Facebook memiliki 71.6 juta pengguna aktif, Instagram 19.9 juta pengguna aktif, dan Twitter 19.5 juta pengguna aktif setiap harinya. Jumlah penduduk Indonesia kini berkisar di angka 262 juta jiwa pengguna internet menurut APII menyentuh angka 132.7 juta, maka bisa diartikan setengah dari jumlah penduduk Indonesia menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

Kesempatan dan peluang yang sama juga dimanfaatkan oleh teroris dalam melancarkan bujuk rayunya kepada warga sipil. Selain itu mereka juga memanfaatkan ruang publik sebagai sarana menyebarkan pemikiran diskriminasi intoleran. Pemikiran tersebut tersampaikan melalui ujaran-ujaran kebencian yang memantik masyarakat melakukan diskriminasi intoleran kepada kelompok masyarakat tertentu. Dalam situasi kebencian tersebut teroris masuk dan mempengaruhi masyarakat bahwa konsep pemerintahan berdasar syariah islam merupakan satu-satunya jalan menuju kehidupan ideal.

Memberdayakan Media Sosial

Media sosial merupakan ranah rawan yang bisa dimanfaatkan siapapun, termasuk teroris untuk berbuat kejahatan. Hal yang ditakutkan tidak hanya sampai pada tingkat bujuk rayu, namun juga media sosial bisa menjadi awal dari tindakan kekerasan oleh ekstrimis. Selain konteks terorisme, media sosial juga merupakan ranah untuk melakukan tindakan





penipuan hingga kekerasan seksual.

Serangkaian potensi rawan media sosial tersebut juga bisa dilihat dari sudut pandang lain. Media sosial juga bisa menjadi alat perlawanan penyebaran bujuk rayu teroris dan diskriminasi intoleran. Iklim interaksi di media sosial harus dibuat secepat mungkin dengan banyaknya penyuluhan terkait realita dinamika gerakan terorisme yang telah terjadi. Hal ini kurang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Saya melakukan pengamatan terhadap laman dan akun media sosial (facebook dan twitter) BNPT. Saluran-saluran tersebut digunakan sekedar menjadi penyampai press release kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNPT. Memang, hal ini membuktikan bahwa BNPT telah melakukan sosialisasi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun pesan semacam itu tidaklah cukup untuk memaksimalkan potensi media sosial sebagai alat perlawanan.

Media sosial sudah selangkahnya difungsikan sebagai media perlawanan dan sosialisasi seluk beluk terorisme. Terbayang jika aku media sosial milik BNPT memiliki konsep yang menarik dan interaktif dengan kampanye wacana yang efektif. Hal ini tentu akan menarik perhatian masyarakat untuk tahu lebih dalam tentang bahaya terorisme. Wacana bahwa terorisme berbahaya dan NKRI harga mati harus direproduksi ulang.

Dalam tataran personal, sejatinya media sosial ibarat senjata api, teknologi ini bisa memperlihatkan eksistensi kita atau bahkan membunuh kita. Ungkapan *who's men behind the gun* menjadi penting disini dimana kita harus menentukan fungsi dan kegunaan media sosial. Dengan menentukan fungsi dan kegunaan, kita dapat menentukan batasan sekaligus membangun dinding pertahanan yang kuat. Pengguna media sosial secara personal juga harus mendukung wacana besar untuk melawan terorisme dan aksi kekerasannya. Peran serta masyarakat yang tersosialisasi merupakan bentuk perlawanan kongkrit terhadap terorisme.

Teroris dengan segala jaringan dan sistem yang dimilikinya





akan selalu bergeliat. Mereka bersikukuh dengan tekad awal mereka mewujudkan pemerintahan dunia berdasarkan sistem khilafah. Kekerasan merupakan cara utama mereka mencapai tujuan tersebut. Bujuk rayu warga sipil juga dilakukan demi meningkatkan kekuatan. Salah satu alat perlawanan adalah media sosial yang memiliki jutaan pengguna di Indonesia. Sosialisasi terkait bahaya terorisme harus terus dilakukan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Hal ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan ideologi kita Pancasila. 🤝





10

Media Sosial sebagai Alat Perlawanan Terhadap Diskriminatif, Intoleransi dan Kekerasan Estrimis

MUHAMMAD SOLEH

Kasus intoleransi yang berujung pada kekerasan sosial sepertinya sudah menjadi budaya baru bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan sopan. Masih hangat ingatan kita dengan kasus yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, tidak dikeluarkannya izin mendirikan tempat ibadah, dan larangan melakukan diskusi di kampus hingga kasus intoleransi yang berujung pada perusakan dan kekerasan sosial. Kejadian intoleransi yang berimbas pada kekerasan sosial tentu menjadi komoditas yang laku untuk diperjualbelikan. Media massa masih menganggap “*Bad news is a good news*” karena berita-berita seperti itu pasti akan menarik perhatian masyarakat.

Seperti di era Medsos sekarang ini, banyak diwarnai dengan munculnya berbagai kasus berbasis agama di Indonesia, dengan media sosial yang ada antara lain *facebook*, *youtube*, *twitter*, blog, WA, telegram dan sebagainya. Setidaknya, beberapa daerah yang dijadikan penelitian berbagai kelompok peneliti ataupun *civil society* lainnya antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Pontianak, Makasar, dan





Surabaya.

Dilihat dari banyak hasil survei, maka dapat digambarkan mozaiaknya secara garis besar yaitu sebagai berikut :

Pertama mayoritas anak muda tidak yakin bahwa radikalisme dan ekstrimisme agama dimotivasi oleh keinginan syariat Islam sebanyak 75,6%, serta tidak setuju kekerasan dilakukan kelompok agama 88,2%, dengan alasan tidak sejalan dengan nilai-nilai agama 44,3%.

Kedua, akses media sosial dan internet anak muda dilakukan setiap hari 60,4% dan membuka *facebook* 76,7%, email 58,4% dan akses internet melalui *handphone* 87,8%.

Ketiga, anak muda Indonesia masih bangga menjadi WNI dengan kebhinekaan 94,5% dengan alasan beragam suku dan agama saling menghormati 29,7% dan masyarakat saling membantu 26,8%. Sementara pihak yang berpengaruh membentuk keyakinan beragama 70,3%, dan guru agama 6%.

Keempat, untuk menghindari radikalisme dan ekstrimisme 24,8% percaya dengan belajar agama, 20,4% jangan terprovokasi dan 10,9% beraktivitas yang positif.

Disamping itu, banyak narasi yang dikembangkan dalam perbincangan bahkan perdebatan ataupun hal-hal berbau hoax di Media sosial, mulai dari kepentingan AS vs Tiongkok di Indonesia, demokrasi vs kapitalisme, negara berkembang vs negara maju, muslim vs kafir, keadilan vs liberalisme, Pancasila vs khilafah Islamiyah sampai kepada perbincangan dan meme terkait bahaya kebangkitan komunisme.

Dari berbagai perbincangan tentang radikalisme di Media sosial dapat disimpulkan bahwa awal radikalisme antara lain sistem demokrasi yang buruk, kaum kafir adalah musuh yang akan menghancurkan Islam, adanya musuh Islam yang mengancam seperti kafir, komunisme dan liberal, dunia terbagi dua yaitu muslim dan kafir, dan umat Islam didzolimi di daerah mayoritas non muslim. Yang ingin dibentuk adalah umat Islam ditindas, didzolimi dan diperlakukan tidak adil. inilah sebenarnya narasi besar akan radikalisme dan esktrimisme.

Salah satu isu yang paling hangat adalah isu kebangkitan





komunisme di Indonesia, khususnya di sejumlah media sosial karena beredar postingan kebangkitan komunisme di Indonesia dikaitkan dengan masuknya para pekerja dari Cina.

Masalah ini sebenarnya sudah dinetralisir oleh para pejabat negara yang berkompeten, namun nampaknya terus menggelinding sehingga menjadi tantangan berat bagi komunitas Kominfo di Kementerian atau Lembaga untuk bersinergi mengatasi masalah ini, dengan membuat narasi yang masuk akal dan sesuai dengan fakta yang benar. Sebab, kata Abraham Lincoln, masyarakat sebenarnya dapat dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara, dengan satu syarat yaitu berikan mereka fakta yang benar.

Menurut beberapa pakar Medsos, nalar narasi sangat berperan dalam seseorang untuk melakukan ataupun meyakini sesuatu itu atau tafsir atas teks, dan dalam radikalisme yang dilakukan tafsir dalam realitas. Oleh karena itu, interpretasi media sosial tidak pernah memberikan realitas yang sebenarnya sehingga orang sangat mudah percaya medsos tanpa klarifikasi atas narasi-narasi radikal. Akhirnya, banyak kalangan menyarankan pentingnya bahwa menyadarkan seluruh lapisan masyarakat untuk menyadarkan narasi sejarah bangsa Indonesia sehingga tidak mudah ikut atau mencari narasi lain yang mengingkari sejarah NKRI seperti ingin mendirikan Khilafah.

Namun jika dipandang dari lapisan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh media dapat berdampak pada sikap intoleransi yang dapat berujung pada kekerasan sosial di masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya “melek media” (media literacy) karena apa yang disampaikan oleh media kadang tidak selalu sesuai dengan realitas social, dan memberikan masukan kepada media agar berperan sebagai penengah dan pencari solusi atas berbagai tindakan intoleransi dan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia.

Menurut Hafizen dari Lembaga Kajian Islam Sosial, Media cetak, media elektronik menjadi hal yang sangat penting





untuk membentuk pola pikir masyarakat, oleh karena itu, media televisi sering disebut sebagai *magic box*. Media harus menjadi alat untuk penyampai informasi yang sesuai dengan fakta, bisa menjadi *early warning system*, sebagai *social control* masyarakat, dan diharapkan media harus lebih condong dalam membela kepentingan hak asasi manusia, bukan malah mementingkan kepentingan politik pemilik media.

Sebenarnya Media Sosial memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir intoleransi serta kekerasan, diantaranya *talkshow* dengan melibatkan tokoh yang netral, iklan layanan masyarakat, dan radio komunitas. Radio komunitas berperan sebagai media yang mampu merangsang demokrasi dan dialog masyarakat sekitar radio komunitas, menenangkan dan mendamaikan suasana, dan sebagai alat perlawanan terhadap diskriminatif intoleransi yang sedang terjadi Negara kita ini.

Media massa juga harus dipandang sebagai institusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya. Media mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dalam masyarakat sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang dalam melaporkan konflik, harus ikut mencegah konflik dan dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Media dapat juga mengambil fokus pemberitaan akibat yang ditimbulkan oleh konflik sehingga diharapkan pihak yang bertikai menyadari akibat yang ditimbulkan dari konflik itu. Hal ini menjadikan media merupakan bagian dari solusi dalam meredam konflik dan bukan malah memanas-manasi serta memperburuk konflik. ☹️





11

Media Sosial sebagai Benteng Penjaga Perdamaian Masyarakat Indonesia

SILVIA ANANDA

Beberapa tahun belakangan ini kita tidak asing dengan media sosial, ruang kasat mata yang kita gunakan untuk berbagi informasi, berinteraksi dan mengenal semua orang dari belahan bumi manapun. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak juga ikut mengambil andil yang besar dalam perkembangan sosial media. Merujuk dari laman Wikipedia Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke 4 sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Menurut data BPS tahun 2015 Indonesia memiliki jumlah penduduk 255,461,700 jiwa.

Menurut data yang di himpun oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia sebsar 132,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat di Indonesia telah menggunakan internet.

Infografis diatas menunjukkan perilaku pengguna internet Indonesia melalui konten yang diakses dan yang paling tinggi adalah mengakses sosial media. Media sosial ibaratkan dua



mata pisau, memiliki sisi yang baik dan sisi yang buruk.

Sisi baik media sosial adalah mendekatkan yang jauh, menyambungkan komunikasi, dan mempercepat penyampaian informasi. Lantas hal buruk apa yang terdapat dari penggunaan sosial media? Ada beberapa hal buruk dari penggunaan media sosial yaitu secara tidak sadar menjadikan pengguna sebagai anti sosial dan individualis, menyerap informasi secara sembrono tanpa mencari kebenarannya, mempersempit ruang *privacy*, dan tanpa disadari tempat terjadinya cyber bullying. Kecepatan akses informasi tidak dibarengi dengan minat baca yang baik di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan studi *Most Littered Nation in the World* Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 61 negara. Hal ini membuat oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan sosial media sebagai ajang untuk menfitnah, diskriminasi, intoleransi demi tujuannya masing-masing agar tercapai.

Membuat postingan yang menjatuhkan dan tidak didasari dengan sumber informasi yang jelas membuat para pengguna media sosial menyerap informasi yang salah dan tidak mencari kebenaran dari postingan orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk memecah belah.

Alhasil terjadilah *cyberwar* saling menyudutkan satu sama lain untuk sesuatu yang kebenarannya diragukan. Rasis, intoleransi dan diskriminasi terhadap suatu golongan pun terjadi.

Lantas apakah kita harus diam menerima kenyataan bahwa, saudara kita di luar sana disudutkan, teman kita di-bully hingga membuatnya takut keluar rumah? atau kita yang di adu domba demi kepentingan politik atau apapun itu, dan semua itu dilakukan oleh masyarakat kita sendiri yang mudah sekali termakan isu. Tentu saja jawabannya adalah tidak. Pemerintah telah berupaya keras meredam isu SARA, Intoleran, radikalisme yang menggunkan sosial media sebagai sarana nya memancing masyarakat awam yang inginnya "berilmu" instan. Menyebarkan informasi yang berbau *hoax*. Berdasarkan wikipedia bahasa Indonesia, *hoax* diartikan



sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Kementerian Kominfo telah berupaya meredam pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoax dengan membuat mesin pengais konten negatif atau “Ais” dan akan beroperasi pada 3 Januari 2018 mendatang yang berfungsi menonaktifkan situs yang berbau SARA, radikalisme, perjudian dsb.

Sudah seharusnya kita mendukung pemerintah untuk memberantas situs media sosial penyebar berita bohong serta memecah belah. Pemerintah telah mengambil bagiannya, sekarang giliran kita sebagai warga negara juga harus mendukungnya dengan berbagai cara yaitu :

1. Mengajarkan toleransi sedari dini mulai dari keluarga, sekolah hingga lingkungan organisasi.
2. Meningkatkan dan menyadarkan masyarakat kita bahwa menggali informasi dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran dari suatu isu adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan.
3. Meningkatkan kesadaran diri serta lingkungan untuk *me-report* situs berita dan akun media sosial yang berisi menyebarkan berita bohong.
4. Aktif berperan serta menyuarakan ke Bhinekaan yang memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia melalui media sosial.
5. Aktif mengkampanyekan toleransi disosial media, membantu memberantas hoax dengan menyediakan fakta dan data yang akurat.
6. Membuat forum diskusi online sebagai upaya meningkatkan kesadaran toleransi antar warga negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat terutama di media sosial.

Sejatinya toleransi telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia sejak dari masa penjajahan. Itulah sebabnya





mengapa semboyan negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yang artinya “Berbeda-beda tetapi tetap satu” hal ini dianggap sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbeda suku, agama, ras, bahasa dan sebagainya. Ada 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010, dan mengutip dari laman National Geographic terdapat sebanyak 742 bahasa di Indonesia. Namun, oknum tidak bertanggung jawab berusaha merusak toleransi yang ada di dalam diri masyarakat kita. Sekarang saatnya kita sebagai pemuda turut serta membantu memperkuat keragaman masyarakat Indonesia, jangan sampai kita yang menjadi korban dan termakan isu bohong. Benamkan semangat kebhinekaan dalam diri demi Indonesia yang lebih damai serta aman. 🌙





12

Media Sosial sebagai Alat Perlawanan terhadap Diskriminasi Intelektual dan Kekerasan Ekstrimis

SULTRIANA

Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku, bangsa, budaya dan agama. Realitas kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia.

Sebagai masyarakat sudah seharusnya kita mempunyai cara pandang yang positif tentang kemajemukan. Hampir seluruh ajaran agama yang ada memiliki cara pandang bahwa kemajemukan terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus diterima dengan lapang dada dan dihargai, termasuk di dalamnya perbedaan konsepsi keagamaan.

Perbedaan konsepsi di antara agama-agama yang ada adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsepsi itu terjadi pada hampir semua aspek agama, baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan. Hal ini dalam prakteknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat





berbeda agama dan konflik diantara umat beragama.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia. Interaksi yang dibangun bersifat intensif dan massif. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Interaksi tidak hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi juga antara satu individu dengan kelompok individu, atau antara kelompok individu dengan kelompok individu lain. Dengan adanya interaksi tersebut, disadari atau tidak, akan melahirkan benturan kepentingan antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, karena perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Kelompok yang memiliki dukungan sosial baik dari aspek kuantitas maupun kualitas akan berhasil mewujudkan kepentingannya dan dapat mempengaruhi opini publik yang disebut sebagai kelompok mayoritas.

Keberadaan kelompok mayoritas dalam masyarakat secara otomatis memunculkan kelompok minoritas, yaitu kelompok yang ditinjau dari segi aspek kuantitas maupun penguasaan dan kontrol terhadap wilayah publik cenderung lebih kecil. Kelompok ini umumnya dianggap sebagai komunitas sosial kelas dua yang berada di bawah pengaruh mayoritas dalam kehidupan sosial.

Pengaruh kelompok mayoritas terhadap minoritas sering kali menyentuh hal-hal yang prinsipil, seperti keyakinan beragama, dan kebenaran yang diyakini oleh kelompok mayoritas dianggap sebagai suatu keyakinan beragama yang paling normatif dan profan serta dianggap sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan yang harus dihormati dan diikuti oleh kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas yang memiliki keyakinan beragama berbeda dengan kelompok mayoritas, mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang telah melawan keyakinan arus utama. Mereka pun mendapatkan berbagai tekanan dan tindakan provokatif serta represif dari kelompok mayoritas, seperti pelabelan





sebagai kelompok sesat, kafir, dan sebagainya. Bahkan sampai pada tindakan-tindakan brutal seperti penyerangan dan pembantaian terhadap suatu kelompok.

Di dunia Islam pada umumnya, mayoritas kajian tentang Syi'ah di Indonesia masih berkuat pada beberapa doktrin yang dianggap "problematik", terutama dari perspektif maenstream muslim Indonesia yang berhaluan Sunni, seperti konsep imamah, nikah mut'ah, keadilan para sahabat, dan persoalan fikih lainnya.

Jika kita mengulas sejarah terkhusus di Indonesia, perlakuan kekerasan yang dialami oleh penganut Syi'ah tidak hanya sekali atau dua kali. Melainkan kekerasan yang dialaminya sejak runtuhnya masa orde baru yakni Era reformasi seperti pembakaran Pondok Pasentren al-Hadi di desa Brokoh pada tanggal 14 April 2000 Batang, Jawa Tengah, yang mengakibatkan beberepa kerusakan material seperti gudang, rumah dan mobil. Belum lagi kasus yang terjadi di Sampang dan sampai saat lima tahun terakhir ini kasus penyerangan terhadap penganut Syi'ah masih bergulir yakni penyerangan terhadap Pondok Pasantren Rausyan Fikr di Yogyakarta pada tahun 2013.

Mengingat era Reformasi adalah suasana kebebasan beragama, maka tak heran jika banyak dimanfaatkan oleh orang yang berkepentingan dan menurut tafsiran masing-masing. Semenjak orde baru berkhir, era kebebasan di Indonesia meluas. Pemerintah dinilai tidak menanggapi dengan tegas saat terjadi intoleransi, seperti kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Bahkan temuan peneliti LIPI menyebutkan bahwa penyebaran paham radikal meningkat, bahkan di kalangan anak muda. Di era ini jugalah banyak bermunculan paham Fundamental, seperti Wahabi dan Salafi dan sejenisnya.

Secara umum, opini, wacana atau isu-isu penyesatan, pengkafiran dan menggagap ajaran Syi'ah bukan bagian dari Islam, itu semua merupakan persoalan perbedaan pandangan secara teologi yang menurut mereka bukan





hanya perbedaan pandangan secara Furuiyah atau cabang yang berkaitan dengan fikih seperti persoalan nikah Mut'ah, Rafidha, Taqiyah, pengkafiran sahabat dan juga menyentuh persoalan perbedaan Ushuli atau pokok, yaitu berkaitan dengan akidah seperti keyakinan tentang Imamah. Berbagai wacana itu merupakan wacana vital yang selama ribuan tahun menjadi sumber konflik berdarah antara kelompok Syi'ah dan kelompok mayoritas yakni Sunni.

Alasan yang juga telah dikaitkannya yakni perkembangan politik luar negeri, khususnya yang terjadi di Timur Tengah seperti Suriah, Yaman dan Libanon dan pastinya Iran, mereka memandang bahwa yang menjadi dalang di balik peristiwa itu adalah kelompok Syiah.

Terkait dengan permasalahan yang ada, maka perlu adanya penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik bisa dilakukan oleh beberapa dimensi seperti menghindar, mengakomodasi, kompotisi, negoisasi, memecahkan masalah atau kolaborasi dan bisa juga melawan, bentuk perlawanan bisa dilakukan beberapa cara juga. Seperti Gerakan Wacana dalam bentuk media sosial (tulisan) atau menggunakan *Spiral of Silence*. Karena wacana memiliki karakteristik sebagai tindakan.

Dengan pemahaman seperti ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana pada dasarnya tidak ditempatkan pada ruang tertutup dan internal. Apa yang disampaikan oleh orang atau kelompok tertentu baik melalui perkataan maupun lewat tulisan tidak hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Seseorang atau kelompok berbicara, menulis dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman ini, sehingga wacana memiliki konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang memiliki tujuan apakah untuk mempengaruhi, mendebat, menyangga, bereaksi dan sebagainya. Karena itu, ketika seseorang atau kelompok tertentu berbicara dan mengemukakan pandangannya, sudah pasti memiliki maksud





dan tujuan tertentu baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang diekspresikan secara tidak sadar dan di luar kendali.

Spiral of silence theory dikenal juga dengan teori spiral kesunyian, dan sering juga disebut spiral kebisuan. Menurut Richard West & Lynn H. Turner, Noelle-Neumann menyatakan dalam teori *Spiral of Silence* bahwa ada tiga asumsi dasar yang mendasari teori tersebut yakni : pertama, bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi atau rasa ketakutan akan isolasi tersebut. Kedua, ketakutan akan isolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai opini secara terus-menerus. Ketiga, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh penilaian opini publik.

Ada hal yang sangat urgen dalam teori *Spiral of Silence* yaitu pengaruh media massa. Noelle-Neumann percaya bahwa media mempunyai peran yang kuat dalam mempercepat proses gerak dalam *Spiral of Silence*. Walaupun setiap individu atau kelompok tertentu berusaha untuk mengamati dan menganalisis iklim opini publik, pengamatan langsung hanya memberi sebagian kecil informasi yang dapat digunakan. Karena itu, media cetak dan elektronik memberikan sebagian dari pengetahuan kita tentang dunia di sekitar kita. Dan teori lingkaran kesunyian ini menggambarkan fenomena mempublikasikan opini publik, kemudian memperjelas opini mana yang menonjol. Selanjutnya, individu-individu menyatakan opini mereka . Dan selanjutnya, media kemudian melibatkan diri kedalam opini yang diekspresikan tersebut, dan lingkaran itu terus berlanjut.

Pada beberapa fenomena, teori lingkaran kesunyian dapat pula menggambarkan bagaimana sebuah ancaman-ancaman kritik dari orang lain merupakan suatu kekuatan yang ampuh dalam membungkam seseorang.

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kerugian baik material maupun fisik, penganut Syi'ah (seperti yang dilakukan oleh pondok Pasantren Rausyan





Fikr dan komunitas Human Illumination Makassar) lebih memilih memanfaatkan media untuk mengekspresikan apa yang menjadi gagasannya. Seperti menulis di beberapa media bahkan mereka melawan dalam bentuk gagasan yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan di beberapa media sosial seperti *Facebook*, Blog dan sebagainya.

Menulis di media sosial adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh penganut Syi'ah untuk menghindari konflik dan melindungi identitas mereka sekaligus menyampaikan gagasan mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi yang dialaminya. 🙏





13

Cyberspace dan Bubble Effect:
Sebuah Tantangan Dimensi Maya
Atas Tatanan Sosial dan Perdamaian
di Tengah Kecamuk Massa
SYIHABUL FURQON

/1/
Pada awal milenium ketiga ini, tentu kita banyak melihat betapa kemajuan di berbagai ranah pengetahuan semakin menaik tajam. Lihat saja, misal grafik peningkatan yang mencolok ditunjukkan Sains, terutama sains terapan (yang bersifat positivistik) baik itu perangkat keras, hingga perangkat lunak seperti yang terjadi hingga sekarang ini. Itu terjadi karena produktifitas dan efisiensi manusia semakin ketat menuntut suatu kenyamanan. Seperti dituturkan dalam salah satu majalah selular bahwa: untuk menjawab suatu tantangan hidup diperlukan suatu Ketepatan, Kecepatan demi menunjang efisiensi dalam berkegiatan dalam dunia globalisasi ini. Karena tanpa itu semua manusia akan sangat kesulitan dalam bekerja (Roger Fidler, 2003: 8).

Terbukti, perkembangan perangkat maupun jaringan telekomunikasi itu semakin menggebrak dari 2008/2009 hingga serkarang ini. Tercatat khususnya dari 2008 di sektor





perangkat komunikasi seperti HP (*Handphone*) atau telepon genggam mengalami persaingan dan perkembangan. Seperti sudah menjamurnya digital camera yang merajalela menjadikan standar baru alat telekomunikasi hari ini. Hingga sekarang, yang menjadi sorotan penting dalam alat telekomunikasi adalah dari segi resolusi layar dan *key-pad* yang menunjang kenyamanan dan ketepatan juga kecepatan saat berkomunikasi. Tengok saja, kita sekarang dapat dengan mudah menemukan perangkat gadget elektronik dengan ukuran layar yang ultra dengan efisiensi memukau hingga penyesuaian keluaran cahaya yang memanjakan mata.

Di atas semua itu, terhitung dari awal 2009 kuartal ketiga hingga akhir 2010 perang persaingan tidak lagi ditunjukkan secara signifikan di segi perangkat keras, karena di fase ini yang menjadi *Public Center* adalah perang perangkat lunak atau OS (*Operation System*). Mulai dari *Microsoft*, *Symbian*, *iOs* teranyar, lalu perangkat besutan RIM (*Risearch In Motion*) dan dipungkas oleh pabrikan Google, yaitu Android yang terutama sedang marak membombardir pasar. Bahkan bukan saja itu, di pojokan Industri luar yang sedang menggila, kita juga akan mendapati geliatnya pasar lokal yang ikut menyemarakkan penyakit akut akan teknologi.

/2/

Berbondong-bondong manusia berambisi untuk membongkar cangkang di dalam cangkang alam semesta ini yang belum terjawab. Mungkin di sini, boleh saja kita mengasumsikan bahwa bapak modern kitalah—dengan pemahamannya yang diselewengkan orang setelah zamannya—dunia harus dipahami secara mekanistik Jelas dan Terpilah ala Rene Descartes. Alih-alih menyingkapkan tabir dunia yang kompleks dengan kemajuan atas pemecahan bidang sains—hingga menjadikanya kajian yang universal dan sekaligus reduktif, hal ini malah menjadikan hidup kita itu tak ubahnya hanya segumpal darah dan himpunan daging yang





bergerak secara mekanis.

Kita terlempar ke dunia yang sudah seakan tidak lagi berputar dengan kecepatan poros bumi, kita terlempat dalam realita yang super cepat. Dimana ruang tidak lagi melebar seperti yang selama ini kita ketahui. Ajang panggung pentas drama maha akbar telah digelar jauh hari dan kenyataannya kita hidup hari ini dengan zaman itu, Yasraf menyebutnya zaman teknologi (Yasraf Amir Piliang, 1998: 46).

Semua ini, diakselerasi oleh apa yang kini kita sebut sebagai teknologi. Teknologi, mengisi ruang hidup (*lebenswelt*) dan memperluasnya. Pelbagai ranah kehidupan, sebagaimana telah disinggung Don Ihde, dipercepat, diperbesar dan diperlebar. Hal ini sebangun dengan kian canggihnya sebuah teknologi memperentari manusia, maka semakin berubahlah persepsinya atas waktu. Gambaran mengenai waktu yang dipercepat ini bisa kita temui dalam satu fakta bahwa satuan waktu kian berubah setelah moda transportasi berkembang sedemikian cepat. Realitas yang diperbesar, sehubungan dengan semakin ekspansifnya manusia menggunakan perangkat yang dapat memagnifikasi. Sementara realitas yang diperlebar adalah realitas yang, sejak pertengahan milenium 20 diwanti-wanti sebagai *cyber-space* (dunia siber). Semua hal ini, pada titik tertentu, menggiring manusia pada pertanyaan eksistensial mengenai dirinya sendiri dan realitasnya.

Di titik ini, pertanyaan muncul: benarkah manusia hidup otentik? Sehubungan dengan dirinya, sejauh mana realitas adalah realias itu sendiri dan bukan realitas manipulatif. Sehubungan dengan relasi teknologis pertanyaan baru muncul: sejauh mana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia—alih-alih membuatnya manusia yang otentik? Dan pertanyaan terakhir, sejauh menyangkut realitas-maya; sejauh mana ia adalah realitas sebagaimana adanya?

Dalam apa yang orang katakan dengan kehidupan yang bebas, jika kita bertolak dari hal-hal di atas, tertanya tidak demikian adanya. Realitas di mana kita hidup tidak lagi bisa





dikatakan murni, karena kita seakan-akan sedang dibayangi oleh suatu *panoptik* (semacam kamera pengintai). Kebebasan menjadi semacam halusinasi yang dipaksakan untuk selalu ada.

Bahkan dalam suatu tatanan negara yang demokratis, nilai demokrasi menjadi hisapan jempol belaka jika kita meninjaunya dari sisi yang lebih mendetail. Ada sebuah data menunjukkan bahwa sistem demokrasi saat ini tidak lagi mengutamakan kesetaraan hak dalam berpendapat. Terlebih setelah para kapitalis di wilayah ekonomi menyerukan neolib (neoliberal) dengan sistem pasar bebas. Jelas bahwa demokrasi sekarang bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang sedari awal diakal-akali untuk kepentingan mereka, entah itu ekonomi dan atau politik.¹

Orang dengan demikian tak lagi memilih dan melakukan sesuatu dengan kehendak bebasnya (*free will*) karena telah digantikan dengan perputaran kontrak. Kita kemudian digiring pada *mind sett* pragmatis. Toh kitapun tak ingin dirugikan hanya dengan tak patuh pada prinsip-prinsip kemajuan zaman yang ditawarkan sistem. Keadaan yang seperti ini, jika kita kembali menggunakan akal sehat dan moralitas, tidak lebih baik dari kerbau yang ditindik hidungnya. Kemerdekaan, alih-alih mengembalikan kesejatian manusia, malah menjadikannya budak bagi hasrat dan pikirannya. Tak segan-segan, *common sense* kita sedikit-demi sedikit dipangkas dari yang awalnya manusiawi menjadi sangat kaku dan bendawi.

¹ Dengan model pemahaman tertentu atas demokrasi, campur tangan politik demi kepentingan mengendalikan masa untuk diorientasikan pada konsumerisme kurang lebih berhasil. Ini terutama disokong oleh kelompok elit militer yang memegang sistem otoriter. Dan inilah inti dari demokrasi neoliberal: membuat masyarakat sibuk dengan perdebatan remeh-temeh dengan isu-isu minor oleh partai yang pada dasarnya sama-sama mengejar kebijakan pro-bisnis di luar perbedaan formal dan debat kampanye. Demokrasi diperbolehkan sepanjang kendali bisnis dikecualikan dari diskusi atau perubahan. Dengan kata lain selama itu bukan demokrasi. (Noam Chomsky, *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tantangan dunia Modern*, Profetik: Jakarta, 2005, h. x.). Dalam pengantar oleh R. W. McChesney



Ide mengenai kebebasan sangat erat kaitannya dengan hak-hak; untuk mengatakan saya bebas melakukan sesuatu sama dengan mengatakan saya punya hak untuk melakukan sesuatu itu, yang juga artiny bebas dari intervensi. Dengan demikian hak secara umum dianggap mendasar dan tak terlanggar. Tapi itu bukanlah kartu truf (bukti “alat” atau sesuatu yang digunakan saat terakhir akan mengalahkan lawan). Pada saat ini hak mengalami konflik, dalam kasus seperti tadi, kita dituntut untuk menentukan hak mana yang lebih penting dan harus didahulukan.² Dihadapkan dengan persoalan yang komplementer sekaligus dilematis mau tidak mau kita harus memilih, jika tidak ingin diasingkan.

Sialnya, permainan kebebasan telah sedemikian rupa dimonopoli oleh pelbagai institusi yang kebal dengan hukum dengan sifatnya yang mensensor segala hal. Dengan terpaksa persoalan personal harus ditunda karena menghadapi sesuatu yang lebih besar dan berpengaruh. Apa yang terjadi jika kepentingan dan hak telah tersentuh para kapitalis dan politik? Mereka akan menggunakan segala hal untuk mengolah segala sesuatu menjadi terkendali, paling tidak dikendalikan demi kepentingan segelintir orang. Persoalan kemanusiaan di lingkungan yang demikian hanya soal bagaimana membubuhkan tanda-tangan persetujuan. Bahkan jika kita melihatnya dengan sudut pandang konspiratif, mungkin tak ada yang terjadi di luar lingkaran setan yang mereka ciptakan.

² Julian Baggini, *Making Sense: filsafat di balik berita media massa*, Teraju: Jakarta, 2003, h. 52). Bandingkan dengan analisis mengenai neoliberal dalam manipulasi sistem demokrasi: "kelompok neoliberal, tidak dapat dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang mereka ciptakan. Sebaliknya mereka menawarkan—tepatnya menuntut—keimanan total terhadap pasar yang tidak diatur, yang dibangun atas teori-teori abad-19 dan hanya sedikit terkait dengan dunia nyata. Kartu truf para pembela neoliberalisme adalah tidak adanya alternatif lain. Masyarakat komunis, masyarakat demokrasi sosial, dan bahkan masyarakat yang menerapkan kesejahteraan seperti AS, seperti diklaim oleh para neoliberalis, telah gagal, sehingga mereka menerima neolib sebagai satu-satunya pilihan. Sistem ini mungkin diamini tidak sempurna, namun inilah satu-satunya sistem ekonomi yang tersedia." (Noam Chomsky, *Memeras Rakyat*, h. viii-ix.



Konteks berbangsa dan bernegara kini berubah posisi haluan dari mengembalikan jatidiri dan kesejahteraan menjadi tirani dan perbudakan. Hanya perbudakan yang terjadi tak bisa lagi dianggap kolonialisasi ala abad silam.

Dalam wacana kekinian, monopoli ruang publik merasuk ke dalam elemen yang paling mendasar di masyarakat. Orang-orang tidak lagi bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang bukan, atau mana yang hakiki dan mana yang bukan. Kehidupan yang sarat konsumerisme kini bukan lagi sesuatu yang aneh, melainkan kebutuhan yang urgent. Padahal jika kita kembali perhatikan, betapa di dalam suasana kehidupan yang demikian, nyaris tiap orang tak lagi dikendalikan dengan akal sehatnya.

Kegandrungan orang-orang terhadap sesuatu, bukan lagi diukur dengan niai guna, melainkan dengan hasrat. Sialnya, ini menjadi budaya kita, budaya yang digerakkan bukan lagi oleh kesadaran orang-orang terhadap nilai budaya akarnya, melainkan budaya yang dipasok oleh para cukong di balik kebijakan politik dan regulasi media. Demikian pula kesadaran kita penuh dengan *false of consciousness* dan kian jauh dari angan-angan *stream of consciousness* yang sejati. Demikian pula dengan kolektivisme kian marak di mana-mana sementara manusia dari segi religiusitas dan eksistensi mengalami pengkeroposan, jika tidak dikatakan teralienasi.

Alienasi yang sejati sebetulnya ditimbulkan bukan oleh regulasi media semata. Akan tetapi ini dilakukan oleh etos kerja, menjadi mind set bersama bahwa kerja adalah hal yang paling utama yang harus ditekankan. Seakan-akan orang merasa tak lagi bisa mendapatkan posisi di lingkungan khalayak tanpa status pekerjaan. Kita mungkin sementara bisa mengabaikan orang-orang yang bekerja di luar jadual pabrik dan kantor. Bagaimana pun sistem jadual kerja yang ketat akan menjadikan manusia teralienasi, di satu sisi, tapi menjadi kewajibannya demi tuntutan hidup (tentu saja biaya hidup mewah "*hedon*"). Ini dilematis, karena manusia dengan kehendaknya sendiri merasa bangga diperbudak oleh





sistem yang ada. Di sini kita akan melihat kegilaan Wall Street Journal yang update secara berkala di sosial media *Facebook* mengungkapkan sisi keterbelengguan sebagai sumber inovasi: *“People are at their most innovative when they work within the constraints of what they know”*.

Di titik ini, jelas bahwa realitas hari ini adalah realitas manipulatif. Terlebih, sebagaimana yang hendak dituju penelitian ini, adalah dampak dari penggunaan cyberspace dalam hal ini internet, yang mengandung sejumlah dilema. Secara sosio-antropologis, pemahaman manusia hari ini, sebagaimana kami gambarkan di muka, penuh dengan ruang-ruang artifisial. Bahkan pada masa kini, pemahaman kognisi manusia tidak pernah terlepas dari apa yang dibacanya di internet. Karenanya, pertanyaan-pertanyaan mengenai sejauh apa otentisitas manusia dalam era ini selalu bersitegang dengan sejauh mana ia terlibat dan melibatkan diri dengan realitas *cyberspace*.

/3/

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Semua itu dilandasi oleh perkembangan yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari semua itu.³ Semua perkembangan itu membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang menurut Stevan Harnad dalam *Post-Gutenberg Galaxy: The*

³ Samaun Samadikun, Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi, Kompas, 28 Juni 2000, hal. 52. Lihat pula tentang pentingnya sains dasar bagi pengembangan internet terlihat dari contoh riset dalam bidang fisika zat padat yang didasari sepenuhnya oleh fisika kuantum yang menghasilkan sains dan teknologi semikonduktor, lalu diikuti oleh aplikasi pada teknologi dan industri informasi dan komunikasi pada Muhammad Nur, Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju Pada Kemandirian Sains, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober 1998, hal. 4.



Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).⁴

Perkembangan teknologi semakin lama semakin cepat menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi serta kesadarannya atas dunia. Perubahan juga akan terjadi pada kualitas diri manusia jika teknologi informasi itu digabungkan dengan teknologi rekayasa genetik. Bahkan oleh Stephen Hawking dalam kuliahnya “Millenium Evening” di Gedung Putih, Washington DC, awal 1998 memprediksikan akan datangnya manusia super di milenium mendatang (anasir dari hal ini tampak dari semakin berkembangnya kesadaran virtual AI Artificial Intellegent). Komunitas super itu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Hal ini dapat terwujud melalui pertemuan antara teknologi komputer dan rekayasa genetik.⁵

Internet (*cyberspace*) merupakan big bang kedua—menurut Dimitri Mahayana—setelah big bang pertama yaitu material big bang menurut versi Stephen Hawking. Big bang kedua merupakan knowledge big bang (ledakan besar pengetahuan) yang ditandai dengan komunikasi elektromagnetoopis via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan. Internet merupakan

⁴ Steven Harnad, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>, akses tanggal 23 Agustus 2003. Lihat juga Dimitri Mahayana, 2000, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung: Rosda, hal. 24 – 25. Bandingkan dengan siklus ilmu pengetahuan dan teknologi dari T. Jacob, yang disebutnya siklus kondratieff, dimana masa sekarang merupakan siklus kelima yang ditandai dengan perkembangan mikro elektronika dan bioteknologi. T. Jacob (a), 1986, Menuju Teknologi Berperikemanusiaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 15.

⁵ Lihat lebih lengkap uraian ini dalam Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, Edisi I (Lengsernya Rezim Newton) April 2000, pada rubrik Dinamika dengan judul Dari Cambridge Menuju Kopenhagen, hal. 6.



simbol material embrio masyarakat global.

Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya "selebar daun kelor".⁶ Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi bagi tiap individu. Jelas informasi, hari ini, merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan di era ini sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh John Naisbitt, Nana Naisbitt, dan Douglas Philips sebagai Zona Mabuk Teknologi.⁷

Perkembangan teknologi jaringan komputer global telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global serta mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial, budaya dan terutama dalam hal ini agama.⁸ Internet juga membawa kita pada pemahaman yang kian memecah manusia sekaligus membawanya pada satu tatanan tanpa batas.

Ungkapan Kenichi Ohmae mengenai *borderless world-*

⁶ Ini yang kami singgung di atas sebagai magnifikasi realitas. Namun dalam kasus cyberspace, dunia diciutkan sedemikian rupa. Hal inilah yang menandai era citra atau pencitraan.

⁷ John Nasibitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, 2001, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan, hal. 23-24.

⁸ Bandingkan dengan Slouka yang mengemukakan bahwa masyarakat global kini telah memasuki dunia baru yang di dalamnya dapat berbuat apapun seperti yang dapat dilakukan di dunia nyata, dengan tingkat pengalaman yang sama, yaitu di dalam jagat raya cyberspace. Cyberspace telah berkembang dan meluas serta secara fundamental telah menggasak definisi lama tentang ruang fisik, identitas dan komunitas. Mark Slouka, 1999, *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Bandung: Mizan, hal. 13 dan 55.



nya menemui kenyataan di sini. Ini juga merupakan *smash the boundaries, tear down the hierarchy and dismantle the bureaucracy*, kata Jessica Lipnack dan Jeffrey Stamps.⁹ *Cyberspace* dengan realitas virtual menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia alternatif, dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang bahkan dapat lebih nyata dari realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Jagat raya cyberspace telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan, dan pengembaraan seperti *teleshopping, teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cybersex, cyberparty, dan cyberorgasm*.¹⁰

Proses cybernation yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan, dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat persoalan hukum yang muncul berupa sisi gelap yang perlu kita perhatikan yaitu *cybercrime* dengan berbagai macam bentuknya.¹¹ Carding, merupakan kasus yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkenal dalam

⁹ Jessica Lipnack & Jeffrey Stamps, 1994, *The Age of the Network, Organizing Principles for the 21st Century*, New York: John Wiley & Sons, Inc., hal. 3. Bandingkan dengan pendapat Anne Branscomb yang mengatakan "(t) he very existence of information technology is threatening to nation states". Anne Branscomb, *Global Governance of Global Networks: A Survey of Transborder Data Flow in Transition*, 36 *Vand. L. Rev.* 985, 987-88 (1983).

¹⁰ Yasraf Amir Piliang dalam pengantar buku Mark Slouka, *op.cit.*, hal. 14-15. Untuk cyberorgasm, lihat lebih jelas pada Robin B. Hamman, *Cyberorgasm, Cybersex Among Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms*, 30 September 1996, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybersoc.com/Cyberorgasm.html>, akses tanggal 23 Oktober 2003.

¹¹ Tentang sisi gelap dari internet dapat dibaca pada Neill Barrett, 1997, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, London: Kogan Page Ltd., hal. 21 dan Mark D. Rasch, 1996, *The Internet and Business: A Lawyer Guide to the Emerging Legal Issues*, pada bab kesebelas yang berjudul *Criminal Law and the Internet*, Computer Law Association, 1996, <http://cla.org/RuhBook/chp11.htm>, akses tanggal 12 November 2000



cybercrime. Selain itu adalah hacking, sebagai bentuk baru dalam mengekspresikan kekecewaan, kekesalan dalam dunia bisnis dan politik, seperti kasus hacking terhadap situs-situs milik Malaysia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara itu dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Cyberspace adalah ruang yang dihuni para netters atau netizen, ruang atau tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. John Suler menganggap *cyberspace* adalah ruang psikologis dan sebagai ruang psikologis keberadaannya tidak tergantung pada batas-batas konvensional mengenai benda berwujud.¹² *Cyberspace*, istilah yang pertama kali diintrodusir oleh William Gibson ini, menampilkan realitas, akan tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia yang tanpa batas. Para netters yang menghuni *cyberspace* itu dinamakan *virtual community* (komunitas virtual).

/4/

Namun, sekalipun cakupan realitas *cyberspace* begitu luas, kami akan menspesifikasi tulisan ini pada hal-hal tertentu. Pertama, sehubungan dengan pembentukan kesadaran dan dampaknya atas tatanan sosial yang damai. Internet hari ini sebangun dengan premis kami di atas, ia menentukan kesadaran seseorang. Ada sebuah proses pembentukan subjek nyata yang tidak sekadar virtual, yang pada gilirannya menentukan bagaimana ia bersikap.

Terutama setelah mendapatkan justifikasi bahwa dalam era digital, sejumlah protokol keamanan muncul yang bersifat

¹² Bandingkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh John Suler, *The Psychological of Cyberspace, Overview and Guided Tour*, September 1999, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html>, akses tanggal 12 November 2000. Bandingkan dengan Onno Purbo yang menyatakan bahwa dengan adanya *cyberspace* maka batas dimensi ruang, waktu dan tempat menjadi hilang. Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet Di Indonesia*, Kompas, 28 Juni 2000, hal. 50.





menfkondisikan. Dampak dari hal ini dimulai sejak tahun 2011, ketika Eli Parisier merilis *The Filter Bubble: Apa yang Disembunyikan Internet Dari Anda*.¹³ Dalam buku ini, Parisier menjelaskan bagaimana mesin pencari internet dan algoritma mereka menciptakan situasi di mana pengguna semakin mendapatkan informasi yang menegaskan kepercayaan mereka sebelumnya.

Algoritma pencarian menggunakan sejumlah besar informasi tentang pengguna untuk menemukan dan menyajikan informasi yang relevan kepada pengguna individual. Riwayat penelusuran dan penelusuran seseorang merupakan bagian penting dari informasi yang digunakan untuk menyesuaikan hasil yang ia dapatkan saat melakukan penelusuran online. Menggabungkan ini dengan informasi tentang jaringan sosial seseorang, kebiasaan melihat dan geografi mengarah pada semakin sempitnya pandangan tentang informasi yang tersedia secara online.

Argumen utama Parisier adalah bahwa penyempitan ini menciptakan gelembung filter, yang tidak terlihat oleh pengguna, namun masih memiliki dampak besar pada informasi yang tersedia bagi individu. Saat melakukan penelusuran Google, informasi tentang person digunakan selain istilah penelusuran untuk menemukan dan memprioritaskan hasil penelusuran yang paling mungkin diminati. Kemudian, saat ia mengklik di antara hasil penelusuran pertama (seperti yang dilakukan kebanyakan orang), ia mengonfirmasikan kembali ke mesin telusur sehingga hasilnya sangat relevan dan atau menarik. Hal ini pada gilirannya memperkuat saringan, sehingga kemungkinan seseorang akan mendapatkan hasil serupa di masa mendatang.

Namun, bukan hanya perilaku kita sendiri yang mempengaruhi hasilnya. Minat dan preferensi di antara orang-orang di jaringan sosial juga merupakan bagian dari algoritme, sehingga kemungkinan kita akan menerima hasil penelusuran

¹³ Parisier E. *Gelembung filter: Apa yang disembunyikan Internet dari Anda*. London: Penguin Inggris; 2011.





yang umumnya jaringan sosial yang dikunjungi. Dalam banyak kasus, filter ini memberikan hasil yang relevan dan bagus. Namun, ini menjadi masalah begitu profil person berisi elemen yang membuat hasil pencarian tertarik pada informasi yang keliru. Saringannya sampai tingkat besar tak terlihat, yang menambah masalah. Banyak pengguna bahkan tidak menyadari bahwa penyaringan sedang terjadi, dan bahkan jika memang demikian, sulit untuk mengendalikan bagaimana filter diterapkan.

Pada titik tertentu, efek dari filter ini akan menghasilkan satu lingkungan tersendiri. Terutama menyangkut cara berpikir manusia dan terkhusus di Indonesia, sebagai salah satu negara religius terbesar dunia, akan menciptakan satu tatanan masyarakat yang terpilah. Oleh karena itu, menarik bagi kami untuk meneliti sejauh mana kait-kelindan realitas yang kian kompleks ini dalam kehidupan individu dan kehidupan beragama; terutama secara sosial. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa efek dari sensor selalu berdampak buruk. Terutama, sebagaimana telah kita lihat di atas, ketika protokol ini diarahkan oleh sejumlah agenda terselubung.

/5/

Sebagaimana telah dimafhum, bahwa tantangan terbesar dalam jagat *cyberspace* sekarang adalah tak terkendalinya pemberitaan palsu. Hal lain yang memperparah keadaan adalah sistem logaritma *bubble effect*. Sistem ini menyaring informasi untuk disajikan pada satu individu. Informasi yang ditampilkan ini adalah informasi yang telah melalui sejumlah identifikasi pengguna. Cara kerja sistem ini adalah mengumpulkan mikro-aktifitas pengguna di internet, kemudian diolahnya menjadi pola identifikasi individu sehingga setiap kemungkinan mesin pencarian internet hanya akan menampilkan informasi sesuai dengan citra yang telah sistem tersebut identifikasi dari pengguna.

Sistem penyaringan ini problematik dan berbahaya. Pada satu pola tertentu, sistem ini akan mengarahkan pengguna





pada skrup zona yang kecil. Pada kasus pencarian informasi kesehatan sebagaimana kami tampilkan sebelumnya, ada kecenderungan pola hasil pencarian mengarah pada informasi keliru. Sialnya, ini juga akan terjadi pada tema pencarian lain. Katakanlah isu mengenai radikalisisasi, terorisme dan isu sensitif: akan menciptakan lingkungan habitus yang sama dan memungkinkan pengguna semakin masuk ke dalam lubang hitam informasi keliru.

Sistem ini pada gilirannya akan mengubah sistem sosial tak lagi plural, melainkan terfragmen sedemikian rupa. Katakanlah A memiliki teman 9 di internet (baca: jejaring sosial tertentu), relasi ini akan menentukan bagaimana filter *bubble effect* mengidentifikasi A. Jika rata-rata relasi teman A adalah orang yang memiliki kecenderungan radikal maka sistem pencarian akan mengarahkan pada pertemanan dengan ciri-ciri teman yang identik dengan rata-rata teman A. Dan ini tidak hanya terjadi di media jejaring sosial; melainkan juga terjadi di mesin pencarian secara umum. Bertolak dari kasus informasi kesehatan di atas, cara sistem filter *bubble effect* bekerja dalam ranah ini beroperasi melalui serangkaian kecenderungan kata kunci yang dicari oleh pengguna.

Jika A, sebagai pengguna mesin pencarian lebih banyak mengakses berita palsu atau hal-hal yang ekstrem, maka setiap kali ia mengetikkan kata kunci apa saja, maka konten yang akan didapat akan diarahkan (secara tanpa sadar) pada habitus yang telah ia bangun sebelumnya dalam serangkaian pencarian. Pola ini tidak hanya mengalienasi kognisi melainkan juga mengalienasi ruang gerak sosial. Pertanyaannya adalah; dampak apa yang akan ditimbulkan sistem ini dalam laku kehidupan sehari-hari kita? Sederhananya seperti ini: ia akan bekerja mengelompokkan masyarakat dalam gerbong-gerbong yang terpisah. Seorang ekstremis agama dengan cara kerja sistem ini hanya akan berkawan dengan orang yang identik dengannya. Yang ekstrem akan kian ekstrem. Demikian pula dengan patologi sosial lainnya, terorisme, berita palsu dan hal-hal yang merusak intimasi sosial.





Ambivalensi ini membuat kita tahu bahwa agenda perdamaian dan gerakan sosial lainnya kian membias secara struktur. Selama yang disebut sebagai struktur adalah internet dengan sistem dilematis serupa filter *bubble effect*. Sekali pun demikian, bukan berarti tak ada harapan sama sekali. Harapan dalam jagat internet adalah pemerataan database dan pemberdayaan konten. Secara sosial kita bisa menyebutnya—*agen of change*. Agen ini, yang siapa pun dapat mengambil bagian daripadanya, akan mengubah ketersekatan dalam relaitas *cyber* dengan cara setiap orang menulis, membagikan dan menyediakan konten-konten yang sehat. Singkat kata, membentuk lingkungan (*habitus*) yang berkelanjutan. Sebab hanya dengan cara ini, agenda sosial yang memiliki nilai kebaikan, pembebasan dan bersifat plural akan hidup dan bertahan. Apalagi jika kita mengharapkan perubahan ekosistem sosial dan kognitif yang sehat. 🐼

Daftar Pustaka

- Noam Chomsky, *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tantangan dunia Modern*, Profetik: Jakarta, 2005.
- Julian Baggini, *Making Sense: filsafat di balik berita media massa*, Teraju: Jakarta, 2003.
- Samaun Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni 2000.
- Muhammad Nur, *Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju Pada Kemandirian Sains*, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober 1998.
- Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Rosda, 2000.





- T. Jacob (a), *Menuju Teknologi Berperikemanusiaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan, 2001.
- Mark Slouka, *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Jessica Lipnack & Jeffrey Stamps, *The Age of the Network, Organizing Principles for the 21st Century*, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- Anne Branscomb, *Global Governance of Global Networks: A Survey of Transborder Data Flow in Transtition*, 36 Vand. L. Rev. 985, 987-88, 1983.
- Robin B. Hamman, *Cyberorgasm, Cybersex Among Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms*, 30 September 1996.
- Neill Barrett, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, London: Kogan Page Ltd., 1997.
- Mark D. Rasch, *The Internet and Business: A Lawyer Guide to the Emerging Legal Issues*, 1996.
- Pariser E. Gelembung filter: *Apa yang disembunyikan Internet dari Anda*. London: Penguin Inggris; 2011.





KEPING 3
**KEARIFAN LOKAL
DAN BUDAYA DAMAI**







1

Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan dengan Pendekatan Budaya Lokal Indonesia

NURANI FITRIYAH

Ketika kita membicarakan negara, berarti kita tengah membicarakan diri kita sendiri, karena kita adalah bagian dari Negara. - Filsuf Yunani

Indonesia, negara dengan banyak keberagaman. Ragam budaya, adat istiadat, agama, dan etnik yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Dari Miangas hingga Pulau Rote. Keberagaman adalah suatu hal yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Seperti sebuah mata koin yang memiliki dua sisi, ada yang berkata bahwa keberagaman bisa menjadi pemanis dan menambah kekayaan bangsa yang membuat masyarakat menjadi humanis, tetapi di sisi lain ada yang berujar sebaliknya bisa menjadi *boomerang* yang mampu menghancurkan kekayaan dan memunculkan perpecahan. Dampak kedua itulah yang harus kita cegah dengan memaksimalkan dampak pertama dari keberagaman.

Mari kita tengok sejenak, kondisi sosial yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Membaca artikel, koran ataupun menonton televisi, memberitakan seolah-olah negara akan runtuh esok pagi. Fenomena radikalisme, intoleransi, diskriminasi atau



bahkan ektrimisme kekerasan yang sering disajikan menjadi *headline* sebuah berita Nasional. Belum lagi perang komentar antar dua kubu yang seolah selalu merasa benar dan saling menebarkan kebencian. Juga kelompok radikalisme yang merasa eksklusif dengan ideologi yang mereka pegang.

Salah satu paham radikalisme yang kini mengkhawatirkan adalah ekstremisme agama, suku, ras maupun politik. Hal yang menimbulkan kekerasan adalah ekstremisme yang bersifat anarkis dalam mengajarkan keyakinan mereka, yang tidak menghormati pemeluk agama lain, suku, ras ataupun pandangan politik. Belajar dari kasus pembakaran tempat ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada bulan Juli 2016 yang dipicu oleh permasalahan etnik akibat salah paham yang terjadi antara mereka. Kerusuhan tersebut adalah buah dari sikap intoleran yang diprovokasi melalui media sosial.

Kasus lain yaitu teror bom bunuh diri di Kampung Melayu pada bulan Mei 2017 dimana ISIS mengklaim bertanggung jawab atas kasus tersebut. Paham ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh ISIS adalah untuk mendirikan kekhalifahan atau Negara Islam dengan menggencarkan teror dan pemberontakan di Indonesia. Oleh karena itu kita butuh aksi untuk menangkal segala tindak radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang semakin mengkhawatirkan Indonesia.

Kearifan Lokal sebagai Penangkal Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Mari kita lihat dari sisi lain. Tak sedikit daerah yang mampu hidup rukun dan damai walau dengan keberagaman suku dan agama di dalamnya. Namun, hal-hal baik tersebut malah yang sering luput dari pemberitaan. Entah karena dianggap biasa atau dianggap tak semenarik kisah kisruh diskriminasi, intoleransi maupun ekstremisme kekerasan yang kerap kita dengar. Mengapa tak kita coba menyalakan lilin harapan ketimbang mengutuk kegelapan? Melihat dan mencontoh bagaimana kearifan lokal di daerah mampu meredam kasus



intoleransi, diskriminasi maupun ekstremisme.

Kearifan lokal adalah alternatif solusi tepat yang dapat digunakan untuk meminimalisir konflik di negeri ini. Kearifan lokal mencerminkan perilaku budaya masyarakat yang berlatar belakang dari suatu sifat dan perilaku bijak masyarakat yang umumnya diturunkan dari generasi ke generasi mengenai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Nilai tradisi yang dijunjung untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara melestarikan alam lingkungan, menghargai, sopan santun, gotong royong atau bahkan nasionalisme. Mampukah kearifan lokal menangkal diskriminasi, intoleransi dan kekerasan ekstrimis?

Kearifan lokal melalui struktur sosial dan budaya yang ada di Aceh misalnya. Kearifan lokal merupakan aset strategis untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme politik dan terorisme di Provinsi Aceh. Trauma masa lalu akan konflik separatistis yang pernah terjadi di Aceh di awal tahun 2000 hingga 2004 menumbuhkan rasa persatuan yang erat saat ini. Misalnya di Sawang, salah satu desa di Aceh Utara yang pernah menjadi basis dan daerah hitam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2004, kini tumbuh dengan rasa persatuan yang tinggi dari masyarakatnya. Rasa nasionalisme terus digencarkan oleh para penggerak pendidikan, tokoh agama dan adat maupun masyarakat pada umumnya kepada generasi muda melalui beragam kegiatan unik seperti refleksi HUT RI dengan adanya kenduri dan pengajian syukur kepada Tuhan. Bagi sebagian daerah merayakan HUT Republik Indonesia adalah hal biasa. Namun bagi rakyat Aceh adalah hal yang luar biasa dimana rasa nasionalisme dan patriotisme itu yang menguatkan genggam tangan untuk menolak paham ekstremisme kekerasan.

Selain itu, budaya kenduri yang sering diadakan oleh warga untuk memperingati banyak hal seperti Maulid Nabi yang diadakan selama 3 bulan, kematian, kelahiran, pernikahan, sunatan, peresmian bangunan atau peringatan tahunan





seperti HUT RI, perdamaian MOU Helsinki antara GAM-RI mampu merekatkan genggam tangan masyarakat dengan adanya gotong royong.

Tak ketinggalan tentang kehidupan beragama dimana Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Nyatanya tak menolak adanya pendatang dari luar daerah yang beragama Non-Islam. Budaya Mulia Jame atau memuliakan tamu dianggap sebagai kewajiban yang berprinsip siapapun tamunya, tak peduli apapun agamanya, mereka harus dimuliakan. Tak heran bahkan ketika Natal, masyarakat sangat menghargai umat NonMuslim dengan adanya penjagaan ketat dari aparat keamanan maupun masyarakat sendiri. Sebaliknya, Non-Muslim juga menghargai umat Islam dan mengikuti budaya mereka salah satunya dengan menutup warung/toko mereka saat adzan Mahgrib berkumandang.

Lain Aceh, lain Sulawesi. Kearifan suku banggai, suku asli kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang hidup rukun bersama dengan suku lainnya, Balantak dan Saluan. Sebagai daerah transmigran, maka tak heran jika banyak pula suku Jawa, Bali dan Lombok yang menetap di salah satu desa di Banggai, yaitu Tompotika Makmur. Keberagaman suku yang menetap pada daerah tersebut secara otomatis juga menambah keberagaman agama. Di daerah tersebut terdapat 3 agama besar yaitu Hindu, Islam dan Kristen yang hidup berdampingan. Uniknyanya pada saat acara keagamaan ketiga pemeluk agama saling membantu. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat terus memberikan pemahaman yang tepat dan mendorong adanya toleransi dan gotong royong di daerah ini. Tak hanya dari toleransi di lingkungan masyarakat, tetapi sekolah juga menjadi ladang penanaman toleransi agama. Sehingga pada hari-hari tertentu, seluruh siswa dianjurkan memakai pakaian ibadah masing-masing dan melaksanakan doa bersama.

Juga pada kearifan melayu di pulau Natuna misalnya dimana dikenal kearifan lokal bahwa hidup dikandung adat biar mati anak asal jangan mati adat. Orang melayu sangat





memperhatikan pendidikan kebudayaan dan kesinambungan. Bila adat itu terus dilestarikan maka akan lestari lah kebudayaan melayu. Dalam adat melayu juga dikenal jika kita dan keturunan kita membuat salah maka kita dan masyarakat jangan segan memberikan hukuman atau sanksi sosial yang berlaku di kebudayaan tersebut.

Lain halnya suku Jawa dengan prinsip hormat kepada yang lebih tua dan sopan santun. Suku Papua dengan penerimaannya yang hangat, terbuka dan sangat menghormati guru tak peduli latar belakang agama maupun suku. Beragamnya budaya di Indonesia menunjukkan beragam pula kearifan lokal yang dimiliki Indonesia. Budaya lokal di atas hanyalah beberapa contoh saja dimana dengan kearifan lokal yang mereka junjung mampu menangkai intoleransi maupun ekstremisme. Hal tersebut membuktikan bahwa kearifan lokal mengena di hati masyarakat.

Kearifan lokal tak selalu bersifat kearifan tradisional, karena kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya, atau interaksi masyarakat dengan budaya lain maupun hasil dari suatu sejarah di masa lalu sebuah komunitas. Seperti halnya kenduri pengajian untuk menguatkan perdamaian yang kerap diadakan oleh masyarakat Aceh pasca konflik yang sebelumnya tidak pernah ada.

Terdapat keberagaman bentuk kearifan lokal dalam masyarakat diantaranya nilai, norma dan etika, kepercayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, meskipun kearifan lokal memiliki keunggulan setempat atau bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap universal. Hal-hal tersebut adalah nilai-nilai umum yang sebenarnya kerap diajarkan oleh orang tua, guru atau bahkan masyarakat kepada generasi selanjutnya baik di masa modern saat ini. Bisa kita bayangkan jika nilai-nilai kearifan ini mendalam dan mendarah daging di setiap insan manusia.

Dengan kembali mengingat dan menguatkan budaya lokal





dengan sebaik-baiknya, niscaya kita mampu membangun kekuatan untuk menangkal radikalisme. Revitalisasi budaya lokal adalah upaya preventif yang tepat saat ini. Seperti kutipan filsuf Yunani diatas, membicarakan Negara berarti membicarakan kita sendiri. Maka inilah saatnya kita mengambil aksi untuk ikut menguatkan budaya lokal yang akhir-akhir ini mulai luntur. Setiap tahun kita memperingati hari sumpah pemuda, maka jadikan sumpah pemuda sebagai ikrar yang mengakar di hati. Perlu kita bersama bersumpah untuk sama-sama mengikis ekstremisme kekerasan. 🙏

Daftar Pustaka

Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism" by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352

Wiktorowicz, Quintan (2005). *"A Geneology of Radical Islam,"* studies in conflict and terrorism (Routledge)

Reuter, Thomas & Alexander Horstmann (eds). *"Faith in the Future : Understanding the Revitalization of Religions and Cultural Traditions in Asia.* Leiden: Brill 2013

Jones, Sidney et al (2006). *Strategic, Political and Social Perspective Radical Ideologies.* Singapore: MUIS

www.dhs.gov/topic/countering-violent-extremism

<https://www.counterextremism.com/countries/Indonesia>

www.bbc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2016/07/160730_Indonesia_rusuh_tanjung_balai

Indah Alsita M, *Pengajar Muda Indonesia Mengajar XIII,* Kabupaten Banggai





2

Cinta Indonesia, Cinta Budayanya

MUSTOFA

Budaya merupakan daya dari budi, yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Menurut Djojodigono 1958 Cipta merupakan aktualisasi dari daya kreasi manusia yang dapat berupa benda. Rasa adalah kepekaan manusia pada diri, dan lingkungan sekitar. Dan karsa dapat berarti kehendak, cita-cita, atau ideologi yang dapat berguna bagi orang lain.

Berbicara soal budaya, Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang beragam. Oleh karena itu masyarakat Indonesia di kenal dengan masyarakat multikultural. Model masyarakat multikultural ini sebenarnya telah digunakan acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.”

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia akibat dari kondisi sosial kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut





dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbang pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beragam.

Budaya di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Budaya Daerah, dan Budaya Nusantara. Budaya Daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah sendiri mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan – kerajaan terdahulu. Contohnya budaya dari Jawa Timur yang berupa tarian: ada tari Remong, sebuah tarian dari Surabaya yang melambangkan jiwa, kepahlawanan, Reog Ponorogo, merupakan tari daerah Jawa Timur yang menunjukkan keperkasaan, kejantanan dan kegagahan. Dapat juga berupa musik, di Jawa Timur sendiri memiliki musik gamelan yang tidak jauh beda dengan Jawa Tengah. Lalu bentuk bangunan Jawa Timur bagian barat (seperti di Ngawi, Madiun, Magetan, dan Ponorogo) umumnya mirip dengan bentuk bangunan Jawa Tengahan (Surakarta). Bangunan khas Jawa Timur umumnya memiliki bentuk joglo, bentuk *limasan (dara gepak)*, bentuk *srontongan (empyak setangkep)*. Masa kolonialisme Hindia-Belanda juga meninggalkan sejumlah bangunan kuno. Kota-kota di Jawa Timur banyak terdapat bangunan yang didirikan pada era kolonial, terutama di Surabaya dan Malang.

Sedangkan Budaya Nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di Negara tersebut. Itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu Negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari Negara





tersebut. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara, Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 12 Oktober 1928 yang diikuti oleh seluruh pemuda berbagai daerah di Indonesia yang membulatkan tekad untuk menyatukan Indonesia dengan menyamakan pola pikir bahwa Indonesia memang berbeda budaya tiap daerahnya tetapi tetap dalam satu kesatuan Indonesia Raya dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia tentu sudah menjadi kewajiban jika kita mencintai budaya Indonesia. Mencintai dapat diartikan menaruh kasih sayang. Jika kita mencintai maka kita telah memberi kasih sayang pada objek, subjek, atau hal tertentu. Atas dasar rasa cinta tersebut kita pun tergerak untuk menjaga, dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia.

Sebelum kita dapat menjaga budaya yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita dipastikan dapat mengenal berbagai budaya tersebut. Mencari sumber informasi mengenai beraneka budaya dapat dilakukan secara formal, maupun non formal.

Jika non-formal maka dapat dilakukan dengan wawancara kepada para ahli sejarah, ataupun pada seseorang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa yang bersejarah yang dapat mencipta suatu budaya.

Jika mencari sumber informasi dilakukan secara formal, maka salah satu caranya adalah dengan memilih fakultas ilmu budaya sebagai ladang mencari informasi.

Apabila kita sudah memiliki informasi mengenai beragam budaya yang ada di Indonesia, maka kita bisa berusaha untuk menjaga budaya agar tidak diklaim oleh negara lain. Karena sangat menyayangkan bila hasil cipta, karsa, dan rasa masyarakat Indonesia tiba-tiba diakui negara lain. Beberapa contoh budaya yang di klaim negara lain adalah musik indang sungai garinggiang dari Sumatera Barat di klaim oleh Malaysia, kursi taman dengan ornamen ukir khas jepara dari Jawa Tengah





oleh oknum warga negara perancis, pigura dengan ornamen ukir khas Jepara dari Jawa Tengah diakui oleh oknum warga negara Inggris , kain ulos diklaim oleh malaysia, alat musik angklung diklaim oleh pemerintah Malaysia , Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan diakui oleh perusahaan Jepang , lagu jali-jali diklaim oleh pemerintah malaysia, tari pendet dari bali diklaim oleh pemerintah malaysia, dan masih banyak lagi.

Sangat menyayangkan bukan? Maka dari itu sebelum Indonesia hanya tinggal nama, setidaknya dengan ilmu yang nantinya kita timba dari memilih fakultas ilmu budaya, atau dari berbagai sumber memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan alternatif solusi untuk menanggulangi lemahnya perlindungan kebudayaan negeri dan lemahnya rasa nasionalisme bangsa. Harapannya kebudayaan-kebudayaan tradisional negeri yang kita miliki tidak dapat diklaim seenaknya lagi oleh negara lain dan rasa nasionalisme akan semakin meningkat.

Dengan demikian, tidak terasa berlebihan apabila dikatakan bahwa adanya suatu upaya perlindungan terhadap kebudayaan tradisional yang akhir-akhir ini sering diklaim oleh bangsa asing merupakan wujud rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh karenanya upaya tersebut harus dilakukan secara optimal dengan harapan rasa nasionalisme rakyat Indonesia akan semakin terpujuk dan meningkat, yang dengannya akan menciptakan rasa kepemilikan atas dasar cinta yang mendalam terhadap apa saja yang berbau bangsa dan negara Indonesia tercinta termasuk kebudayaan tradisionalnya.

Selain menjaga budaya agar tidak diklaim negara lain, kita juga perlu melestarikan budaya tersebut. Menurut Turner (1984), “budaya pop dan media massa memiliki hubungan simbiotik dimana keduanya saling tergantung dalam sebuah kolaborasi yang sangat kuat. Kepopuleran suatu budaya sangat bergantung pada seberapa jauh media massa gencar mengampanyekannya. Begitu pula media massa hidup dengan





cara mengekspos budaya-budaya yang sedang dan akan populer.”

Sebagai seorang mahasiswa kita akan dekat dengan media massa jika kita senang menulis. Terutama menulis tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya memilih prodi Sastra Indonesia yang tentunya sangat erat dengan dunia tulis menulis. Apabila tulisan-tulisan yang kita pelopori berhasil meraih pasar dan menumbuhkan minat terhadap budaya Indonesia di manca negara, maka tugas berikutnya adalah memelihara dan mengembangkan minat itu dari sebuah infiltrasi menjadi suatu gelombang budaya Indonesia yang deras.

Pada tahap ini, produk-produk budaya lainnya seperti musik, literatur, hingga fashion akan berperan penting untuk menarik dan mengikat minat budaya itu lebih jauh dan lebih kokoh lagi. Jika kelompok-kelompok fans telah terbentuk di manca negara, maka para selebriti Indonesia akan meraih momentumnya untuk *go international*. Trend-trend yang berlaku di Indonesia akan turut digandrungi pula di negara-negara yang telah menerima ekspansi budaya kita. Ini bisa diiringi pula dengan masuknya produk-produk lain seperti beragam manufaktur yang membawa nama dan gaya hidup Indonesia. Selangkah demi selangkah, kita menuju hegemoni budaya Indonesia. Selanjutnya jika saatnya tiba, kita boleh tersenyum melihat budaya Indonesia berkibar di mana-mana.

Jika di lihat pada kondisi saat ini menjaga, dan melestarikan budaya sangat penting karena masyarakat Indonesia, khususnya remaja pada saat ini malah menggandeungi budaya dari negara lain. Contohnya: remaja Indonesia sekarang ini telah mengikuti cara berpakaian orang asing yang kurang sopan dan tidak seharusnya digunakan. Sehingga melupakan pakaian yang seharusnya dipakai oleh bangsa Indonesia. Hal itu berpengaruh dan berdampak buruk bagi orang Indonesia. Selain itu lebih parahnya lagi remaja mulai mengikuti budaya asing yang di lihatnya dari televisi, internet, dan lain





sebagainya. Diantaranya adalah berciuman dan berpelukan di tempat umum, padahal berciuman dan berpelukan di tempat umum itu melanggar norma kesopanan, bukankah anak remaja diajarkan norma kesopanan? Kebudayaan barat masuk ke Indonesia dengan begitu cepatnya melalui akses teknologi dan informasi. Hal tersebut – seperti telah tercantum di atas – semakin mempermudah remaja ataupun pemuda kita untuk mengetahui kebudayaan yang masuk tersebut. Yang menjadi sebuah persoalan ialah para remaja kita tidak melakukan filterisasi terhadap hal-hal asing yang mereka ketahui, akan tetapi tanpa berpikir panjang mereka langsung menjiplak dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan asing yang masuk tersebut kedalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti minum - minuman keras, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang dan hal-hal negatif lainnya.

Selain melestarikan budaya lewat tulisan kita juga bisa melestarikan budaya dengan mengadakan pertunjukan. Contohnya mengadakan pertunjukan gamelan, pertunjukan wayang kulit, pagelaran tari, pementasan ramayana, dan lain sebagainya. Yang tujuannya jelas agar budaya yang ada di Indonesia tetap lestari, dan tetap terjaga dari generasi ke generasi. Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat diperlukan. Karena pemerintah juga perlu melakukan terobosan dengan memberlakukan Hari Budaya Nusantara. Hari di mana tiap-tiap provinsi atau minimal desa memiliki hari budaya masing-masing yang telah disepakati oleh perangkat pemerintah setempat.

Selain itu beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan diselenggarakannya Hari Budaya yaitu pengembangan karakter. Dengan mengetahui nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam Hari Budaya Nusantara di tiap-tiap daerah, akan mampu membangkitkan rasa nasionalisme serta mampu membentuk karakter bangsa yang asli. Orang Indonesia yang rajin, ramah, telaten, dan beradab akan menjadi cermin bahwa pembangunan budaya juga ikut andil dalam pembangunan karakter bangsa.





Melihat budaya Indonesia yang beragam, dan perlu dijaga. Oleh karenanya cintai, pelihara dan lestarikanlah warisan budaya kita. Supaya untuk ke depannya jangan sampai negara lain yang justru lebih menguasai warisan budaya kita dibandingkan dengan kita sebagai pemilik budaya tersebut. Universitas Tanjungpura, khususnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik adalah salah satu ladang informasi untuk mengetahui keanekaragaman budaya, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk berusaha melestarikan budaya Indonesia. 🐦







3

Prinsip Piil Pesenghiri: Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Social Capital dalam Upaya Menciptakan Pedamaian

FITRA UTAMA

Lampung sebagai miniatur Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa. Jawa, Bali, Banten, Palembang, Padang, Aceh, Bugis, Cina Arab dan suku Lampung sebagai suku Pribumi. Ulun Lampung (orang Lampung) sebagai suku asli, menjadi kaum minoritas, dengan jumlah hanya sebesar 19% dari total penduduk, sedangkan etnis Jawa dan Bali mencapai 65% dari populasi (data Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2013). Kebijakan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan menempatkan Karesidenan Lampung sebagai lokasi utama pemindahan penduduk yang dimulai pada tahun 1905 dan dilanjutkan oleh pemerinah RI setelah kemerdekaan menciptakan kondisi ini.

Walaupun memiliki jumlah yang sedikit, data menunjukkan bahwa suku Lampung terlibat secara aktif dalam 90% konflik dan aksi kekerasan yang telah terjadi. Sejumlah konflik yang cukup besar, selalu melibatkan suku asli Lampung, antara lain kejadian Balinuraga Lampung Selatan (Suku Lampung dengan Suku Bali, 2012), Bumi Nabung Lampung tengah (Suku Lampung dan Suku Jawa, 2014) Anak Tuha Lampung Tengah





(Suku Lampung dan Suku Jawa, 2014). Ada sejumlah faktor yang memicu munculnya konflik dalam masyarakat Lampung. Antara lain kesenjangan ekonomi, dimana etnis pendatang saat ini cenderung lebih makmur ketimbang native. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah serta pemahaman atas toleransi antar etnis yang rendah, fenomena ini cenderung terjadi pada anak muda, serta penghargaan atas kearifan lokal setempat yang sebenarnya sangat menjunjung tinggi keragaman.

Sejarah masyarakat Lampung mulai tercatat ketika agama Hindu masuk ke wilayah paling selatan dari pulau Sumatera ini pada abad ke – 1 Masehi. Pada saat itu, telah eksis suku asli Lampung yang disebut suku Tumi, dimana menurut catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah hidup di wilayah pesisir barat dan utara Lampung sejak jaman pra sejarah. Suku Tumi mendirikan Kerajaan Sekala Brak yang menganut agama Hindu dengan pemimpin pertama Raja Buay Tumi (William Marsden, Sejarah Sumatra, 2008). Pada abad ke-16 M, Islam masuk ke kerajaan Skala Brak dan konsep kerajaan Hindu digantikan pemerintahan Islam yang disebut dengan istilah Kepaksian. Anak keturunan Buay Tumi kemudian tersebar di seluruh wilayah Lampung, dengan membawa adat budaya yang telah berproses selama ribuan tahun.

Secara garis besar, saat ini terdapat dua kelompok masyarakat adat yang eksis di Provinsi Lampung. Yang pertama masyarakat adat Sai Batin yang masih meneruskan kerajaan lawas Skala Brak, tersebar di wilayah pesisir Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung. Yang kedua masyarakat adat Pepadun, golongan masyarakat adat yang telah melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Skala Brak dan membentuk Buai (marga) sendiri, antara lain Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Sungkai Bunga Mayang dan Pubian Telu Suku. Buai-buai pepadun ini tersebar di daerah pedalaman, antara lain di Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan,





Lampung Tengah, Lampung Timur dan Mesuji.

Walaupun telah terpecah menjadi dua kelompok masyarakat adat, namun masyarakat lampung tetap mewarisi nilai dan filosofi yang sama, kearifan lokal yang telah diciptakan nenek moyang pada ratusan tahun yang lalu. *Piil Pesenggiri* adalah tatanan moral yang merupakan pedoman dalam bermasyarakat. Piil (fiil=arab) artinya perilaku, dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Selain itu *Piil Pesenggiri* memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Abdul Syani, 2013). *Piil Pesenggiri* memiliki empat unsur yang saling melengkapi, yang jika dilaksanakan secara utuh akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang positif, etis, damai dan berbudaya luhur. Keempat unsur tersebut adalah (penjelasan disarikan dari tulisan Abdul Syani, 2013):

1. Juluk – Adek

Secara etimologis *Juluk-adek* (gelar adat) terdiri dari kata *juluk* dan *adek*, yang masing-masing mempunyai makna; *Juluk* adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan *adek* bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk-adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Setiap perilaku individu, mempunyai tanggung jawab moral atas *juluk* dan *adeknya*, agar dapat mengontrol setiap perilaku yang akan dilakukan. Biasanya penobatan *juluk-adek* ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian. *Juluk adek* ini biasanya mengikuti tatanan yang telah





ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temungging, Radin, Minak, Kimas dan lain-lain. Dalam hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

2. *Nemui nyimah*

Nemui berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja *nemui* yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. *Nyimah* berasal dari kata benda “*simah*”, kemudian menjadi kata kerja “*nyimah*” yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah *nemui-nyimah* diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui-nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui-nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

3. *Nengah nyappur*

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan *nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. *Nengah-nyappur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya.





4. *Sakai sambayan*

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan *sambaiyan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. *Sakai sambaiyan* berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai-sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpendang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Filosofi *Piil Pesenggiri*, terutama dalam unsur *Nemui nyimah*, *Nengah nyappur* dan *Sakai sambayan*, jika dipahami dengan sungguh sungguh kemudian diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan sosial secara bertanggung jawab, akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan toleran. Karena prinsip ini, Lampung selama ratusan tahun hidup damai tanpa adanya konflik dan perilaku intoleransi yang memecah belah masyarakat. Pemerintah kolonial Belanda, dalam menetapkan Lampung sebagai lokasi rintisan transmigrasi, juga mempertimbangkan tipologi masyarakat Lampung yang terbuka, ramah dan toleran.

Sebaik-baiknya sebuah konsep, tentu kembali kepada manusia sebagai pelaksana dari konsep tersebut. Sejumlah konflik berlatar belakang etnis yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Provinsi Lampung, menggambarkan bahwa



generasi saat ini kurang memahami kearifan lokal mereka dengan, diluar beberapa variabel pemicu lain. Paparan budaya populer yang masuk melalui televisi, majalah, hiburan dan akses informasi tanpa batas melalui internet dan *smartphone* telah mengubah karakter generasi muda saat ini, khususnya generasi muda di Lampung. generasi yang mulai mendapat paparan negatif budaya pop adalah generasi Y (lebih dikenal dengan generasi mileneal, yang lahir pada tahun 1970an sampai 1990an) dan generasi Z, yang lahir setelah era 2000an. Banyak anak-anak muda di Lampung yang tidak paham adat – istiadatnya, tidak memahami tata pergaulan lokal bahkan tidak menguasai bahasa daerah. Pemahaman *Piil pesenggiri* bahkan menyempit lebih kepada harga diri, sehingga menjadi lebih sensitif dan gampang “panas” jika harga dirinya “diganggu” dalam bergaul dan bermasyarakat.

Beberapa konflik berdarah yang terjadi di Lampung, dipicu oleh masalah yang sepele. Bentrok antara warga Balinuraga (etnis Bali) dan Desa Anom (etnis Lampung) di Way panji Kabupaten Lampung Selatan bermula hanya karena sejumlah pemuda bali menggoda gadis Lampung. Konflik antara etnis Lampung dan etnis Jawa di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dipicu oleh pencurian karet milik petani beretnis Jawa oleh pemuda Lampung. Pemahaman yang rendah terhadap kearifan lokal, ditambah dengan kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial, membuat masyarakat gampang terprovokasi dan tersulut amarahnya untuk melakukan penghakiman sepihak.

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari fenomena tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, di berbagai pelosok Lampung akan muncul berbagai macam konflik dan bentrok berlatar belakang etnis yang akan merusak kedamaian dan citra masyarakat Lampung yang toleran. Sejumlah program dilaksanakan untuk kembali membumikan *Piil Pesenggiri* di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Dengan anak-



anak muda yang memahami dan berperilaku dengan filosofi tersebut, diharapkan tercipta generasi baru yang ramah dan toleran dengan dasar kearifan lokal. Dalam tataran mikro, sosialisasi, seminar, outbond, yang melibatkan sejumlah etnis di Lampung dilakukan secara kontinyu dengan melibatkan tokoh adat dan akademisi kebudayaan. Selain itu dilakukan sejumlah kebijakan dengan tujuan mengatasi kesenjangan ekonomi antara warga asli Lampung dan pendatang, dengan semangat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Walaupun belum berjalan secara sempurna, apa yang telah diusahakan mampu meminimalisir terjadinya konflik etnis. Sejak tahun 2015, konflik terjadi minimal. Bahkan pada tahun 2017, Provinsi Lampung dinobatkan sebagai Daerah Terbaik dalam Penanganan Konflik Sosial se- Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri.

Usaha menciptakan Indonesia yang bebas diskriminasi, damai, toleran dan bebas dari kekerasan merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Di Lampung, dimana perbedaan etnis menjadi bahan bakar terjadinya konflik, menggunakan piil pesenggiri sebagai penawarnya. Di sejumlah daerah, dengan tipologi pemicu konflik yang berbeda, tentu memiliki resep yang berbeda pula. Namun sebelum jauh-jauh memikirkan solusi yang sulit dan rumit, akan lebih indah jika tiap daerah tersebut kembali kepada kearifan lokal setempat. Indonesia sebagai negeri yang adiluhung secara budaya dan cinta akan perdamaian, tentu tiap daerah memiliki konsep "*Piil Pesenggiri*"nya masing-masing. dengan menggali kembali kearifan lokal yang tergerus budaya populer, tentu masyarakat yang damai dan toleran sedikit banyak akan tercipta. 🙏







4

Pelestarian '*Tari Lulo*' Kesenian Khas Sulawesi Tenggara Dalam Menyatukan Keberagaman di Indonesia

IRWAN SAPUTRA

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau yang tersebar di seluruh Kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 13.446 pulau yang bernama dan 4.134 pulau yang belum bernama. Setiap pulau yang membentang dipisahkan hamparan laut dan gunung yang begitu luas, hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia hidup dengan kondisi alam dan geografis yang berbeda-beda.

Perbedaan ini membuat kebiasaan yang dilakukan setiap daerah berbeda sehingga menciptakan budaya yang berbeda-beda pula, inilah yang mendasari Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa dan agama yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik





(BPS) tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.

Keberagaman yang ada bukan berarti membuat Indonesia tidak dapat hidup rukun dan damai. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga di usianya yang ke -72 tahun pasca kemerdekaan.

Kongres pemuda yang melahirkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi Indonesia. Para pemuda yang berasal dari suku, strata dan agama yang berbeda mengikrarkan persatuan dan mengesampingkan perbedaan. Jika saja tidak adanya semangat juang yang tinggi dan keinginan bersatu, hal yang sangat mustahil rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan seperti yang dirasakan saat ini. Maka dari itu sangat tidak adil sekali jika ada suatu kelompok tertentu yang ingin menjadikan bangsa Indonesia sesuai dengan aturan yang mereka inginkan dan mengesampingkan apa yang telah dibangun oleh pendiri bangsa ini sejak lalu.

Bhineka Tunggal Ika yang artinya “meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua” merupakan semboyan bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari pendiri-pendiri bangsa ini dan itu menjadi harga mati yang perlu kita junjung dan jaga. Sebab, bukan Indonesia namanya jika suku, budaya dan agama yang tidak beragam, keberagaman ini telah menjadi identitas bangsa Indonesia yang menarik banyak perhatian dunia.

Keberagaman yang ada di Indonesia, bisa saja menjadi tantangan hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan, hal tersebut dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya itu, keberagaman agama yang ada di Indonesia juga dapat mengancam keutuhan NKRI, adanya





sikap intoleransi dan menganggap ajaran agama yang dia ikuti adalah yang paling benar serta menganggap ajaran yang berbeda dari dirinya adalah salah membuat banyaknya gerakan radikalisme muncul sehingga menyebabkan banyak konflik antar umat beragama yang terjadi. Padahal, kewajiban beragama telah dituliskan dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijamin perundang-undangan dan hukum, yang memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia dalam memeluk agama yang dianut dan peraturan hukum tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat yang beragama di Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai antar umat beragama.

Sejumlah kerusuhan dan konflik sosial sering muncul di Indonesia beberapa tahun belakangan ini di berbagai daerah. Beberapa di antaranya berskala besar dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Ambon (mulai tahun 1998), Poso (mulai tahun 1998), Maluku Utara (pada tahun 2000) dan di berbagai daerah lainnya termasuk di daerah Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi. Meskipun penduduk Sulawesi Tenggara tidak sebanyak di Pulau Jawa dan Sumatera, itu bukan jaminan daerah tersebut aman dari isu konflik yang diakibatkan karena perbedaan suku dan agama. Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang juga dihuni oleh berbagai macam suku seperti Tolaki, Muna, Kabaena, Wawoni, Bugis dan berbagai suku lainnya termasuk suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera yang datang mengadu nasib di Sulawesi Tenggara.

Beberapa waktu belakangan ini Sulawesi Tenggara sering terjadi berbagai konflik sosial yang diakibatkan karena perbedaan suku dan agama. Ada beberapa konflik yang terjadi awalnya merupakan masalah sepele antar individu kemudian berkembang hingga melibatkan kelompok yang lebih besar seperti suku dan agama. Hal itu dikarenakan rasa toleransi dan persatuan yang dimiliki masyarakat sangat rendah dan





tingginya rasa sukuisme yang mereka miliki sehingga mereka akan merasa marah jika salah satu dari kelompok mereka diganggu oleh orang yang bukan dari kelompok mereka. tentu ini tidak hanya menjadi ancaman keamanan Sulawesi Tenggara tapi juga mengancam keutuhan Negara Indonesia.

Melihat potensi konflik yang terjadi akibat keberagaman yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara, tentu kita perlu solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik. Lalu apa yang perlu kita dan pemerintah lakukan? Terkadang kita terlalu memikirkan hal yang besar dan sulit untuk dilakukan demi menjaga persatuan bangsa Indonesia dan jauh dari konflik sosial. Padahal banyak hal kecil yang bisa dilakukan dan mungkin hal tersebut sudah sering kita lakukan hanya saja kita tidak menyadari hal tersebut. Apakah itu? Jawabannya adalah mencintai dan melestarikan warisan budaya daerah kita.

Di Sulawesi Tenggara terkenal dengan kesenian Tari Molulo/lulo. Tari Lulo adalah salah satu tarian tradisional yang merupakan warisan budaya dari Sulawesi Tenggara yang masih ada sampai saat ini. Tari lulo juga merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tenggara, terutama di daerah Kendari dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti pernikahan adat, panen raya, dan berbagai perayaan adat lainnya. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa tarian ini membawa pesan penting untuk kita semua, yakni saling menghargai dan saling bergandengan satu sama lain walaupun kita berbeda.

Tarian ini dilakukan secara bergandengan. Posisi telapak tangan pria harus dibawah telapak tangan wanita. Ini etika yang harus diperhatikan agar gerakan tetap harmonis dan wilayah dada wanita pasangan menari tak tersentuh. Tangan yang sudah saling mengait digerakkan turun naik bersama dengan pasangan untuk mengimbangi ayunan kaki yang maju mundur, ke kiri dan kanan, dengan tempo gerakan satu dua sesuai irama pengiring. Jumlah penari pada tarian ini tidak dibatasi, sehingga jika banyak penari, tarian ini dapat





membentuk lingkaran yang besar.

Tari lulo ini menjadi sarana dan media masyarakat Tolaki untuk mengeratkan pergaulan dengan warga masyarakat lain tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, status sosial, kelompok, atau usia. Atraksi tari lulo adalah sebuah bentuk konfigurasi sosial dalam keberagaman yang harmonis, sehingga tidaklah mengherankan jika tari lulo ini dapat diterima oleh semua etnis yang ada di kota kendari, yang akhirnya menjadi ciri khas kota Kendari. Tidaklah mengherankan jika Kota Kendari mendapat julukan sebagai kota lulo, hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan yang dilakukan oleh masyarakat kota Kendari dari semua etnis tidak pernah ketinggalan menggelar acara lulo, baik siang maupun malam.

Kita perlu merasa senang karena warisan budaya ini masih terus ada bahkan juga banyak diminati kalangan muda. Akan tetapi kita juga perlu merasa khawatir, kemajuan zaman yang terus meningkat dan banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia tentu mengancam eksistensi budaya asli Indonesia yang dianggap anak muda sekarang sebagai sesuatu hal yang kampungan. Anak muda saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti budaya barat, korea dan jepang. Ironisnya mereka merasa bangga mengikuti budaya asing tersebut, agar mereka dapat dikatakan anak kekinian yang tidak ketinggalan zaman.

Kita juga perlu merasa senang karena tari lulo ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya kalangan atas saja tapi juga kalangan bawah, laki-laki dan perempuan, bahkan dari berbagai suku dan etnis. Hanya saja masih banyak dari masyarakat yang tidak paham makna dari gerakan yang mereka lakukan dalam tari lulo ini. Ibaratnya mereka hanya makan untuk kenyang tapi tidak tahu apa manfaat dari makanan yang mereka makan bagi tubuhnya.

Bagi orang yang melakukan tari lulo ini akan merasakan suatu kegembiraan dan kedamaian yang berbeda. Tari lulo ini





tidak akan terasa istimewa jika hanya dilakukan oleh beberapa orang ataupun dilakukan oleh satu strata sosial dan gender saja. Karena keistimewaan tari lulo ini akan terlihat dan terasa jika dilakukan oleh banyak orang dengan masyarakat yang beragam.

Ada beberapa hal yang bisa kita dan pemerintah lakukan agar kesenian warisan budaya Sulawesi Tenggara tetap bertahan dan masyarakat bisa paham serta mengaplikasikan pesan yang disampaikan melalui gerakan tari lulo yang mereka lakukan.

Pertama, menyiapkan wadah berupa sanggar tari yang bisa menjadi tempat para generasi muda untuk belajar tari tradisional terutama tari lulo. Pengajaran yang diberikan tidak hanya berupa gerakan saja tapi juga makna dari gerakan yang akan diajarkan.

Kedua, mengadakan lomba tari lulo yang saat ini sudah jarang terlihat lagi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Selain sebagai bentuk apresiasi, melalui lomba juga akan lebih menarik minat masyarakat untuk mempelajari tari lulo apalagi jika hadiah yang ditawarkan cukup menggiurkan.

Ketiga, membentuk sebuah komunitas pemerhati kesenian daerah khususnya tari lulo. Komunitas ini bertugas menjadi relawan untuk menjaga tari lulo tetap bertahan dan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pada generasi muda tentang pesan yang terkandung dalam tari lulo ini.

Keempat, membuat standarisasi gerakan lulo yang dilegalisir oleh hukum. Hal ini dikarenakan saat ini gerakan lulo sudah banyak di campur dengan gerakan-gerakan modern yang tentunya dapat mengurangi makna tari lulo yang sebenarnya sehingga jika ada oknum yang ingin merusak makna lulo itu sendiri dapat ditindaklanjuti oleh hukum.

Tari lulo ini merupakan satu dari sekian banyak tari tradisional yang membawa pesan mulia dari leluhur kita. Mereka menciptakan gerakan tari untuk menyampaikan pesan





kepada kita semua agar kita dapat hidup rukun dan damai, saling berpegangan satu sama lain meskipun kita berasal dari strata, budaya, dan agama yang berbeda. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman, bukan berarti itu adalah petaka melainkan sebuah anugrah. Pelangi di langit terlihat indah karena dia terbentuk dari perpaduan banyak warna dan bukan karena satu warna. Kita boleh bangga dengan suku kita dan merasa benar dengan agama yang kita anut. Tapi bukan berarti kita menganggap suku dan agama orang lain adalah salah. Sebab, Negara Indonesia telah menjamin setiap individu untuk hidup sesuai dengan takdir mereka yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan dengan penuh pertimbangan dan perdebatan.

Pejuang-pejuang bangsa kita telah susah payah membangun bangsa ini, menyatukan semangat walaupun mereka berbeda dan berusaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Sementara kita yang tinggal merasakan kemerdekaan saat ini dengan tanpa rasa bersalah mau merubah konsep kebangsaan yang dibangun sejak dulu dengan susah payah. Dimanakah rasa nasionalisme kita? Dimanakah rasa terima kasih kita kepada para pejuang bangsa ini? Kita tidak perlu lagi mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, kita hanya perlu menyingkirkan ego dan sara, sehingga kita dapat hidup rukun dan tenang untuk menjadi bangsa yang tetap kuat dimasa mendatang. ☺

*Lestarkan tari lulo, Cintai budaya Indonesia
Dengan itu kamu akan sadar indahnya keberagaman*







5

Menangkal Intoleransi Melalui Kearifan Lokal Falsafah Kesusastaan Masyarakat Ternate “*Jou Se Ngofangare*”

MULFANDHY GAILEA

Masyarakat Indonesia telah lama dikenal sebagai masyarakat yang heterogen. Selain memiliki lebih dari 500 kelompok etnik yang masing-masing dapat dibedakan secara geografis, pengalaman sejarah, juga berbeda dalam bahasa dan budaya. Hidup dalam masyarakat heterogen kerap kali dihadapkan oleh berbagai permasalahan budaya, baik pada tingkat lokal, hingga ke tingkat nasional.

Perubahan identitas budaya yang terjadi dalam masyarakat heterogen sering menjadi ancaman terhadap keberadaan tradisi lokal, warisan adat leluhur dan nilai-nilai lokalitas etnik yang awal mula tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai falsafah bangsa, kini mulai tergerus oleh arus globalisasi.

Pemaknaan tentang kearifan lokal (*local wisdom*) sering digunakan secara bergantian atau saling isi mengisi dengan konsep-konsep lain yang terkait misalnya konsep pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) atau '*indigenous knowledge*'. *Local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang





menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil.

Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis dan Spanyol di Ternate pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Keragaman ini menjadikan perbedaan yang dimilikinya memiliki potensi konflik yang dipunyainya juga akan semakin tajam. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat akan menjadi pendorong untuk memperkuat isu konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dimana sebenarnya konflik itu muncul dari isu-isu lain yang tidak berkenaan dengan keragaman kebudayaan.

Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia dan komunitasnya yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya secara berkelanjutan. Kearifan lokal itu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti, hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat lokal setempat. Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Dalam bingkai kearifan lokal ini, masyarakat bereksistensi, dan



berkoeksistensi satu dengan yang lain. Kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan secara terus-menerus.

Falsafah "*Jou Se Ngofangare*" menurut pendekatan arti yang mudah dipahami adalah "Aku" dan "engkau". Secara Etimologi "*Jou*" diartikan sebagai Dzat tertinggi atau Tuhan, bila didekati dengan pengertian religi.

Namun pada konteks yang berhubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan, *Jou* diartikan sebagai Pemimpin. Konsep falsafah *Jou Se Ngofangare* ini bisa dimaknai sebagai pemimpin dan rakyat (aku dan engkau) dengan keterjalinan arti yang bersamaan dengan "Manunggaling Kawula Gustinya" pada Masyarakat Jawa.

Secara sederhana pengertian falsafah *Jou Se Ngofangare* ini bisa dikatakan sebagai sistem/pola berpikir atau cara pandang masyarakat Ternate menurut tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Pandangan ini juga awalnya bersifat mitis. Dimana petuah atau pedoman hidup dari ajaran-ajaran *Jou* (dalam hal ini *Kolano* = Raja atau Sultan ketika Kerajaan ternate mulai bertransformasi dengan Islam) dianggap sebagai sumber kebenaran.

Bertolak dari dasar pemikiran mitis atas konsep ini tak bisa dipisahkan dengan proses awal terbentuknya Kerajaan yang hampir sama berasal dari dunia atas atau Kayangan di hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Artinya unsur mitologi atau dimensi mitis tak bisa dipisahkan dengan sumber kekuasaan yang menjadi titah atau pedoman hidup bagi masyarakat setempat yang harus ditaati.

Masyarakat Ternate mengenal sistem kekerabatan patrilineal, yaitu dengan mengacu kekerabatan yang mengikuti pihak bapak karena umumnya nama anak digabungkan



dengan nama turunan bapaknya, baik bapaknya sendiri atau pun kakek dari pihak bapak sesuai marga. Berdasarkan sistem kekerabatan ini, dalam pelaksanaan suatu hajatan atau acara perkawinan misalnya, yang menjadi penentu adalah pihak dari keluarga bapak. Jika bapak sudah tiada, perannya digantikan oleh kakak atau adik laki-laki dari pihak bapak. Selain itu, nilai kearifan yang terdapat dalam keluarga masyarakat Ternate mempunyai hubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan (gotong royong). Kekerabatan yang dibangun ini tidak hanya untuk keluarga yang berhubungan dengan garis keturunan, melainkan kerabat jauh atau keluarga yang tidak bertalian darah pun bisa mendapat tempat yang sama jika dianggap mempunyai hubungan baik bagi sesama warga.

Tradisi menyangkut penghormatan antar keluarga ataupun tetangga dalam masyarakat Ternate sangat diagungkan. Salah satunya adalah ungkapan penghormatan dalam hal mengundang tetangga atau keluarga pada acara atau hajatan hajatan tertentu seperti dalam acara akad Nikah, pelaksanaan dina kematian, atau Khataman Qur'an. Tradisi mengundang dalam adat Ternate ini disebut dengan istilah *Gogoro* atau *Koro* yang berarti mengundang. Apabila kurang lebih dari setengah jam sebelum acara dimulai maka disusul dengan "*Koro Susulan*" oleh keluarga yang melaksanakan hajatan, bagi orang Ternate prosesi ini disebut dengan "*Sidola*". Saat *sidola*, ada beberapa kata yang disampaikan kepada yang diundang misalnya, dengan kata-kata: "yang mengundang menitip salam (meminta) sebisa mungkin untuk hadir tepat waktu, sebab acara/hajatan sudah mau dilaksanakan". Apabila yang diundang berhalangan untuk hadir, maka yang bersangkutan akan mengucapkan semacam "*Siloaloo*" atau permohonan maaf atas ketidakhadirannya. 🙏





6

Kearifan Lokal di Aceh “Penghormatan Perempuan” Sebagai Modal Sosial untuk Mengatasi Diskriminasi

WIDIA MUNIRA

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam mengatasi diskriminasi. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sanksi adat maupun yang tidak memiliki sanksi. Hampir setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan diskriminasi.

Dari sisi etnis dan budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti etnis Aceh yang dikenal terbuka menerima etnis lain sebagai saudara (adat Pemulia jamee) etnis Batak juga terbuka, Jawa





terkenal dengan tata-krama dan perilaku yang lembut, etnis Madura dan Bugis memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletannya dalam usaha. Demikian juga etnis-etnis lain seperti, Minang, Lampung, Sunda, Toraja, Sasak, Nias, juga memiliki budaya dan pedoman hidup masing yang khas sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hidup mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat Aceh yang menganut agama Islam, maka agama, budaya, dan kearifan lokalnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kesehariannya. Semboyan Adat *ngon hukom lagee zat ngon sifeuet* merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat Aceh adat-budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan hukum-Syariat Islam adalah satu, seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan dan berlaku bolak-balik. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya budaya Aceh pada dasarnya berazaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Kearifan lokal sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan alam. Termasuk di dalamnya mengatasi diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal.

Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh kehidupan mulai dari aspek sosial, politik, hukum, pendidikan dan budaya. Pada konteks budaya, ajaran Islam mampu melakukan dialektika dan harmonisasi antara tatanan adat dan nilai-nilai agama. Nilai agama tertransformasi dan aplikasi secara apik dalam ranah budaya yang dipraktekan sepanjang sejarah yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut menjadi formula dalam mengatasi diskriminasi dan sengketa dalam masyarakat.





Keberadaan adat-budaya dan kearifan lokal akan mendapat legitimasi dari masyarakat jika berazaskan nilai-nilai dan norma keislaman. Karena itu, sebagai bagian dari budaya maka kearifan-kearifan lokal masyarakat Aceh mustilah bernafaskan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, dan karena itu pula bukanlah kearifan lokal masyarakat Aceh apabila bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Kearifan lokal masyarakat Aceh mencakup segala aspek kehidupannya, seperti aspek budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam dan lingkungan, dan lain-lain.

Ketika terjadi diskriminasi maka mekanisme dan formula penyelesaiannya ada dalam tatanan budaya Aceh. Salah satunya yang dikenal dengan “penghormatan perempuan”. Mekanisme pencegahan diskriminasi ini disebut sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan terbukti efektif mampu mengatasi diskriminasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Dari aspek budaya ada kearifan lokal yang berkaitan dengan penghormatan terhadap perempuan yang diekspresikan dalam bentuk memelihara aurat perempuan sejak usia dini (balita) berupa pemakaian perhiasan *Cupeng* yang berfungsi ganda dan dimaksudkan juga sebagai penutup alat genitalnya ketika ia tidak berpakaian. Sementara untuk perempuan remaja dan dewasa melengkapi pekaianya dengan kancing baju emas *Boh Dokma* yang sesungguhnya juga berfungsi ganda sebagai senjata kejut guna menjaga kehormatannya dari gangguan lelaki jalang. Demikian juga guna mengangkat martabat perempuan, para istri menjaga daya tarik dan efek erotis bagi suaminya di kamar tidur dengan memakai perhiasan tali pinggang yang melekat pada badannya dengan prinsip kecantikan hanya untuk suami. Ketiga hal tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip berpakaian orang Aceh, bahwa menutup aurat merupakan keharusan walau terpaksa dengan seutas benang sekalipun, berpakaian harus sesuai tempat,





suasana, dan fungsinya, dan bagi istri kecantikan yang utama haruslah dipersembahkan kepada suaminya. Penghormatan kepada perempuan tidak hanya diekspresikan di dunia, tetapi juga sampai ke kuburannya, seperti tercermin pada makam putri-putri Pasai yang berpusara alam indah, berbalik dari pusara para raja yang bernisan batu-batu biasa.

Prinsip berpakaian orang Aceh dengan berbagai tujuan, keadaan, dan fungsinya ditanamkan melalui memori kolektif masyarakat, misalnya dengan ungkapan: *“peue ka peulhon aneuk keuh, meusikrek beuneung tan”*, yang berarti “mengapa (ekspresi kemarahan) kamu biarkan anakmu telanjang bulat, tanpat pakaian seutas benang pun?” Ungkapan ini bermakna bahwa orang Aceh, meski anak kecil sekalipun harus berpakaian, dan walaupun terpaksa harus telanjang, tidaklah boleh telanjang bulat, kecuali melekat pada badannya walau seutas benang. Prinsip ini dipelihara kelestariannya dengan pernyataan-pernyataan lain yang mengancam dengan mara yang akan terjadi bila dilanggar, seperti *“bek teulhon abeh, jitamong jen”* yang artinya jangan telanjang bulat, bisa masuk jin.

Pelestarian prinsip keharusan berpakaian tersebut juga menjadi kearifan masyarakat Aceh dengan menyediakan *“ija rhah”* atau kain basah di kamar mandi, yang berarti dalam keadaan sendiri dan tertutup sekalipun aurat harus dijaga. *“Gho bagho, tika eh tika ceumeulho”*, yang bermakna “Sembrono (tidak pada tempatnya), tikar tempat tidur jadi tempat perontokan padi”. Ungkapan ini bermakna bahwa dalam berpakaian (termasuk memakai perhiasan) seseorang haruslah sesuai dengan tempat, suasana, dan fungsinya. *“Ngon gob bahie, ngon lakoe khie”*, yang berarti “bersama orang lain (di luar rumah) cantik, bersama suami bau tengik”. Ungkapan ini bermakna bahwa perempuan Aceh haruslah cantik (*bahie*: bahenol) bersama suaminya, guna menjaga kasih sayang dan kebahagiaan suami istri.

Bentuk dari “penghormatan perempuan” juga diaplikasikan dalam bentuk pemberian rumah kepada anak perempuan





sebagai *rumoh peunulang*” (rumah pemberian) merupakan adat yang diaplikasikan pada masa kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam dan tetap bertahan sampai sekarang. Dilihat dari segi sosial mempunyai akibat yang sangat positif dan mengatasi terjadinya diskriminasi suami terhadap istri. Yaitu kuatnya kedudukan si istri dalam rumah tangga selaku pemilik rumah, untuk istri di Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Besar yang disebut *peurumoh*, yang artinya yang punya rumah. Dalam keadaan yang demikian suami tidak dapat dengan sewenang-wenang, menghardik dan mencoba mengusir istri dari rumah kepunyaannya sendiri, sehingga tercegahlah terjadinya perceraian oleh sebab-sebab yang mungkin terjadi. Dengan adat tersebut menjadi satu modal sosial dalam mencegah diskriminasi di tengah masyarakat lokal khususnya.

Kearifan lokal “penghormatan perempuan” di Aceh juga diberlakukan dalam sebuah aturan “syariat Islam”. Syariat Islam menggambarkan tentang penghormatan perempuan atas diskriminasi-diskriminasi yang pernah terjadi pada masa konflik yang pasca pemberlakuan DOM di Aceh yang menelan korban cukup banyak warga masyarakat Aceh. Khususnya perempuan Aceh yang paling terkena dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung. Dari peristiwa tersebut Aceh dijadikan salah satu wilayah yang berstatus syariat Islam. Perempuan menjadi target utama syariat Islam dikarenakan kaum perempuan menjadi kelompok yang paling sering terbidik oleh diskriminasi. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh dapat mengatasi diskriminasi-diskriminasi yang pernah terjadi pasca konflik di Aceh.

Karena itu sangat tepat jika menyelesaikan diskriminasi dengan menggunakan kearifan lokal ditengah keberagaman selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai tersebut telah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima masyarakat. Dengan kearifan lokal ini diharapkan





resolusi diskriminasi dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi diskriminasi lain yang tersembunyi dalam masyarakat. Baik diskriminasi yang menyebabkan kematian, luka berat, luka ringan, cacat ataupun sengketa mengenai persoalan ekonomi dan sosial. ☺





7

Diskriminasi Struktural dan Sosial Masyarakat Adat Sunda Wiwitan dan Jemaat Ahmadiyah Kuningan Jawa Barat

ZARIQOH AINNAYAH SILVIAH

Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, agama, bahasa, serta budaya yang kesemuanya tidak bisa dipisahkan dari Indonesia itu sendiri. Lahirnya pancasila pada 1 Juni 1945 merupakan tanda bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman, dan menghargai perbedaan. Setidaknya itulah pengetahuan yang saya dapat ketika berada pada bangku SMA sekitar 4 tahun lalu, yang kemudian berubah menjadi satu tanda tanya besar ketika melihat banyaknya konflik atas nama agama yang terjadi di tetangga kota dimana saya lahir, yaitu kuningan.

Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Cigugur dan Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor adalah dua kelompok masyarakat yang sering mendapat tindakan diskriminatif dan mendapat stigma sesat. Undang-undang seolah memberikan persepsi bahwa hanya ada 6 agama resmi di Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi pangkal adanya diskriminasi baik struktural maupun sosial yang dialami Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Secara struktural, pemerintah telah mencederai hak Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Tanda strip pada kolom





agama dalam KTP dan tidak dicatatnya pernikahan warga adat merupakan diskriminasi struktural yang kemudian berakibat pada diskriminasi sosial yang dilakukan masyarakat.

Bukan hanya Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, ahmadiyah yang merupakan satu aliran dalam islam juga mengalami hal serupa. Terhitung sejak 2012 sampai dengan akhir tahun 2017 Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor tidak bisa mendapatkan KTP elektronik. Selain itu, adanya diskriminasi struktural yang dilakukan pemerintah dan MUI melalui keluarnya SKB dan fatwa akan sesatnya ahmadiyah menjadi semangat baru bagi ekstrimis untuk melakukan tindakan persekusi.

Di sunda wiwitan, anak usia SD dibuli teman-temannya sampai pada tindakan fisik berupa pemukulan, pernikahan tidak dicatat secara resmi oleh negara, tidak dicantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak, dan pemberian tanda bahwa pernikahan tidak resmi. Tidak hanya sampai disitu, pengosongan kolom agama juga menyulitkan warga adat sunda wiwitan dalam memperoleh akses pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai pada sesuatu yang vital, yaitu kesehatan.

Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan tidak bisa melangsungkan pernikahan di daerahnya sendiri, dengan alasan mereka adalah Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, untuk mendapatkan KTP Jemaat Ahmadiyah diminta mengucapkan syahadat ulang di depan petugas dan menandatangani surat pernyataan bahwa dia keluar dari Ahmadiyah. Anak-anak dibuli, dikafirkan, terancam nilainya karena guru yang masih berkuat pada perdebatan sesat dan tidak sesat, serta pengrusakan masjid yang dilakukan ekstrimis dengan membabi buta.

Berkembangnya ekstrimis jujur saja membuat saya pesimis dengan masa depan keberagaman di Indonesia. Ekstrimis melakukan pengorganisasian sampai pada akar rumput. Masuk pada dunia pendidikan dengan mengadakan halaqoh, membaca kebutuhan ibu-ibu dan mengadakan pengajian, serta maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan konten-konten





yang mengarah pada intoleransi. Sasarannya adalah remaja yang tidak mempunyai banyak akses untuk memperoleh pengetahuan agama, yang seringkali menjadikan media sosial sebagai alat bagi dirinya untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Maka, munculnya Muslim Cyber Army menjadi hal yang harus diwaspadai namun juga harus kita pelajari agar setidaknya dapat mengcounter konten-konten yang berbau intoleransi.

Mendekati tahun politik saya semakin khawatir, akan dibawa kemana lagi keberagaman di Indonesia? Saya khawatir sekaligus berharap, semoga wakil rakyat pada masa-masa mendatang dapat mengurangi luka-luka mereka. Saya pesimis sekaligus optimis melihat semangat kelompok korban yang walaupun sering mendapat tindakan diskriminatif tetapi masih mempunyai kekuatan untuk menyusun strategi agar apa yang telah mereka alami tidak terulang kembali.

Tentu saja, politik mempunyai andil besar pada langgengnya diskriminasi di Indonesia. Pada tahun-tahun politik issue agama akan naik, dan lagi-lagi kelompok minoritas yang menjadi korban. Saya rasa, sudah tidak banyak ekstrimis yang lahir karena ideologi. Ekstrimis zaman now lahir karena kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang dengan tega menunggangi agama sebagai jalan mewujudkan kepentingannya.

Masih segar dalam ingatan saya rentetan aksi yang berjilid-jilid menemani perjalanan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ribuan massa dari berbagai daerah tumpah ruah, katanya ingin membela agama. Di kuningan Jawa Barat penerbitan KTP elektronik Jemaat Ahmadiyah sementara dihentikan karena aksi demo kelompok ekstrimis yang menuntut agar KTP elektronik bagi Jemaat Ahmadiyah dicabut kembali. Hal ini ditanggapi oleh bupati kuningan dengan mengatakan bahwa ia akan melakukan pendekatan pada warga Ahmadiyah agar mau bersholawat dan bersyahadat bersama. Bukankah administrasi kependudukan seperti KTP sudah menjadi





kewajiban negara untuk memenuhinya? Bukankah keyakinan adalah forum internum yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun? Mengapa seorang kepala daerah tidak melihat kewajiban negara sebagai satu hal yang harus dilakukan? Entahlah, yang saya tau beliau akan mencalonkan lagi sebagai bupati dalam pilkada tahun ini.

Di sisi lain, ternyata semangat kelompok korban masih menyala sekalipun mereka telah mengalami banyak sekali penderitaan. Mereka mulai mempelajari strategi yang dilakukan kelompok ekstrim, belajar tentang bagaimana membangun sistem keamanan, mengkampanyekan keberagaman melalui seni, budaya, dan yang lainnya. Upaya-upaya hukum sebagai langkah mengingatkan negara untuk menjalankan kewajibannya tentu saja terus dilakukan. Sampai saat ini, Jemaat Ahmadiyah sudah bisa mendapatkan KTP elektronik walaupun beberapa masih tertahan, dan dengan putusan mk tentang kolom agama, masyarakat adat sudah bisa mencantumkan penghayat kepercayaan pada kolom agamanya. Sedikit angin segar di tengah gempuran ekstrimis yang semakin menjadi. 🤝





8

Pesantren Sebagai Kearifan Lokal yang Membentuk Watak Otentik Islam Toleran

ZUMROTUN NAFISAH

Indonesia tetap satu. Sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya ‘meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Terdapat kurang lebih 700 suku-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan tipe kelompok masyarakat yang berbeda, agama yang beraneka, bahasa daerah, bahkan adat istiadat juga. Indonesia begitu kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah heterogenitas masyarakat. Masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik, serta budaya toleransi dan tepo seliro menjadi modal utama bagi masyarakat kita dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik.

Agama menjadi salah satu hal yang sensitif bila dikaitkan dengan keharmonisan dan toleransi. Indonesia seringkali terjadi banyak gesekan, problematika semacam ini berakar dari perbedaan paham dalam melihat suatu hal yang masih harus disamakan bagaimana agama mengajarkan toleransi kemanusiaan. Sebagian orang masih memahami agama mereka secara eksklusif, sehingga mengklaim keyakinan sendiri





lebih baik daripada keyakinan orang lain dengan fanatik. Sikap semacam ini dapat mendorong terjadinya kekerasan antarkelompok, di mana sebagian pengikut sebuah agama menyerang pengikut yang lain karena dianggap menyimpang dari agama “yang sebenarnya”. Upaya untuk membangun kerukunan antaragama tidak hanya terbentur pada persoalan teologis tapi juga masalah sosial, politik dan ekonomi. Perubahan sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini akan terus bergulir, selama pemahaman kemanusiaan masih jadi penghalang tumbuhnya studi yang intensif mengenai faktor yang mempengaruhi konflik dan pluralisme bertoleransi.

Tanpa usaha yang terencana untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan pluralis, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas akan terus memecah-belah keberagaman yang telah membentuk dan memperkaya Indonesia. Kemampuan manusia dalam menerjemahkan sebuah perintah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda, sehingga butuh implementasi penjelasan detail yang nanti dijadikan senjata menggagalkan kelompok intoleransi yang tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Banyak pertanyaan yang muncul perihal ke-bhineka-tunggal-ika-an yang didengungkan oleh negara kita. Deretan kasus pelanggaran HAM terkait intoleransi antarumat beragama yang muncul di Indonesia menjadi salah satu bukti belum ditegakkannya rasa toleransi secara keseluruhan dalam bernegara. Baru-baru ini, gejala intoleransi di Indonesia memanas seiring dilaksanakannya aksi yang mengatas namakan pembelaan agama. Mulai dari aksi damai 411 hingga aksi 212 pada penghujung tahun 2016 dan aksi 212 jilid II di awal tahun 2017.

Menggali sejarah kebelakang dalam konteks Indonesia peran pesantren tidak hanya sebatas dalam pendidikan, melainkan juga perjuangan kemerdekaan. Hal itu pernah disimpulkan peneliti Asia Tenggara, Harry J Benda, dalam bukunya yang membahas masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dia menekankan, sejarah Islam Indonesia adalah





sejarah perluasan peradaban santri serta pengaruhnya bagi kehidupan beragama, sosial, serta politik Indonesia. Di Indonesia, khususnya Jawa, dalam masa transisi memudarnya pengaruh Hindu-Buddha sekaligus menyebarnya dakwah Islam, para kiai antara lain Wali Songo mengislamkan sistem lembaga pendidikan warisan dua agama tersebut. Seperti contoh strategi dakwah yang diterapkan oleh sunan kudus di masanya, beliau menghindari konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Budha, untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah.

Suatu ketika Sunan Kudus atau Ja'far Sodiq membeli seekor sapi (dalam riwayat lain disebut kebo gumarang) yang notabene rakyat kudus kebanyakan beragama hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh sunan kudus terhadap sapi tersebut. Sapi dalam pandangan agama hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa, mereka percaya menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa.

Karena menjunjung tinggi toleransi dalam beragama serta membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian, sunan kudus melarang kepada umatnya untuk tidak menyakiti bahkan menyembelih sapi dengan bersidalih mengisahkan bahwa sapi itu pernah datang menyusui beliau saat hampir mati kehausan. Sejak tahap-tahap awal pengembangan Islam di Nusantara, para ulama pelaksana misi dakwah Islam termasuk Wali Songo telah melakukan dakwah di tengah bangsa kita melalui pendekatan beraneka ragam seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, mereka mampu menangani langsung problem umat secara kondisional dan regional, sehingga Islam kemudian dikenal dan dipeluk oleh berbagai lapisan masyarakat dan suku di Nusantara.





Gelombang modernisme yang disambut antusias oleh kalangan terpelajar terutama yang memperoleh pendidikan Barat (AS). Mereka tidak berusaha mengembangkan modernitas dengan berbasis pada kearifan lokal melalui seleksi atau adaptasi dengan tradisi, tetapi berusaha menerapkannya secara letterlijk secara puritan, sehingga ide yang dibawa dari Barat itu sama sekali tidak dicoba padukan dengan gagasan serupa yang sudah muncul di negeri ini. Akhirnya modernisme menjadi lawan tradisionalisme, dianggap modern bila berhasil meninggalkan bahkan memutus tradisi secara pragmatisme. Tradisi merupakan aspek kebudayaan yang tidak hanya diterapkan dalam kehidupan, tetapi terus-menerus diwariskan baik berupa tata nilai, cara berpikir dan perilaku yang tetap mengatas namakan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Sementara itu sebagai sebuah elemen kebudayaan, walaupun tradisi itu diwariskan tetapi hal tersebut juga terus mengalami perkembangan. Perkembangan yang bersifat gradual dalam sebuah garis kontinum yang tidak terputus Karena kebudayaan maju itu memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan sejarah bangsa itu sendiri.

Keterputusan dengan tradisi itu yang membuat bangsa ini mengalami gamang dan disorientasi, mau menjangkau barat tapi masih terlalu jauh atau mau menghilangkan tradisi. Akhirnya tercipta kebudayaan Indonesia yang tidak jelas, menjadi bangsa yang tidak jelas yang tega menggadaikan diri dan bangsanya pada bangsa lain secara hina sebagai budak, baik di tingkat politik intelektual hingga pekerja kasar. Semuanya bermental budak, sebab tidak memiliki tradisi berpikir, dan tradisi bersikap mandiri. Ketika semua aspek kehidupan telah terserap ke dalam logika modernisme yang werternized dengan segala implikasi positif negatifnya, maka dunia pesantren terus bertahan pada cara berpikir lama, dan terus mengadakan penyesuaian dengan kemodernan yang ada, tetapi masih merujuk pada sumber tradisi sehingga dinamikanya relatif lambat. Sebab segala sesuatu harus diseleksi, ditakar menurut budaya dan tradisinya sendiri secara





mandiri. Selama ini pesantren dianggap sebagai benteng perlindungan tradisi, sehingga orang pesantren maupun kaum Nahdliyyin yang berbasis pada pendidikan pesantren itu disebut sebagai kaum tradisional.

Abdurrahman Wahid menilai pesantren sebagai subkultur dari kultur nasional, karena ia memiliki tradisi sendiri yang unik dan independen, terbebas dari tekanan modernisme yang hegemonik dan terus bertahan walaupun mendapatkan cacian sebagai konservatif terbelakang. Karena daya dukungnya kuat, maka tradisi pesantren tetap bertahan sesuai dengan kultur dan iramanya sendiri namun terus berkembang sesuai dengan logika tradisi masyarakat. Munculnya era post modernisme membuat tradisi yang selama ini dilecehkan dan dilupakan akhirnya mendapatkan tempat kembali, tidak hanya di ranah kebudayaan tetapi juga mendapat pengakuan akademisi. Era ini akhirnya juga berimbas pada NU yang selama ini diabaikan karena dianggap tradisional kembali menemukan relevansinya, tradisionalisme yang selama ini dianggap sinkretik kemudian mendapatkan pemaknaan baru sebagai multi kulturalisme simpatik. Sikap itu yang mencegah terjadinya radikalisme dan berbagai tindak kekerasan yang lain yang dipicu oleh semangat puritanisme.

Menurut pendapat CC Berg bahwa santri berasal dari kata shastri atau cantrik dalam bahasa Sanskerta yang berarti 'orang yang mengetahui isi kitab suci' atau 'orang yang selalu mengikuti guru'. Santri tekun menuntut ilmu, mereka dikenal taat menjalani perintah agama dan kiai. Sejarah membuktikan santri adalah orang-orang yang berada di garis terdepan dalam memerdekakan bangsa ini. Mereka mewarisi dan memelihara keberlanjutan tradisi keilmuan Islam sehingga sampai kepada dakwah Rasulullah SAW. Dalam corak pendidikan pesantren setidaknya ada beberapa ciri khas antara lain: hubungan toleransi santri baik dengan santi lainnya ataupun dengan kiai sebagai pendiri pesantren itu sendiri. Kehidupan yang sederhana atau mendekati zuhud, kemandirian, gotong royong, pemberlakuan aturan agama secara ketat, serta





kehadirannya di tengah masyarakat sebagai pemberi solusi dan mengayomi.

Ciri pertama yang bisa mengidentifikasi jati diri pondok pesantren itu bahwa setiap pondok pesantren dalam mengembangkan Islam selalu mengajarkan paham Islam yang moderat, tasamuh, Islam wasatiah yang dikenal dengan Islam ahlussunnah waljamaah. Ciri kedua inilah yang dibangun dan menjadi tradisi pondok pesantren sehingga para santri dan kiainya tidak mudah menyalahkan orang lain, mengafirkan sesama. Itulah sesungguhnya yang dibangun karena pada setiap manusia ada keterbatasan diri, sehingga Allah menciptakan keberagaman. Keberagaman ialah anugerah Tuhan, dan karena keterbatasan sehingga bisa saling melengkapi. Ciri ketiga, pondok pesantren mengajarkan santrinya untuk wajib mencintai Tanah Air. Sikap cinta Tanah Air ini sebagai representasi dari ajaran hubbul wathan minal iman, cinta Tanah Air itu sebagian dari iman.

Jadi, syarat untuk menunaikan ajaran Islam ialah kondisi negara yang aman. Itulah mengapa cinta Tanah Air bagian dari iman. Nasionalisme ditanamkan di pondok pesantren. Tasamuh atau toleransi ini menyandarkan pada satu sikap sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam makna yang umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, yakni terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan ajaran Islam. Cara kita menyikapi keragaman dengan cara tawasut, tawazun bukan saling menegasikan satu sama lain. Ketiga ciri inilah menjadi bagian integral dari kehidupan dunia pesantren, dan tiga ciri tersebut akan memperkuat para santri menghadapi dunia luar.

Seperti ditegaskan intelektual Islam, Azyumardi Azra dalam kata pengantar buku Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren, bahwa pembaruan pesantren dalam masa ini mengarah pada pengembangan pandangan dunia dan substansi pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan





zaman. Pikiran yang dikembangkan Azyumardi menegaskan kembali bahwa pondok pesantren dengan tiga ciri khusus tersebut harus terus-menerus merespons perubahan zaman di luar dirinya. Dengan terpeliharanya keutuhan bangsa dan tegaknya kedaulatan negara merupakan bagian dari pewujudan kemaslahatan umat sehingga kita punya pegangan ukhuwwah wathoniah dan ukhuwwah Islamiyah. Pemahaman dan sikap terhadap Islam pun akan bersifat komprehensif dan tidak sepenggal-penggal agar tetap kembali pada kearifan lokal yang dimiliki oleh NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Keanekaragaman lembaga pendidikan Islam merupakan khazanah yang perlu dilestarikan. Setiap lembaga mempunyai ciri khas dan orientasi masing-masing, namun demikian harus ada satu komitmen, yaitu memberi pemahaman Islam secara kaffah demi terciptanya *islam rahmatan lil alamin*. 🤲







9

Mendongeng: Mengatasi Masalah Kekerasan Melalui Bercerita

ARRAYYAN FIRDAUS

Laporan yang dirilis oleh Child Rights NGO Plan International and International Centre For Research On Women (ICRW) menunjukkan bahwa tingkat pengalaman siswa yang mendapat kasus kekerasan (termasuk bullying) di Indonesia mencapai angka 84% atau 7 dari 10 anak menjadi korban kekerasan di sekolah. Artinya, sekolah yang merupakan tempat pendidikan formal kini telah menjadi tempat yang tidak aman bagi para siswa. Berdasarkan hasil survei KPAI di tahun 2015, fenomena ini terjadi dikarenakan lemahnya sistem manajemen sekolah dalam upaya peningkatan kesadaran dalam menegakkan norma-norma dan budaya Indonesia di tingkat sekolah. Hal ini tentu memberikan dampak bagi orang tua siswa, dimana sebanyak 52% dari 800 orangtua di 33 propinsi di Indonesia merasa khawatir dan menganggap sekolah menjadi tidak aman bagi anaknya.

Mirisnya lagi, penulis pernah melihat kasus kekerasan di sekolah yang korbannya adalah saudara kandungnya sendiri yang mengakibatkan saudaranya mengurungkan niatnya untuk berangkat kesekolah selama 3 hari berturut-turut karena depresi dan trauma. Melihat hal tersebut, penulis





percaya bahwa mengambil upaya untuk mengatasi masalah ini adalah sebuah kebutuhan. Alhasil, pada tanggal 30 Agustus 2015, penulis dan keempat orang temannya membentuk sebuah gerakan sosial yang bernama Gerakan Mendongeng Indonesia (disingkat Gendong). Singkatnya, upaya inisiasi gerakan ini melalui kegiatan survei yang sederhana, yaitu dengan mengajukan dua pertanyaan: 1) apakah Anda suka dongeng?; 2) pernahkah Anda “didongengin”? Dua pertanyaan ini kami berikan kepada 5 orang yang masih berusia belia dan 10 orang tua. Lalu, dari lima anak-anak dan sepuluh orang tua yang kami berikan pertanyaan, secara spontan seluruhnya menjawab bahwa mereka “suka mendengarkan dongeng”, namun, sangat disayangkan sebagian besar dari mereka masih ada yang belum pernah “didongengin” oleh orang tuanya.

Gerakan Mendongeng (Gendong) Indonesia adalah salah satu gerakan yang berfokus pada upaya pengentasan masalah kekerasan pada anak melalui budaya mendongeng. Artinya, gerakan ini juga aktif dalam melakukan penyebarluasan budaya mendongeng dan sekaligus meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap budaya mendongeng. Ada beberapa alasan penulis terkait pemilihan budaya mendongeng sebagai alternatif upaya mengatasi masalah kekerasan pada anak diantaranya yaitu:

- 1) satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan nilai-nilai ataupun karakter dari tokoh cerita sehingga anak-anak bisa untuk menirunya;
- 2) mampu meningkatkan kecerdasan;
- 3) menstimulasi kekuatan berpikir sehingga mereka akan selalu mudah untuk mengingat kembali (memorizing) alur cerita hingga peran tokoh-tokoh yang terlibat; dan
- 4) mampu meningkatkan budaya literasi serta memperkenalkan kembali budaya Indonesia kepada anak secara mudah. Alhasil, melalui budaya mendongeng ini bisa dikatakan sebagai sebuah platform yang berusaha melahirkan the new local leaders di usia dini.





Sebagai informasi, saat ini Gendong masih berdomsili di kota Malang dan berbagi cerita kepada lebih dari seribu anak di wilayah Jawa Timur. Dalam pergerakannya, Gendong lebih memanfaatkan ruang-ruang publik yang banyak dikunjungi oleh orangtua dan anak-anak seperti taman-taman yang ada di kota dan ruang publik lainnya serta turut aktif berbagi cerita dan menumbuhkan nilai-nilai positif ke anakanak di sekolah-sekolah dan panti asuhan. Sampai saat ini Gendong telah memiliki lebih dari 40 anggota aktif dengan latar belakang dan usia yang berbeda-beda dan memiliki beberapa program rutin seperti Gendong dongengin taman, Gendong #goesto, dan gebyar dongeng.

Program Gendong dongengin taman yaitu sebuah movement yang memanfaatkan keberadaan ruang-ruang publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas mendongeng. Kedua, gendong #goesto yaitu sebuah kegiatan mendongeng di tempat wisata di kota-kota yang berbeda pada hari libur nasional. Ketiga, menyelenggarakan pentas dongeng seperti dengan menyelenggarakan lomba mendongeng yang disebut dengan Gebyar Dongeng. Keempat, Gendong #gocollaborate yakni melakukan kolaborasi salah satunya dengan Yam Saroh, salah satu pendiri komunitas Suara Difabel Mandiri, untuk menciptakan beberapa buku dongeng yang berisi tentang bagaimana cara menjaga alam dan bagaimana menjadi “superhero di bidang lingkungan”. Dalam waktu dekat, Gendong akan melakukan program kerja terobosan terbaru yaitu sekolah dongeng yang akan berkolaborasi dengan komunitas Kampung Urang Bangka.

Program sekolah dongeng ini berbentuk perkemahan (bisa disebut sebagai sekolah alam) yang akan dilaksanakan selama tiga hari. Anak-anak yang menjadi peserta sekolah dongeng akan dipertemukan dengan tokoh-tokoh lokal yang berkompeten dalam mengatasi masalah lokal berdasarkan bidangnya dan siap memberikan inspirasi dengan cara mendongeng. Artinya, sangat memungkinkan para peserta bisa saling berbagi (*sharing*) atau terlibat langsung dalam





mengkaji permasalahan lokal dengan tokoh lokal tersebut secara umum. Selain itu, para peserta juga akan dilatih bagaimana menjadi seorang *good storyteller* dengan teknik *ventriquoлист* boneka tangan/puppet, dan teatrikal/musikalisasi. Diakhir, untuk melihat seberapa jauh keberhasilan program ini, mereka juga akan diberi panggung untuk mendongeng dengan teknik yang telah diajarkan sebelumnya.

Di bagian akhir, Gendong saat ini masih dalam tahap pengembangan. Baik pengembangan kegiatan, pengembangan sarana-prasarana untuk dapat menyebarkan budaya mendongeng secara lebih baik lagi, maupun pengembangan jaringan. Disisi lain, Gendong juga sedang berusaha mengembangkan sayap untuk hadir di daerah-daerah lainnya yang mungkin memiliki banyak relawan yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan serupa ataupun saling berkolaborasi hingga berafiliasi dengan tujuan lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya kalangan anak-anak. Seiring berjalannya waktu, kini melalui gerakan ini ada rasa percaya bahwa pendidikan karakter di usia dini melalui budaya mendongeng dapat melahirkan *the new local leader* yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan (kehumanisan) dan juga memiliki karakter yang kuat seperti kesadaran trasedental dan kepedulian terhadap alam. 🐣

Daftar Pustaka

- Bhatla, Nandita., dkk. 2015. *Summary Report Are School Safe and Equal Places for Girls and Boys in Asia?: Research Findings on School-Related Gender Based Violence*. Bangkok: Plan International and ICRW.
- Susanto. 2016.
- KPAI: *'Quo Vadis' Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita*, (Online), (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anakdi-sekolah-antara-norma-dan-realita/>), diakses 27 Oktober 2017.





KEPING 4

MERAYAKAN KEBERAGAMAN







1

Keberagaman Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia

PRISKA NUR SAFITRI

Era informasi berkembang pesat. Indonesia dalam menghadapi globalisasi harus mampu mempertahankan *Cultural Diversity* serta identitas bangsa. Masyarakat harus mampu melestarikan kekayaan peradaban bangsa. Keragaman budaya menegaskan pluralisme adalah esensi yang tidak bisa di lepaskan dari kemerdekaan.

Mari kita tengok sejarah, letak geografis Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional, serta kekayaan alam yang melimpah. Proses penyebaran kepercayaan, agama masuk melalui perdagangan. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang di huni oleh jutaan penduduk yang beraneka ragam agama, aliran, budaya, bahasa, SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan).

Perbedaan harus di sikapi dengan rasa tenggang rasa, bijak serta harus di syukuri. Sebagai anugerah dari Tuhan yang maha kuasa, bahwa apa yang ada di dunia adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya perbedaan dalam keragaman akan menjadikan Indonesia indah. Sebagai mana yang sudah di rumuskan oleh *founding father* Indonesia.





Keragaman budaya sangat erat dengan adat istiadat/ kultur masyarakat. Menurut Koenjtaraningrat kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat sebagai proses belajar. Masyarakat Indonesia harus mampu mempersatukan keragaman untuk mengikat seluruh kelompok tanpa terkecuali. Generasi muda di harapkan mampu menyapaikan message serta menarasikan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Persoalan keberagaman seperti di bakarnya tempat ibadah, konflik antar umat beragama, penistaan atas nama agama, hingga gerakan ekstrimis brutal yang mengarah pada aksi terorisme. Konflik inilah yang ditunggu oleh golongan yang tidak menginginkan keberagaman. Kelompok radikal menjadikan suatu pembenaran atas konflik untuk melakukan jihad. Kaum jihadis ini menebar pemahaman yang salah, dan tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Jaringan jihadis melakukan jihad di jalan yang salah dan menganggap radikal adalah akhir dari penyelesaian. Pemahaman yang salah terhadap jihad akan meluber hingga pembenaran pada ajaran agama.

Radikalisme adalah paham yang menghendaki perubahan secara drastis, serta mengklaim dirinya paling benar. Gerakan radikal merupakan ancaman yang serius terhadap keberagaman di Indonesia. Radikalisme berkembang dan mengancam keutuhan NKRI. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa, "menjadi teladan yang baik adalah memperjuangkan Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme. Seharusnya generasi muda mempunyai integritas, toleran, tanggung jawab, serta mempunyai sikap tanpa pamrih untuk melindungi NKRI. Pemuda Indonesia harus memperkuat ideologi Pancasila serta mempunyai jiwa kepahlawanan.

Bukan suatu hal yang mudah menyatukan perbedaan di tengah banyaknya keberagaman. Maka di butuhkan semangat nasionalisme untuk mempersatukan dan membangun masyarakat Indonesia yang pluralistik. Prof R. Rijanta,





menggunakan analogi lain desa lain adat, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Artinya di negara Indonesia yang besar dan beragam ini, maka integrasi nasional harus diperhatikan karena integrasi sebagai prasyarat pembangunan nasional.

Semangat membangun Pancasila harus di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pondasi menyatukan keberagaman terhadap masyarakat Indonesia yang pluralistik. Jiwa nasionalisme harus selalu tertanam dalam diri setiap individu untuk menumbuhkan kecintaan pada negeri. Memahami bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah rahmah untuk hidup rukun damai dalam kebinekaan, serta toreransi dengan semua komunitas/kelompok.

Dengan beragamnya keanekaragaman negara mulai dari etnis, suku, ras, budaya, bahasa, serta komunitas yang berbeda. Akan menjamin nasionalisme masyarakat multikultural serta terbinanya kesepakatan tanpa menghilangkan identitas budaya. Sehingga hak hidup damai, gotong royong, berdampingan akan tercipta, kebudayaan daerah tetap eksis, toleransi umat beragama terbina dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bersinergi bersatu bersama dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan beragam keberagaman dalam satu kesatuan.

Keberagaman yang di miliki Indonesia akan menjadi ciri khas di banding negara lain. Sebagai mana semboyan Negara Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia dengan keanekaragamannya akan mampu unggul karena potret keragamannya yang bervariasi dan mampu mengembangkan budaya lokal di tengah peradaban modern. Serta mampu berinteraksi dengan perbedaan yang ada untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan.

Indonesia bisa menjadi kebudayaan, toleransi, inklusifikasi, dan ketanggahan jika seluruh masyarakat dan semua kalangan





dapat bersatu padu. Perkokoh persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang beragam keragaman. Menjaga kesatuan sebagai kekuatan dalam mewujudkan transformasi demokrasi, desentralisasi yang berjaya serta berdaya. 🌟





2

Pelangi Indonesia Wisata Religi Negara Majemuk

NUR HIKMAH

Mengunjungi tempat suci umat beragama menjadi salah satu alternatif wisata yang bisa dicoba. Selain mengisi liburan, kegiatan ini juga akan menambah wawasan kita mengenai keberagaman Indonesia dalam beragama. Sekarang banyak tempat peribadatan yang menjadi tujuan wisata terkenal di Indonesia. Bahkan Candi Borobudur yang menjadi tujuan wisata nasional dan internasional adalah tempat ibadah Umat Buddha. Jadi, wisata religi yang dimaksud dalam tulisan ini bukan wisata religi yang merupakan perintah atau anjuran agama yang dianut tetapi wisata kunjungan tempat ibadat.

Penulis sendiri pernah mengikuti kegiatan wisata tempat peribadatan dengan 'keluarga kecilnya' yang bernama pondok damai. Pondok damai adalah komunitas lintas iman yang bertujuan menyebarkan kedamaian dalam perbedaan. Komunitas ini terdiri dari semua agama yang ada di Indonesia, bahkan atheis dan penganut kepercayaan turut serta dalam komunitas ini.

Pertemuan tahunan dengan anggota baru menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Setiap tahun pondok





damai melakukan pertemuan baik anggota baru ataupun lama. Setelah melakukan live in biasanya anggota baru melakukan kunjungan ke beberapa tempat ibadah.

Penulis mendapatkan pengalaman menarik dalam kegiatan ini. Sempat berpikiran ragu untuk masuk tempat ibadat agama lain. Karena jujur, penulis hidup dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, berteman dengan orang Islam dan hidup dengan orang Islam bahkan penulis sejak masuk Sekolah Menengah Atas sudah mondok di pesantren. Jadi, interaksi dengan orang yang beda agama sudah pasti belum pernah ia lakukan.

Kegiatan pondok damai saat itu berada di Pure Agung Giri Nata Semarang. Memasuki area Pure, teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini mengatakan untuk menjaga sikap ketika memasuki pure, penulis hanya manut karena ini pertama kalinya mengunjungi pure.

Mengingat di pure, atau lebih tepatnya di aula pure tidak seseram yang penulis bayangkan sebelumnya. Bahkan saat ada waktu istirahat, peserta bisa berkeliling pure dan bertanya kepada pengurus pure tentang fungsi masing-masing tempat yang kemudian penulis ketahui tempat-tempat tersebut dinamakan mandala. Apalagi ketika malam hari, dari pure ini peserta bisa melihat Semarang pada malam hari karena posisi pure berada di daerah atas. Karena semakin atas tempat ibadat, maka ia akan semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang penulis tahu dari obrolan santai dengan peserta pondok damai lainnya.

Kunjungan selanjutnya adalah Masjid Kauman Semarang. Penulis sendiri sudah terbiasa shalat di Masjid Kauman saat berbelanja di Pasar Johar. Namun, teman-teman yang beda agama sangat antusias, mungkin karen ini pengalaman pertama mereka. Ada diantara mereka yang bertanya fungsi bedug, barisan shalat, wudhu, bahkan tempat imam yang di depanpun dipertanyakan.

Tempat ibadat selanjutnya adalah kunjungan ke Gereja.





Gereja yang dipilih adalah Greja Kristen Muria Indoneisa (GKMI) Semarang. Pertama kali masuk saya mendapatkan para remaja yang sedang bermain musik, katanya itu merupakan kegiatan remaja setiap hari minggu. Pengurus disana sangat ramah, bahkan kami disuguhi makanan beraneka ragam. Pengurus disana sangat senang berbagai agama bisa berkunjung ke GKMI. Dalam berdiskusi pun, kami lebih sering tertawa karena sudah tidak ada lagi rasa canggung antara pengurus dan peserta Pondok Damai.

Kemudian kunjungan selanjutnya ke salah satu Gereja Katolik di Semarang. Disini kami berdiskusi santai, selain peserta pondok damai yang bertanya mengenai gereja, pengurus gereja pun bertanya tentang banyak hal, terutama tentang Islam. Mulai dari kenapa harus shalat menghadap ke kiblat te, cara membaca tulisan huruf hijaiyah yang disambung, dan masih banyak lagi. Kemudian kami juga berkunjung ke Klenteng Tay Kak Sie Semarang. Disana saya diperkenalkan dengan nama-nama dewa dan dewi yang ada di Klenteng.

Tempat terakhir adalah Vihara Tanah Putih Semarang. Romo yang ada disana sangat baik, ia bahkan menceritakan kehidupan Siddhartha Gautama sejak kecil sampai meninggal. Tidak hanya itu, bahkan Romo disana juga menguasai sejarah Islam dan menemukan ada beberapa persamaan antara kehidupan Siddhartha Gautama dan Nabi Muhammad saw. Jika semasa hidup Siddhartha Gautama berjalan, maka daun teratai akan tumbuh tepat ditanah yang akan ia pinjak, sedangkan dalam Islam, ketika Nabi Muhammad berjalan, awan akan selalu mengiri beliau.

Dari sinilah, pandangan saya terhadap agama yang beragam mulai terbuka. Meskipun kita banyak sekali perbedaan dalam tata cara beribadah, tapi satu yang dituju yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Meski berbeda keyakinan tetapi saya percaya, bahwa semua agama sebenarnya mengajarkan kepada umatnya kepada kebaikan. Jika ada pertikaian yang mengatasnamakan agama, jangan salahkan agamanya, itu





hanyalah perbuatan okum yang tidak bertanggung jawab berkedok agama.

Perbedaan ini bertitik temu pada Indonesia. Indonesia yang majemuk adalah bangsa yang kaya dengan berbagai keragaman. Dengan perbedaan inilah wadah bergandeng tangan, saling membantu, bergotong royong, saling menghormati agar terjadi harmoni dalam warna yang berbeda. Sehingga kedepannya Indonesia bisa semakin kuat dimuali dengan umat beragama saling bergandeng tangan menjaga keselarasan dalam perbedaan. 🙏





3

Dampak Positif Penulisan Identitas Aliran Kepercayaan di KTP bagi Keberagaman Indonesia

PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN

Indonesia adalah negara yang majemuk. Mulai dari kemajemukan budaya, adat, bahasa, maupun kehidupan beragamanya. Agama atau kepercayaan adalah elemen penting dalam kehidupan kultural masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Praktik sehari-hari kehidupan adat tidak lepas dari sisipan nilai-nilai yang diadopsi dari unsur religiusitas. Mengambil contoh dalam ranah budaya adat Minangkabau terdapat ungkapan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabulloh*”, artinya adat dan agama tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Konklusifitasnya adalah, mayoritas ritual adat tidak hanya mempunyai hubungan antar manusia (*Hablu Minnanas*), namun tetapi juga memiliki hubungan ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Hablu Minallah*). Ideologi



bangsa yaitu Pancasila pun menempatkan unsur religius menjadi komponen yang pertama, seperti termaktub dalam sila I “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari paparan tersebut mengindisikan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa tetap menempatkan sisi religius sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bernegaranya. Sehingga Indonesia bukanlah negara sekuler.

Angin segar bagi para pemeluk aliran kepercayaan di negeri ini mulai berhembus. Diawali dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016 yang menyatakan:

1. *Bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.*
2. *Bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.*

Indonesia adalah negara hukum dimana dalam konstitusinya tertulis jelas hak-hak asasi manusia yang dijamin. Hak asasi tersebut adalah:

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan*



- pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*
 3. Pasal 28 yang berbunyi: *“Kemerdekaan berserikat dan ber-kumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;*
 4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;*
 5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”;*
 6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi *“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”;*
 7. Pasal 34 yang berbunyi: *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.*

Dari ketujuh HAM yang dijamin dalam UUD 1945, hanya terdapat 1 (satu) pasal yang secara tegas mencantumkan frase “menjamin”, yaitu Pasal 29 ayat (2) menegani jaminan beragama. Hal itu menjadi kontradiktif dengan produk hukum turunannya yang tidak menunjukkan semangat jaminan beragama tersebut, salah satunya adalah UU Sistem Administrasi Kependudukan yang menjadi objek gugatan tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam Konstitusi RI tidak ada satu pasal pun yang mencantumkan agama resmi negara, sehingga salah kaparah apabila ada penyebutan anekdot agama resmi di Indonesia hanya ada 6: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

KTP merupakan dokumen autentik sebagai identitas resmi kependudukannya. Itu berarti sebagai dokumen alat pembuktian sempurna mengenai akan informasi diri seorang WNI.



Walaupun Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan Pra-Gugatan MK memperbolehkan pengosongan kolom agama bagi pemeluk aliran kepercayaan, bukankah berarti secara eksplisit negara mengakui bahwa warga negara tersebut tidak mempunyai agama/atheis.

Sehingga betul dalam stigma masyarakat apabila ada KTP yang kolom agamanya “-” (strip), pemilik KTP tersebut tidak memiliki agama. Hal itu akan menyulitkan para pemeluk aliran kepercayaan yang kolom agama di KTP-nya kosong untuk memperoleh pelayanan publik seperti melamar pekerjaan, akses ke dunia perbankan, dan pelayanan sipil lainnya. Mau tidak mau mereka diharuskan memilih salah satu dari 6 agama mayoritas di Indonesia.

Ke depannya pasca putusan MK di atas, para pemeluk aliran kepercayaan secara legal dapat menuliskan identitas aliran kepercayaannya di dalam KTP. Dampak positifnya sangat fundamental putusan tersebut, para pemeluk agama dapat secara legitimitasi terlindungi hak-hak warga negaranya khususnya dalam urusan sipil. Misal, ketika mereka akan melangsungkan perkawinan, tidak perlu lagi hijrah ke salah satu dari 6 (enam) agama mayoritas tersebut. Perkawinan adalah momen sakral bagi umat manusia, bukan hanya ikatan lahir batin antar manusia saja, namun dalam perkawinan ada ikatan suci antara umat manusia dengan Tuhannya dalam membina rumah tangga di kemudian hari.

Bayangkan apabila perkawinan menurut aliran kepercayaan tidak bisa dilegalkan oleh negara dan diharuskan memilih salah satu cara perkawinan 6 (enam) agama mayoritas, seumur hidup perkawinan, pasangan tersebut akan terganggu masalah keyakinan dan kebatinannya. Nantinya pasca putusan MK tersebut, perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan tersebut tetap dapat dicatat sebagaimana amanah UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara aliran kepercayaannya tetap bisa mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat, sama dengan hak-hak pemeluk 6 (enam) agama mayoritas. Hak dan Kewajiban suami-istri lebih terjamin dengan adanya legalisasi perkawinan, daripada tetap melaksanakan perkawinan bawah tangan yang tidak dicatatkan demi mempertahankan aliran kepercayaan yang belum bisa diakui oleh negara seperti yang lazim terjadi Pra gugatan MK. Bahkan dalam hak-hak pasca perceraian, mereka pun bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, termasuk urusan harta gono-gini, hak asuh anak, dan perjanjian kawin. ♡







4

Langkah Merawat Keberagaman Indonesia

MUHAMMAD SAIFUL HAQ

Masa depan keberagaman Indonesia sepertinya akan menghadapi tantangan. Pendapat ini bukan tanpa alasan, faktanya beberapa tahun belakangan, semakin banyak kemunculan kelompok radikal dan intoleran yang menanamkan ideologi anti-pancasila dan mengusik kebhinekaan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa ada sebanyak 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. Sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Empat persen orang Indonesia menyetujui kelompok teroris dan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang artinya 10 juta umat Islam simpatik kepada ISIS. Mirisnya, mereka berusia 19-25 tahun dan 5 persen adalah mahasiswa¹.

¹ Berdasarkan uraian peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di forum Membedah Pola Gerakan Radikali tanggal 18 februari 2017.



Ernest Renan, seorang sastrawan, filolog, filsuf dan sejarawan Prancis, pernah berkata “Tiap bangsa atau nation punya ajalnya masing-masing”. Sejarah telah mencatat dari masa ke masa, banyak bangsa yang lahir dan berlalu. Jika melihat besarnya populasi “bom waktu” di atas, bukan sebuah kemustahilan jika Indonesia kemudian menjemput ajalnya.

Pertanyaannya, dari mana bom waktu bermula? Semua bisa kita lacak dari kemunculan kelompok beraliran fundamentalisme yang memiliki pendekatan fanatisme kelompok dan semena-mena dengan kelompok lain yang tidak sepaham. Para fundamentalis ini mengakrabi dirinya dengan idiom dan istilah-istilah negatif sebagai legitimasi perilaku semena-mena mereka, seperti kafir, sesat dan thought kepada hal-hal di luar mereka.

Proses kaderisasi dan doktrinasi dari kelompok radikal terus berlangsung di berbagai kampus sejak era reformasi. Hingga saat ini mereka terus tumbuh dengan gerakan-gerakan yang baru. Mereka terus menggurita dengan respek masyarakat yang meningkat sejak demo angka-angka cantik terjadi². Menurut hemat penulis ada empat hal yang bisa kita lakukan untuk memanjangkan umur keberagaman Indonesia.

1. Peran Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri peran pemerintah merupakan langkah pertama yang dapat menghentikan radikalisme dan merawat keberagaman Indonesia. Pemerintah harus semakin tegas kepada kelompok yang teridentifikasi anti Pancasila. Menarik apa yang dikatakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi Indonesia, jika ada organisasi masyarakat yang ingin keluar atau mengganggu ideologi Pancasila serta pilar

² <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170324185255-20-202640/komnas-ham-kasus-ahok-picu-meningkatnyatindak-intoleransi/> diakses 31 desember 2017.



negara yang lainnya, maka negara akan 'gebuk' dan negara tidak akan segan melakukan tindakan represif terhadap sikap-sikap intoleran.

Pernyataan ini bukan isapan jempol belaka, terbukti dengan pembubaran ormas-ormas dan pemblokiran media online anti Pancasila. Meski menuai pro-kontra di tengah masyarakat sebab dinilai bertentangan dengan konstitusi dan sistem demokrasi, tetapi hal ini patut diacungi jempol. Langkah ini dapat dipandang sebagai cara negara mengantisipasi terjadinya keos di Indonesia.

2. Peran Pendidikan

Selain langkah tegas yang dilakukan negara, pendidikan juga perlu hadir sebagai tindakan preventif. Perlu dilakukan sosialisasi kebijakan dengan fokus pada langkah deradikalisasi di tengah masyarakat, khususnya pada siswa, mahasiswa dan guru. Penelitian Maarif Institut menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, gerakan radikal melalui institusi pendidikan semakin membesar. Biasanya yang menjadi agen penyebar paham adalah oknum guru ataupun dosen melalui proses belajar-mengajar.

Penanaman pendidikan di sekolah seharusnya tidak hanya berfokus pada intelektualitas semata, namun sebaiknya penyusunan kurikulum mengembangkan pembelajaran dengan penguatan hak-hak kewarga-negaraan, toleransi, perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah dan kampus. Selain itu, perlu memperbanyak kajian ilmiah, diskusi dan publikasi yang dipelopori oleh pihak-pihak akademisi kampus di ruang wacana publik. Langkah ini dianggap penting, karena institusi pendidikan menjadi pionir penanaman intelektualitas dan moralitas kepada masyarakat, sehingga mereka harus aktif merespon ancaman keberagaman





Indonesia.

Selain pendidikan formal di sekolah, juga penting pendidikan keluarga. Setiap keluarga harus menyadari keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan radikalisme adalah musuh bersama semua lapisan masyarakat. Setiap keluarga harus mencari jalan dalam setiap kendala yang ada untuk memastikan kelancaran dan kedekatan komunikasi orangtua dan anak. Orangtua pun perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang toleransi, keindonesiaan dan beragama yang moderat, karena orang tua secara langsung mengambil peran pendidikan yang akan menjadi nilai-nilai yang ditanamkan ke anak-anaknya. Kalau pun harus menyerahkan peran ini ke sekolah, pastikan bahwa orang tua memilih sekolah yang tepat, lalu berupaya sebisanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah untuk memastikan bahwa materi pelajaran agama diberikan dengan benar³.

Hal lain yang dilakukan orang tua adalah pengawasan yang memadai atas pergaulan anak, khususnya dalam kelompok-kelompok keagamaan menjadi sangat krusial. Yayasan-yayasan pendidikan juga perlu mengevaluasi pengelolaan pendidikan agama di lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan kerohanian sekolah dan mentoring, khususnya yang melibatkan pihak-pihak luar. Kementerian Agama juga perlu memastikan bahwa pendidikan keguruan di sekolah-sekolah tinggi agama telah menyiapkan para pendidik dengan pemahaman keagamaan yang benar⁴.

³ <http://www.mizan.com/mencegah-radikalisme-dari-keluarga/> diakses 31 desember 2017.

⁴ Ibid Mizan.





3. Netizen yang Cerdas

Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia akan mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat⁵. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan di tahun 2016 terdapat 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet dari 256,2 juta total penduduk Indonesia. Itu artinya separuh dari masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet⁶. Sebagian besar pengguna tersebut berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta.

Mereka ini menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman (lama dan baru) dan untuk hiburan. Hal inilah yang menjadi celah bagi para penyebar paham radikalisme untuk menyebarkan doktrinnya di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi dari pemuda sebagai pengguna internet terbanyak di Indonesia untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan dengan mengunggah konten damai di sosial media seperti tulisan, komik, dan meme. Sehingga konten-konten damai yang bertebaran di dunia maya dapat mengalahkan konten-konten radikal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal.

Jika kemudian konten-konten damai diserang dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas, tidak perlu diladeni secara serius. Kebanyakan dari penyebar kebencian bersembunyi dibalik

⁵https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media diakses 31 desember 2017.

⁶<http://teknokompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna-internet.di.indonesia.capai.132.juta> diakses 31 desember 2017.





akun anonim. Menurut penulis tidak ada gunanya meladeni akun anonim, lebih baik memfokuskan diri menyuarakan kedamaian di dunia maya. Selain itu jangan pernah berpikir dua kali untuk merespon dengan melakukan pelaporan untuk akun-akun yang teridentifikasi radikal dan menghasut dengan isu sara. Justru itulah tugas kita sebagai secara individu untuk berkontribusi menjaga Indonesia.

4. Memperdalam

Nilai Moderat Doktrin teologis seringkali menjadi modal kelompok fundamental untuk menghancurkan keberagaman. Doktrin teologis seringkali menghasilkan sikap eksklusif. Mereka yang bersikap eksklusif biasanya akan bersikap anti keberagaman dan cenderung untuk menghindari proses-proses dialogis lintas agama bahkan lintas aliran, walaupun ada proses dialog sudah tentu dialog yang terjadi adalah dialogdialog yang bersifat apologetis, reaktif dan mau menang sendiri⁷. Doktrin teologis yang sering digunakan fundamentalis kebanyakan dalil-dalil konteks peperangan lalu kemudian digeneralisir ataupun lebih dulu menanamkan pemikiran kebencian kepada kelompok tertentu sehingga dalil yang sebutkan sesuai konteks terkini.

Prof Oliver Roy, seorang ahli bidang terorisme dan 'jihad' dari Prancis, berkesimpulan bahwa kebanyakan kelompok-kelompok radikal, justru bukanlah orang-orang yang penghayatan agamanya kuat. Mereka minim pengetahuan agama. Bahkan banyak di antara mereka memiliki masa silam yang gelap seperti pencandu narkoba, pelaku kegiatan seks bebas, dan sebagainya.

⁸ <http://www.acehtrend.co/membangun-sikap-keberagaman-yang-moderat/> diakses 31 desember 2017.





Penulis menawarkan untuk sekedar mengetahui dan tidak menerapkan teks kekerasan agama. Selain itu banyak mempromosikan ayat-ayat yang menyebarkan pemahaman agama yang toleran, merawat keberagaman dan sikap yang penuh cinta kasih kepada semua makhluk. Selain itu, kita aktif merespon tapi tidak reaktif terhadap perilaku intoleran.

Mempromosikan nilai-nilai moderat dalam agama untuk melindungi silent majority, yaitu orang-orang yang tidak mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka terhadap sesuatu hal. Menjadi umat beragama moderat menurut penulis adalah cara religious untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Hans Kung, seorang teolog asal Swiss berkata “Tidak Mungkin ada perdamaian di dunia, tanpa perdamaian antar agama” begitupun KH. Abdurrahman Wahid berkata “Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Ada lima agama yang diakui di Indonesia, jadi tolong hargai empat agama yang lain”.

Keberagaman adalah bagian dari Indonesia yang tidak bisa kita munafikkan. Sehingga paham yang mengancam keberagaman dan Menjaga keutuhan bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Perlu adanya sinergisitas semua elemen bangsa untuk sama-sama bertekad memberantas radikalisme. Tidak dapat dibenarkan berbuat semena-mena kepada kelompok radikal, sebab akan membuat kita sama dengan mereka, tetapi perlu dengan sikap dan perilaku yang baik.

Orang yang terlibat dalam aliran atau kegiatan radikalisme merupakan korban brain wash, mereka menelan “mentah” ideologi yang sifatnya radikal. Ideologi radikal bentuknya non-fisik maka perlawanannyapun harus dengan sesuatu yang non-fisik. Jadi ideologi radikal harus dimusnahkan dengan ideologi pula, yaitu ideologi moderat yang disebarkan melalui





peran pemerintah, pendidikan, netizen yang cerdas dan memperdalam nilai moderat.

Penulis teringat ketika perumusan sila pertama pancasila, kelompok Islam meninggalkan ego sektoralnya demi kebaikan bersama. Pikiran mengalah dan mengambil sikap moderat semata demi kemaslahatan bersama di masa depan yang lebih luas, sehingga moderat adalah salah cara pendiri bangsa menjaga keberagaman di Indonesia. Pendiri bangsa telah menunjukkan, saatnya kita melanjutkan. 🙏





5

Komunitas Literasi Menjaga Masa Depan Keberagaman di Indonesia

FILYADI GUSTI ZAMZAMI

Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terbanyak di dunia. Akhirnya Indonesia disebut negara kepulauan. Jika Indonesia memiliki pulau terbanyak, maka Indonesia sudah dipastikan memiliki suku/etnis, bahasa, budaya dan agama yang beragam pula.

Ketika kita melihat kompleksitas di negara Indonesia, kita harus bersyukur. Karena negara kita masih dikatakan negara yang sangat damai dan aman. Bahkan negara kita sebagai contoh untuk negara-negara lain di dunia, Terutama negara bagian timur tengah, yang sampai saat ini masih sulit merasakan kedamaian dan keamanan itu sendiri. Maka keberagaman yang kita miliki adalah keniscayaan dan hadir di seluruh aspek kehidupan. Dalam perbedaan yang kita miliki akan tercipta harmoni, hingga di tengah perbedaan itu harmoni akan menemukan keindahannya. Inilah nikmat keberagaman yang harus kita jaga sampai anak cucu kita. Tapi kita juga tidak bisa berbahagia dulu, atas kompleksitas yang kita miliki. Tidak mudah untuk menjaga keindahan dan kerukunan yang ada saat ini. Karena semakin beragam struktur suatu





wilayah, semakin tinggi pula potensi konflik sosial yang akan muncul. Baik berlatar belakang ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu, pemicu terjadinya kesalahpahaman atas dasar terlalu mudah percaya berita-berita hoax yang saat ini membanjiri negara kita dan salah satunya juga disebabkan oleh minimnya aktivitas membaca buku dan akses buku di negara Indonesia.

Kini telah banyak komunitas yang bergerak di bidang literasi di negara Indonesia. Lantas, apakah dengan literasi keberagaman di Indonesia akan terjaga? Bagaimana komunitas literasi menyikapi paham intoleransi? Apa pentingnya gerakan literasi dengan keutuhan NKRI? Adakah keterkaitan literasi dengan agama? Bisakah dengan komunitas literasi menjaga kerukunan di negara Indonesia?.

Komunitas literasi adalah kumpulan manusia yang bergerak atas alam dan sukarela. Menurut Nasional Institut For Literacy, "Literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat." Dalam arti lain, literasi adalah informasi. Ketika mengambil pengertian literasi di atas, maka kita telah mengetahui, bahwa dunia literasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, dan mengetahui bagaimana cara memecahkan suatu masalah.

Jika masyarakat di Indonesia gemar membaca buku, maka masyarakat di Indonesia tidak akan mudah percaya atas berita hoax. Tidak mudah digiring oleh berita SARA ketika tahun politik tiba dan akan menanamkan rasa kritis atas segala hal. Dengan banyak membaca buku, maka masyarakat di Indonesia akan mengetahui bahwa di negara kita begitu banyak kerukunan antar suku, budaya, bahasa dan agama, yang masih dijaga dan diwariskan oleh pahlawan-pahlawan kerukunan setiap wilayah masing-masing.

Dunia literasi memberitahu bahwa manusia itu sama. Sama-sama memiliki rasa cinta dan kasih. Setiap manusia





memiliki hak atas kemerdekaannya. Para penggiat literasi tidak akan henti menginformasikan betapa pentingnya menjaga kerukunan yang selama ini telah diperjuangkan oleh pahlawan terdahulu. Selain dengan memberi buku bacaan yang tidak ada unsur SARA, penggiat literasi juga memberi pemahaman bagaimana mencermati berita-berita yang ada saat ini. Bahkan penggiat literasi memberi contoh bahwa hidup berdampingan itu indah, di dalam komunitas literasi, tidak hanya ada satu agama dan satu suku, tetapi perbedaan tersebut bisa menciptakan suatu gerakan untuk kemajuan negeri Indonesia.

Ketika masyarakat di Indonesia telah banyak membaca buku, maka akan semakin banyak mengetahui sejarah di negara Indonesia. Banyak kelompok yang begitu semangat untuk menghancurkan NKRI karena kelompok tersebut tidak banyak mengetahui sejarah di Indonesia. Mengetahui sejarah itu sangat penting. Contoh mudahnya seperti ini, ketika kita mengetahui sejarah orang tua kita mempertahankan dan menjaga rumah yang saat ini kita tempati, maka kita akan menjaga rumah tersebut dengan penuh rasa cinta. Seperti itulah kiranya, jika mereka mengetahui, berdirinya Indonesia atas dasar keberagaman, bukan atas dasar satu golongan ataupun kelompok. Semboyan kita telah mewakilinya, Bhinneka Tunggal Ika. Tak ada lagi yang perlu dipermasalahkan.

Konflik yang memicu paham radikalisme tidak hanya didasari oleh faktor agama. tetapi faktor ekonomi juga. Maka dari itu di dalam kegiatan literasi juga ada pelatihan untuk ibu-ibu untuk membuat kerajinan tangan, agar ada tambahan untuk perekonomian keluarga. Literasi juga perintah pertama dari Tuhan kepada kekasih-Nya.

Kita harus mendalami setiap ayat yang ada di dalam kitab suci setiap agama. Tidak akan mungkin agama itu ada hanya untuk perpecahan dan pertikaian. Membacalah karena kita diberi akal dan hati untuk mengenalinya. Dan bacalah kehidupan sebagaimana perintah Tuhan kepada kekasih-Nya.



Di jalan Gatot Subroto di kota Solo, Surakarta, kita akan melihat Masjid Al Hikmah dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningrat tampak tak terpisahkan. Bahkan dua tempat beribadat ini berada di dalam satu pagar. Tidak hanya itu, Kota Madura adalah sebagai “Benteng Islam di Indonesia”, karena kekentalan nuansa religius masyarakatnya. Akan tetapi, disana kita akan melihat Vihara Avalokitesvara (Klenteng Kwan Im Kiong) vihara terbesar kedua di pulau Jawa. Di dalam kompleks Vihara tersebut terdapat juga Langgar dan Pura.

Selanjutnya, sebagian dari kita pasti mendengar bukit kasih, Desa Kanonang, Minahasa, Sulawesi Utara. Di bukit kasih itu terdapat lima tempat beribadat antara lain, Gereja protestan, Vihara, Pura, Masjid dan Gereja Katolik. Meskipun sebenarnya rata-rata penduduk di Minahasa menganut agama Kristen protestan, tapi tidak bisa kita sembunyikan ada pelangi kerukunan di sana. Bagaimana cara mengetahui kerukunan yang ada di atas? Caranya dengan banyak membaca.

“Reformasi mestinya adalah hijrah dari hati yang beku, kepada hati yang lembut, lunak kepada saudara-saudara. Berhijrah dari kedengkian menuju kasih sayang. Berhijrah dari kebencian menuju cinta,” Tutar Emha Ainun Najib (Cak nun). Itulah yang seharusnya kita lakukan bersama-sama dan sendiri-sendiri berangkat dari ketulusan hati kita sendiri, dan dari keadilan pikiran kita masing-masing. Teruslah membaca. Cinta dan agama diciptakan untuk menjaga satu sama lain. Dan kita manusia jangan sampai memiliki rasa benar sendiri, tumbuhkan rasa rendah hati. Karena kebenaran yang benar hanya milik Tuhan tersendiri.

Akhirnya, dengan adanya penggiat literasi menjaga keberagaman di Indonesia dengan cara menyebarkan virus baca di seluruh pelosok negara Indonesia dan tidak akan pernah berhenti menulis tentang keindahan atas keberagaman yang dimiliki Indonesia, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian yang ada di Indonesia. Salah satu penggiat literasi di Kota Jambi berkata



seperti ini, “jangan hanya membaca buku-buku pelajaran, bacalah buku sastra. Karena sastra lahir atas dasar apa yang terjadi di sekitar kita. Disana kalian akan menemukan arti cinta sesungguhnya. Arti cinta yang selama ini selalu salah diartikan”. 🍷

Jambi, 28 Desember 2017

Daftar Pustaka

Idris, Irfan. 2017. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Ilir Secara Berkesinabungan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Penerbit Daulat Press Jakarta.

Tim Penerbit Kerukunan Umat Beragama (PKUB). 2016. *Pelangi di ufuk Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta. Penerbit Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretaris Jendral Kementerian Agama Republik Indonesia.

<http://www.wikipendidikan.com/2016/03/pengertian-definisi-maknaliterasi.html?=1>

<http://www.islamoderat.net/2010/12/berhijrah-dari-kegelapan.html?m=1>







6

A Spoonful of Smile and a Glass of Kindness; a Warm Peace for Everyone

DESI APRIANTI

Pada 2016 lalu aku berkesempatan berkunjung ke negeri kangguru Australia dalam rangka Australia-Indonesia Youth Exchange Program. Kegiatan tersebut menjadi salah satu momen yang tak akan kulupakan seumur hidup. Mengapa? Karena itu adalah pertama kalinya aku merasakan menjadi kaum minoritas, yaitu seorang Indonesia dan beragama muslim di negeri yang sebagian besar penduduknya adalah ras kaukasian dan berkepercayaan non-muslim. Terlebih, saat itu kasus Islamophobia sedang marak diperbincangkan di media massa internasional terkait ISIS dan terorisme. Aku pun menjadi khawatir.

Pada suatu hari kami berkunjung ke desa wisata Hahndorf di Australia Selatan. Niat hati ingin mengambil gambar, aku dan seorang delegasi dari Aceh yang juga mengenakan hijab berpose di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil memelankan lajunya dan menurunkan kaca mobil tepat di dekat kami. Seorang pria plontos bertato dan berkacamata hitam berteriak sambil mengepalkan tangannya keluar jendela "ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR!". Aku dan temanku sontak





terkejut akan kejadian tersebut. Mungkin saja pria tersebut menganggap kami sebagai salah satu bagian dari penyebab merebaknya Islamophobia yang akan membahayakan hidup mereka. Betapa buruknya kesan seorang muslim di matanya. Kejadian tersebut menjadikanku lebih waspada jika nanti harus menghadapi kejadian-kejadian diskriminasi lainnya selama dua bulan ke depan. Kukira masyarakat Australia tidak lagi memiliki sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap kaum minoritas, mengingat negara mereka terbentuk dari berbagai macam ras, suku dan bangsa yang bercampur menjadi satu.

Aku tinggal dengan keluarga Davis di sebuah kota kecil, Goolwa, dua jam dari Ibukota Adelaide. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka bertemu dengan seorang Indonesia dan tentunya juga seorang muslim, sebuah paket komplrit untuk pengalaman bertukar budaya bagi keluarga tersebut. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia, aku mempersiapkan oleh-oleh berupa batik kain basurek khas Provinsi Bengkulu. Tak kusangka mereka sangat menyukainya. Menurutny, motif batik tersebut sangat elok dan bahan kainnya juga lembut. Padahal di toko oleh-oleh Bengkulu, kain tersebut merupakan kualitas yang biasa saja.

Ternyata nilai sebuah kearifan lokal dan budaya suatu daerah dapat menjadi sangat unik dan berharga di daerah lain. Beberapa kali aku juga mencoba memasak makanan Indonesia dengan bahan-bahan terbatas yang dapat dibeli di pusat perbelanjaan dekat rumah. Masakan Indonesia yang kaya rasa dan rempah pun membuat mereka ketagihan. Makanan favorit yang sangat diidolakan adalah bakso dan rujak. Pada awalnya kedua orang tua angkatku menyangsikan buah-buahan yang dimakan dengan saus kacang yang pedas dan manis. Namun, setelah mencobanya mereka sangat ingin tahu bagaimana resep yang digunakan dalam membuat saus tersebut. Katanya, rujak adalah salah satu salad buah terenak yang pernah mereka makan.

Pada saat perpisahan, mereka memberiku sebuah kartu





yang bertuliskan *“Thank you for sharing your culture with us. We wish you good health and happiness in the future. We hope that all of your big dreams come true!”*.

Hingga kini meskipun telah lewat satu tahun, kami masih kerap bertukar kabar melalui pesan singkat dan berkirim gambar. Aku tidak lagi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selepas kejadian di Hahndorf. Ternyata tidak semua orang di Australia bersikap intoleran dan mendiskriminasi suku bangsa dan agama lain, hanya sebagian kecilnya saja. Dan sebagian kecil masyarakat tersebut mungkin belum mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kaum-kaum minoritas yang mereka kucilkan. Padahal, jika mereka tahu, mereka akan merayakan keindahan dari perbedaan budaya dan kearifan lokal tersebut dengan sikap saling menghargai, toleransi, dan tidak mendiskriminasi. Seperti yang dilakukan oleh keluarga angkatku kepadaku.

Tidak hanya Australia, Indonesia juga merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Tiap-tiap kelompok memiliki kearifan lokal dalam keragaman budayanya masing-masing. Hal ini merupakan sesuatu yang harusnya kita banggakan dan lestarikan, bukan malah menjadi asal-usul perpecahan dan saling tikam akibat perbedaan yang ada. Bukankah berpuluh tahun yang lalu jauh sebelum negara ini berkembang pendiri bangsa telah merumuskan formula jitu untuk menangkal diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimisme? “Bhineka tunggal ika” harusnya tidak hanya menjadi semboyan semata. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita.

Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah perayaan dari sebuah sikap saling menghargai, toleran, dan menyayangi bagi setiap suku, agama dan ras yang tergabung. Tidak seharusnya kita memperlakukan perbedaan yang ada, tetapi lebih kepada





memahami satu sama lain sehingga kita bisa hidup dalam harmoni. Namun dari sekian banyaknya perbedaan, Indonesia juga memiliki kesamaan kearifan lokal dan budaya, yaitu keramah tamahannya.

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan penduduk yang ramah. Dilansir *TribunTravel.com* dari Surya, pada tahun 2009 *The Smiling Report* dari *AB Better Business* yang berbasis di Swedia menyebutkan, Indonesia merupakan peringkat satu di dunia sebagai negara yang paling murah senyum. Ramah merupakan sifat dasar orang Indonesia yang membuat para pendatang atau turis dari luar negeri pun tertarik. Dari berbagai tempat di Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur selalu memberikan keramahan yang sama. Ini merupakan sebuah kearifan lokal yang dapat kita gunakan untuk menjadi modal sosial menangkal diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ekstrimisme. Dengan senyuman, membuktikan bahwa kita dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan cara yang sangat mudah dan sederhana.

Akhir tahun 2017 lalu aku berkunjung ke salah satu desa di kabupaten yang jauh dari keramaian kota. Beberapa hari menginap di sana aku mempelajari bahwa dalam hidup bertetangga warga di desa tersebut masih menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Kemanapun aku berjalan, kutemukan mereka akan tersenyum dan saling menyapa. Sesungguhnya, dari tempat terpencil dan terdalam di Indonesia pun kita dapat mempelajari suatu hal dari kearifan lokal yang ada. Alangkah indahnnya jika seluruh warga Indonesia masih lekat dengan budaya tersenyum ini. Bagaikan sebuah teh hangat yang menyegarkan dan memberi kenyamanan bagi setiap insan. Teh yang dibuat dari sesendok senyuman dan segelas keramah tamahan. Maka kita akan duduk bersama untuk merayakan senja di langit yang berwarna warni jingga dalam kedamaian. ☺





7

Mengelola Keragaman

IKIN ROJIKIN

Membicarakan budaya yang kemudian dinisbatkan kepada Indonesia pada dasarnya bermula dari masalah kebahasaan: bagaimanakah dua kata budaya dan Indonesia itu dimaknai? Tentu ini bukanlah perkara yang sepele karena lingkup kebahasaan adalah lingkup terberi yang dimiliki manusia untuk merenungkan semua hal, tanpa kebahasaan manusia mustahil bisa berpikir.

Tak ada yang menemukan kesepakatan pemaknaan dari kata budaya — suatu kata yang dalam bahasa Arab disebut sebagai “*tsaqâfah*”, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*culture*” itu. Setiap bahasa mempunyai rumusan tersendiri tentang maknanya. Bahkan, setiap cabang ilmu — terutama ilmu-ilmu yang bersifat humaniora — mempunyai pemaknaannya sendiri, belum lagi perkembangan pemaknaan yang terjadi dalam suatu cabang ilmu terhadap kata itu. Sehingga menyoal budaya sebagai budaya dan hanya itu! — hampir merupakan sesuatu yang mustahil bisa dilakukan: ia hanya akan mengantarkan kepada hubungan dan rentetan pemaknaan yang tak berujung. Oleh sebab itu, ia harus





dibatasi dalam lingkup tertentu — dan di sini kata budaya didudukkan dalam lingkup keberagaman sebelum kemudian dinisbatkan kepada Indonesia.

Dalam keragaman pemaknaan budaya, ada sejumlah kesamaan sifat dan alur yang ingin diketengahkan dari kata itu: budaya adalah suatu sistem yang terkait dengan simbol dan nilai sebagai hasil daya cipta manusia yang diulang-ulang sedemikian rupa sehingga bisa terejawantahkan dalam perilaku. Berangkat dari makna tersebut, penisbatan budaya kepada agama merupakan merupakan sebuah usaha untuk memaknai agama sebagai sistem nilai yang diupayakan menjadi tata keyakinan dan tata laku.

Dengan demikian, agama sebagai budaya bukanlah sesuatu yang universal yang mengatasi kelokalan sistem kemanusiaan, dan bukan pula agama sebagai wahyu yang diterima oleh para nabi (kecuali sejumlah agama kesalehan yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh agung seperti Konfusius, Lao Tze, Buddha Gautama, dan lainnya: sejak pertama kali muncul sejumlah agama itu sudah dipandang sebagai budaya).

Ada semacam penegasan semenjak awal bahwa agama adalah beragama: ia bersifat lokal. Oleh karena itu menjadi beralasan mengapa satu agama — katakalah: Islam — mengalami keragaman corak ketika didudukkan sebagai budaya agama. Hal itu berpulang pada satu kenyataan bahwa ia selalu berbanding lurus dengan keberhasilannya menemukan bentuk lokalnya yang tak bisa dipatok dan disamaratakan: ada ber-Islam secara Indonesia, secara Mesir, secara Saudi; ber-Islam secara tradisional, secara urban, dan lainnya.

Sedang Indonesia adalah kata yang dibakukan untuk menandai sebuah kelahiran kesadaran berbangsa yang dicita-citakan agar menjadi bangsa yang merdeka, berketuhanan, bermartabat, adil, makmur, dan beradab. Indonesia merupakan kata yang muncul secara definitif sejak diproklamkan pada tahun 1945, sebagai usaha bersama untuk keluar dari kungkungan penindasan dan penjajahan yang dialami oleh





sejumlah ras dan sejumlah kelompok masyarakat dalam skala yang luas, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah nasionalisme yang kemudian ditunjukkan oleh perwujudannya dalam sebuah bahasa Indonesia.

Memahami bahwa Indonesia sebagai budaya merupakan sebuah kesadaran berbangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda ras dan kelompok masyarakat, merupakan pemahaman terhadap kenyataan bahwa ia berangkat dari cara memahami dan menilai yang berbeda-beda sebagai budaya lokal terberi yang kemudian disatukan oleh kata Indonesia itu. Bahwa kenyataannya, masing-masing budaya terberi itu memiliki tata keyakinan dan tata laku tersendiri, dan kemudian membaurkan diri menjadi suatu bangsa yang satu, merupakan sebuah bukti bahwa ada semacam tarik ulur penyesuaian terhadap nilai-nilai kelokalan sehingga ia bisa bertaut dan menyatu dalam nasionalisme kebangsaan itu; mereka mengalami pergeseran dan penyesuaian sehingga bisa diobyektifikasikan sebagai negara-bangsa Indonesia.

Dalam konteks itu, kemunculan Indonesia merupakan jati diri kesadaran baru yang ditopang oleh sejumlah kesadaran lokal yang majemuk, karena bersikukuh dalam budaya kebangsaan yang lokal dan fragmentatif telah begitu rupa menimbulkan kesadaran yang tertindas, terampas hak-haknya, dan terbungkam. Sehingga nasionalisme Indonesia yang muncul merupakan hasil dari usaha membebaskan diri dari pengalaman dan ingatan yang traumatik dan murung. Karena ada hasrat yang kuat untuk keluar dari kungkungan traumatik dan murung itu, maka pergeseran sistem nilai dan prilaku yang dialami oleh setiap budaya lokal yang menopang budaya Indonesia menjadi niscaya. Dan pergeseran sistem nilai sebagai budaya ini terutama dialami oleh budaya agama, budaya politik, dan budaya ekonomi. Ada semacam tantangan baru yang dialami oleh sejumlah budaya lokal dalam tiga aspek itu untuk merumuskan kembali dari kelolakan yang rasial menjadi kelokalan nasional-kebangsaan.



Keberagamaan sebagai Pembentuk Budaya Kebangsaan

Jika membaca budaya Indonesia dengan segala aspeknya dalam ruas baris yang sederhana ini merupakan hal yang nyaris mustahil, mau tak mau harus ada semacam pengerucutan yang sesuai. Oleh sebab itu tulisan ini, terutama, hanya akan menyoroti budaya Indonesia dari aspek agama, atau lebih tepatnya: aspek keberagamaan.

Kemunculan nalar budaya kebangsaan Indonesia merupakan tantangan aktual yang dialami oleh budaya agama dari setiap budaya lokal yang ada di dalamnya. Dalam kasus agama Islam, budaya Indonesia adalah tantangan baru untuk merumuskan nilai yang semula dikonsepsikan untuk menopang dan membentuk budaya lokal dari tiap-tiap budaya yang ada sehingga ada kesesuaian diantara keduanya yang saling menguntungkan.

Perumusan itu tentunya merupakan konsep yang bisa memberikan sumbangsih nilai keagamaan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yang ditopang oleh kemajemukannya, terkait dengan usaha menuju persamaan hak dan kewajiban, dan menuju kesadaran berbangsa yang berketuhanan, bermartabat, adil, dan makmur: sejumlah prinsip mendasar yang dapat ditemukan dalam lima sila dari Pancasila berikut penjabaran-penjabarannya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai sistem budaya juga harus mampu memberikan jaminan kebebasan beragama bagi tradisi keagamaan lokal yang menopangnya baik tradisi yang berkaitan dengan ajaran mendasar dari keberagamaan itu sendiri (yang mencakup keyakinan, ibadah, dan kesalehan, atau yang dalam Islam disebut sebagai akidah, syari'ah, dan akhlak), ataupun tradisi yang muncul sebagai hasil dari bekerjanya ajaran mendasar tersebut (yang mencakup diantaranya etika, seni, politik, ekonomi, dan lain sebagainya).

Hal ini merupakan hubungan mendasar yang terjadi ketika, pada kenyataannya, dalam konteks ke-Indonesiaan, budaya agama dijadikan sebagai salah satu penopang dan pembentuk



budaya Indonesia. Penerimaan budaya agama terhadap budaya kebangsaan nasional itu berangkat dari sebuah kenyataan bahwa dalam konteks pra keIndonesiaan, budaya agama telah begitu rupa disudutkan dan dibungkam dalam sejumlah hal mendasar di atas, sehingga kesadaran agama mengalami pengalaman yang traumatik dan murung.

Berangkat dari kenyataan itu, menjadi beralasan meskipun budaya kebangsaan Indonesia merupakan sebuah kesadaran budaya yang relatif modern sebagai proses peniruan terbalik sebagai proses mimesis dari modernitas kolonialis menuju modernitas yang lokal ke-Indonesiaan, budaya agama (dalam hal ini budaya agama Islam merupakan contoh yang tipikal) bisa menerima dan mendukung keberadaannya secara mendalam.

Jika modernitas dalam kesadaran penjajahan merupakan sistem nilai dan laku yang sangat ditentang, maka modernitas yang muncul dari kesadaran negara-bangsa Indonesia diterima dengan legowo dan lapang dada (yang bisa dilihat, misalnya, dengan adanya penerimaan dan dukungan yang kuat dari sejumlah ormas keagamaan seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah). Hal itu, karena kesadaran nasional kebangsaan itu mampu — atau diharapkan mampu — merumuskan sistem nilai yang memberikan ruang yang longgar dan saling menguatkan terhadap budaya agama.

Oleh karena itu, tugas utama yang harus dilakukan oleh kesadaran budaya keagamaan adalah penguasaan terhadap dua hal: 1) penguasaan terhadap tradisi keagamaan yang selama ini telah mengakar menjadi sistem budaya yang lokal sehingga bisa memilah antara nilai-nilai ajaran yang universal dan agung di satu sisi, dan pengejawantahan lokal dari nilai-nilai universal itu sebagai nilai tradisi (mencoba mencermati antara yang universal dan yang lokal dari sistem nilai keagamaan) di sisi lain; 2) mencermati nilai-nilai dan lingkup kebangsaan yang ada dalam kesadaran

ke-Indonesiaan sebagai negara-bangsa dan cita-cita yang





ingin diraih sejak kemunculannya.

Dua hal itu adalah tugas yang mutlak harus dilakukan dan diselesaikan dengan memadai. Ketidak-mampuan untuk memenuhi keduanya akan membawa dampak-dampak yang buruk, baik bagi budaya keagamaan atau budaya kebangsaan Indonesia. Dampak buruk yang dialami oleh tradisi keagamaan, diantaranya, adalah, tradisi keagamaan yang sudah terlanjur menjadi lokal itu dianggap sebagai tradisi yang selesai dan tak bisa diganggu gugat; memilah-milah tradisi keagamaan lokal seolah-olah memilah-milah ajaran agama sehingga bisa dianggap sebagai usaha yang bertentangan dengan agama itu sendiri.

Dalam konteks seperti itu, budaya agama yang lokal justru menyederhanakan dan menyempitkan lingkup universal dari nilai-nilai agama. Dampaknya yang lain adalah, agama kurang bisa menyesuaikan dengan kesadaran dan cita-cita negara-bangsa, sehingga ia gagal mengalami penyatuan budaya sebagai sistem nilai yang menyangkut pandangan dan perilaku antara budaya agama dan budaya negara bangsa. Dengan kata lain, budaya agama tetap menjadi sub-budaya sebagai budaya yang menyimpang dan tak bisa menjadi budaya induk yang nasional.

Di sisi lain, dampak buruk dari kegagalan budaya agama untuk menyelesaikan tugas itu adalah, agama justru menjadi ancaman bagi keutuhan kesadaran kebangsaan; budaya agama yang mengandung nilai-nilai nasionalisme justru menjadi ancaman terhadapnya tumbuh berkembangnya kesadaran nasionalisme yang sangat dibutuhkan oleh bangsa untuk merumuskan nilai dan semangat kebangsaan. Budaya agama yang seharusnya menjadi pengusung dan pengontrol moral kebangsaan sehingga mempunyai kesadaran kebangsaan yang santun justru menjadi sumber munculnya kecenderungan kekerasan. ☹️





8

Dinamika Gerakan Perdamain di Cirebon

HARRY

Bagi masyarakat Indonesia, gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Aksi-aksi pengeboman yang menewaskan ratusan nyawa yang tidak bersalah dan berakibat juga pada rusaknya berbagai fasilitas publik serta teror dan tindak kekerasan yang terus dilakukan membuat kehidupan ini tidak nyaman.

Berbicara mengenai radikalisme dan terorisme yang masih lekat dalam ingatan saya kejadian bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan hotel Ritz-Carlton Jakarta yang terjadi pada 17 Juli 2009. Pelaku bom bunuh diri tersebut adalah Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana (pelaku bom bunuh diri), Noordin M Top (otak pelaku utama), Ibrohim, dan 7 orang lainnya. Dani Dwi Permana adalah mantan ketua Rohis (Kerohanian Islam) SMK Yadika Bogor Jawa Barat. Hal itu karena pelaku nya ialah mantan ketua Rohis dan saya pada saat SMA kelas dua saya diercaya menjadi ketua Rohis. Rumor miring mengenai Rohis sebagai tempat sarang teroris pun masih terdengar ditelinga saya pada saat itu.

Hasil penelitian beberapa lembaga menunjukkan bahwa





Jawa Barat adalah daerah yang paling rawan diantara beberapa daerah lainnya. Bahkan dalam kategori lain disebutkan beberapa daerah di Jabar masuk dalam kategori zona merah. Hal ini bisa dibenarkan dengan memperhatikan beberapa kasus kekerasan atasnama agama di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Bahkan beberapa pelaku peledakan bom di Indonesia, pelakunya adalah warga Jawa Barat Seperti Ibrahim, Saefuddin Zuhri bin Jaelani dan Muhamad Sahrir kakak Saefudin, ketiganya berasal dari Kuningan. Nama lainnya adalah M. Salik Firdaus, pelaku bom bunuh diri Bali II dan Watono alias Tono alias Anton alias Jafar, diduga terlibat dalam bom buku di Jakarta dan bom Serpong, keduanya berasal dari Majalengka. Demikian juga Zulkifli Lubis alias Lebah, Mardiansyah alis Ferdi dan Eko Ibrohim alias Boim yang tertangkap di depok Jawa Barat.

Nama lain yang cukup membuat masyarakat terkejut-kejut adalah kelompok teroris Muhammad Syarif yang melakukan aksi bom bunuh diri di Masjid Mapolres Kota Cirebon. Setelah dilakukan pengejaran dan beberapa bulan menjadi DPO, akhirnya densus 88 menangkap mereka yang mayoritas berasal dari Cirebon.

Disamping aksi terorisme, Jawa Barat juga dikenal sebagai daerah yang banyak memproduksi tindakan intoleransi atas nama agama. beberapa lembaga yang melakukan pemantauan terhadap kebebasan beragama di Indonesia, seperti Wahid Institute dan Setara Institute menempatkan Jawa Barat dalam urutan pertama sebagai daerah yang paling banyak melakukan tindakan intoleransi atas nama agama disusul Jawa Timur dan Aceh. Laporan Setara Institute tahun 2012 menyebutkan bahwa dari 264 peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, Jawa Barat menempati urutan pertama dengan (76) peristiwa, Jawa Timur (42) peristiwa, Aceh (36) peristiwa, Jawa Tengah (30) peristiwa, dan Sulawesi Selatan (17) peristiwa.

Disisi lain gerakan keagamaan fundamentalis dan





radikalis juga membidik anak-anak muda terutama yang masih ditingkatan Sekolah Menengah Atas. Beberapa fakta menunjukkan bahwa anak-anak muda di usia SMA ini masih sangat labil dalam pemahaman agamanya, namun memiliki ghirah keagamaan yang cukup tinggi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Rahima Jakarta di 5 SMA di kotakota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan Makasar, menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA memiliki semangat keagamaan yang tinggi namun tidak memiliki waktu untuk belajar agama yang lebih mendalam. Sehingga pemahaman keagamaan mereka didapat dari otodidak, atau mengikuti halaqoh-halaqoh yang hanya mengkaji dan memahami agama secara lahiriyah saja. Sehingga tidak sedikit diantara mereka yang terjebak pada pemahaman keagamaan yang radikal yang diawali dengan kesalahan dalam memahami teks agama, terutama terkait masalah jihad. Informasi terakhir yang dihimpun Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Cirebon bahwa saat ini terdapat sekolah yang beberapa muridnya menolak terhadap konsep tatanegara Indonesia. Mereka bahkan mengatakan bahwa system tata Negara Indonesia adalah system kafir karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Disamping dianut bererapa ormas keagamaan, pemahaman keagamaan secara skripturalis dan fundamentalis diduga disebarkan ke beberapa pesantren dan kelompok pengajian di wilayah Jawa Barat. Dalam kondisi normal, pemahaman ini memang tidak bermasalah. Namun oleh para santri dan jama"ahnya pemahaman yang disebarkan secara skripturalis tanpa ada penafsiran yang kontekstual dengan perspektif humanis dan anti kekerasan, akan berdampak pada pemahaman keagamaan yang radikal. Sehingga potensi melakukan kekerasan atas nama agama sangat tinggi.

Maraknya aksi kekerasan termasuk bom bunuh diri yang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini banyak terjadi di Indonesia, diyakini banyak dilakukan oleh sekelompok orang





yang secara keyakinan beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan identitas para pelaku yang tertangkap oleh pihak kepolisian beberapa saat setelah kejadian. Dari beberapa pernyataan serta bukti-bukti yang ada, aksi kekerasan tersebut dilakukan sebagai implementasi dari pengamalan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang diwujudkan dan dikuatkan dengan *Jihad fi sabilillah*. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, pemahaman ini disebarkan keberbagai tempat seperti masjid, majlis ta'lim, kampus, sekolah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan bahkan terdapat juga beberapa "pesantren" yang mengajarkan pemahaman ini kepada para santrinya.

Respon dari Radikalisme, Terorisme & Kekerasana atas nama Agama di Cirebon

Geliat Permasalahan yang terjadi mengenai kekerasan atas agama, radikalisme hingga terorisme, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakatnya. Kehidupan berbangsa, bernegara serta bergama sekarang mulai dikoyak-koyak dengan berbagai permasalahan yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa ini. Sebagai manusia yang sadar dengan malisah yang terjadi disekelilingnya tentu sejumlah Lembaga Swadaya masayakat atau berbagai Civil Social Organisation (CSO) tidak tinggal diam. Bersama masyarakat mereka semua berusaha membangun dan menciptakan kedaiamaian dan ketenangan.

Berawal dari kegelisahan para tokoh agama di Cirebon yang melihat kurangnya dialog-dialog lintas Iman (agama) dan juga sebagai respon atas maraknya radikalisasi dan kekerasan mengatasmamakan agama. Pada tahun 2011 para pemuda dan tokoh agama Cirebon yang tergabung dalam Forum Sabtuian di Fahmina Institute lewat acara sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 2011 berhasil mendirikan komunitas PELITA (Pemuda Lintas Agama) Cirebon. Sejak berdirinya sampai sekarang PELITA terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya menamamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai





perbedaan kepada semua umat bergama yang ada di Cirebon. Beberapa divisi dalam komunitas ini pun

dibentuk untuk memudahkan gerakannya. Beberapa divisi tersebut diantaranya divisi pertemuan bulanan, divisi Sosial dan Kemasyarakatan, divisi Riset dan Kajian Ilmiah dan divisi Paralegal. Kesemua divisi tersebut saling terkait, dan harus ada upaya kerjasama dalam hubungan pemuda lintas ras, agama, budaya di wilayah Cirebon Khususnya. Divisi yang sering saya ikuti dan merupakan divisi yang vital dalam wilayah kerja PELITA adalah divisi pertemuan bulana. Divisi pertemuan bulanan ini mempertemukan pemeluk agama dan keyakinan yang ada di Cirebon, pertemuannya bersifat santai dan informal. Sehingga setiap pertemuan ada saja pemuda yang ingin mengikuti kegiatan ini.

Respon selanjutnya dilakukan oleh Fahmina ialah mengadakan program SETAMAN (Sekolah Cinta Perdamaian) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Fahmina Institute bekerjasama dan didukung oleh Mensen meet een Missie, sebuah lembaga yang berpusat di Belanda dalam program “mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan” di Wilayah Cirebon. Setaman tidak hanya di Cirebon melainkan juga di beberapa wilayah yaitu Kuningan, Majalengka dan Indramayu. Program ini sudah dibentuk sejak tahun 2015. Pada tahun 2016 Setaman berhasil merangkul 350 remaja dari berbagai komunitas yang terdiri dari 185 perempuan dan 165 laki-laki. Mereka merupakan siswa sekolah menengah atas, mahasiswa dan pesantren. Setaman tidak hanya di Cirebon melainkan di beberapa daerah sekitar Cirebon, seperti Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Pada tiap-tiap daerah tersebut sudah beberapa kali dilakukan pelatihan Setaman. Setaman Cirebon 4 kali, Indramayu 3 kali, Kota Cirebon, Kuningan dan Majalengka 2 kali. Jika dilihat dari asal komunitasnya maka alumni Setaman yang berasal dari pesantren 79 orang, pelajar sekolah menengah atas dan sederajat 204 orang, sedangkan dari perguruan tinggi





67 orang. Pada komunitas pesantren ini adalah para remaja/pelajar/mahasiswa yang selain menjalani pendidikan formal tetapi sehari-hari mereka beraktivitas di pesantren, dan pendidikan formal berada dikawasan pesantren. Sedangkan komunitas perguruan tinggi adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi maksimal tingkat II / semester 3 atau 4.

Setaman dalam perjalanannya tentu saja memiliki tantangan tersendiri, meski demikian ada titik terang yang membuat Setaman terus bergerak dan menebar damai untuk para generasi penerus bangsa. Dampak yang dirasakan dari program Setaman bisa dilihat dari para alumnya yang sekarang menjadi lebih terbuka dengan perbedaan, bisa menghargai bahkan ikut kedalamnya untuk menjaga dan menebarkan nilai-nilai perdamaian itu sendiri.

Kearifan Lokal sebagai basis Gerakan Penebar Damai

Keberagaman ialah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika merupakan payung keberagaman yang mensyaratkan akan adanya prinsip gotong royong dalam masyarakat. Begitu juga nilai kearifan lokal yang melekat erat dengan kehidupan masyarakatnya.

Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Cirebon mampu mengajarkan Islam dengan memasuki sendi-sendi kearifan lokal masyarakat Cirebon pada saat itu dan hingga sekarang masih dirasakan ajaran-ajarannya. Pada saat itu Cirebon yang bercorak kerajaan Islam dalam pimpinannya namun dalam praktek pemerintahannya menjunjung tinggi asas toleransi tanpa disekat suku, ras dan agama. Terbukti dengan penamaan Cirebon yang bersala dari kata caruban (campuran).

Terlebih lagi tradisi-tradisi lokal yang sejatinya toleransi ini sudah bisa kita intepretasikan melalui simbolisme, ikon dan juga kesenian yang ada pada masyarakat. Terbukti dari





peninggalan Sunan Gunung Jati yaitu Paksinagaliman sebagai alat transportasi yang dipakai Sultan Pangeran Sepatdia yang merupakan makhluk imajinasi gabungan dari gajah (Hindu), naga (China) dan burok (Islam).

Berangkat dari kearifan lokal dan kesenian daerah yang bercorak Islami Komunitas Alang-Alang mengkampanyekan perdamaian lewat alat musik *hadroh* (genjring) dengan membawakan lirik-lirik lagu yang menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Sejak dari 2014 komunitas ini dibentuk atas dasar inisiasi oleh Ibu Koidah sebagai Guru PAI di SMAN 1 Plumbon dan juga sebagai Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon. Komunitas Alang-alang dibentuk pada awalnya sebagai wadah para alumni Rohis SMAN 1 Plumbon yang ingin bergerak dalam bidang serta isu perdamaian.

Kesenian merupakan jalan yang indah untuk menjembatani pesan-pesan perdamaian. Memilih alat musik hadroh sebagai instrumen karena alat musik genjring pada saat ini sangat digemari oleh para muda-mudi muslim meski tidak menutup kemungkinan juga lagu-lagu yang diciptakan oleh komunitas Alang-alang juga bisa didengar oleh kalangan agama lain. terbukti pada saat ajang kampanye kreatif tampil sebagai runner up pada kegiatan yang diadakan oleh *Ready (Respect and Dialog)* sebuah program yang diadakan oleh kerjasama LBH Jakarta, Wahid Foundation, Fahmina Institute dan Hivos di Jakarta.

Tentunya masih banyak lagi yang digalih dari kearifan lokal yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana budaya, adat yang sudah tertanam di dalam setiap daerah menjadi sebuah terobosan dalam menjaga kedamaian dan ketentraman negeri ini.

Infiltrasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini sudah mulai pudar harusnya bisa bangkitkan kembali. Arus globalisasi dan permasalahan radikalisme yang begitu derasnya bisa difilter dan dicegah dengan kearifan lokal dari tiap-tiap daerah. Dengan menjaga nilai-nilai tradisi pada





msayarakat seharusnya bisa menjadi benteng tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang mengguncang kesatuan dan pesatuan bangsa. Seharusnya juga kita harus menyadari bahwa sejak dulu kita sudah berbeda, namun perbedaan tersebut bukan untuk dijadikan sebagai syarat untuk menjadikan konflik, perpecahan dan bahkan melakukan tindak kekerasan. Namun perbedaan tersebut dapat kita jadikan sebagai kekuatan dan modal sosial untuk membangun dan menjaga bangsa Indonesia ini.

Dengan demikian tantangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama di Indonesia akan selalu ada. Sekarang saatnya bangsa ini bergerak untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Ruang-ruang dialog antar umat beragama harus bisa diperbanyak, nilai-nilai inklusifitas harus ada dan ditonjolkan dalam tiap umat beragama. Hal ini guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar umat beragama.

Remaja, pemuda dan orang tua harus selalu membiasakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, perdamaian sejak dari keluarga. Karena pembentukan karakter seseorang dimulai dari keluarganya selain lingkungan juga yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karakter seseorang.

Radikalisme, terorisme ialah musuh bersama, maka tentu sudah menjadai tanggung jawab kita bersama untuk mencegah dan melawan nya. 🤝





Menyikapi Intergrasi Sosial Rakyat Aceh pasca Konflik

DINAR SARI

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan; dari sabang sampai dengan Merauke yang memiliki begitu banyak suku, ras, agama dan budaya. Bukan hanya itu, masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman ethnik, budaya, ras, pendidikan dan latar belakang yang berbeda. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tetap dipersatukan dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Ada banyak efek positif dan negatif yang terjadi disebabkan dari perbedaan tersebut. Efek positif yang terjadi seperti mengenal beragam suku dan budaya dan juga merasa bangga dengan perbedaan yang beragam yang tidak dimiliki daerah lain. Efek negatif yang sering terjadi dan sering kita temukan adalah konflik.

Perbedaan yang terjadi di antar masyarakat Indonesia memicu banyaknya terjadi konflik. Konflik karena perbedaan telah terjadi di beberapa kota seperti Papua dan Aceh. Konflik sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ini menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan yang





merugikan masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat sosial muncul dalam caranya masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam proses untuk menyesuaikan diri dengan suatu perbedaan akan dapat mendatangkan ketidakselarasan apabila tidak diatur dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerja sama untuk bersatu dan bergabung dengan orang lain. Kerja sama itulah yang akan membentuk suatu yang disebut integrasi.

Integrasi sosial adalah penyatuan dua atau lebih unsur sosial menjadi satu kesatuan utuh yang dapat diterima dengan baik. Integrasi sosial bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial serta untuk menyatukan unsur-unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat. Integrasi sosial penting untuk menjaga masyarakat agar siap menghadapi tantangan, baik berupa tantangan fisik atau mental yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pernah terjadi konflik cukup lama. Konflik di Aceh dimulai dari tahun 1976 sampai dengan 2005. Terjadinya konflik di Aceh yang cukup panjang menyebabkan intergritas sosial di Aceh menipis, seperti membeda-beda antar suku Aceh dan suku Jawa, adanya rasa takut untuk mengajari Pancasila dan melakukan upacara bendera setiap senin, takut terhadap ancaman TNI, bahkan menganggap bahwa aparat negara adalah musuh dan ancaman bagi negara. Namun itu semua terjadi ketika konflik di Aceh berlangsung dan tidak untuk setelahnya.

Setelah petandatangan MOU perdamaian Aceh di kota Helsinki Finlandia pada tahun 2005 silam, Aceh berubah menjadi daerah yang aman dan damai. Masyarakat Aceh sudah dapat hidup rukun dengan beragam suku, ras, dan agama. Masyarakat Aceh juga sangat menjunjung tinggi toleransi agama, seperti menghargai agama lain untuk beribadah dan merayakan hari-hari yang penting setiap agama dan memberi kebebasan setiap anak dari agama apapun.





untuk mendapatkan hak yang sama seperti pendidikan dan lain-lain. Bukan hanya soal toleransi, nasionalisme masyarakat Aceh juga telah meningkat. Ini dapat dilihat banyak anak muda Aceh yang berprestasi dan membawa nama baik Indonesia ke internasional, dan juga mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarga negaraan menjadi mata pelajaran wajib, serta sering di lakukan pelatihan bela negara yang di ikut serta oleh anak muda aceh. Kegiatan-kegiatan dan perilaku masyarakat Aceh di atas membuktikan bahwa intergritas sosial masyarakat Aceh sekarat sudah sangat meningkat.

Pengalaman Personal

Saya adalah salah satu anak Aceh yang pernah menjadi korban konflik 12 tahun yang lalu. Saya telah merasakan bagaimana perbedaan Aceh ketika konflik dan pasca konflik. Saya merasakan intergrasi sosial masyarakat Aceh sekarang sangat meningkat. Dalam hal menyikapi intergrasi sosial yang terjadi sekarang di Aceh, dengan meningkatnya intergrasi sosial di Aceh membawa banyak efek positif dalam masyarakat Aceh itu sendiri. Seperti pendapatan daerah meningkat dari segi parawisata, pembangunan daerah yang meningkat, dan pendidikan di Aceh yang kian membaik. Hal ini menjadikan rakyat Aceh dapat hidup sejahtera dan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai.

Dengan adanya perselisihan dan perbedaan dalam cara hidup masyarakat akan menimbulkan konflik menjadi titik tolak dalam pencapaian suatu integrasi. Integrasi sosial adalah sebuah cara atau upaya untuk mengatasi suatu perbedaan, khususnya perbedaan yang mengarah pada konflik sosial. Kehidupan akan menjadi padu, serasi, aman, dan tenteram akan terwujud bila adanya integrasi dalam menjalaninya. Hal yang telah terjadi di Aceh menunjukkan bagaimana pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat. Jika integrasi sosial menipis, sangat berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat. 🙏







10

Hukum Progresif Investasi Dalam Menjaga Pluralisme Di Indonesia

ANITA WAHYU RAKASIWI

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya¹. Masyarakat Indonesia secara tipikal merupakan masyarakat yang plural karena sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki berbagai ragam suku, adat, budaya, etnis, agama, hingga kepercayaan. Dengan demikian pluralisme bukan lagi merupakan suatu hal yang asing bagi bangsa Indonesia.

Pluralisme merupakan pandangan hidup atau sikap kemasyarakatan yang mengutamakan sifat kemajemukan atau keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengambil kenyataan bahwa dalam kehidupan terdapat berbagai perbedaan, mereka yang berpaham pluralisme menganggap bahwa setiap perbedaan itu harus mendapat pengakuan sebagai entitas yang otonom dan memperoleh

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 147



penilaian yang sama². Sekalipun pluralisme merupakan fakta keras (Hard fact) dan hukum alam yang harus dan pasti ada, banyak orang tidak mau mengakui kenyataan pluralisme. Akibatnya, manusia sering terjebak pada truth claim yang bisa mengarah pada perpecahan dan konflik manifes³.

Penyebaran nilai-nilai kebhinnekaan menjadi sangat penting, mengingat pada beberapa waktu terakhir masyarakat dengan begitu mudah tersulut dengan isu-isu berkenaan dengan perbedaan agama, etnis, suku, dan budaya. Pembiaran terhadap hal tersebut bukanlah hal yang tepat karena akan berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran akan kebhinnekaan bangsa Indonesia harus terus tertanam dalam jiwa setiap warga negara Indonesia hingga kesadaran tersebut mengakar dalam masyarakat menjadi sebuah budaya.

Salah satu solusi merawat pluralisme dan kebhinnekaan bangsa Indonesia melalui pelaksanaan dan penegakan hukum. Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia cenderung kepada arah positivisme. Positivisme melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu teks, lalu pembaca harus memahami keadaan itu dan tidak boleh berpikir lain⁴. Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik semata, di mana kepastian hukum menjadi ikon kebenaran⁵.

Kecenderungan hukum yang positivistik mengakibatkan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat diukur dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hukum tertulis

² Sayidiman Suryohadiprojo, *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 179

³ Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 31

⁴ Lintang O. Sihan, *Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun 36 No. 1, Tahun 2006, hlm. 35

⁵ Rusli Muhammad, *Kajian Kritis terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)*, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006, hlm. 222

pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, demikian justru hal tersebut berdampak pada tidak dapat terakomodirnya segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang plural dan majemuk. Tidak terakomodirnya kepentingan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis menyebabkan timbul potensi konflik. Maka di sini hukum progresif dibutuhkan sebagai salah satu jalan keluar dalam menekan potensi konflik guna merawat pluralisme dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Satjipto Rahardjo berikut pendukungnya menghendaki adanya perubahan paradigma para intelektual hukum dan terutama struktur hukum dalam menegakkan hukum sehingga tidak lagi terperdaya dengan pengkultusan undang-undang yang dibangun oleh kalangan positivism, tetapi diharapkan adanya terobosan cara berpikir yang paling tidak, dalam melihat undang-undang hanya sebagai salah satu variabel yang harus dikorespondensikan atau didialektikkan dengan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat atau bangsa sebagai variabel lainnya.⁶

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip baha hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷

Hukum progresif menjadi investasi dalam merawat pluralisme dan kebhinekaan di Indonesia sebab dalam penerapan dan penegakan hukum tidak hanya terbatas dalam teks-teks peraturan tertulis saja. Pembentuk undang-

⁶ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi, vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 319

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

undang dalam membentuk suatu undang-undang melihat lebih dalam akan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan pluralistik, sehingga hukum yang dibentuk adalah hukum mampu memenuhi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang beragam.

Tidak hanya dari sisi pembentuk undang-undang saja, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum juga tidak hanya terpaku pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat melakukan terobosan-terobosan dalam penyelesaian sengketa hukum dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural sesuai dengan suku, etnis, budaya, agama, dan kepercayaannya.

Pelaksanaan dan penegakkan hukum progresif akan turut membantu dalam menekan tingkat konflik di masyarakat berkaitan dengan sengketa hukum yang pada dasarnya telah diatur dalam peraturan tertulis namun tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang beradab. Hal demikian akan lebih bermanfaat lagi apabila hukum progresif diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa hukum yang dialami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang suku, etnis, budaya, agama, maupun kepercayaan yang berbeda.

Hukum progresif juga turut menentukan masa depan eksistensi keberagaman di Indonesia. Keberagaman yang terus dirawat hingga saat ini akan menjadi investasi untuk menjaga keberagaman Indonesia tetap ada di masa depan. Namun, apabila keberagaman tidak dirawat dengan membiarkan adanya konflik maupun potensi konflik antar masyarakat yang berbeda latar belakang, maka bukan menjadi hal yang mustahil bahwa masyarakat Indonesia ke depan mudah untuk terpecah belah. ☹️

Daftar Pustaka

Hamdi, Ahmad Zainul, dan Muktafi, *Wacana dan Praktik*



Pluralisme Keagamaan di Indonesia, (Jakarta: Daulat Press, 2017).

Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*,
Jurnal Konstitusi, vol. 14 No. 2, 2017.

Muhammad, Rusli, *Kajian Kritis terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).

Siahaan, Lintang O., *Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 36 No. 1, Tahun 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Suryohadiprojo, Sayidiman, *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014).







**Senam Nusantara dalam Merawat
Keberagaman Budaya Indonesia**
Kolaborasi Tarian Tradisional Indonesia
Pada Perspektif Senam Kesegaran Jasmani
PUTRA RENALDY SARI

Perkembangan teknologi zaman milenial saat ini tidak terlepas dari campur tangan Negara-negara barat sebagai produsen segala aspek teknologi. Mulai dari teknologi pendidikan, pertanian, kelautan hingga kepada teknologi informasi. Pengaruh perkembangan teknologi barat tersebut disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga mampu menciptakan segala sesuatu yang dapat membantu dan mempermudah aktivitas keseharian manusia. Hadirnya penemuan-penemuan oleh para ilmuwan barat menjadikan sikap arogansi dan kekuasaannya untuk menguasai Negara lain baik secara teknologi, ilmu pengetahuan hingga kepada aspek budaya.

Tidak dapat dipungkiri pengaruh kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan barat merambat ke Negara-negara timur. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Negara barat untuk dapat menjajah Negara-negara kawasan timur dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Meskipun kolonialisme telah usai, namun penjajahan tak pernah usai. Dengan





kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Negara barat dapat terlihat bahwa Negara timur saat ini mengagungkan hasil karya teknologi dan ilmu pengetahuan Negara barat.

Selain hal tersebut di atas, perkembangan masyarakat primitive (tradisionalisme) ke masyarakat modern dewasa ini terlihat dengan pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Negara barat. Pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan kehidupan Negara barat, yang disajikan melalui teknologi informasi, baik media cetak dan elektronik hingga ke basis internet media social.

Pengaruh-pengaruh tersebut secara tidak sadar maupun sadar merubah dan menggeser nilai-nilai kebudayaan Negara-Negara terjajah yakni Negara kawasan timur. Pergeseran nilai tersebut terlihat oleh masyarakat modern saat ini, mulai dari cara berpakaian (*fashion*) yang kebarat-baratan, hegemoni mengonsumsi makanan ala barat (*food*), hingga kepada tontonan layar lebar yang dengan cepat dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat (film).

Hal tersebut memberikan hibriditas dan pergeseran nilai-nilai kebudayaan Negara-negara Timur sehingga mampu memberikan ketidaktahuan dan atau keterlupaan identitas dari negara sendiri khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2013, “mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang, dari angka tersebut 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial”.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya serta bercorak kebudayaan. Tanah yang subur, laut yang membentang luas, serta kekayaan dan keberagaman kebudayaan menjadi kekayaan utama Negara Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak kebudayaan yang menjadi watak dan ciri khas dari daerah tersebut. Kebudayaan adalah kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat yang diwariskan



secara turun temurun dan menjadi suatu keharusan maupun kesakralan. Berbagai macam kebudayaan yang dapat kita lihat di Indonesia, mulai dari prosesi pernikahan, kematian, kearifan lokal (afektif), hingga kepada tari-tarian tradisional.

Menurut Bambang Sunaryo staf pengajar FISIPOL UGM mengungkapkan “Degradasi budaya di Indonesia dinilai sudah cukup mengkhawatirkan baik fisik maupun non-fisik. Sayangnya berbagai dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi serta ketahanan unsur-unsur kebudayaan di masyarakat cenderung dilihat sebagai persoalan hilir. Lebih lanjut Bambang menuturkan persoalan hulu yang menyebabkan terjadinya degradasi kebudayaan seperti modal sosial sejauh ini tidak pernah dilihat, contohnya lingkungan sekolah maupun keluarga di Indonesia diharapkan tidak hanya fokus pada upaya pencerdasan secara kognitif namun juga sosial budaya”. Tuturnya pada Seminar Nasional Tata Kelola Kebudayaan sebagai bentuk strategi Kebudayaan di PPS UGM 2010 lalu.

Tarian tradisional merupakan suatu kebudayaan Indonesia, setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki tarian tradisional masing-masing. Tarian tersebut dahulunya digunakan sebagai acara-acara tertentu di dalam suatu sistem kerajaannya. Oleh karena tarian tradisional tersebut merupakan salah satu asset kebudayaan Indonesia, maka wajib untuk mempertahankan dan melestarikan kekayaan Negara Indonesia tersebut.

Mempertahakan dan melestarikan suatu kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang merupakan tugas generasi masyarakat selanjutnya. Generasi masyarakat yang dimaksud adalah pemuda, peran serta kepemudaan dalam melestarikan kebudayaan tarian tradisional tersebut sangat penting. Karena yang melanjutkan proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu berada di pundak pemudanya. Bung Karno pernah mengatakan bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan dan nenek moyangnya. Kurang lebih seperti itulah yang dimaksudkan oleh presiden



pertama Indonesia tersebut.

Berfokus pada pembahasan penulis mengenai kebudayaan tarian tradisional, pemuda Indonesia sangat kurang aktif dalam hal melestarikan dan menjaga tarian tradisional yang menjadi identitas dari Negara Indonesia itu sendiri. Dapat kita lihat sangat minimnya kelompok-kelompok yang bergerak dalam hal pelestarian tarian tradisional, kebanyakan generasi saat ini lebih senang dan aktif kepada tarian Negara-negara barat misalnya *shuffle dance*, *hip-hop*, balet, salsa, dan sebagainya. Sehingga memberikan penekanan ketidaktahuan atau keterlupaan pada tarian tradisional di generasi muda.

Hal tersebut diatas merupakan proses hibriditas dari kebudayaan tari tradisional dan tari modern yang saat ini terlihat di kalangan generasi muda. Tarian tradisional yang dianggap temporer dan ketinggalan jaman, dan dianggapnya tarian modern lebih kontemporer dan kekinian. Namun pada esensinya mereka tidak mengetahui bahwa sebuah tarian adalah salah satu kebudayaan yang keberadaannya mesti dijaga dan dilestarikan. Inilah tugas yang mesti dipegang teguh oleh generasi muda Indonesia melalui berbagai kelompok-kelompok atau komunitas dalam penggiat kebudayaan Indonesia.

Proses hibriditas kebudayaan tersebut mempengaruhi adanya pergerseran nilai kebudayaan. Antara tarian tradisional dan modern dewasa ini, terlihat kualifikasi tari modern lebih diminati. Tidak heran masih banyak generasi muda saat ini, tidak mengetahui tarian tradisional daerah Indonesia bahkan tarian tradisional daerahnya pun tidak diketahui.

Problem tersebut menjadi tugas pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keluarga, masyarakat dan pemuda. Elemen Negara tersebut mesti memberikan suatu konsep pelestarian tari tradisional Indonesia agar generasi muda sejak dini dapat memahami dan mengetahui bahwa tari tradisional merupakan identitas kebangsaan, dan tari modern merupakan produk Negara-negara barat yang kemudian





dikonsumsi sehingga tari tradisional sebagai identitas Negara Indonesia terlupakan oleh hegemoni tari modern.

Penulis sebagai salah satu pemuda dan merupakan kader Himpunan mahasiswa Islam tentunya merasa memiliki tanggung jawab dalam menghadapi hibriditas kebudayaan diatas. Sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi *agent of change* (penggagas perubahan), *social of control* (mengontrol segala kehidupan masyarakat), *moral of course* (sebagai teladanyang patut di contoh) tentunya memiliki ide dan gagasan terkait permasalahan yang melanda bangsa ini.

Mahasiswa memiliki tujuan mengontrol ummat, insan pencipta, pengabdian, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur tidak berdiam diri melihat kondisi bangsa ini. Berdasarkan permasalahan di atas, untuk memberikan kontribusi bagi bangsa ini penulis memberikan konsep yang nantinya dapat diimplemetasikan di masyarakat umum bahkan di dunia pendidikan. "Senam Nusantara (Kolaborasi Tarian Tradisional Indonesia Pada Perspektif Senam Kesegaran Jasmani) dalam Merawat Keberagaman Budaya Indonesia", dari judul inilah akan tertuang sebagai konsep untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan tarian tradisional Indonesia kepada generasi muda agar keberadaannya dapat melebihi dari tari barat atau modern yang dianggap lebih kontemporer. Sehingga dalam dunia pendidikan terkhusus di masyarakat umum, akan ikut menjaga dan meletarikan kebudayaan Indonesia melalui pendekatan senam kesegaran jasmani. Terlebih konsep ini diimplementasikan sebagai kurikulum di sekolah akan lebih efektif dalam menjaga ragam kebudayaan sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Senam Nusantara tersebut adalah perpaduan tarian tradisional yang ada di Indonesia di kolaborasi ke dalam gerakan senam kesegaran jasmani. Dari gerakan-gerakan senam inilah akan memunculkan pengetahuan kepada siswa atau masyarakat secara tidak langsung. Selain itu, pendekatan





kesehatan siswa dan masyarakat juga di dapatkan dari implementasi konsep tersebut dengan hadirnya gerakan-gerakan yang membuat aktivitas motorik akan lebih aktif dan menghibur rohaniyah. 🙏





KEPING 5

MASA DEPAN KEBERAGAMAN







1

Masa Depan Keberagaman Di Indonesia

DEMAS BUNTUMA'DIKA

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman: suku, agama, bangsa, bahasa, etnis, kebudayaan, status sosial dan lain-lain. Secara dasar negara, meskipun terdiri dari beragam budaya, agama, dan lain-lain, bangsa ini mengaku bahwa semuanya itu satu yaitu bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia juga banyak terjadi konflik di dalamnya. Entah apa yang mendasari banyaknya konflik yang terjadi. Mengapa dengan Indonesia? Apa yang salah dengan Indonesia? Mungkin jawaban yang dapat diterima yaitu karena banyaknya perbedaan dan juga keberagaman di Indonesia.

Persoalan keberagaman dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Arti keragaman menjadi isu yang sangat penting di tengah Indonesia yang kini telah memasuki usia yang cukup panjang. Dalam tahun-tahun belakangan ini kita menyaksikan Indonesia semakin lama semakin krisis akan keberagaman. Konflik-konflik sosial berbasis agama yang terjadi di berbagai daerah tak jua kunjung usai. Seperti pembakaran rumah ibadah, penistaan atas nama agama, benturan fisik antar umat agama, misalnya. Atau yang paling merugikan banyak pihak: terorisme. Tak





jarang, agama menjadi sumbu konflik di negeri yang majemuk ini.

Perbedaan merupakan salah satu kata atau kalimat yang paling sering didengar oleh telinga para generasi muda Indonesia, baik itu di televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Bagaimana tidak, tampaknya Negara Indonesia memang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman yang secara tidak langsung juga memiliki banyak perbedaan.

Pluralitas agama, etnis, bahasa, dan budaya bukanlah hal yang asing lagi bagi bangsa ini. Walaupun dengan kondisi yang penuh perbedaan dan keberagaman, nampaknya rakyat Indonesia masih bisa hidup rukun dan damai. Inilah wujud dari toleransi rakyat Indonesia yang katanya dikagumi oleh bangsa asing. Sesungguhnya, perbedaan dan keberagaman ini bisa menjadi potensi untuk membuat atau menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdepan lagi dalam hal keberagaman. Tapi dengan syarat bahwa semua rakyat Indonesia harus dilibatkan dalam setiap pergerakan bangsa Indonesia yang terkenal dengan kepulauannya.

Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia ke belakang, kita tahu bahwa bangsa ini tidak merdeka oleh karena satu agama, tetapi oleh beberapa agama yang bahu-membahu ingin membuat bangsa ini merdeka. Kita tahu bahwa bangsa ini merdeka bukan hanya karena satu etnis, tapi semua etnis di Indonesia-lah yang membuat bangsa ini merdeka. Dan kita tahu bahwa kita merdeka bukan karena oleh satu kebudayaan, melainkan oleh seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia.

Bangsa ini juga mempunyai falsafah atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya "Berbeda-beda tapi satu jua" . Meskipun berbeda-beda, tapi rakyat Indonesia bisa menjadi satu dan saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Ditengah-tengah keberagaman dan perbedaan yang mewarnai hampir ke seluruh pelosok negeri, semboyan atau falsafah ini dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bagi





masyarakat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka. Sehingga suatu hari kelak bangsa ini bisa mewujudkan suatu cita-cita leluhur yang tertuang dalam Pancasila sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”. Untuk mewujudkan sila ke-3 ini sangatlah sulit jika melihat beberapa tahun belakangan dimana banyak terjadi konflik di beberapa daerah Indonesia. Konflik tersebut masih terbayang di benak kita, sebut saja konflik di Poso, Maluku, Aceh hingga Papua. Itu semua disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan suku dan agama. Penyebabnya mungkin hanya masalah sepele tapi kita bisa lihat dampaknya yang bisa menyebabkan ratusan hingga ribuan orang kehilangan nyawa mereka.

Apakah konflik-konflik diatas akan hanya dituliskan dalam sejarah Bangsa Indonesia tanpa adanya upaya untuk mengintrospeksi diri ?

Apakah kedepannya kita masih dapat hidup dengan damai, tenang, dan tentram tanpa ada lagi konflik yang bergolak ?

Apa yang dapat dilakukan oleh para generasi muda Indonesia untuk menjawab tantangan keberagaman ini yang dimasa depan dapat menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak ?

Pertanyaan diatas merupakan tiga dari banyak pertanyaan yang bisa diajukan atas munculnya konflik ini. Kita percaya bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai keinginan yang hampir sama, yaitu untuk hidup secara harmoni tanpa ada gangguan di sekeliling walaupun kita berada di tengah banyaknya keberagaman dan juga perbedaan.

Indonesia adalah negara yang luas dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang tersebar hampir di setiap kepulauan Indonesia. Tak hanya itu, generasi muda Indonesia juga mendiami daerah dengan kondisi alam yang berbeda-beda tiap daerahnya, mulai dari pedesaan, perkotaan, pegunungan, hutan-hutan, tepi pantai, dan masih banyak lagi. Kondisi geografis yang berbeda ini pulalah yang semakin membuat





para generasi muda Indonesia mempunyai keberagaman karakteristik yang lain lagi. Pada dahulu kala, keberagaman dan perbedaan yang banyak terdapat di Indonesia mampu berjalan dengan baik secara berdampingan dan juga saling mengisi.

Seperti yang kita tahu, karakteristik generasi muda Sulawesi berbeda dengan generasi muda Jawa, generasi muda Kalimantan berbeda dengan generasi muda Papua, dan banyak lagi perbedaan yang ada. Karakteristik yang berbeda itu seperti volume suara antara generasi muda Jawa dan Sumatera. Para generasi muda Sulawesi menganggap jika suara orang Jawa itu terlalu lembut, generasi muda Jawa menganggap kebalikannya bahwa suara orang Sulawesi itu terlalu keras.

Perbedaan ini terbentuk bukan tanpa ada alasan. Sejak dahulu, Pulau Jawa itu sudah banyak didatangi dan dipenuhi oleh banyak orang dari berbagai penjuru negeri, ini menyebabkan Pulau Jawa padat dengan banyak orangnya. Sehingga mereka kalau mau berbicara tidak perlu keras-keras, dengan suara pelan saja suara mereka sudah terdengar karena padatnya orang-orang.

Kebiasaan ini pun masih terbawa sampai sekarang. Sementara itu, lain lagi kondisinya di Sulawesi contohnya di Toraja, Orang-orang banyak yang hidup berjauhan. Dengan demikian mau tidak mau orang Sumatera kebanyakan harus berteriak keras-keras untuk saling berkomunikasi. Kebiasaan ini pun terbawa hingga sekarang. Ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan karakteristik seperti ini. Tapi, sebenarnya perbedaan karakteristik seperti ini tercipta dari kondisi geografis atau kondisi alam Indonesia yang berbeda.

Saya mengutip perkataan Stephan R Covey, salah seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat. “Kekuatan itu berasal dari keberagaman, bukan dari keseragaman”. Jadi, bagi generasi muda Indonesia hendaknya menjaga keberagaman yang ada di negara ini agar negara kita tetap kuat dan bersatu. Tak dipungkiri lagi bahwa peran dari generasi muda Indonesia





sangatlah dibutuhkan dan sangat penting dalam menjaga kekuatan negara. Alangkah baiknya lagi kalau para generasi muda Indonesia tidak mempolitikkan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga keberagaman dan perbedaan bisa tetap berdiri pada tempatnya. Kepentingan-kepentingan politik tertentu bisa sangat mempengaruhi keadaan masyarakat.

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh generasi muda Indonesia di tengah keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Generasi muda yang tepat untuk memimpin negeri yang kompleks akan perbedaan ini haruslah generasi muda yang adil, jujur, dan dewasa dalam membangun bangsa di tengah perbedaan dan keberagaman ini. Untuk itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berpikir kritis, dapat menciptakan persatuan dan tentunya juga kesatuan bangsa. Generasi muda yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongan tentu tidak cocok untuk memimpin Bangsa Indonesia. Pemimpin seperti ini akan menyebabkan konflik baru lagi di negeri yang penuh akan perbedaan dan keberagamannya.

Bicara mengenai keberagaman dan perbedaan agama yang terdapat di Indonesia sesungguhnya setiap agama itu mempunyai ajaran tersendiri. Tapi kita yakin bahwa setiap agama yang ada di Indonesia baik maupun yang ada di seluruh dunia ini pasti tidak mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Setiap agama bertujuan untuk mengajarkan kebaikan dan tidak menyuruh umatnya saling membenci dan saling memusuhi karena adanya perbedaan dan keberagaman agama. Bahkan, sudah sejak dulu kala tidak ada yang namanya “membedakan” hukuman antara agama yang satu dengan agama yang lainnya.

Keadilan adalah hak milik semua orang walaupun terdapat banyak perbedaan dan keberagaman dalam hal agama. Setiap orang berhak memeluk agama mereka masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat menghendaki orang lain untuk memeluk agama mereka. Dengan demikian, maka





seharusnya-lah para generasi muda yang ada di bumi Indonesia maupun di negara lain dapat hidup secara damai dan tentram walaupun dikeping oleh perbedaan dan keberagaman.

Suatu hari, kami pernah mewawancarai seorang Pendeta yang menjadi kepala desa di wilayah mayoritas Muslim, Ditengah maraknya perilaku intoleransi di beberapa daerah di Indonesia ternyata nilai luhur Pancasila mengenai keberagaman dan toleransi antar sesama masyarakat terjadi di Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Di daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim ini, seorang pendeta bernama Timotius Trimin terpilih menjadi kepala desa. Kesaksian dari Kepala Desa tersebut bahwa masyarakat di desa ini hidup tentram walaupun mereka jauh dari politik yang ramai dibicarakan di negara ini. Skala mayoritas Muslim, desa ini terdiri dari agama Islam, Kristen dan Hindu. Walaupun hidup di tengah agama yang berbeda-beda, tapi belum pernah terdengar adanya konflik yang terjadi di desa ini. Justru yang ada hanyalah harmoni yang dijalankan tanpa adanya paksaan. Bagi penduduk di desa ini, mereka menganggap bahwasanya perbedaan itu adalah kekayaan yang harus mereka jaga baik-baik, keindahan yang harus dilestarikan dan juga kerukunan yang menyejukkan hati

Tuhan sendiri didalam penciptaan menciptakan keberagaman suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, segala jenis tumbuhan, binatang dan makhlukhidup lainnya. Jadi keberagaman yang ada di dunia terkhusus di Indonesia adalah suatu karya sang pencipta yang paling indah dengan berbagai warna-warni yang menghiasi Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dalam hal suku bangsa,ras/etnis,adat-istiadat,bahasa hingga agama memang sangat rawan terhadap konflik. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara dan Pancasila yang menjadi ideologi negara seolah-olah hanya sebagai sekedar semboyan dan simbol saja. Di era globalisasi saat ini nilai-nilai yang dianut oleh bangsa





kita telah mulai memudar tergerus oleh perkembangan zaman dan ideologi yang lain. Konflik antar umat beragama terutama yang sering terjadi saat ini.

Konflik destruktif yang berujung pada tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Toleransi beragama dianggap sebagai suatu solusi atas konflik antar umat beragama yang sering terjadi saat ini. Sikap saling menghormati dan saling menghargai memang sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Diperlukan rasa saling pengertian antar sesama agar tercipta komunikasi yang baik. Karena pada dasarnya agama itu mengajarkan kasih sayang dan bisa membangkitkan solidaritas dan kohesifitas sosial yang kuat dengan harapan masa depan keragaman yang lebih Indah di Indonesia tercinta. 🌸







2

Bingkai Keberagaman dalam Demokrasi

SONYA YULISTAN ANDOMO

Meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi hal fundamental demi peningkatan kualitas demokrasi. Namun, konflik yang ditimbulkan akibat perbedaan, justru menjadi antitesisnya, yaitu penurunan kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat di dalam masyarakat yang beragam, harus disikapi dengan cerdas. Keberagaman masyarakat membuat kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat bersifat multidimensi. Konflik kepentingan dan sentimen kelompok turut hadir ditengah-tengah keberagaman tersebut.

Peningkatan kualitas membutuhkan kesadaran masyarakat atas hak dan kebebasannya, yang dijamin oleh konstitusi dan aturan hukum lainnya. Tanpa adanya kesadaran, sekuat apapun hak dan kebebasan yang dijamin konstitusi dan aturan hukum, masyarakat tidak akan dapat berpartisipasi. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adalah hal pertama dan utama yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Ketika pemberdayaan tidak diberikan, sementara suara-suara pemerintah untuk menggenjot peningkatan partisipasi gencar dikumandangkan, maka kualitas demokrasi





tidak akan naik. Hal demikian hanya menjadi sebuah paradoks, ketidaksesuaian permintaan dan pemberian. Masyarakat hanya menjadi sasaran kampanye, *floating mass*, serta kantong-kantong suara untuk caleg. Dan lebih jauh masyarakat akan bersifat apolitis.

Pembangunan Manusia

Pemerintah dan penyelenggara negara harus memfasilitasi keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi, dan tetap berupaya membuat rule agar partisipasi tersebut tidak memuat unsur SARA. Peningkatan kualitas demokrasi tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam menanggapi perihal bangsa dan negara. Di negara-negara demokrasi, umumnya muncul anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Pembangunan manusia menjadi unsur penting dalam tertib demokrasi. Pembangunan manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat sipil perlu menyokong untuk suksesi pembangunannya. Pembangunan Partisipatif menjadi sebuah konsep pembangunan yang cocok dalam upaya pemberdayaan masyarakat, demi tujuan peningkatan kualitas demokrasi. Konsep ini memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan, bukan lagi objek dari pembangunan. Tujuannya sangat konstruktif, yaitu menjadikan masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan dan menjadi subyek atas pembangunan tersebut, atau disebut People Centre Development.

Pembangunan bukanlah sekedar mendirikan gedung-gedung, membangun jalan-jalan. Pembangunan harus berguna bagi penduduk yang tinggal didalamnya. Pembangunan harus mengangkat kualitas dari masyarakatnya. Dalam membangun SDM, tidak melulu kita membahas persoalan kapasitas, atau





sisi akademis manusia. Tetapi hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun *attitude* atau cara berfikir dan sikap manusia tersebut. Sederhananya, pendidikan tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan seseorang, tetapi juga harus mampu membangun kepribadian dan kedewasaan budi. Begitu juga dengan keluarga sebagai lingkungan sosial pertamanya, yang harus mampu turut membentuk kepribadian yang positif. Sehingga, kepribadian yang demikian mampu menjawab tertib sosial dan tertib berdemokrasi yang kita butuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, merupakan refleksi dari pelaksanaan demokrasi yang baik. Tidak hanya dalam tataran pemerintahan, namun demokrasi juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Di dalam pembangunan, keikutsertaan masyarakat luas bukan hanya dilihat dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan, seperti dalam birokrasi pemerintahan. Namun, ketika kita berbicara pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat di dalam sistem terhadap masalah yang dihadapi dan solusi untuk permasalahan tersebut.

Bukan Penghambat

Kondisi masyarakat yang beragam, tidak boleh menghalangi kebebasan sipil dalam mendapatkan haknya. Konstitusi telah menjamin kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang. Kemudian dipertegas dengan Huruf C (2), setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Keberagaman masyarakat bukanlah sesuatu yang menghambat konsolidasi demokrasi. Konflik memang sering





terlahir dari rahim masyarakat yang beragam ini, tetapi hal demikian bukan menjadi alasan pemerintah menghalangi hak dan kebebasan sipil dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, lebih dari itu, keberagamanlah yang menguatkan demokrasi. Kebutuhan dan aspirasi yang kompleks dari masyarakat yang beragam, melatih para penyelenggara negara untuk kreatif dan responsif, dan juga melatih masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dengan memberikan aspirasinya.

Keberagaman harus di sikapi dengan cerdas, dan tentu harus memiliki persiapan matang oleh penyelenggara pemerintahan. Penguatan doktrin toleransi sebagai upaya menjaga keberagaman harus dipatrikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Toleransi menjadi pilar penjaga keberagaman, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, dan hak kelompok harus ditekankan, agar konflik yang dilatarbelakangi unsur SARA dapat diminimalisir dan hilang. Dan terakhir, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan keberagaman yang selaras dan rukun. ☺





3

Bergerak Bersama Sebagai Solusi untuk Masa Depan Keberagaman di Indonesia yang Lebih Baik

WIDHYKA FAKHRIYAKANSA

Berangkat dari pengalaman saya sebagai mahasiswa jurusan ekonomi islam di Universitas Padjadjaran, sebuah jurusan yang mengandung kata agama di sebuah universitas negeri umum. Menjadi menarik karena muncul anggapan dan pandangan bahwa jurusan saya hanya untuk satu agama dan berbeda dari jurusan lain yang dapat bebas berekspresi di berbagai bidang keilmuan.

Dari anggapan dan pandangan tersebut mulai lah muncul intoleransi antara jurusan kami dengan jurusan yang lain. Intoleransi yang terbentuk adalah buah dari anggapan yang sangat tidak berdasar. Seperti yang saya alami adalah selalu dianggap bukan bagian dari fakultas ekonomi karena kami menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai landasan, sedangkan sebagai ekonom haruslah melihat bukti empiris.

Atau lebih parahnya lagi kami dianggap sebagai bagian dari kaum ekstrimis yang tidak toleransi dan hanya mengutamakan kaumnya. Namun setelah jurusan kami berada di Universitas Padjadjaran selama empat tahun, kami mengamati dan kami tidak gentar dengan pandangan tersebut. Kami tidak melemah,





namun kami membuktikan dengan aksi nyata, bahwa kami dapat berkompetisi di berbagai tingkat perlombaan dengan membahas ekonomi dari berbagai sudut pandang, dan ikut serta dalam organisasi mahasiswa yang juga berkerjasama dengan berbagai kelompok dan etnis dengan baik.

Saya membahas essay ini berangkat dari pengalaman saya, karena saya ingin menunjukkan bahwa pernah merasakan dan berada dalam posisi sebagai minoritas. Dan kawan saya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur pernah berkata bahwa, universitas adalah miniatur Indonesia, apa yang terjadi di kampus adalah prototype yang akan terjadi di kehidupan bermasyarakat sesungguhnya dari mulai politik, budaya, hingga bersosialisasinya. Sebagai buktinya, sekarang saya yang berasal dari sebuah jurusan yang dulunya dianggap mengandung unsur SARA dapat bertahan bahkan dapat ikut berkiprah meramaikan dan membawa harum berbagai sektor di Universitas Padjadjaran.

Jadi, pemecahan masalah yang saya temukan tentang toleransi dan keberagaman di Universitas Padjadjaran ada beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan saya berinteraksi, dimana saya berada di sekitar orang-orang terdidik dan sedang mengenyam pendidikan, maka masyarakatnya pun dapat mengedukasi diri sendiri ataupun mengedukasi masyarakat luas dengan sebuah gerakan untuk memberikan penjelasan atas informasi yang didapat tentang kebermanfaatannya mahasiswa di jurusan saya atau masalah lain yang berkaitan dengan SARA di Universitas Padjadjaran.

Yang kedua, Universitas Padjadjaran dari sebelum adanya jurusan ekonomi islam memang sudah berasal dari beranekaragam suku, agama, ras, etnis, dan bahkan dari negara yang berbeda. Dan dalam perjalanannya tidak pernah ada masalah atau pergesekan atas masalah toleransi. Maka adanya intoleransi atas jurusan saya hanyalah reaksi atas penyesuaian akan hal baru, yang pasti akan selesai dengan berjalannya waktu.





Dan yang terakhir, perlu dilihat intoleransi maupun kaum ekstrimis hanyalah oknum yang dapat dibilang hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat. Maka apabila oknum telah mengacaukan tatanan masyarakat dengan kekerasan verbal maupun non-verbal maka akan muncul perlawanan atas kekacauan atas tatanan masyarakat tersebut, entah dari gerakan mahasiswa, komunitas mahasiswa, ataupun pemegang kepentingan di universitas yang menjaga ketentraman dan kenyamanan di lingkungan universitas.

Dengan penjelasan diatas, apabila pertanyaan esai ini adalah masa depan keberagaman Indonesia, maka saya dapat menjawab bahwa masa depan keberagaman Indonesia seharusnya lebih baik dan lebih kondusif dari saat ini. Saya bisa berkata seperti itu karena dilihat dari pengalaman saya yang dapat bertahan di Universitas Padjadjaran dengan toleransi yang tinggi serta keberagaman di dalamnya.

Permasalahan intoleransi di Indonesia yang muncul ke permukaan saat ini dapat dibilang dimulai dari kaum elit politik yang kita ingat bermula dari pilkada DKI Jakarta, dimana permasalahan ini muncul dari media sosial yang dimulai oleh segelintir orang yang dapat disebut sebagai oknum yang dengan sengaja menyulut permasalahan berbau SARA ditambah dengan berita bohong atau *hoax*. Sebagai buktinya ditemukan sekelompok orang yang menamai dirinya Saracen dan seorang "*buzzer*" yang menamai dirinya triomacan2000.

Dapat dilihat dampak dari permasalahan elit politik yang menyebabkan intoleransi di Indonesia sebenarnya karena diperkeruh oleh oknum yang menebarkan informasi bohong atau *hoax*. Maka solusi yang tepat menurut saya untuk saat ini adalah gerakan masyarakat yang mengedukasi dan melawan *hoax* tersebut. Dan sudah banyak gerakan melawan *hoax* di Indonesia sebagai contohnya yaitu; ANTI HO@X! (Serikat Media Siber Indonesia), #SiBerkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital, Persatuan Artis Film Republik Indonesia), Bandung Hantam Hoax (Pemerintah Daerah Kota Bandung). Dari tiga





contoh gerakan melawan hoax diatas dapat dikatakan bahwa usaha melawan hoax sebagai salah satu penyebab masalah intoleransi adalah dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat dari mulai pemerintah hingga komunitas, karena dengan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat dapat mengedukasi dan teredukasi untuk melawan ketidakbenaran informasi.

Lalu potensi kekerasan ekstrimis di Indonesia seringkali diasosiasikan dengan kelompok tertentu, misalnya pemeluk agama Islam, melalui penyebaran paham penggunaan kekerasan atas nama agama. Di samping itu, kemajuan teknologi juga turut dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk merekrut anak muda, terutama melalui sosial media.

Oleh karena itu, penting untuk menyebarkan narasi tandingan (*counter-narratives*) untuk melawan sekaligus memberdayakan pemuda agar tak terjebak ideologi radikal. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyebarkan bahwa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang saling menghargai dan inklusif sebagai *nation-branding* Indonesia. Narasi tandingan ini harus hadir dari pemerintah sebagai motor penggerak utama yang di gawangi oleh Kementerian terkait (e.g. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dengan menghadirkan informasi di media massa, media sosial, ataupun media mainstream lainnya agar secara tidak langsung masyarakat tidak terdokrin dengan paham radikal yang masuk.

Juga didorong gerakan dari masyarakat yang melawan gerakan radikal agama ataupun golongan dengan kegiatan positif. Saat ini di Indonesia telah banyak muncul gerakan yang memberi dampak besar untuk melawan radikalisme, seperti; Gerakan Pemuda Hijrah (gerakan pemuda muslim yang ingin berhijrah mendekati diri pada Allah SWT di Bandung), Indonesia Mengajar (gerakan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia di daerah terpencil), Sabang Merauke (Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk Kembali, program pertukaran pelajar





antardaerah di Indonesia) yang menunjukkan *social movement* dari masyarakat pun berdampak besar untuk melawan radikalisme dan intoleransi terhadap unsur SARA.

Mengingat bahwa Indonesia terbentuk dari perjuangan berbagai suku, agama, ras, bahkan etnis, maka seharusnya permasalahan intoleransi dan kekerasan ekstrimis bukanlah masalah yang harus timbul di Indonesia. Tapi bukan dengan cara seperti Negara Amerika Serikat di zaman Barrack Obama yang membuat *Countering Violent Extremist Program*, yang justru memberi stigma negatif kepada umat Muslim dan memperkuat stereotip Islamofobia, serta malah menjadi landasan untuk mengintervensi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan melakukan kesewenang-wenangan disana.

Cara yang seharusnya hadir dari Negara Indonesia saya yakin dapat lebih bijaksana, dengan penanaman nilai bangsa bahwa negara ini berasal dari berbagai suku, agama, ras serta etnis dapat hidup rukun dan berdampingan adalah kelebihan yang kita miliki. *National Branding* dapat menjadi cara penanaman nilai bangsa yang efektif, seperti halnya di negara tetangga Malaysia yang setiap sudut negaranya dipenuhi bendera negaranya dan slogan kebanggannya, yang tanpa sadar hal itu menerap kedalam diri setiap Warga Negara Malaysia.

National Branding dapat dilakukan dengan cara yang sesuai zaman, seperti bantuan teknologi ataupun media sosial sebagai saluran informasinya. Di Indonesia ternyata hal ini telah dilakukan, seperti contohnya *Good News From Indonesia* (Media daring tentang informasi membanggakan dari Indonesia), *Damn! I Love Indonesia* (Produk urban streetwear yang membawa unsur budaya lokal Indonesia) serta telusuRI (*YouTube Channel* yang mengajak semua orang untuk bangga dan cinta akan Indonesia).

Dari masalah yang saya paparkan mulai dari oknum yang menyebarkan berita bohong atau hoax, lalu potensi





kekerasan ekstrimis di Indonesia, hingga gerakan intoleransi yang disebabkan oleh adanya isu SARA. Dan jawabannya merujuk pada satu hal, yaitu bergerak bersama antara seluruh masyarakat di Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Dari mulai gerakan, komunitas, bisnis, hingga program pemerintah daerah bersinergi dalam aksi tanpa adanya sebuah perjanjian. Gerakan-gerakan yang muncul dari masyarakat karena rasa sayang mereka terhadap Indonesia yang tidak ingin diganggu oleh berita hoax yang memecah belah. Atau komunitas-komunitas yang peduli akan pentingnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini tak boleh tergoyahkan oleh isu SARA. Hingga bisnis atau usaha yang ditujukan agar penggunanya merasa bangga akan Indonesia yang bertoleransi tinggi dan menolak keras kekerasan ekstrimis. Dan dorongan dari pemerintah sebagai stimulus utama bagi masa depan keberagaman di Indonesia.

Maka apabila sinergi antara masyarakat dengan gerakan dan komunitas positifnya, serta pemerintah dengan dorongan terhadap masa depan keberagaman Indonesia dapat bergerak bersama, saya yakin Indonesia dapat menjadi negara dengan keberagaman yang lebih baik serta lebih kondusif di masa depan kelak. Karena kesadaran yang muncul bukanlah dari satu golongan tapi dari seluruh masyarakat yang mencintai dan peduli terhadap Republik Indonesia tercinta ini. 🙏🐦





4

Merawat Toleransi dan Keberagaman Melalui Gerakan Mahasiswa Peduli Anak Usia Dini untuk Mewujudkan Indonesia yang Berbudaya

TUMPAL ANDANI ARITONANG

“Indonesia menjadi contoh neara-negara lain mengenai toleransi”, demikian pujian yang pernah dilontarkan oleh Barrack Obama mantan Presiden Amerika Serikat, dalam sambutannya pada acara pembukaan Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta, Juli 2017.

Tidak tanggung-tanggung, menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, ada 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, 1.211 bahasa daerah, dan 6 agama. Masih banyak kekayaan keberagaman di Indonesia jika dikupas keseluruhan.

Keberagaman ini merupakan menjadi tantangan sendiri untuk bangsa ini apakah mampu tetap berdiri ditengah-tengah perbedaan atau akan terbawa arus perpecahan di era globalisasi ini. Tidak heran bahwa banyak persoalan yang bermunculan yang mengatasnamakan agama, suku, hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik.





Salah satu bukti terguncangnya keberagaman di Indonesia adalah kasus yang baru-baru ini di pertengahan tahun 2017 menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok pada kasus penodaan agama. Jika diamati, banyak kelompok-kelompok menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik dan golongan. Saya merasa prihatin dan merasa sedih, mata berkaca-kaca ketika melihat mereka hanya demi kekuasaan semata merelakan keberagaman ini terpecah belah. Saling menyerang, menyebar berita bohong, bahkan menjatuhkan saudaranya sendiri hanya karena kepentingan.

Persoalan itu menjadi bukti bahwa perbedaan dalam keberagaman yang sudah terawat sejak zaman nenek moyang kita mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Jacobus Rajanbar S.H., M.Si dalam bukunya yang berjudul "Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar" memberikan pandangan bahwa, ilmu sosial seharusnya memosisikan sebagai pembantu dari aktivitas pembangunan dengan berupaya menerjemahkan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat lalu mengambil sari-sari maknanya untuk dipergunakan sesuai keperluannya. Pandangan ini mencoba menafsirkan bahwa ilmu sosial yang dimiliki seseorang seyogyanya dipergunakan untuk hal positif membangun peradaban dalam perbedaan, dan yang paling terpenting dapat memosisikan diri dalam situasi tertentu, bukan malah sebagai pemecah persatuan.

Oleh karena alasan keberagaman dan persoalan ini sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk tetap menjaga keutuhan negara yang majemuk ini, supaya bangsa ini tidak melupakan sejarah berdirinya bangsa ini tidak lain adalah berasal dari perbedaan. Maka hadirilah Mahasiswa ditengah-tengah masyarakat sebagai generasi perubahan, pengontrol, dan penerus, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berbudaya.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, salah seorang tokoh pendidikan, memberikan pengertian bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta





masyarakat. Ini lah sebenarnya yang harus tetap terjaga. Melalui Gerakan Mahasiswa Peduli Anak Usia Dini, bisa digambarkan terwujudnya Indonesia yang berbudaya. Anak merupakan sasaran utama, jika salah didik maka generasi yang lahir akan membawa bangsa ini ke arah yang tidak diharapkan.

Dalam kesehariannya, Mahasiswa bekerja sama dengan pemerintah ataupun sekolah-sekolah dapat melakukan tahapan-tahapan pengenalan kebudayaan terhadap anak, menanamkan jiwa saling mencintai dalam perbedaan, tentang keberagaman, untuk saling menghargai, menumbuhkan jiwa tolong menolong tidak membedakan latar belakang. Hal ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam sehari-hari.

Misal dalam perkuliahannya, mahasiswa tidak full seharian didalam kampus, disela-sela kekosongan waktu dapat digunakan untuk terjun berinteraksi sosial dengan anak, mahasiswa dapat berkordinasi dengan pihak sekolah, terlebih pada anak tingkat TK. Waktu mereka hanya beberapa jam di sekolah. Sebenarnya tidak mudah namun mahasiswa akan terasa lebih mudah jika membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar tempat tinggal si anak.

Dengan bermodalkan pengetahuan cukup, seorang mahasiswa dapat menyajikan hal-hal kreatif menghibur dan dapat diterima dengan mudah oleh anak, misal melalui drama anak, bisa bermain ditaman, melalui permainan, melalui musik, mengenalkan bahas daerah, bercerita tentang pahlawan-pahlawan nasional, dan banyak hal lainnya. Dapat dilakukan bertahap setidaknya minimal satu kali dalam kurun waktu seminggu. Sesuatu yang dilakukan hanya beberapa kali saja tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, dengan metode yang bertahap tentunya dapat menjadi mediasi pendekatan bagi anak. Untuk melakukan hal ini tidaklah terbebani oleh materi namun kembali pada kemauan seorang mahasiswa untuk membangun negara ini agar tetap menjadi bangsa yang berbudaya.

Sepanjang hal ini tetap dilakukan, maka negara ini tidak





akan pernah kehabisan generasi penerus. Saat anak tumbuh dewasa, maka mereka juga akan melakukan hal yang kita lakukan terhadap generasi dibawah mereka, akan tetap dibudayakan samah halnya buah kelapa saat jatuh tidak terletak jauh dari pohon nya, demikian si anak akarakturnya tidak akan jauh beda dengan orang yang mendidiknya.

Dengan dilakukannya gerakan ini, sedikit banyaknya merupakan sebagai langkah merawat toleransi dalam keberagaman di negara yang majemuk ini. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah generasi penerus, agar generasi penerus berkualitas maka sudah sepatutnya ditempah sejak usia dini. Ini lah sebenarnya masa depan bangsa. Bangsa yang memiliki masa depan adalah bangsa yang berbudaya. Keberagaman yang tetap terjaga, saling memiliki, satu rasa, satu jiwa, satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. NKRI Harga Mati !!! 🤝





5

Mengkaji Dan Merevitalisasi Gagasan Pluralisme Gus Dur Sebagai Upaya Membingkai Indonesia Harmonis Beragama

GIOVANO BHAKTI MEIZHAR

Berbicara tentang Indonesia, salah satu topik kajian yang tidak pernah bosan untuk dibahas adalah pluralisme (kemajemukan). Ya! Sektor ini memiliki daya tarik tersendiri untuk terus di kaji. Mulai dari kerukunan umat beragama hingga potensi konflik (SARA) yang melanda bangsa menjadi salah satu *trending topic* di kalangan tokoh agama.

Keberagaman agama di dunia merupakan sebuah fakta yang tak terbantahkan lagi dalam berinteraksi sosial. Pluralitas merupakan sebuah Sunnatullah. Hal ini haruslah disadari oleh setiap manusia, bahwa mustahil di era saat ini tidak bersinggungan atau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda agama.¹ Sikap yang muncul sebagai upaya menjalankan ajaran agama di masing-masing penganut agama cenderung memunculkan sikap eksklusif, *claim of truth*² and

¹ Surya Adi Sahfutra, "Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan", *Religi*, Vol.X, No. 1, Januari 2014, 90.

² Keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar.





*salvation of claim*³. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan rasa ketidaksenangan dan kecaman dari penganut agama lain yang merasa disalahkan.

Menurut The Pew Research Center (2015) merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa 10 juta warga Indonesia berpaham radikal.⁴ Peneliti bidang Kebebasan Beragama Setara Institute, Sudarto Toto, mengatakan bahwa per 8 Desember 2016, terdapat 182 pelanggaran kebebasan beragama. Variabel kebebasan beragama atau berkeyakinan turun 0,10 persen dari 2,57 tahun 2015 menjadi 2,47 pada tahun 2016.⁵

Ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah dalam melindungi kemerdekaan beragama sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.⁶

Padahal, jika kita tarik kebelakang, Indonesia terlahir sebagai negara pluralis. Dalam sejarah kemerdekaan, nuansa pluralisme begitu kuat menaungi bumi pertiwi dalam merumuskan Ideologi bangsa. Sebagaimana yang dilakukan founding father kita, yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika “berbeda-beda namun tetap satu” sebagai simbol bahwa Indonesia adalah negara plural

Bukan hanya itu, pencoretan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pancasila sila pertama, yang terdapat dalam Piagam Jakarta, merupakan implikasi nyata bahwa Indonesia lahir dari banyak

³ Keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia

⁴ Kompas, 23 November 2016, 7.

⁵ <http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/> diakses tanggal 05 Agustus 2017

⁶ Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Pusiitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 250.



warna. Itulah *gentlement Agreement* para *founding father* kita demi terciptanya kesatuan bangsa.⁷

Karena itulah Soekarno membingkai Indonesia yang majemuk dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai makna: *heb God lief boven alles Uw naasten gelijk U zelf* yang artinya “cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri”, dan *Tat Twam Asi* yang artinya “aku adalah dia, dia adalah aku, tiada perpisahan”.⁸ Karena sejatinya Indonesia adalah milik kita, sebagaimana pidato kebhinekaan Soekarno di Surabaya tanggal 24 september yang menyatakan bahwa: “kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya, negara ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku dan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari sabang sampai merauke!”.⁹

Namun diakui atau tidak, kemajemukan di Indonesia ibarat pisau bermata ganda, disatu sisi kemajemukan dapat menjadi good potential apabila mereka bisa hidup rukun. Namun di satu sisi perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik perang saudara seperti yang terjadi di Negara Timur Tengah.

Menurut Koentjaraningrat¹⁰, setidaknya ada empat masalah besar yang dihadapi Indonesia sebagai akibat dari kemajemukan yang mewarnai masyarakatnya yaitu:

- 1) Masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa,
- 2) Masalah hubungan antaragama,
- 3) Masalah hubungan mayoritas minoritas dan,
- 4) Masalah integrasi kebudayaan- kebudayaan Irian Jaya dengan kebudayaan Indonesia.

⁷ Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959), (Jakarta: Gema Insani, 1997), 41.

⁸ Taufik Adi Susilo, Soekarno Biografi Singkat 1901-1970, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), 91-92

⁹ Ibid., 71.

¹⁰ Swastiko Putro, Persepsi Tokoh, 443.



Masalah di atas menjadi sisi negatif yang harus diterima Indonesia sebagai negara “majemuk”. Lebih-lebih dalam konteks beragama yang memang sangat sensitif untuk disentuh. Agama merupakan wahyu atau petunjuk Tuhan, namun kehidupan beragama tetaplah menjadi fenomena yang sulit ditebak. Hal ini mengakibatkan praktik keberagaman selalu memunculkan wajah ganda. Di satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun di sisi lain bisa menjadi kekuatan disintegratif. Itulah agama, mampu menjadi alat perekat namun di waktu bersamaan dapat menciptakan perpecahan.¹¹

Di berbagai media, mungkin sudah sering kita dengar berbagai peristiwa kekerasan, radikalisme, konflik antar agama dan aksi terorisme. Dampaknya pun sangat besar, berbagai sebutan negatif sering dialamatkan terhadap Indonesia seperti “Republik Horor” dan “Negara Teroris”.¹²

Ini yang kita takutkan, suatu paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa akan beranak pinak luas menghasut pemuda bangsa untuk berbelot dan memberontak. Sungguh pilu, ketika cita-cita membangun Indonesia yang satu, seakan sirna ketika desing peluru, hujaman bom, dan sabetan pedang menyimbahkan darah saudara-saudara se-tanah air.

Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Dalam Membingkai Indonesia Harmonis Beragama

Pluralitas agama adalah fakta yang tak terbantahkan, siapapun suka atau tidak, mustahil jika agamanya saja yang berhak hidup dan berkembang di bumi ini, di mana semua manusia hidup. Sikap *zero tolerance* atau merasa tidak senang atas kehadiran agama lain dengan segala implikasi pengalaman ajarannya adalah sikap yang menentang *sunnatullah* itu

¹¹ Arifinsyah, *Wacana Pluralisme Agama Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media, 2002), 9.

¹² Hasan Basri, “Islamic Education in Pesantren and Terrorism”, *Karsa*, Volume IX, Nomor 1, 2006, 854-862.





sendiri.

Secara arti, pluralis berasal dari akar kata Latin, plus, pluris, yang secara harfiah berarti: lebih dari satu.¹³ Dalam pengertian filosofinya, pluralisme adalah gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang sifatnya banyak dan heterogen di suatu komunitas masyarakat.¹⁴

Pluralisme agama sangat penting diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadirannya menempati posisi sentral dalam menahkodai kehidupan beragama dan bermasyarakat berada dalam jalur *on the track right*, sehingga terciptalah iklim kondusif yang menjadikan Indonesia damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain.

Di sinilah pentingnya membumikan gagasan pluralisme ala Gus Dur sebagai obat penawar dalam membingkai persatuan umat beragama di Indonesia. Konsep pluralisme yang diusungnya selalu mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama yang diwujudkan dengan mengedepankan sikap saling terbuka, saling mengerti, memahami dan menerima, sebagai kenyataan bahwa kita berbeda-beda namun tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik (ajaran agama masing-masing).

Mengkaji Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur dalam Membingkai Indonesia Harmonis Beragama

Sebelum menyemai gagasan Gus Dur, kita harus mengkaji gagasan beliau agar substansi pluralisme Gus Dur dapat benar-benar mengena. Dalam menjelaskan pluralisme versinya, Gus Dur sering mengutip ayat yang berbunyi: “Wahai manusia, Aku ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan

¹³ Miftahuddin, *Berislam Dalam Bingkai Indonesia: Membaca Konsep Pluralisme* Abdurrahman Wahid, Mozaik, No. 1, Vol.6, 2012, 65.

¹⁴ Imam Sukardi, *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), 129.





Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di mata-Ku, ialah orang yang paling bertaqwa kepada-Ku".¹⁵

Beliau memberi sedikit tafsiran mengenai kata "*Li Ta'arafu*" (saling mengenal). Menurutnya arti kata tersebut bukan hanya sekedar tahu nama, alamat rumah, nomor *handphone*, atau tahu wajah dan tubuh yang lain. Saling mengenal adalah memahami kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, pikiran, hasrat yang lain, yang berbeda, yang tak sama. Lebih dari segalanya "*li ta'arafu*" berarti agar kalian saling menjadi arif bagi yang lain.¹⁶

Dan menurutnya manusia yang paling mulia di hadapan Tuhannya adalah manusia yang paling taqwa, bukan yang paling gagah atau cantik, bukan yang paling kaya atau rumah megah. Taqwa bukan sekedar dan hanya berarti sering datang ke masjid atau menghadiri secara rutin majelis ta'lim, membaca kitab suci, memutar-mutar tasbih, bangun malam, atau puasa setiap hari. Tetapi lebih dari itu taqwa adalah mengendalikan amarah, hasrat-hasrat rendah, menjaga hati, tidak melukai, tidak mengancam, ramah, sabar, rendah hati dan sejuta makna kebaikan kepada yang lain dan kepada alam.¹⁷

Gus Dur sering mengatakan bahwa Islam itu terdiri dari 3 rukun (pilar): Rukun Iman, Rukun Islam, dan Rukun Tetangga/kemanusiaan. Dengan itu, Gus Dur tampaknya ingin menggugah kesadaran kaum muslimin agar tidak mengabaikan atau mereduksi rukun tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa ia menjadi tujuan dari agama dalam kehidupan manusia di dunia.¹⁸

Gus Dur sering bicara tentang keteguhan/kesabaran dalam

¹⁵ Al-Qur'an, 49:13

¹⁶ Husein Muhammad Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 52.

¹⁷ Ibid., 52.

¹⁸ Husein Muhammad, Sang Zahid, 53.



berjuang, menghargai orang dan mengadvokasi siapa saja yang menderita dan yang ditindas. Lebih dari itu, Ia bukan hanya sekedar menghargai atau menghormati manusia yang berbaju beda, melainkan juga menyambutnya dengan rendah hati dan rengkuhan yang hangat. Bahkan semasa menjadi presiden, Beliau sering mengadakan acara *open house*, dengan maksud untuk mendengar dan menampung problema masyarakat dengan terbuka, jujur, tanpa basa-basi dan birokrasi.¹⁹

Sebaliknya, Ia akan menentang siapa saja yang merendahkan martabat manusia, apalagi menyakiti, mengurangi dan menghalangi hak-hak mereka. Ia akan membela mereka yang martabat kemanusiaannya direndahkan, mereka yang hak-haknya dikurangi, dipasung, disakiti dan ditelantarkan. Seperti ketika para pengikut Ahmadiyah diusir dan masjid-masjid mereka dirobuhkan, Gus Dur hadir bersama mereka. Ketika Gereja-gereja dilempari batu, Ia berteriak “jangan”. Ketika orang-orang Tionghoa meminta hari raya Imlek dan Barongsae, Ia memberikannya dengan tulus. Meski tak bisa melihat dengan matanya, Ia hadir menyaksikan tarian-tarian singa itu dan bertepuk tangan. Gus Dur senang.²⁰

Tindakan Gus Dur di atas merupakan cerminan bahwa merubah moralitas masyarakat harus dengan sabar, agar sesuai dengan ajaranajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari beberapa tokoh Islam. Masyarakat kita sekarang ini memiliki kemajemukan sangat tinggi, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan mudah marah dan bersikap “memaksakan”

¹⁹ Al Zastrouw Ng, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 243.

²⁰ Husein Muhammad, *Sang Zahid*, 54.

²¹ Abdurahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 72.

kehendak kepada masyarakat.²¹

Menurutnya²², seorang pluralis adalah dia yang menghormati dan menghargai sesama manusia dalam kekhasan identitasnya. Sementara sikap pluralis menunjuk pada pandangan terbuka dan kesadaran untuk mengakui bahwa *lifestyle and how to religious* memiliki perbedaan satu sama lain. Sikap pluralis tidak menyangkal adanya fakta mayoritas dan minoritas. Justru sebaliknya seorang pluralis sejati menerima kenyataan itu sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam melakukan relasi beragama, Gus Dur seringkali melepas identitas agama atau formalisme agamanya, la tanggalkan fanatisme beragama demi merajut keharmonisan beragama. Ia hindari beragama yang sempit hanya karena keyakinan yang membelenggu. Maka, hadirilah keyakinan itu di dalam hati dan termanifestasi di dalam kecintaannya kepada semua manusia tanpa membedakan latar belakang apapun.²³

Bagi Gus Dur semua manusia adalah sama, tak peduli apa covernya, dari mana asal usulnya, apa agamanya, warna kulit mereka, suku mereka, ras dan kebangsaan mereka. Yang Gus Dur lihat adalah bahwa mereka adalah saudara kita yang layak kita lindungi. Ia membela karena tubuh mereka diserang dan dilukai hanya karena paham agamanya yang berbeda, ekspresi-ekspresi diri mereka dihentikan secara paksa oleh negara dan harga diri mereka diinjak-injak.

Pada konteks kehidupan sosial beragama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia saat ini, yang kita butuhkan adalah transformasi dari kebaikan *al-khoir*²⁴, *al-ma'ruf*²⁵, *al-birr*²⁶ menjadi kebaikan *al-ihsan*²⁷ dan *as-sholeh*²⁸. Kebaikan

²² Miftahuddin, Berislam dalam, 74.

²³ Swastiko Putro, Persepsi Tokoh Lintas Agama Terhadap Pemikiran "Gus Dur" Tentang Pluralisme Agama, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, No. 1, Volume 2, 2013, 449.

²⁴ Artinya kebaikan yang murni dari Allah

²⁵ Artinya kebaikan dalam wilayah sosial

²⁶ Artinya kebaikan pada diri seseorang untuk menjadi lebih baik

²⁷ Artinya kebaikan yang sesungguhnya bukan kewajiban bagi kita, melainkan kita bersedia untuk melakukannya

²⁸ Artinya kebaikan yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan, meliputi ranah sosial, politik, dan juga budaya

yang bersifat individual menjadi kebaikan yang sosial. Nabi Muhammad SAW pernah memberi contoh yang baik ketika terjadi peristiwa fatkhu Makkah (penaklukan kota Makkah). Pasukan Muslim yang berhasil mengalahkan kaum kafir dan melucuti senjatanya justru oleh Nabi tidak disakiti. Nabi justru membebaskan mereka. Dalam konteks ini, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan kategori *al-ihsan*.²⁹

Al-ihsan dan as-sholeh inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perannya sebagai makhluk sosial. Kolaborasi keduanya dalam memainkan pluralisme agama tentu akan menjadi *smart solutions* dalam menciptakan Indonesia harmonis beragama. Pribadi inilah yang disebut sebagai “*the next Gus Dur*”.

Pentingnya Revitalisasi Gagasan Pluralisme Gus Dur

Dari pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa Gus Dur mempunyai peran penting menjadi aktor penyejuk dalam menahkodai suasana keberagaman di Indonesia berada dalam status “*secure*”. Ia bagai pohon besar yang menjadi tempat berteduh banyak orang tatkala panas matahari menyengat. Seperti itulah perumpaan jiwa pluralismenya.

Maka di sinilah penulis mengajak pemuda bangsa untuk hadir dan membantu memberantas akar radikalisme yang kian menjadi-jadi di Indonesia. Melalui meneladani pemikiran hingga dedikasinya sebagai ikon pejuang pluralis, asa untuk membangun Indonesia harmonis akan menjadi kenyataan. Ada 3 cara yang efektif dan efisien dalam mencuatkan kembali gagasan pluralisme Gus Dur di seluruh Indonesia:

1. Memanfaatkan Potensi Santri

Sudah seharusnya pemerintah menggandeng dan memfasilitasi santri sebagai *smart solutions* mereduksi radikalisme yang kian menghantui dan meresahkan umat beragama di Indonesia. Ditopang dengan keunggulan

²⁹ Kompas, 19 September 2016, 6.



substansi dalam bidang ilmu agama, potensi santri inilah yang harus dimanfaatkan sebagai garda terdepan mensyiarkan kembali gagasan pluralisme Gus Dur.

Dengan didukung jumlah santri yang mencapai 3,75 juta yang tersebar di 27.230 pondok pesantren³⁰, serta meluasnya pengguna internet di Indonesia yang kini sudah mencapai 132,7 juta,³¹ tentu peluang dakwah di media sosial dapat dimanfaatkan santri dalam menggemakan resolusi jihad jilid dua melawan radikalisme agama melalui gagasan indah tentang pluralisme ala Gus Dur.

Media sosial sangat tepat menjadi venue menebar pesan *Islam rahmatan lil alamin*. Santri bisa menulis konten dakwah atau membagikan konten positif kepada teman-temannya atau group yang ia ikuti. Bahkan dakwah melalui media sosial dapat menjadi *maintenance ruhuhiyah*, yang mana para netizen bisa berdialog langsung mengenai cara beragama dengan benar kepada santri agar tidak terjebak dalam hasutan paham radikalisme.

2. Good Role Model

Selain itu, unsur masyarakat harus segera dilibatkan secara kuat untuk mampu meredam bahaya radikalisme yang mulai tersemayam di bumi pertiwi. Caranya, membentuk sikap anak sejak kecil melalui pembelajaran dan pengembangan berpikir kritis (*critical thinking*) dan sekaligus menjadi teladan yang utama (*good role model*) bagi mereka. Cara ini penting difungsikan agar pencucian otak dan indoktrinasi yang akan dilakukan perekrut terorisme-ekstermisme tidak mudah memengaruhi basis kognitif, emosi, dan tindakan anak.³²

³⁰ Data Pendis, Analisis Statistik Pendidikan Islam, Kemenag, 2011.

³¹ Data Survey Internet APJII 2016

³² Jawa Pos, 12 Desember 2016, 4.





3. Memasukkan gagasan pluralisme Gus Dur ke dalam Kurikulum

Terakhir, dalam segi pendidikan, perlu memasukkan program deradikalisasi melalui gagasan pluralisme Gus Dur ke dalam kurikulum pada semua tingkatan pendidikan sebagaimana upaya yang kita lakukan untuk mengatasi korupsi. Generasi muda yang menjadi target kampanye penyebaran ideologi radikalisme tentu harus dibekali pendidikan yang kuat, agar para pemuda dapat memilah mana paham sesat atau yang benar.

Dengan demikian, bahaya akibat radikalisme agama juga dapat dicegah dan di lumpuhkan dengan baik dan agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.³³ 🌸

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

- Anshari, Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifinsyah. 2002. *Wacana Pluralisme Agama Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media.
- Departemen Agama RI. 2007. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Muhammad, Husein. 2012. *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS.

³³ Swastiko, Persepsi Tokoh Lintas Agama, 443.



- Ng, Al Zastrouw. 1999. *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Sukardi, Imam. 2003. *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*. Solo: Tiga Serangkai.
- Susilo, Taufik Adi. 2010. *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Wahid, Abdurahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Jurnal dan Koran

- Adi Sahfutra, Surya. "Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan", *Religi*, Vol.X, No. 1, 2014.
- Basri, Hasan. "Islamic Education in Pesantren and Terrorism", *Karsa*, Volume IX, Nomor 1, 2006.
- Data Pendis, *Analisis Statistik Pendidikan Islam, Kemenag*, 2011.
- Data Survey Internet APJII 2016
Jawa Pos, 12 Desember 2016
Kompas, 19 September 2016
Kompas, 23 November 2016
- Miftahuddin. *Berislam Dalam Bingkai Indonesia: Membaca Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid*, *Mozaik*, No. 1, Vol.6, 2012.
- Putro, Swastiko. *Persepsi Tokoh Lintas Agama Terhadap Pemikiran "Gus Dur" Tentang Pluralisme Agama, Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1, Volume 2, 2013.

Internet

<http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/>



6

Teologi Inklusif Cak Nur; Menyemai Kerukunan Umat Beragama

IIN SHOLIHIN

Kehadiran internet telah mengubah segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan beragama. Masyarakat tak lagi menggali ilmu agama dari ulama, pendeta, maupun tokoh agama lainnya. Mereka dapat mengaksesnya melalui internet. Brenda Brasher mengungkapkan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat dalam kehidupan beragama akan menjadi bentuk dominan, dibandingkan dibandingkan konten lainnya. (Give Me That Religion, 2001).

Pew Internet & American Life Project bersama Center for Research on Media, Religion, and Culture memaparkan hasil penelitian yang mereka sebut dengan istilah “faith online”. Sebanyak 64 persen responden mengatakan bahwa mereka menggunakan internet bertujuan mencari informasi keagamaan. Aktivitas keagamaan yang sering mereka lakukan di antaranya saling bertukar email berisi pesan-pesan keagamaan, bertukar kartu ucapan hari besar agama, dan membaca berita tentang isu-isu agama.

Fenomena semacam ini dikenal dengan istilah





cyberreligion, dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika terdapat hubungan signifikan antara agama dan internet. Keduanya saling berinteraksi, baik sebagai media untuk mencari ilmu agama maupun sebagai ruang mengekspresikan kehidupan beragama. Akibatnya akan terjadi banyak perubahan ekspresi dan pengalaman dalam kehidupan beragama.

Substansi ajaran agama menjadi pertarungan dalam cyberreligion. Di satu sisi peran dan fungsi agama bisa saja memiliki jangkauan yang lebih luas, jika substansinya berhasil dipertahankan. Di sisi lain, agama hanya akan menjadi sebatas platform dan cangkang kosong tak berisi apabila substansinya semakin menghilang. Kondisi inilah yang saat ini terjadi di Indonesia, kelompok Islam garis keras yang memaknai Islam secara eksklusif mulai mengancam kedaulatan negeri Pancasila ini.

Maraknya situs Islam garis keras yang anti Pancasila menjadi tantangan tersendiri bagi keharmonisan masyarakat Indonesia. Pasalnya situs-situs tersebut mengajarkan kehidupan beragama yang tertutup. Mereka tidak hanya mengklaim melainkan juga memonopoli kebenaran dan keselamatan agama Islam versi mereka. Akibatnya, muncul generasi muslim tempramental, bahkan tak segan berbuat anarkis dan teror.

Pandangan semacam ini ditolak oleh seorang akademisi dan tokoh pembaharu Islam Indonesia, Nurcholis Madjid atau yang lebih dikenal dengan Cak Nur. Salah satu buah pemikirannya adalah teologi inklusif, sikap bertuhan yang diimplementasikan secara terbuka. Sikap keterbukaan ini mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi perbedaan di antara hamba-hamba Tuhan. Bermula dari pribadi seperti ini, muncul sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Selain itu akan memunculkan sikap kritis terhadap dirinya sendiri yang sangat penting untuk kemajuan peradaban.



Sikap terbuka merupakan konsekuensi logis dari keimanan seorang muslim yang harus melaksanakan kesaksian tauhid, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya, seorang muslim meyakini semua sifat yang melekat pada Tuhan, tidak bisa dimiliki oleh dzat selain Tuhan itu sendiri. Semua makhluk, hanyalah bersifat nisbi atau mungkin.

Sementara seorang muslim yang bersifat tertutup seperti halnya kelompok Islam garis keras, secara tidak langsung mengakui kemutlakan atas dirinya sendiri. Menganggap kebenaran hanya menjadi milik kelompoknya, sedangkan kelompok lain dianggap salah. Dalam pandangan Cak Nur sikap semacam ini dapat dikatakan sebagai sikap yang menuhankan diri sendiri.

Usai mengikrarkan syahadat tauhid, seorang muslim seharusnya memiliki sikap al-islam yang berarti tunduk dan pasrah kepada dzat yang maha mutlak. Maka dari itu, dalam pandangan Cak Nur, Islam tidak hanya dipahami secara legal formal (agama yang dibawa Muhammad), melainkan sebagai suatu sikap pasrah kepada Tuhan.

Sikap pasrah menjadi titik temu atau common platform yang menjadi hakikat dasar agama-agama samawi sebagai pesan Tuhan yang universal. Inilah yang menjadi inti ajaran para nabi dan rasul, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 133 yang menjelaskan bahwa Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq adalah Tuhan yang esa. Hanya kepada-Nya anak-anak Ya'kub berserah diri (berislam). Sikap pasrah merupakan perpaduan antara dua pandangan: kesatuan kenabian (*the unity of prophecy*) dan kesatuan kemanusiaan (*the unity of humanity*). Keduanya berangkat dari konsep keesaan Tuhan.

Dari sinilah, Cak Nur mengajak umat Islam untuk lebih bersifat terbuka, toleran, dan menghargai setiap perbedaan sebagai wujud dari Islam yang sebenarnya. Ketika seorang muslim tidak terjebak dalam sikap eksklusivisme dan absolutisme, ia akan menyadari adanya suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan kebenaran dari orang lain.



Sikap seperti ini sangat penting dalam beragama melihat karakter dasar manusia diciptakan dalam keadaan fitrah dan hanif. Artinya, setiap orang pada dasarnya suci dan cenderung pada kebenaran.

Apabila dikaitkan dengan konteks kebhinnekaan, kebangsaan, dan keberagaman masyarakat Indonesia, penerapan teologi inklusif menjadi sesuatu yang penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Apalagi dengan adanya fenomena *cyberreligion*, pemahaman agama yang tertutup akan semakin mudah tersebar dan dapat memicu konflik antaragama. Masing-masing kelompok saling mengklaim kebenaran keagamaannya, tanpa memberi penghormatan kepada umat beragama lain.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia harus menjadi pamong dan garda terdepan dalam mewujudkan sikap beragama yang inklusif dan toleran. Jika umat Islam bersikap eksklusif atau bahkan cenderung anarkis, bisa membahayakan keutuhan NKRI. Cak Nur berharap Islam mampu menjadi rahmat bagi semesta alam. Pertanyaannya, sudahkan kita Islam selama ini? *Wallahu a'lam bi showab.* 🤲





7

Damai dalam Keberagaman

IKA PUSPITASARI

Dewasa ini, beberapa isu terkait agama serta ras santer diperbincangkan di media masa maupun di media sosial, puncaknya di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Isu-isu mengenai agama ataupun ras menyebabkan kerenggangan antar kelompok satu dan yang lainnya, hal itu semakin panas dengan maraknya berita hoaks. Sebenarnya, perbedaan ada di setiap lapisan hidup masyarakat. Hanya saja bagaimana cara masing-masing individu menyikapinya dan menjadikan perbedaan itu menjadi indah.

Salah satu potret keindahan hidup damai dalam keberagaman terdapat di Desa Naibonat, Kupang Timur Nusa Tenggara Timur. Di desa ini, terlihat pemandangan berbagai rumah ibadah yang berdampingan, terdapat masjid yang berada di tengah bangunan gereja Katolik dan Protestan. Pun dengan masyarakatnya, mereka dapat hidup damai meski berbeda agama.

Salah satu tokoh masyarakat di Naibonat, Fransisco Ximenes mengatakan, meskipun mereka memiliki agama yang berbeda dalam wilayah yang sama, mereka tetap menjalin





kekeluargaan. “Meski kita berbeda agama, hubungan darah tidak bisa dipisahkan, kami saling membantu,” katanya, Rabu (2/8/2017)).

Tak hanya di Naibonat, pemandangan hal serupa juga terdapat di Maumere, Sikka, Flores. Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera menjelaskan jika di Sikka terdapat 5 etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, namun kerukunan antar masyarakatnya terjalin dengan baik.

“Jadi Sikka ini seperti sarang kebinekaan. Mayoritas penduduk di sini beragama Katolik, namun kami membangun kerukunan yang baik antar masyarakatnya, kami saling menjaga satu sama lain. Apabila ada upacara keagamaan semua hadir, misalnya idul fitri, nanti semua pada menjaga muslim selama salat id, dan juga sebaliknya,” ungkapnya, Jumat (4/8/2017).

1. Merasakan indahnya toleransi di NTT

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Juli-Agustus 2017, Community Engaging with Difference and Religion (Cedar) mengadakan acara Nusantara School of Difference (NSD) dari 27 Juli-9 Agustus 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, juga beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uganda, Jepang, dan Prancis. Bukan hanya berbeda asal daerah, peserta juga berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Selama dua minggu, peserta belajar mengenai hidup bersama dalam perbedaan di Timor dan Flores, NTT. Wilayah yang dikunjungi selama kegiatan ini berlangsung antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.

Dengan mengusung tema *Past Continuous: Rethinking Colonial History*, peserta NSD berupaya melihat kembali pengaruh kolonialisme dalam dinamika identitas, relasi mayoritas-minoritas, ketegangan dalam relasi intra-Christian, serta berbagai persoalan lain seperti pemahaman tentang





gender, keberadaan masyarakat adat di Pulau Timor dan Flores.

Pimpinan Cedar, Adam Seligman menyampaikan, bagian yang paling penting dari program ini adalah bagaimana membantu peserta untuk menerima bahwa manusia di manapun berbeda. Dalam konteks Indonesia, bagaimana menunjukkan hal ini dalam hal perbedaan agama, perbedaan etnis, cara hidup. Menjadi penting bagi masyarakat Indonesia untuk menerima perbedaan, karena keberagaman itu manusiawi.

“Bersama dengan rekan-rekan dari Jepang, Uganda, Amerika Serikat, serta rekan-rekan dari Indonesia, kami telah mengembangkan sebuah model untuk hidup dengan dan belajar dari perbedaan-perbedaan, hal itu akan menginspirasi komunitas-komunitas di seluruh dunia,” kata Adam.

Sedangkan Koordinator Nusantara School of Differences Dominggus Elcid Li mengatakan, ada tiga komponen penting dari acara ini. Pertama, elemen kognitif yang meliputi pemberian materi kuliah dari berbagai ahli di bidangnya. Seperti memberikan materi tentang korban 1965, konversi dan pernikahan beda agama, dinamika orang beragama di Indonesia, diskriminasi orang beragama terhadap kaum LGBT, kehidupan orang Timor Timur di Indonesia, sejarah Orang Timor, dan tentang *trust and confidence*.

Materi-materi tersebut diberikan sebelum turun langsung ke lapangan melihat bagaimana masyarakat minoritas hidup dengan damai dalam perbedaan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende. Peserta juga berkesempatan mengunjungi sekretariat Persatuan Waria Kabupaten Sikka (Perwaksi), di mana terdapat kurang lebih 500 waria yang tergabung dalam Perwaksi dan mereka tetap diterima di dalam masyarakat setempat.

Tak hanya itu, peserta juga mengunjungi permukiman muslim yang berada di Maumere, mayoritas masyarakat permukiman itu beragama Islam, mereka merupakan korban





stunami yang melanda Pulau Babi pada 1992 yang lalu. Pascastunami, mereka memutuskan pindah ke Maumere dan tinggal di pesisir pantai. Meski tinggal sebagai minoritas, mereka tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.

Salah satu peserta NSD yang juga mahasiswa pascasarjana Universitas Boston, Amerika Serikat, Micah Pace mengatakan kegiatan ini menambah banyak pengetahuan terkait keberagaman." Tentang saya dan orang lain yang terlibat satu sama lain, dengan orang-orang dari negara, agama, dan karir yang berbeda." ujar Micah.

Mengenai belajar perbedaan, menurut Pendeta GMIT Kauniki, Sam Liubana, pelajaran berharga yang didapat ketika belajar tentang perbedaan adalah perbedaan tidak hanya berarti saat seseorang mampu melewati batas perbedaan itu sendiri, tetapi juga dapat belajar tentang bagaimana menghormati batas-batas yang tidak bisa dilewati. Acara ini juga diselenggarakan karena melihat isu-isu agama yang kerap menjadi senjata beberapa kelompok dalam dunia politik. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sudah saatnya membuktikan pada kelompok yang sengaja memecah belah, bahwa meski berbeda budaya, suku, ras, dan agama, namun dapat hidup damai dalam keberagaman.

2. Mengintip Semangat Damai Umat Yahudi Indonesia

Kehadiran Yahudi di Indonesia tidak diketahui banyak orang. Namun, siapa sangka mereka membaur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan mereka yang hidup bersama sebagai warga Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara.

Ternyata terdapat beberapa penganut agama Yahudi di salah satu daerah di Tondano. Keberadaannya didukung dengan tempat ibadah yang lazim disebut Sinagog dan pemuka agama yang mereka namai Rabi. Dilihat dari sejarahnya, layaknya agama lain, Yahudi juga bukanlah agama lokal Indonesia.





“Agama ini berkembang di Indonesia karena ada orang Yahudi dari Belanda, Inggris, dan Portugis yang datang ke Indonesia,” kata Yaacov Baruch (33) selaku Rabi setempat, di atas mimbar Shaar Hashamayim Synagogue Sabtu sore (21/5/2016).

Menurutnya, pada saat penjajahan, agama ini ada di beberapa daerah seperti Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Manado. Jumlah mereka saat itu pun mencapai puluhan ribu orang. Namun, kini jumlah tersebut menyusut hingga kurang lebih 1000 penganut. Hal ini memperlihatkan bahwa ada permasalahan yang hadir di tengah kehidupan umat Yahudi. Dari paparan Rabi Yaacov, permasalahan itu justru datang dari leluhur mereka terdahulu.

“Selepas kemerdekaan, pendahulu kita tidak mendaftarkan agama ini ke pemerintah, sehingga ada beberapa dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya. Dampak ini menysar eksistensi umat Yahudi dalam kehidupan bernegara.

3. Problem Adminduk

Dampak paling utama adalah tidak adanya pengakuan yang sah terhadap agama ini. Agama Yahudi bukan salah satu agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia layaknya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Menurut Rabi Yaacov, akibat dari tidak adanya pengakuan ini adalah tidak difasilitasinya hari-hari besar yang mereka miliki oleh pemerintah. Sampai sekarang pemerintah tidak memberikan pengakuan yang sah terhadap hari besar mereka.

Akibat selanjutnya, sambung Yaacov, tidak tersedianya pilihan Yahudi pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Di sisi lain, mereka sebagai penduduk Indonesia juga tidak bisa memilih untuk mengosongkan kolom agama karena hal itu akan sangat menyulitkan mereka, terutama ketika mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) untuk keperluan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak warga negara. Sehingga, pemeluk agama ini harus mengisi kolom tersebut dengan agama lain yang mereka pilih.



Tak dapat dipungkiri, nihilnya pengakuan dari pemerintah membuat pemeluk Yahudi susah memperoleh dokumen legal. Turunan dari hal tersebut ungkap Rabi Yaacov, selama ini umat Yahudi sulit mendapatkan pengakuan atas pernikahan, kelahiran, dan juga kematian dari negara. Ia juga menambahkan bahwa mereka harus mengadakan lebih dari satu kali pesta pernikahan. Setelah melakukan prosesi sesuai dengan agamanya, mereka juga melakukan pernikahan layaknya agama lain.

“Jadi setelah melakukan pernikahan layaknya Yahudi, kami juga melakukan pernikahan seperti Kristen ataupun akad nikah seperti umat Islam agar memperoleh pengakuan dari negara,” ungkapnya, (22/5/2016).

Absennya Yahudi dari enam besar agama yang diakui di Indonesia, membuat eksistensinya meredup, bahkan tenggelam. Banyak masyarakat yang belum paham tentang Yahudi dan tidak mengetahui keberadaannya. Tenggelamnya Yahudi dari perbincangan pascakemerdekaan membuat mereka harus mengenalkan agama ini dari awal. “Sekitar 20 tahun yang lalu ketika kami memulai membangun kembali, banyak masyarakat yang tidak paham karena sebelumnya agama ini kurang eksis,” tutur Rabi Yaacov.

Hilangnya Yahudi dari perbincangan masyarakat Indonesia membuat pemeluknya yang terdahulu banyak berpindah ke agama lain. Mereka memilih untuk menganut agama yang sudah diakui di Indonesia. Menurut Rabi Yaacov ketika mereka mulai mendata jumlah umat Yahudi yang ada di Indonesia, banyak ditemukan bahwa orang keturunan Yahudi telah memeluk agama lain.

Damai dalam Perbedaan

Kendatipun menjadi agama yang minoritas, khususnya di Tondano, tidak ada perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh pemeluknya. Olva Pinontoan (32), salah satu pemeluk agama Yahudi, menuturkan bahwa ia sangat nyaman berada di tengah mayoritas masyarakat yang notabene menganut



agama Kristen. Ova bahkan menegaskan bahwa beberapa warga kerap membantu pengunjung-pengunjung yang hendak ke Sinagog.

Pun ketika mendapatkan undangan menghadiri acara keagamaan agama lain, Ova juga akan menghadirinya. “Kita hidup saling mengormati saja. Bukan berarti karena saya tak beragama Kristen, lalu saya tak hadir dalam undangan acara-acara mereka,” paparnya, (22/5/2016).

Meski demikian, Ova terkadang dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Saat ia diundang dalam acara yang dilaksanakan oleh agama Kristen, makanan yang tersedia adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Yahudi. Sebab ajaran Yahudi sangat ketat dalam mengatur makanan-makanan yang boleh dikonsumsi umatnya.

Namun begitu, ia tak ingin membuat orang yang telah mengundangnya kecewa serta sakit hati. Sebagai jalan keluarnya, ia harus memilih makanan yang dibolehkan untuk dimakan dalam ajaran Yahudi. Bagaimanapun Ova sadar betul, ia hidup di tengah masyarakat yang multikultur. Orang-orang yang ada di sekitarnya bukan hanya orang dengan keyakinan yang sama. Jadi ia harus tetap menjaga toleransi dan komunikasi yang baik satu sama lain.

Saat ini, kata Ova, penganut Agama Yahudi di Manado sekitar 50 orang. Mereka memiliki komunikasi yang sangat baik dengan warga yang tidak memeluk agama Yahudi. “Beragama itu suatu kebebasan untuk semua orang, kita tak perlu menuntut orang lain untuk beragama seperti kita. Yang terpenting kita saling menghormati, karena semua kebenaran yang tahu hanya Tuhan,” kata Ova.

Menilik konflik agama yang banyak terjadi di Indonesia, Ova berharap agar pemeluk masing-masing agama memiliki toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pasaunya, sambung Ova, toleransi sangat dibutuhkan dalam menjalin komunikasi dengan banyak orang. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan stigma yang buruk. Seperti stigma yang





selama ini muncul di benak banyak orang yang beranggapan bahwa Yahudi itu buruk.

Menanggapi kesalahpahaman masyarakat Indonesia terhadap agama Yahudi, Rabi Yaakov menyayangkan beredarnya informasi-informasi yang tidak benar yang memojokkan penganut Yahudi. “Banyak yang anti dengan Yahudi karena dendam terhadap penjajah,” kata Rabi Yaacov.

Tak hanya itu, anggapan banyak orang tentang Israel yang menjadi salah satu negara yang memiliki pemeluk agama Yahudi terbesar juga buruk. Orang Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menganggap akses mereka untuk ke Israel sangat terbatas. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar.

Yobbi Ehsel (55) yang sama-sama Rabi di Sinagog Shaar Hashamayim Tondano mengatakan bahwa banyak orang yang sebenarnya belum tahu tentang fakta di Israel. Menurutnya banyak sekali orang yang hanya mendengar desas-desus yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal, banyak orang Islam Indonesia yang melakukan umrah kemudian mengunjungi masjid al-Aqsa. Mereka bisa dan mudah berkunjung ke sana dengan terlebih dahulu memasuki Israel. “Tetangga saya yang baru saja kembali dari sana membantah isu sulitnya masuk ke Israel. Ia mengatakan kalau penerimaan masyarakat Israel terhadap Islam sangat baik,” pungkasnya. 🙏





8

Iman Yang Selalu Tersenyum

SOFAH D. ARISTIAWAN

Sepanjang tahun 2017 ini, apa kiranya yang membuat hatimu sedih sekaligus kesal dengan ragam pertanyaan yang menggantung di ubun-ubun kepalamu? Jika boleh, mungkin sama, saya ingin membantu menjawabnya: salah satunya, sepertinya, ada yang keliru dengan diri kita soal bagaimana semestinya melihat dan memaknai sebuah agama. Yang paling menyita perhatian dunia, juga tentu Indonesia, di akhir tahun 2017, yakni apa yang terjadi di negeri tetangga Myanmar beserta efeknya buat, utamanya, Indonesia.

Dalam laman tempo.co, 4 September 2017, saya ingat kutipan keprihatinan Sudhamek AWS (Ketua Dewan Pengawas Keluarga Buddhayana Indonesia): “Tindakan satuan keamanan Myanmar adalah biadab dan pengecut... Myanmar tak pantas lagi mengklaim sebagai negara Buddhis.” Apa maksudnya? Kekesalan Sudhamek itu ternyata dilatar-belakangi adanya krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Adanya motif ekonomi dan geopolitik tentu benar, tapi agaknya, tensi kesalnya itu bertambah oleh karena tak sedikitnya biksu yang justru mengamini, bahkan membela kebiadaban itu. Biksu





Ashin Wirathu, misalnya. Dengan terang, ia umbar kebencian terhadap etnis Rohingya yang muslim itu: “Sekarang adalah waktu untuk membuat darah anda mendidih.”

Efeknya, di Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu mengecam serupa apa yang disesalkan Sudhamek AWS di atas, tapi sayangnya, ada saja oknum yang mengekspresikan simpatinya pada etnis Rohingya itu dengan cara-cara yang, bagi saya, sangat-sangat salah: melempar bom molotov di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Pula, ada sebagian masyarakat kita yang mengklaim paling tahu Islam justru berdemonstrasi di depan tempat ibadah umat Budhha: Candi Borobudur.

Saya rasa, hal demikian justru menyakiti sangat umat Budhha Indonesia. Bila begitu, bukankah oknum dan mereka yang mendaku paling mengerti Islam itu berarti punya watak yang tak jauh beda dengan Wirathu?

Ngeri, juga penuh benci. Tragedi kemanusiaan atau dalam level yang terkecil, konflik keseharian yang berlandung dan atas nama agama seakan tak pernah ada kata usai. Dan dari situ, saya kian bertanya-tanya: Mengapa manusia gemar menampilkan agama dengan wajah galak?

Entah murni wujud dari sebuah ajaran atau justru sebagai nafsu buruk manusia yang mengatas-namakan ajaran agama. Sulit rasanya kita untuk menilainya. Tapi, kita sedikit bisa melacak persepsi yang terbangun akan hal itu dan mengapa. Saya tertarik apa yang pernah diucapkan Haidar Bagir: agama bisa dipandang dalam orientasi hukum (*nomos/law oriented religion*), juga *eros/love* atau cinta, sejak mulanya. Dan berangsur-angsur, memang manusia cenderung menelan agama sebagai sesuatu yang galak akan hukum-hukumnya.

Semua agama, tanpa terkecuali. Tentu bukan barang baru, pula bukan cuma dilema masa kini, apa yang diistilahkan Pankaj Mishra (Esais India) baru-baru ini: *the Age of Anger* itu. Keluhan itu, abad kemarahan itu hadir disebabkan pula oleh kebiasaan isi kepala yang keliru dalam melihat sebuah agama.





Konflik, apalagi darah dan air mata muncul. Seakan tak mengapa, satu atau dua, bahkan ribuan nyawa melayang untuk tegaknya hukum Tuhan... Kita coba melacaknya mulai dari tanah Eropa di Abad Pertengahan, saat ramai praktik Inkuisisi sebab melanggar hukum Tuhan dalam fatwa ketat yang dikeluarkan Vatikan masa itu –justru dengan dalih: atas nama cinta kasih Tuhan. Bahkan, untuk sekadar tertawa pun dilarang.

“Suasana hati hanya akan saleh kalau hati merenungkan kebenaran dan bergembira dalam kebaikan yang dicapai. Kebenaran serta kebaikan tidak untuk ditertawakan. Itulah mengapa Kristus tak pernah tertawa. Ketawa mendorong keragu-raguan,” tutur Jorge de Burgos, seorang biarawan tua yang buta.¹ Di sebuah biara pinggiran Italia pada musim salju akhir November 1327 Masehi, kepala biara yang renta itu menentang rahib-rahib muda yang punya argumen lain.

Singkat cerita, timbul peristiwa pilu, rentetan kematian beberapa rahib yang tak berjarak lama gegerakkan seisi biara itu. Lantas, diusut dan kemudian ditemui bahwa mereka, para rahib dengan rasa ingin tahu yang sangat akan naskah-naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan biara, tewas terkena racun yang sengaja dilumuri Jorge pada pagina demi pagina buku tua itu –sebuah buku yang tak boleh diketahui. Jorge tak ingin mereka membaca sehimpun fabel dalam satu naskah Arab, satu naskah Syria yang disalin dalam bahasa Yunani dan Latin itu –buku yang berisi, juga mengundang gelak tawa: “Pada saat Tuhan tertawa, lahir tujuh dewa yang menguasai dunia, ketika Ia tertawa terbahak-bahak, muncul cahaya, waktu tertawa untuk kedua kalinya muncul air, dan saat Ia tertawa pada hari ketujuh muncul jiwa.”² “Omong kosong,” tukas Jorge segera mengomentari naskah tua nan lembab itu...

¹ Umberto Eco, *The Name of the Rose*, terj. Nin Bakdi Soemanto, Yogyakarta, Benteng Budaya (2003), hal. 178

² *The Name of the Rose*, hal. 620-621. 3 Ibid., hal. 634.



Roman sejarah khas Umberto Eco (profesor semiotika dari Universitas Bologna, Italia), *The Name of the Rose* itu agaknya bagi saya, ingin menyindir agama yang begitu dijalani secara angker seperti ucapan tokoh William, ia yang diberi tugas mengusut kasus kematian para rahib itu, yang menyebut sosok Jorge serupa "...iman tanpa senyum."³ Di dalam Islam, iman tanpa senyum itu dimulai dalam panas nafas Khawarij, mereka yang berdalih paling mengikuti titah nabi secara literer.

Bagi mereka, apa yang-baru dan siapa yang tak sesuai mesti diperangi. Kisah yang terus diingat dan tragis dibuatnya, barangkali ketika Ali bin Abi Thalib, menantu Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, tewas dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam si Khawarij. Saat itu, Imperium Islam dalam keadaan terpecah belah, efek dari terbunuhnya Khalifah Utsman dalam pemberontakan 17 Juni 656 Masehi di Madinah.

Menghindari vacuum of power, Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai khalifah baru yang sah. Muawiyah -sepupu Utsman bin Affan yang meminta Khalifah Ali mengusut dalang pembunuhan anak pamannya itu, tapi nihil- bersikeras berada diposisi yang berseberangan dengan Khalifah Ali, padahal sang khalifah cuma ingin menenangkan semua pihak, termasuk desakan Khawarij untuk membunuh Muawiyah. Mereka menuduh kerabat Utsman itu sebagai pembangkang yang tak mengakui Kekhalifahan Ali.

Namun, ada asa untuk memperbaiki dan menyatukan. Cinta dan persaudaraan harus didahulukan. Khalifah Ali mengulurkan tangannya serta menerima usulan arbitrase dari pihak Muawiyah –hal yang nampaknya tak disukai Khawarij lewat slogannya: *la hukma illa li allah* (hukum hanya milik Allah –red). Dan pemberontak tetap pemberontak, mereka halal darahnya untuk dibunuh, dan sang khalifah tak tunduk pada apa yang literer dalam hukum agama, sebab itu, Khalifah

³ *The Name of the Rose*, hal. 620-621. 3 Ibid., hal. 634.

Ali pun mesti diperangi.

Di sini, nomos jelas mengalahkan eros. Mala, juga fitnah kian berkepanjangan, tak boleh ada matahari kembar. Maka, di suatu subuh, 24 Januari 661 M, skema pembunuhan disusun rapi. Lalu sejarah mencatat, Muawiyah bin Abi Sufyan selamat dari teror dan Khalifah Ali ditusuk. Tiga hari kemudian wafat...⁴ Tak sepenuhnya salah, memang. Saya mencoba memahami persepsi akan agama yang berorientasi hukum itu. Tapi, sejarah selalu saja menghadirkan orang atau sekelompok orang yang rasa-rasanya salah dan kelewat batas saat agama beserta 'tools-nya' melulu dipandang sebagai sesuatu yang keras –apalagi hari-hari ini, dalam psikologis the Age of Anger ini, termasuk di negeri Indonesia. Seakan meng-'hukum' ialah jalan tol untuk menegakkan marwah agama. Meng-'hukum' itu berarti mengolok-olok, membenci, memusuhi, meneror, terlebih membunuh dan memerangi siapa saja yang berbeda meski seiman, sesama namun tak seiman.

Lantas, muncullah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai wajah baru Khawarij di abad 21 ini, yang menjaral ke seantero dunia, utamanya Timur Tengah, Filipina, dan celakanya, tumbuh sumber di Indonesia pula. Atau bahayanya sikap fundamentalisme Kristen di Amerika yang kerap mendorong terjadinya perang di Timur Tengah agar Armageddon segera tiba, lalu Yesus turun dari langit untuk Kedatangan Kedua.

Juga ngerinya apa yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar –tragedi kemanusiaan yang juga tak bisa lepas dari seruan biksu bernama Ashin Wirathu itu. Maka, betulkah agama ikut melestarikan konflik? Adakah cara lain di luar ancaman, persekusi, kekerasan, juga teror? Dan mengapa mesti lewat teror dan pembantaian? Bukankah Siddhartha

⁴ Kisah tersebut diambil dalam Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin, Deadi Slamet Riyadi, Jakarta, Serambi (2013), hal. 224-228. 5 Yohanes 8: 2-11.



Gautama demikian pengasih (metta) dan penyayang (karuna) pada siapa pun, tanpa terkecuali? Atau bagaimana seruan Yesus pada khalayak: “Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” Peristiwa di pagi hari yang dicatat Yohanes itu, setidaknya beri arti bahwa meng-‘hukum’ tak akan mengubah apa-apa. Yesus mengerti akan ketentuan Taurat. Ia tak menampik sanksi rajam bagi seorang pezina. Tapi, ada prosedur yang mesti ditempuh untuk final mengatakan bahwa wanita itu benar adanya telah berbuat zina. Di pelataran Baitullah itu, yang nampak jelas hanya suara Yesus pada perempuan yang dituduh berzina itu: “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”⁵

Dari sana, welas asih atau cinta atau iman dengan senyum ialah laku yang menggugah dan karenanya, buat siapa saja jadi mengerti dan berbenah dengan segera. Bukan mengaraknya di tengah publik dengan tiba-tiba. Saya kira, ketika membaca kisah-kisah teladan Yesus yang melengkapi ajaran Taurat dan digenapkan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, agaknya, lebih dominan bagaimana agama itu tampil sebagai sesuatu yang santun. Haidar Bagir, seperti di atas, menyebutnya eros/love oriented religion. Kita jadi lebih membuka diri dan mengutamakan kedamaian. Tak terjebak di dalam tempurung kecurigaan yang sempit, juga apak.

Agama seharusnya diposisikan sebagai suatu rembulan yang terbuka. Artinya, ia memang mampu melihat realita, sanggup melihat apa-yang-baru dan apa-yang-kini. Ia bukan semata-mata produk masa lalu yang datang dan jatuh dari langit, dan dengan itu merasa telah ‘utuh dan komplet’. Sesungguhnya, ia juga bagian dari -dan bercampur dengan-pengalaman manusia yang amat panjang –sejarah makhluk yang pada dasarnya setengah malaikat, separuh iblis itu.

⁵ Yohanes 8: 2 - 11





Dari kerendah-hatian seperti itu, agama tentu bukanlah tempat yang merawat konflik, menganjurkan persekusi, apalagi sumbu peperangan dan penyebab krisis kemanusiaan. Tidak sama sekali. Justru, di dalam agama memuat penyelesaian sebuah sengketa. Menyelesaikan itu berarti berembuk. Dengan diawali sikap keteguhan iman tanpa perlu memojokkan: mengerti bahwa agama saya yang benar bukan sebab agama lain yang salah. Tapi karena sebulat-bulatnya keyakinan. Sehingga, manusia bisa saling menghargai dan memahami bukan karena terpaksa dan ditekan, tapi sebab cinta yang dilandasi iman yang selalu tersenyum. Dan Indonesia di tahun 2018 kelak, saya yakin dan perlu untuk optimis, walau dengan suasana the Age of Anger itu, yang terjadi pula di negeri sendiri, tapi justru lewat pengalaman panjangnya yang berusaha untuk membawa setiap konflik pada sebuah rembukan –dan boleh dibilang kerap berhasil, semestinya mampu dan barangkali sudah menjadi contoh bagi negeri tetangga Myanmar itu, bahkan jadi pemain utama di hadapan dunia bagaimana cara menjalankan kehidupan berbangsa dengan ragam agamanya yang baik dan benar, yakni keharusan adanya iman yang selalu tersenyum. Itu saja barangkali cukup, sebagai kunci peredam bagi dunia yang galak akhir-akhir ini. 🤲

31 Desember 2017







Islam Nusantara
Sebagai Rumah Bhinneka Di Indonesia
Merawat Keberagaman melalui Agama: sebuah
Ikhtiyar menuju Indonesia sebagai Negara
Baldatun Toyyibun Warobbun Ghofuur
M. SABAR PRIHATIN

“Menyoal keberagaman dalam kehidupan keberagaman di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Konflik-konflik sosial berbasis agama yang terjadi di berbagai daerah tak jua kunjung usai. Seperti pembakaran rumah ibadah, penistaan atas nama agama, benturan fisik antar umat agama, misalnya. Atau yang paling merugikan banyak pihak: terorisme. Tak jarang, agama menjadi sumbu konflik di negeri yang majemuk ini (...).”

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang beraneka. Mulai dari perbedaan adat, suku, ras, bahasa, budaya, agama dan lain sebagainya. Selain menjadi aset bangsa, keberagaman di Indonesia juga memiliki potensi memunculkan konflik baik yang berbasis ras, suku, ataupun agama. Hal tersebut dikarenakan perbedaan/keberagaman lah yang memang kerap kali memicu timbulnya suatu perpecahan ataupun permasalahan.





Munculnya konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia bisa dipicu oleh berbagai hal. Salah satunya adalah sikap etnosentrisme. Yaitu, suatu perasaan di mana suatu masyarakat menganggap bahwa suku atau rasnya lah yang paling baik dari pada suku atau ras masyarakat lain. Apabila suatu masyarakat memiliki sifat etnosentrisme yang berlebihan maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan memicu timbulnya sifat kolot terhadap sukunya dan merendahkan suku lain semasanya. Apabila hal itu terjadi, lebih-lebih jika ke dua suku memiliki sikap yang sama, maka sudah tentu konflik akan terjadi di sana.

Selain sikap etnosentrisme, konflik di Indonesia juga kerap kali dipicu oleh sikap ekstrim seseorang akan identitas yang disandangnya. Agama misalnya. Ekstrim pada dasarnya memiliki makna yang luas. Selain bermakna positif, ekstrim ternyata juga memiliki makna yang negatif. Terlebih pada saat kata itu disandingkan dengan urusan agama.

Tak henti-hentinya, sampai saat ini Islam telah berhasil menyedot banyak perhatian warga dunia dan menjadi sorotan bagi media. Pasalnya, aksi terorisme dan ekstrimisme atas nama Islam, seperti ISIS, kian menjadi-jadi dan meresahkan. Hal itu lah yang menjadi salah satu sebab munculnya istilah "*Islam Phobia*" di negeri-negara barat seperti Amerika dan Eropa, di mana mereka menganggap Islam dan umat muslim sebagai ancaman.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan atas nama agama juga kerap kali terjadi. Seperti bom bunuh diri, pengeboman dan pembakaran tempat ibadah, dan lain sebagainya. Salah satu keputusan "tegas" yang disebabkan karena terindikasinya sikap ekstrimisme agama di Indonesia adalah pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Beberapa bulan yang lalu pada tahun 2017 pemerintah Indonesia resmi telah membubarkan suatu ormas Islam. Hal itu dilakukan karena ormas yang bersangkutan dianggap akan menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan rakyat





Indonesia. Pasalnya, kelompok tersebut menyuarakan tegaknya negara Khilafah Islamiyah dan menentang Pancasila serta UUD sebagai dasar hukum di Indonesia.

Menurut beberapa pakar pengamat sosial dan agama, ormas tersebut di atas, merupakan golongan Islam ahistoris yang lupa terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mejemuk ini. Sehingga, keberadaan ormas tersebut dianggap “anti Pancasila” dan akan mengancam keutuhan NKRI. Selain itu, gerakan-gerakan khilafis kelompok tersebut yang memaksa tegaknya syariat Islam secara *khaffah* (sempurna) di Indonesia dinilai kurang membumi dan hanya akan mengawali munculnya aksi-aksi ekstrimisme Islam di Indonesia. Apabila isu-isu keagamaan seperti itu dibiarkan saja, maka moto keberagaman Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, boleh tentu terancam akan kehilangan singgasana.

Islam Nusantara sebagai Benteng Ekstrimisme Agama

Munculnya aliran-aliran Islam garis keras—ekstrim--- di Indonesia menggugah para akademisi dan cendekiawan Muslim untuk mengkaji ulang Islam dari berbagai sisi. Mulai dari segi histori, etnografi serta tipologi dan lain-lain. Salah satu produk dari kajian ulang keislaman di Indonesia tersebut munculah istilah Islam Nusantara. Salah satu cendekiawan Muslim yang menggagas wacana ini adalah Profesor Azzumardi Azra, penulis buku “*Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi* (2016).”

Wacana Islam Nusantara tengah menyedot banyak perhatian. Mulai dari pakar akademisi, tokoh agama, hingga kalangan masyarakat termasuk golongan santri. Wacana Islam Nusantara mulai merayap di kalangan masyarakat bebarengan dengan ketika mulai menjamurnya gerakan-gerakan aliran Islam yang ekstrim atau radikal. Kemunculan Islam Nusantara dikontekskan dengan gejala radikalisme atau ekstrimisme yang ditengarai terjadi di Indonesia (Anshori).

Islam Nusantara hadir sebagai wacana tanding (*discourse*





counter) terhadap Islam garis keras, ekstrimis atau radikal. Yaitu, Islam yang karakteristiknya lebih mengedepankan pemahaman literal teks-teks keagamaan, mudah menggunakan kekerasan, menolak Islam multikultural, suka mengkafirkan kelompok lain, dan cenderung menolak Pancasila dan NKRI (Sopi).

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaifudin, dalam pidatonya pada seminar di Frankfurt Book Fair 2015 di Eropa yang bertema “Pluralisme, Islam, dan Media”, menyampaikan bahwa perlunya mengembangkan “model Islam Nusantara”, sebuah model keberagaman yang tengah dikembangkan di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan model Islam yang paling tepat diterapkan pada suatu bangsa yang majemuk. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat (*wasatiyah*), inklusif, toleran saling menghormati, tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, namun bersatu dalam keragaman.

Senada dengan Menteri Agama RI, cendekiawan Muslim Indonesia, Azzumardi Azra, dalam BBC Indonesia 2015, pernah menyampaikan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang dibutuhkan oleh dunia saat ini karena Islam model ini lebih menampilkan “jalan-tengah” dan bersifat “moderat” yaitu sebuah sikap yang tidak ekstrim, inklusif, toleran dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan penganut paham dan keyakinan lain.

Selain pendapat-pendapat di atas, KH. Hasyim Muzadi (mantan ketua umum PBNU) menyebutkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang melebur dengan budaya, dan bukan merupakan “aliran atau *madzab*”, namun merupakan tipologi. Islam Nusantara adalah Islam yang toleran dan tidak menebar kebencian terhadap kelompok lainnya. “Wacana Islam nusantara menjadi salah satu alternatif solusi untuk menghadirkan masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan” kata Drs. H. Anshori, Kabag Umum dan Perpustaka-





an Badan Litbang dan Diklat Kemeneg RI.

Dari beberapa definisi Islam Nusantara menurut para ahli tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Islam Nusantara bukanlah aliran ataupun *madzhab* baru dalam Islam, melainkan seruan untuk berIslam, menjadi seorang Muslim, yang wasatiah, moderat, menerima perbedaan, toleran, dan damai dalam keberagaman. Serta untuk, pendek kata, menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan marah.

Dalam mengemban amanah membawa Islam *rahmatan lil'alamain* (rahmat bagi alam semesta), menjadi pribadi muslim yang ramah dan mengenalkan Islam dengan kasih kepada dunia merupakan tugas semua umat Islam. Menebarkan perdamaian dalam keberagaman merupakan salah satu intisari ajaran Islam sebagaimana arti Islam itu sendiri, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Bukan dengan kekerasan atau pemaksaan, melainkan dengan cinta dan kasih sayang. Begitulah menjiwai ajaran Islam semestinya.

Untuk membumikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta di Indonesia, mempromosikan wacana Islam Nusantara bisa menjadi salah satu jalannya. Oleh karena itu, gerakan-gerakan Islam mapan di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah harus menjadi teladan dalam mewujudkan konsep Islam multikultural ini di Indonesia serta dalam mendewasakan gerakan salafi agar menyampaikan ideologi dan tafsir keagamaannya dengan cara yang lebih damai dan demokratis dan membumi dengan budaya Indonesia (M. Adlin Sila).

Selain itu, penulis juga merekomendasi agar pendidikan nasionalisme, pendidikan multikulturalisme, dan pendidikan moral atau akhlakul karimah harus lebih ditanamkan lagi kepada generasi bangsa ini melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun pesantren di Indonesia. Agar kelak, generasi kita akan diisi oleh masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berbudi dan berakhlak mulia, berbangsa dan bernegara, menerima perbedaan dan kebhinnekaan, dan





hidup berdampingan dengan damai dalam “berkeagamaan dan keberagaman”.

Keberagaman yang telah menjadi realita di masyarakat kita harus memiliki benteng-benteng keamanan untuk menjaga kemajemukan yang ada. Jika serangan demi serangan menghampiri, maka perisai-perisai pertahanan juga harus disiapkan untuk menandingi. Apabila kemajemukan bangsa ini akan diogoyahkan oleh suatu aliran agama, maka perisai keagamaan harus disiapkan pula. Islam Nusantara sebagai wacana tandingnya (*discourse counter*) sudah siap menjadi garda terdepan (*avant garde*) untuk melawan musuh-musuh yang hendak mengobrak-abrik bhinneka Indonesia. Islam Nusantara merupakan alat perekat umat untuk menuju bangsa yang beradab dan bermartabat, bangsa yang berkeadaban dan berperadaban, bangsa yang baik dan penuh ampunan Tuhan--*baldatun toyyibun wa Robbun Ghofur*. Hadirnya Islam Nusantara adalah bangkitnya hakikat, ruh, ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta yang kan setia merawat keberagaman di Indonesia seutuhnya, selamanya. 🤲

Sumber Bacaan

Majalah LiDik Kemenag RI Nomor 2 dan 3 Tahun 2015 (IISN: 2243- 1559).





10

Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah Menangkal Ekstrimisme dan Radikalisme

LUTFI NUR FALAQ

Pendahuluan

Merujuk pada “konstitusi” resmi Muhammadiyah yang termaktub dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, khususnya Bab II Pasal 4 disana disebutkan bahwa Identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah dan *amar ma’ruf nahi munkar* dan *tajdid*, bersumber pada *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah*. Sebagai gerakan Islam, dakwah menjadi sesuatu yang sangat penting didalam persyarikatan Muhammadiyah. Segala aktivitas yang dilakukan baik dalam ranah keagamaan, sosial, ekonomi budaya ataupun politik bisa dimaknai sebagai upaya pengejawantahan misi dakwah Islam itu sendiri.

Dakwah, bagaimanapun dia didefinisikan merupakan ajakan dan usaha untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik di setiap sendi kehidupan, baik itu dalam sendi keimanan, keislaman, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dakwah yang dilandasi oleh semangat *tajdid* atau pembaruan. Seperti yang diketahui bersama, pembaruan yang menjadi ciri dari gerakan dakwah Muhammadiyah adalah pembaruan





yang bermakna *purifikasi* (pemurnian). Pemurnian di sini juga dapat dimanifestasikan sebagai upaya dinamisasi atau upaya improvisasi kehidupan keduniaan (*muamalah duniawiyah*) agar Islam sesuai perkembangan zaman (*sholih fii kulli zaman wa makan*) sehingga Islam tidak kehilangan daya hadapnya dengan realitas dunia yang terus berubah dan berkembang.

Dalam *The Future of Islam*, Prof. John L. Esposito menyatakan bahwa tantangan ke depan umat Islam ialah permasalahan ekstrimisme Islam, dalam hal ini radikalisme bahkan hingga terorisme serta benturan terhadap Barat. Mengutip ungkapan Harris dalam *The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason* bahwa maraknya berbagai isu kekerasan, bentrokan, permusuhan, di ranah sosial politik pada ujungnya sering berakhir pada permasalahan agama. Dia mengatakan bahwa agama sudah semestinya ditinggalkan manusia bukan karena alasan teologis, tetapi karena agama telah menjadi sumber kekerasan sekarang ini dan pada setiap zaman di masa yang lalu”.

Sebenarnya terdapat golongan utama muslim mayoritas yang membawa dan menebarkan kesan serta pesan *rahmatan lil 'alamin* yang dilekatkan pada Islam. Golongan ini menempuh jalan kedamaian dalam menyebarkan dan memperlihatkan wajah Islam, yaitu Islam yang moderat. Golongan ini merupakan mainstream Muslim dunia, tak tercuai bagi Indonesia lebih khusus termasuk di dalamnya adalah organisasi Muhammadiyah.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah memang telah banyak melakukan dan mengembangkan aktivitas dakwahnya melalui inisiasi program dan kegiatan yang menembus batas-batas kultural dan struktural masyarakat. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah lebih dari satu abad ini salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam upayanya menangkal ekstrimisme dan radikalisme.

Dakwah Muhammadiyah dan Advokasi Masyarakat

Potret kemiskinan yang masih mendera sebagian besar masyarakat harus kita akui sebagai sebuah kenyataan





pahit yang harus dicarikan solusi kongkrit secara bersama. Kemiskinan telah menjadikan masyarakat menjadi lemah dan penuh dengan ketidakberdayaan. Muhammadiyah sebagai pilar masyarakat sipil di Indonesia harus bisa menjadi solusi membangkitkan dan menguatkan masyarakat.

Khusus untuk kondisi masyarakat yang masih lemah terutama di bidang ekonomi, jalan dakwah yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah yakni dengan melakukan advokasi. Dakwah advokasi masyarakat adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi-aksi nyata membantu masyarakat lemah dan miskin dengan meningkatkan taraf hidup mereka dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Langkah dakwah yang dipilih Muhammadiyah dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Konstruksi dakwah advokatif melalui pemberdayaan masyarakat terlihat jelas ketika kita membaca keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 di Yogyakarta. Sikap keberpihakan Muhammadiyah terhadap masyarakat miskin secara organisatoris dan kelembagaan tergambar semakin kuat. Setidaknya terdapat 11 program yang secara jelas dan eksplisit yang memberikan perhatian pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. (lihat BRM, 2010)

Di belahan dunia lain, wacana tentang tanggung jawab dan peran keagamaan dan institusi agama menjadi solusi bagi permasalahan umat secara riil sudah banyak. Salah satunya di Amerika Latin yang terkenal dengan Teologi Pembebasan. Teologi Pembebasan adalah jalan umat kristiani terhadap problem penderitaan dan kemiskinan yang terjadi di Amerika Latin. Agama memberikan tawaran solusi terhadap masalah yang nyata di masyarakat sehingga agama menampilkan sisi fungsionalnya membela dan memberdayakan umat.

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilihan Utama

Gagasan Islam sebagai rahmat bagi semesta (*Islam rahmatan lil 'alamin*), Islam yang ramah dan bukan Islam





yang marah, harus disebar dan dimengerti oleh sebanyak mungkin orang. Itulah sebabnya Muhammadiyah memilih jalan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah pilihan dakwah yang halus (*soft*). Dakwah ini menjadi pilihan karena dakwah yang keras (*hard*) tentu saja agak beresiko, karena didalamnya menampilkan sisi keras dalam berdakwah. Hard dakwah ini terkadang menimbulkan perilaku dakwah yang cenderung memaksa, intoleran bahkan menampilkan gaya kekerasan sehingga Muhammadiyah cenderung mengesampingkannya.

Sebagai sebuah contoh, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah adalah di Desa Mrican Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Daerah ini pada awalnya merupakan daerah sarang prostitusi yang meresahkan masyarakat. Salah satu faktornya selain karena adanya pelacuran juga disebabkan kriminalitas oleh para preman. Akan tetapi dengan adanya advokasi dari Muhammadiyah dan pedulinya lembaga aparaturnegara ternyata lambat laun kasus prostitusi dan premanisme bisa berkurang sampai pelakunya taubat dari apa yang dilakukan.

Fethali Moghaddam dalam teorinya menjelaskan tentang tangga menuju terorisme (*Stairce to Terorism*). Moghaddam percaya bahwa perjalanan seseorang ekstrimis pasti melalui proses psikologis tertentu. Proses psikologis yang kemudian dia petakan dalam teori enam anak tangga. Anak tangga pertama atau sebagai lantai dasar (*ground floor*) adalah perasaan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat dan otoritas. Pada lantai ini, tentu banyak sekali orang yang merasakannya. Namun hanya pada mereka yang begitu tersakiti dan mendapatkan pukulan secara psikologis yang kuat yang akan melanjutkannya ketahap kedua.

Orang-orang pada tahap kedua adalah mereka yang tidak mendapatkan perlakuan adil dari otoritas kemudian mencari keadilan dengan mendatangi pemegang otoritas (negara, pemuka masyarakat, pengadilan, dan lainnya) akan tetapi ternyata banyak diantara mereka justru tidak diperlakukan



secara adil. Pada tahap inilah mereka mulai berfikir untuk melakukan perlawanan terhadap perlakuan tidak adil tersebut.

Pada tahap ketiga, orang-orang yang melakukan perlawanan tadi mulai melakukan “serangan”. Akan tetapi serangan yang dilakukan belum berupa serangan fisik dan hanya terbatas berupa serangan verbal saja semisal *hate speech* dan lainnya. Pada tahap selanjutnya orang pada tahap keempat mulai menemukan komunitas sebagai alat perlawanan. Hal ini bisa ditandai lewat aksi- aksi *sweeping*, demonstrasi jalanan, kerusuhan hingga “panggilan jihad”. Komunitas itulah yang menjadikan mereka menjadi kuat.

Pada tahap kelima, orang-orang dengan perjalanan psikologi yang terganggu akan sangat mudah mendapati dirinya memiliki persepsi dikotomis “kami” melawan “mereka”. Kami dipersepsikan sebagai kelompok yang berjuang dengan legitimasi moral tertentu (misalnya jihad). Sedangkan mereka adalah musuh yang harus dilawan bahkan dihancurkan. Pada tahap terakhir, seorang yang berada pada posisi ini sudah benar- benar melakukan tindakan penyerangan, perusakan, ataupun “jihad” dalam pengertian melenyapkan “mereka” yang dianggap sebagai musuh (*sidestepping inhibitions*).

Muhammadiyah dalam konteks kekinian tentu dituntut untuk bisa lebih berperan dalam memecahkan problem masyarakat secara langsung dan nyata. Peran yang bisa diambil dan dilakukan terhadap tuntutan tersebut adalah dengan hadir secara langsung masuk kedalam kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran langsung tersebut penting karena masyarakat menunggu aksi nyata dan bukan sekedar wacana.

Penutup

Relevansi untuk menciptakan counter narrative terhadap gagasan radikalisme, ekstrimisme hingga terorisme bisa kita lakukan dengan cara- cara yang tidak rumit. Salah satunya adalah dengan ikut terlibat aktif dalam hal-hal sederhana semisal peduli terhadap masalah sesama. Pemberdayaan



masyarakat yang didalamnya salah satunya advokasi dakwah adalah jurus ampuh menangkal ekstrimisme dan radikalisme.

Kita tahu kelompok-kelompok radikal dengan sangat cerdas saat ini bisa melalui berbagai cara dan usaha. Contoh sederhananya adalah dengan menggunakan media sosial untuk membangun narasi mereka di tengah publik sehingga banyak orang tertarik dengan gagasan mereka. Masalahnya, sudahkah cukup banyak lawan-lawan ceritanya, narasi-narasi anti thesis yang mempromosikan akan perlawanan terhadap gerakan radikalisme itu yang kemudian ditulis dan disebarluaskan? Saya kira masih sangat sedikit.

Banyak dari kalangan aktivis anti-terorisme dan deradikalisasi mengeluhkan tentang efek media sosial dalam mempengaruhi anak-anak muda sehingga tertarik pada gagasan akan radikalisme dan terorisme. Akan tetapi yang patut disayangkan saat ini, kita banyak melihat bahwa cara yang ditempuh para aktivis ini masih konvensional belaka. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga negara ataupun lembaga donor tersebut terbilang hanya sebagai seremonial belaka yang masih nihil akan sebuah hasil. Kegiatan-kegiatan yang didominasi oleh seminar, pelatihan, workshop ataupun kegiatan lain dalam menangkal radikalisme dan terorisme tersebut tidak terlalu memberikan efek signifikan dalam membangun kontra narasi terhadap upaya pencegahan radikalisme dan terorisme tersebut.

Arah gerak Muhammadiyah setelah Muktamar di Malang adalah memberikan perhatian yang besar dan luas terhadap pemberdayaan masyarakat. Kompleksitas problem yang dihadapi masyarakat dan skala yang begitu besar tentu membutuhkan nafas yang sangat panjang untuk menghadapinya. Jalan pemberdayaan ini ibarat menyusuri jalan sempit yang masih sepi dan sunyi akan tetapi jalan inilah yang efektif menanggulangi ekstrimisme hingga radikalisme dan seyogyanya harus terus berjalan dan dikembangkan. 🌸





11

Kebebasan Beragama Masih Dipertanyakan

ISTHIQQONITA

Selama delapan tahun terakhir sejak 2007 hingga 2015, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus intoleran tertinggi, Kasus-kasus pelanggaran hak Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) dan intoleransi. Di antaranya berupa kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti ahmadiyah dan syiah, penutupan gereja, kampanye anti perbedaan, peraturan daerah yang diskriminatif, dan pelanggaran hak-hak sipil.

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Barat, isu kebebasan berkeyakinan dan beragama, kasus-kasus keyakinan dan agama tertentu seperti ahmadiyah masih terjadi. Selain itu, isu mengenai pembangunan rumah ibadah terutama gereja terjadi dan didasarkan pada alasan-alasan perizinan, terutama pada peraturan bersama tahun 2006. Hampir 20 kasus serta peristiwa yang tercatat ditahun 2016, menunjukkan bahwa tindakan intoleransi demikian masih terjadi dan negara ada dalam posisi membiarkan bahkan dominan menjadi pelaku.

Setara Institute menilai, terdapat tujuh kota di Jawa Barat





yang termasuk ke dalam 10 kota besar paling tidak toleran, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Bogor dan Bekasi bahkan menjadi dua kota yang tingkat intoleransinya paling buruk. Sebagai provinsi penyangga ibukota negara, Jawa Barat menjadi daerah konsolidasi dan mobilisasi kelompok intoleran yang kemudian menyebar ke wilayah luar provinsi Jawa Barat.

Mengenai kasus intoleran di Jawa Barat, menurut ketua Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub), Wawan Gunawan menyatakan, terdapat pengaruh dari pergeseran budaya, khususnya budaya Sunda yang dikenal berperilaku ramah, santun, serta sopan. Kebudayaan bukan lagi satu-satunya yang murni, melainkan sudah tercampur budaya global, sekarang dalam berperilaku masyarakat mendapat kiriman 'isme' dari luar. Misalnya dalam konteks Islam, yang memiliki sangkut dengan islam ditata sedemikian apik menyerupai ala Timur Tengah, pelaku kekerasan terhadap agama merupakan ajaran impor, konflik Timur Tengah dibawa ke Indonesia.

Misalnya, kasus Palestina, di sana itu (yang terjadi sebenarnya-red) perebutan tanah, tapi datang ke Jawa Barat jadi isu agama, kenapa palestina bukan isu agama? Karena di Palestina ada kelompok-kelompok Yahudi memperjuangkan tanah Palestina juga. Ada ribuan warga Kristen pro Palestina juga, Palestina juga didukung oleh agama Yahudi dan Kristen. Sampai di Indonesia hanya seolah-olah konflik agama.

Tidak hanya konflik antar agama, konflik berbau sektarian pun merupakan sumbangsih dari luar. Masalah *sunni* dan *syiah* yang kerap mencuat ke permukaan, sebenarnya bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Di salah satu Museum di Banten ada pedang bertuliskan 'Tidak ada Ali tanpa kemenangan, tidak ada kemenangan tanpa Ali' kita tahu itu *syiah* banget, padahal warga Banten *sunni*.

Adanya imbauan ruang privasi dalam beragama juga





menjadi salah satu kategori intoleran yang dilakukan oleh Negara. Contoh kecil imbauan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil yang mengintruksikan untuk solat subuh berjamaah, yang menjadi persoalan ialah terjadinya politik identitas. Artinya mendominasi identitas suatu kelompok lebih muncul ketimbang identitas kelompok lain.

Jika mengacu kedalam konteks Pancasila, itu tidak baik. Hal tersebut memicu daerah lainnya melakukan hal serupa. Misalnya di Manokrawi ada peraturan daerah Injil, di Bali sempat ada peraturan yang sesuai Hindu. Seharusnya untuk mengurus publik pakailah peraturan yang bisa diterima untuk publik, jangan menggunakan peraturan yang diterima oleh kelompok tertentu. Di Kabupaten Bandung izin mendirikan Gereja susah, di Bitung Sulawesi Utara bikin masjid susah.

Tidak Sesuai Konstitusi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954), pada hakikatnya telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Berbagai produk kebijakan beserta turunannya, juga telah menegaskan jaminan serupa.

Demikian halnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Salah satu pasalnya, memuat jaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama yang telah menjadi landasan dan menjadi bagian hukum yang mengikat Negara Indonesia. Negara melalui pemerintah, bertanggungjawab untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfi*) hak-hak kebebasan berkeyakinan dan beragama di wilayah yurisdiksi, termasuk di provinsi Jawa Barat berdasarkan laporan LBH tahun 2016 di Jawa Barat.

Negara tidak berusaha untuk membuat regulasi supaya





semuanya berhak muncul. Undang-undang dasar telah mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk beragama atau berkeyakinan sesuai kepercayaannya masing-masing. Secara konstitusi hal tersebut sudah dilindungi, sayangnya dalam pengaplikasiannya masih belum mengayomi seluruh kepercayaan.

Dua hal penting itu dan istilahnya pun dibedakan, jika masyarakat melakukan kekerasan kepada kelompok yang berbeda. Itu disebutnya intoleran tapi kalau negara yang melakukannya maka disebutnya pelanggaran, bahkan diam saja sudah melakukan pelanggaran.

Minimalisir Intoleran Lewat Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu langkah tepat menyampaikan pentingnya toleransi. Hingga saat ini pendidikan di Indonesia belum gencar membicarakan isu yang berkaitan dengan toleransi. Padahal, masyarakat lebih mengetahui informasi melalui kelas menengah dalam masalah pendidikan. Hal tersebut juga berlaku bagi pemeluk agama Kristen misalnya, penganut Kristen yang mempelajari teologi secara mendalam cenderung toleran. Berbeda dengan penganut Kristen yang tidak mendalami teologi, mereka cenderung radikal. Tumbuhnya pemahaman radikalisme tidak berasal dari kalangan yang mempelajari agama secara mendalam, namun biasanya dari kalangan yang mempelajari agama secara sekilas atau sekadar mendengar. Tidak ada sejarahnya santri ingin menggulingkan Pancasila. 🤝





TENTANG PENULIS

ABDUL GAFFAR (Yogyakarta): Pemuda kelahiran Sidenreng - Rappang, April 1992, yang saat ini menjadi mahasiswa Pascasarjana Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, ikut aktif di Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia juga aktif di Forum Komunikasi Wija Nene Mallomo Yogyakarta serta Jaringan Filsafat Islam (Jakfi).

AGATHA PRICILIA JALNUHUUBUN (Papua): Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura ini, lahir di Ambon, Agustus 1996. Dia aktif di pengurus Paduan Suara Universitas Sains dan Teknologi Jayapura serta menjadi anggota komunitas Menulis Papua. Dia pernah mengikuti kegiatan International Maritime Youth Program 2017, di Majene, Sulawesi Barat.

AHMAD FATHORROZI (Jatim): Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini, lahir di Gresik pada September 1995. Selain aktif sebagai Pengurus HIMAPRODI HES UINSA, serta Pengurus PMII Rayon Syariah dan Hukum, dia juga aktif di Payung Advokasi Mahasiswa UINSA.





AMRIZAROIS ISMAIL (Jateng): Lelaki kelahiran Demak, Desember 1990 ini, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Magister Lingkungan Dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata Semarang. Pengalaman kerjanya antara lain, pernah menjadi Koordinator Proyek pendampingan Psycososial IR-Reguler Migrant (imigrant pencari swaka dari palestina, Iran, Iraq, Somalia, Afganistan, Srilangka) joint Program IOM with IOM Semarang tahun 2015, Koordinator Program Griya ASA PKBI Kota Semarang 2016, serta Koordinator Lapangan Proyek GF NFM SSR PKBI Kota Semarang 2017.

ANITA WAHYU RAKASIWI (Jawa Tengah): Ketua Sobat Bumi Regional Semarang 2017 - 2018 ini, lahir di Kediri bulan Maret 1995. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Prestasi yang pernah diraihnya antara lain Juara III National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung tahun 2015, serta Juara I Lomba Menulis Esay yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta.

ARRAYYAN FIRDAUS (Bangka Belitung): Lahir di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, pada bulan Oktober 1994, dia menyelesaikan pendidikannya dan meraih sarjana sains terapan dari Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Sejak tahun 2017 hingga sekarang, dia tercatat sebagai anggota Pendidikan Himpunan Mahasiswa Bangka Cabang Malang, pendiri dan Chief Financial Officer Innovator Nusantara (tahun 2017-Sekarang), serta ikut Program Pengembangan Proyek Angkatan Muda 2030 Indonesia (tahun 2017-Sekarang).

CYNTHIA NOFENTARY PURBA (Riau): Mahasiswa Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ini, lahir di Cilegon pada November 1997. Anggota Web Programming di organisasi Computer Cyber di Fakultas Teknik UMRAH ini, juga menjabat Ketua





Divisi Lingkungan di organisasi Generasi Baru (GenBI) Bank Indonesia Komisariat UMRH di Kepulauan Riau.

DEMAS BUNTUMA'DIKA (Sulawesi Barat): Lelaki kelahiran Nosu, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, pada Desember 1990 ini, menyelesaikan pendidikan S1 di UKIP Makassar (2009-2013) dan S2 - STIM Nitro Makassar (2014-2016). Pengurus Young Men's Christian Association (YMCA) Makassar sejak tahun 2017 hingga sekarang ini, juga tercatat sebagai Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia tahun 2016 sampai sekarang.

DESI APRIANTI (Bengkulu): Sarjana Program Bahasa Inggris di Universitas Bengkulu ini kelahiran bulan Aoril 1995. Tahun 2015 untuk tingkat ASEAN dia pernah ikut Japan Youth Forum, kemudian di tahun 2016 ikut Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP), serta tahun 2017 mendapatkan XL Future Leaders.

DARUL MA'ARIF ASRY (Sulawesi Selatan): Koordinator Departemen Science Ikatan Alumni Ponpes Al-Ikhlas Ujung-Bone ini, lahir di Ujungpandang, Desember 1994. Dia pernah menjadi peserta Young Interfaith Peace Generation Camp #4 yang digelar Makassar International Peace Generation (MIPG) 2017, di Takalar, Sulawesi Selatan. Dia juga pernah menjadi presenter pada International Conference on Qur'an and Hadith Studies, yang digelar Fakultas Ushuluddin-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Jakarta.

DEVI AFITHASARI (Jakarta): Kelahiran Demak, April 1996 ini, tercatat sebagai Staff Komisi C (Kemuslimahan) pada Forum Studi Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDKN) periode tahun 2017 hingga 2019. Dia juga pernah menjadi peserta magang dengan judul laporan magang "Pendampingan terhadap anak pelaku terorisme oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas 1 Jakarta Selatan pada Juli 2017 hingga September 2017.





DHINAR SARI (Aceh): Perempuan kelahiran July 1995 ini, menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Dia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Pengawas Parlemen Aceh. Pernah mengikuti kegiatan diskusi “Menjaga toleransi dan kebinekaan Indonesia” (Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas), serta menjadi peserta konferensi internasional The 1st internasional Conference on Stateless Ronghingya Acehnese Youth and Understanding the Crisis in Muslim Minority of Myanmar.

EKO PRASETYO (Jawa Timur): Lelaki yang mengaku hobi membaca, menulis, mendaki gunung, fotografi, dan seni ini, lahir di Dili pada Februari 1996. Dia tercatat sebagai mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama dua tahun berturut-turut, dia pernah terlibat sebagai penyuluh Pembekalan Masyarakat Jombang, pada tahun 2015 dan tahun 2016.

FILYADI GUSTI ZAMZAMI (Jambi): Kelahiran Nipah Panjang, pada Agustus 1996 ini, sementara menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pengalaman organisasinya antara lain: tahun 2016 - 2017 dia menjadi anggota DEMA FAH UIN STS Jambi, tahun periode 2017 - 2018 di termasuk dalam BPH DEMA FAH UIN STS Jambi. lalu tahun 2016 hingga sekarang menjabat Ketua Komunitas Jari Menari.

FITRA UTAMA (Yogyaakarta): Kelahiran Kotabumi bulan Juni 1984. Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Angkatan 104 dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI dalam bidang Ketahanan Nasional, sejak tahun 2016 ini, hobinya membaca, memasak, dan berenang. Saat ini dia sedang cuti dari pekerjaannya sebagai Aparat Sipil Negara, untuk melanjutkan pendidikan pada Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Sekolah Paska Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.





GIOVANO BHAKTI MEIZHAR (Jawa Barat): Sarjana Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tahun 2017 ini, lahir di Jember bulan Mei 1995. Selain menjadi Wisudawan Berprestasi non Akademik tahun 2017, selama tahun itu juga, dia meraih sejumlah prestasi antara lain: Juara 1 KTI PORSENI III IAIN Jember 2017, Juara 1 MMQ PORSENI III IAIN Jember 2017, Peserta Terbaik 100 Pemuda JATIM terpilih IYD Jatim 2017, Juara 1 Lomba Essai Nasional di UIN Sunan Kalijaga 2017, Juara 1 Lomba Essai hari santri Tingkat Jawa Timur 2017, serta Juara Best Speaker konferensi SDGs di UNSOED 2017.

HARY (Jawa Barat): Lelaki kelahiran Cirebon pada Juni 1995 ini, tercatat sebagai mahasiswa aktif di Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Disamping sebagai mahasiswa dia juga aktif dalam Komunitas Alang-alang yang konsen dalam penyebaran nilai-nilai perdamaian melalui lagu-lagu perdamaian yang diiringi seni Hadroh (Genjring).

IDRUS MAULANA YUSUF (Jakarta): Lahir di Jakarta, Juni 1993. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang ini, pernah menjabat Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tangerang, serta masuk pada Divisi Pencegahan Faham Radikalisme di kalangan Masyarakat melalui Espedisi Nusantara Jaya 2017.

IIN SOLIHIN (Jawa Tengah): Lelaki yang punya moto hidup “Bermanfaat bagi Orang Lain” ini lahir di Cirebon, bulan Januari 1989. Saat ini dia sementara menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dan sempat aktif di Divisi Perkaderan LPM IDEA serta MPKPK HMI Komisariat Iqbal Semarang.

IKA PUSPITASARI (Jakarta): Perempuan kelahiran Brebes, bulan Februari 1995 ini, sementara menuntaskan kuliahnya di



Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tahun 2017, dia mengikuti Literary Journalism yang digelar PANTAU Foundation, serta menjadi peserta Sekolah Nusantara Perbedaan Di Timor-Flores, Nusa Tenggara Timur (Summer School).

IKIN ROJIKIN (Jawa Barat): Lelaki kelahiran Ciamis, Januari 1996 ini, punya moto hidup: Hidup Adalah Belajar, Maka Belajarlah Untuk Hidup. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan Ekonomi Syariah di STAI Al-Ma'arif Ciamis. Juara 1 Pesta Blogger yang digelar Baju Koprak di tahun 2013 ini, aktif sebagai Ketua KAMMI Daerah Ciamis periode 2017 - 2019.

IRWAN SAPUTRA (Sulawesi Tengah): Lahir di Kolaka, pada September 1996. Saat ini dia sedang menyelesaikan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pengalaman organisasinya antara lain, pengurus Forum Duta Genre Sulawesi Tenggara (2016), Wakil Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) IAIN Kendari (2017), dan Ketua Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat IAIN Kendari (2017-Sekarang).

ISTHIQONITA (Jawa Barat): Perempuan yang mengaku tertarik mengkaji isu-isu kemediasan, kesetaraan gender, serta isu-isu keberagaman ini, sementara menempuh pendidikan Jurnalistik di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, dia terlibat pada Mitra Rahima, sebuah NGO yang bekerja pada isu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain menjadi Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa Suaka UIN Bandung (2017) dia juga terlibat di DIV Komunikasi dan Informasi Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Barat (2016 - 2019).

KHAIRUN NISA (Yogyakarta): Lahir di Amuntai, April 1996. Sejak Januari 2017, ia aktif di komunitas Peace Generation guna menyuarakan harmonisasi beragama di kalangan mahasiswa. Komunitas ini merangkul kawula muda yang



berasal dari background yang beragam guna menanamkan jiwa damai dan toleran di diri para anggotanya. Di samping itu, Mahasiswa Teladan Mutu UIN Sunan Kalijaga 2017 ini, terlibat dalam berbagai penelitian dan berbagai kompetisi tingkat nasional terkait isu perdamaian.

KIRANA AISYAH (Jawa Barat): Jakarta, April 22nd 1997. Gadis yang sementara menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia punya sederet hobi, antara lain membaca buku, menonton film dan serial, mendengarkan podcast, traveling, hiking, berenang, yoga dan pilates. Dia juga sempat menjadi peneliti lepas di PT. Talenta Raya Mediatama tahun 2017, serta mengikuti Penelitian Magister Manajemen di Pusat Penelitian Komunikasi, Universitas Indonesia tahun 2017.

LUTFI NUR FALAQ (Yogyakarta): Lahir di Bantul, pada September 1995. Dia adalah peneliti pada Lembaga Institute Of Southeast Asian Islam (ISAIS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga Ketua Bidang Kajian Dan Dakwah Islam Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah D.I. Yogyakarta. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M. THAHA (Sulawesi Selatan): Lahir di Ujung Pandang, 23 Desember 1996. Saat ini menjadi mahasiswa pada jurusan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Saat ini selain menjadi Ketua Koordinator Komisi Penalaran Dan Keilmuan Dewan Mahasiswa (DEMO) Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, serta Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Pengelolah Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, dia juga menjabat Koordinator Jaringan Aktivistis Filsafat Islam (JAKFI) Kabupaten Gowa.



MASITHAH MASHA (Jambi): Sarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Medan tahun 2014 ini, lahir di Medan, pada Juli 1991. Dia juga sementara melanjutkan pendidikan di Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret. Beberapa pelatihan yang pernah diikutinya terkait interfaith antara lain, Student Interfaith Peace Camp – Young Interfaith Peacemaker Community (2013), World Common Harmony Week – Young Interfaith Peacemaker Community (2013) dan Global Peace Volunteer Camp - Global Peace Festival (2014).

MOHAMMAD FARIANSYAH (Jawa Timur): Lahir di Gresik pada Mei 1996. Sempat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN Sunan Ampel Wonocolo, Surabaya tahun 2014- 2015, namun tidak tamat. Dia kemudian pindah ke Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga sekarang. Pengalaman organisasinya antara lain, Ketua Pelaksana Konferensi Keilmuan Humas BEM Se-Jawa Barat pada tahun 2017, Ketua 1 Parade Jurnalistik Epicentrum Unpad tahun 2017, dan saat ini menjabat Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurnalistik Unpad.

MUHAMMAD MUFTI MUADDIB (Jateng): Kelahiran Kabupaten Purworejo pada November 1995 ini, sementara menyelesaikan pendidikannya pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Pengalaman organisasinya antara lain, terlibat pada Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), Front Nadliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA Semarang) serta aktif di PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2015.

M. SABAR PRIHATIN (Jawa Tengah): Lelaki yang menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga ini, lahir di Sragen, pada Desember 1992. Selain menjadi founder dan Ketua Komunitas Menulis



KATABA Ma'ahad Al-Jamiah IAIN Salatiga (2016-2018), dia juga aktif di Gerakan Kerelawanan Internasional (GREAT) of Indonesia CCIVS Perancis (2016-2018), serta menjadi anggota Young Peace Maker Comunity (YIPC) Consorsium UGM, UIN Jogja, dan UKDW (2015-2018).

MUHAMMAD SAIFUL HAQ (Sulawesi Selatan): Lelaki yang mengaku terbuka dengan perbedaan, tertarik dengan hal-hal baru, terbiasa bekerja sama dengan tim, serta humoris dan menyenangkan ini, lahir di Watampone, bulan Februari 1994. Saat ini dia sedang menyelesaikan pendidikannya Magister Sains Psikologi pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, dia menjadi penulis pada beberapa media online, antara lain: Islami.co, Psikologi.uin.malang.ac.id, Gubuktulis.com, Gusduriangmalang.net.

MUHAMMAD SOLEH (Banten): Lelaki yang hobi tilawah, mendengarkan shalawat dan qiro' ini, lahir di Jakarta, pada Agustus 1996. Saat ini sedang menyelesaikan kuliahnya pada Ushuluddin Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

MUHAMMAD REZA (Jakarta): Saat ini sedang mengikuti Program Magister Pascasarjana pada Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan konsentrasi Pemikiran Politik Islam. Pernah menjadi panitia dalam acara diskusi: Maulid Nabi Muhammad Saw dan Milad Isa Al Masih /Jesus (Natal) Dalam Bingkai Cinta dan Persatuan, yang dihadiri oleh Umat Muslim dan Umat Nasrani. Sering juga menyelenggarakan maupun menghadiri diskusi dan seminar yang berkaitan erat dengan nasionalisme dan semangat toleransi keberagaman.

MULFANDHY GAILEA (Maluku Utara): Lelaki kelahiran Maret 1989 ini, adalah alumnus Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tahun 2011. Dia pernah terlibat sejumlah kegiatan kreatifitas di komunitas





yang ada, diantaranya, menjadi panitia Jelajah Pusaka Ternate (Kampung Cina-Kampung Tenga-Gamalama-Falajawa) yang digelar Ternate Heritage Society tahun 2017, panitia Teaching and Giving MIN Sasa Ternate 1000 Guru Maluku Utara tahun 2017, Panitia Teaching and Traveling SD N Kolorai 1000 Guru Maluku Utara tahun 2017, dan Panitia Kelas Inspirasi Ternate tahun 2017.

MUSTOFA (Kalimantan Barat): Lelaki yang menjadi pengurus LMN Nasdem Kalimantan Barat sejak 2017 dan di tahun 2018 ikut menjadi pengurus Partai Nasdem ini, lahir di bulan Agustus 1995

NI PUTU PUTRI PUSPITANINGRUM (Jakarta): Lulusan terbaik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) Depok, periode wisuda bulan Februari 2017 ini, pernah meraih peringkat II Social Intervention Design Competition dalam 2nd Annual Psychology Summit, Universitas Indonesia, tahun 2016. Pengalaman organisasinya, antara lain menjadi inisiator Bounce Back Project, Program Pengembangan Diri untuk Remaja (Juli 2017 – saat ini); Duta Cerita Jakarta, The Habibie Center 2017; Koordinator Program Komunitas Gdebook, Komunitas Peningkatan Minat Baca dan Motivasi Sekolah (June 2015 – sekarang) ; serta Research and Educational Development pada Gerakan Universitas Indonesia Mengajar (2016 – 2017).

NUR HIKMAH (Jawa Tengah): Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini, lahir di Brebes, bulan September 1993. Beberapa kegiatan interfaith yang pernah diikutinya antara lain: At Press Workshop Campus; Kunjungan dan Reportase ke Tempat Penghayat Kepercayaan Sumarah Yogyakarta Keberagaman (Sejuk) yang digelar Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman (Sejuk), Live in Desa Ahmadiyah Banjarnegara yang digelar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Semarang, serta Pondok Damai





yang diselenggarakan Komunitas Lintas Iman Semarang.

NURANI FITRIYAH (Jatim): Juara 1 Kompetisi Penulisan Ilmiah (Feature) Lingkup Nasional 2017, dan Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Utama Lingkung Kopertis IV Banten Jawa Barat tahun 2015 ini, lahir di Bondowoso pada bulan Februari 1994. Dia menyelesaikan pendidikannya pada Jurusan Teknik Telekomunikasi di Universitas Telkom tahun 2016.

PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN (Yogyakarta): Sarjana hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sejak tahun 2017 melanjutkan pendidikan S2 pada perguruan tinggi yang sama. Pernah bekerja di Radio Saka FM - Jogja, dengan tugas menyajikan informasi yang jelas, informatif, dan menghibur kepada audiens, serta melakukan pelaporan dari lapangan.

PRISKA NUR SAFITRI (Jateng): Perempuan yang meraih gelar kesarjanaan dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini, lahir di Rembang, pada April 1995. Saat ini, dia antara lain tercatat sebagai anggota Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Regional Semarang, Relawan Komunitas Sayap (Sahabat Anak yatim Piatu dan Dhuafa), dan Relawan ACT Jawa Tengah

SILVIA ANANDA (Sumatera Utara): Kelahiran Medan, June 1995 ini, sementara menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara. Dia pernah terpilih menjadi bagian dari XL Future Leaders Batch 4, dan terpilih menjadi salah satu dari 3000 peserta (dari 13.000 kandidat) untuk menjadi bagian dari Ekspedisi Nusantara Jaya di Aceh 2017.

SOFAH D. ARISTIAWAN (Jawa Barat): Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung ini, lahir di Bandung bulan Januari 1994. Di tahun 2017, dia diperayakan menjabat Direktur Program Komunitas Sejarah Teleportasi





2017, dan ikut menjadi penggerak Komunitas Turun Tangan Bandung Raya. Selama tahun 2017 pula, dia sempat mengikuti sejumlah workshop dan camp, antara lain: Anti-Corruption Youth Camp (ACYC) 2017 KPK-Jaringan Gusdurian-Youth Proactive, Workshop dan Kelas Menulis Sains dan Pemikiran Kritis Qureta-GITA, International Seminar on Pancasila as a Way of Life: The Path to Bhinneka Tunggal Ika STF Driyarkara, serta Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPBB) VII Megawati Institute.

SONYA YULISTAN ANDOMO (Padang): Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Tim Reaktor Muda Indonesia (RDE) Muda Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ini, lahir di Lintau, pada bulan Juli 1995. Tahun 2015, dia pernah mengikuti LKMM Tingkat Madya se-Indonesia, yang merupakan ajang bergengsi diadakan UNAND untuk mempertemukan mahasiswa seluruh Indonesia, dalam kegiatan FGD dan mempertajam pola pikir mengenai politik global.

SULTRIANA (Sulawesi Selatan): Perempuan yang aktif pada wadah Srikandi Lintas Iman Yogyakarta dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, lahir di Jeneponto pada Juni 1992. Saat ini di sementara menempuh pendidikan Pascasarjana Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIYHABUL FURQON (Jawa Barat): Lelaki yang pernah menjadi asisten dosen mata kuliah Ilmu Kalam, Jurusan Ilmu Hadits smester ganjil (2017), Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, lahir di Sumedang, Jawa Barat pada Maret 1992. Dia meraih gelar sarjana S1 Akidah Filsafat pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013, dan S2 juga pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017.





TUMPAL ANDANI ARITONANG (Kalimantan Utara): Lahir di Selat Cina, bulan Juni 1996. Saat ini sementara menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT). Pengalaman organisasinya, antara lain: Badan Pengurus Cabang Gmki Tarakan (2016-2018), Wartawan Kampus, LPM Universitas Borneo Tarakan, Anggota Muda Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam UBT, Pengurus BEM Fakultas Hukum UBT (2016-2017), serta anggota Pramuka Saka Wira Kartika 0204 Jenderal Sudirman. Dia pernah menjuarai Lomba Parade Cinta Tanah Air Prov Kalimantan Utara tahun 2017, serta menjadi Juara 1 Lomba Orasi Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016.

WIDHYKA FAKHRIYAKANSA (Jawa Barat): Widhyka Fakhriyakansa: Lelaki yang punya moto hidup “Kamu harus menyelesaikan hari ini dengan baik, untuk hari esok yang lebih baik” ini, lahir di Bandung, bulan September 1996. Saat ini dia sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Dipercayakan sebagai Ketua Angkatan Mahasiswa Ekonomi Islam pada 2016, dia di tahun 2018 ini menjadi Kepala Departemen Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad.

WIDIA MUNIRA (Aceh): Perempuan kelahiran Aceh Besar pada Juli 1992 ini, pernah mengajar di beberapa sekolah yang berada di Banda Aceh antara lain, SMAN 3 Banda Aceh, SMAN 12 Banda Aceh, dan SMAN 16 Banda Aceh. Dia menyelesaikan pendidikan S1 pada Pendidikan Sejarah di Universitas Syiah Kuala, Aceh tahun 2016. Kemudian dia melanjutkan studi S2 Pendidikan Sejarah di Universitas Sebelas Maret, Surakarta sejak tahun 2016 hingga sekarang.

YOSSIKA DWI PERMATASARI (Jateng): Lahir di Lumajang, April 1996. Dia pernah menjadi Wakil Koordinator Wilayah IV Himpunan Mahasiswa Geofisika (HMGI) Wilayah IV tahun





2016 hingga 2017. Untuk periode tahun 2017 hingga 2018, dia dipercayakan menjabat Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa MIPA (ALPHA), selanjut masuk Badan Penasehat Lembaga Pers Mahasiswa MIPA (ALPHA) untuk tahun 2018 hingga 2019.

YUSTIANTO T. (Sulawesi Barat): Kelahiran 10 Maret 1993. Menempuh pendidikan pada Universitas Bosowa Makassar, tahun 2012 – 2017. Pernah menjabat Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sesenapadang (IP-PPMS) Organisasi Daerah Kabupaten Mamasa Periode 2015-2016, serta Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Cab. Makassar Masa Bakti 2015 – 2017.

ZARIQOH ANNAYAH SILVIAH (Jabar): Perempuan kelahiran bulan Agustus 1995 ini, tengah menempuh pendidikan pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selama tahun 2017 hingga sekarang, dia antara lain aktif sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) UKM Merpati Putih Kolat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta menjadi anggota Forum Djalan Juang.

ZUMROTUN NAFSIAH (Jawa Tim)ur: Mahasiswi Universitas Merdeka Pasuruan ini, lahir di Pasuruan pada bulan Februari 1995. Perempuan yang pernah menjadi Pendamping Desa Program Jalin Matra Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan 2017 ini, sejak tahun 2015 hingga sekarang aktif sebagai staf pengajar di SMA Excellent Alyasini Pasuruan.



